



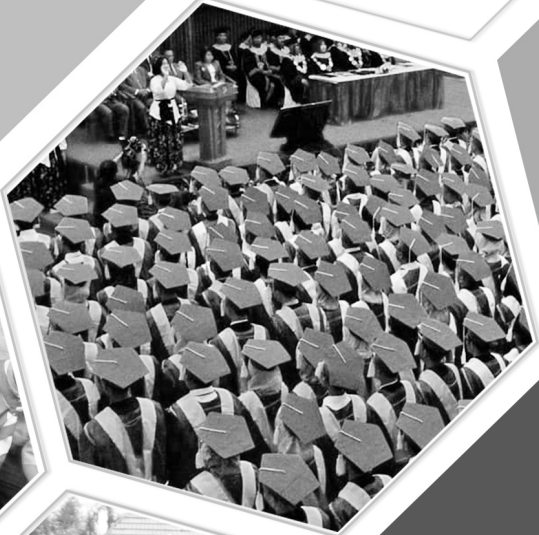
POTRET PENDIDIKAN INDONESIA

STATISTIK PENDIDIKAN

2018



BADAN PUSAT STATISTIK



POTRET PENDIDIKAN INDONESIA STATISTIK PENDIDIKAN 2018



BADAN PUSAT STATISTIK

POTRET PENDIDIKAN INDONESIA

STATISTIK PENDIDIKAN INDONESIA 2018

ISSN	: 2086 - 4566
Nomor Publikasi	: 04220.1807
Katalog BPS	: 4301002
Ukuran Buku	: 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman	: xxviii + 240 halaman
Naskah	: Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
Gambar Kulit	: Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
Diterbitkan oleh	: © Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum

Gantjang Amannullah, M.A.

Penanggung Jawab Teknis

Wachyu Winarsih, M.Si.

Editor

Dwi Susilo, M.Si.

Ida Eridawaty Harahap, M.Si.

Raden Sinang, S.ST., M.Si.

Penulis Naskah

Yeni Rachmawati, S.ST., M.Si.

Ika Maylasari, S.ST., M.Si.

Rini Sulistyowati, S.ST.

Mega Silviliyana, S.ST.

Linda Annisa, S.ST.

Freshy Windy Rosmala Dewi, S.ST.

Kata Pengantar

Pendidikan adalah proses terencana sebagai investasi masa depan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan yang bermutu menjadi modal sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.


Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2018 memberikan gambaran kondisi pendidikan Indonesia berdasarkan hasil Susenas Maret 2018. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Ajaran 2017/2018. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan sarana prasarana pendidikan.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa datang.

Jakarta, November 2018

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

Ringkasan Eksekutif

Data Kemdikbud TA 2017/2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah Sekolah Dasar Negeri, namun pertumbuhan tersebut diimbangi dengan penambahan jumlah Sekolah Dasar Swasta. Kontribusi swasta terhadap fasilitas pendidikan terus meningkat. Semakin tinggi jenjang pendidikan persentase sekolah milik swasta lebih besar dibanding sekolah milik pemerintah. Dilihat dari kondisi ruang kelas, lebih dari 50 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada semua jenjang pendidikan. Namun, persentase ruang kelas dengan kondisi baik meningkat hampir pada semua jenjang pendidikan. Sarana pendidikan lain yaitu perpustakaan juga mengalami peningkatan. Selain itu, persentase guru yang berijazah minimal D4/S1 juga mengalami peningkatan.

Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia dini (APK PAUD) kelompok umur 3-6 tahun secara nasional meningkat menjadi 37,92 persen, namun masih jauh di bawah target pembangunan sebesar 77,2 persen. Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, terdapat disparitas antara perkotaan dan perdesaan dimana APK PAUD di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan (48,71 persen berbanding 36,14 persen). Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh akses dan fasilitas untuk pelayanan PAUD yang belum merata, dimana fasilitas PAUD lebih banyak tersedia di perkotaan.

Pertisipasi sekolah masih bervariasi antar jenjang pendidikan yang terlihat melalui nilai Angka Partisipasi Kasar (APK). APK jenjang pendidikan SD/ sederajat nilainya sudah melebihi 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah pada jenjang SD bukan hanya penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun. Masalah ekonomi masih menjadi salah satu persoalan penting dalam proses pendidikan formal. Apabila perekonomian suatu keluarga kurang bagus maka proses pendidikan juga menjadi terhambat. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas antar kuintil pengeluaran rumah tangga. Separuh dari penduduk pada kelompok kuintil pengeluaran teratas mampu mengenyam pendidikan hingga PT, namun pada kelompok kuintil pengeluaran terendah, hanya 8 persen penduduknya yang mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang PT.

Mulai tahun 2018, BPS menyajikan data indikator menurut disagregasi kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas. Penyajian indikator ini diharapkan menambah informasi terkait pemerataan pembangunan pendidikan untuk semua. Kesenjangan pendidikan nyatanya juga terlihat pada kelompok rentan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, terlihat gap yang lebar antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat pada semua data indikator yang disajikan.

Dalam publikasi ini juga dibahas kegiatan siswa selain bersekolah, antara lain mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bekerja, serta membantu mengurus rumah tangga. Akses TIK yang dicakup dalam Susenas 2018 adalah menggunakan telepon seluler, komputer, dan internet selama 3 bulan terakhir. Secara umum, akses TIK sudah bersinggungan dengan siswa umur 5-24 tahun namun siswa dengan disabilitas lebih sedikit yang terpapar teknologi informasi dan komunikasi.

Di samping itu, sekitar 7 persen siswa umur 10-24 tahun bekerja. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar persentase siswa yang bekerja. Sedikitnya 1 dari 4 mahasiswa bekerja. Di sisi lain, seperempat siswa umur 10-24 tahun membantu mengurus rumah tangga, baik di perkotaan maupun perdesaan. Adapun dilihat dari jenis kelamin, persentase siswa perempuan yang mengurus rumah tangga lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki.

Pada buku ini juga diulas beberapa capaian pendidikan yang dapat diukur dari data Susenas 2018. Capaian pendidikan Indonesia secara umum meliputi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk umur 15 tahun ke atas, rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas, dan Angka Melak Huruf (AMH) penduduk kelompok umur 15-24 tahun, 15-59 tahun, dan 15 tahun ke atas. Sementara itu, capaian pendidikan yang mencakup penduduk yang masih bersekolah antara lain angka bertahan sampai dengan kelas lima SD, angka naik kelas/mengulang dan angka melanjutkan. Pada publikasi ini juga ditambahkan ukuran capaian proses pendidikan yang baru yaitu tingkat kelulusan.

AMH penduduk umur 15-59 tahun sebesar 98,07 persen, telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Kemdikbud. Akan tetapi, AMH penduduk umur 15 tahun ke atas sebesar 95,66 persen masih di bawah target yang diharapkan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas mencapai 8,58 tahun atau setara kelas 2 SMP/ sederajat. Angka ini masih cukup rendah mengingat

program Wajib Belajar 9 Tahun telah dilaksanakan sudah sejak lama sebagaimana tertera dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas setidaknya terus mengalami kenaikan.

Tingkat kelulusan sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam SDGs yang mampu menggambarkan capaian pendidikan penduduk yang dilihat melalui minimal jenjang pendidikan yang ditamatkan pada usia referensi tertentu. Pada tahun 2018, tingkat kelulusan SD pada penduduk dengan kelompok umur 15-17 tahun sebesar 96,75 persen. Artinya dari 100 orang penduduk usia 15-17 tahun ada sebanyak 96 orang yang lulus minimal pada jenjang SD/ sederajat. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka tingkat kelulusan sekolah yang dihasilkan semakin rendah.

<https://www.bps.go.id>

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Tabel Lampiran	xix
Daftar Tabel Hasil Perhitungan <i>Sampling Error</i>	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
Tantangan Pembangunan Pendidikan	3
Indikator Pendidikan Sebagai Monitoring Pembangunan Pendidikan	6
BAB 2. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	
Jumlah Sekolah dan Peserta Didik	11
Kondisi dan Kecukupan Ruang Kelas	17
Perpustakaan Mendukung Proses Pembelajaran	20
Kualifikasi dan Beban Kerja Guru	22
BAB 3. PARTISIPASI SEKOLAH	
Pendidikan Anak Usia Dini	30
Angka Partisipasi Sekolah	41
Angka Partisipasi Kasar	48
Angka Partisipasi Murni	54
BAB 4. KEGIATAN SISWA	
Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Siswa	61
Siswa dalam Dunia Kerja	65
Siswa Pekerja dan Status Pekerjaan	68
Siswa dalam Kegiatan Mengurus Rumah Tangga	69

BAB 5. HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf	74
Hasil Proses Pendidikan	77
Angka Putus Sekolah	81
Tingkat Pendidikan	82
Rata-rata Lama Sekolah	86
Tingkat Kelulusan Sekolah	89
Daftar Pustaka	95
Catatan Teknis	99
Lampiran Tabel	109
Hasil Penghitungan Sampling Error (<i>Relative Standard Error</i>)	189

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
2.1	Jumlah Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah pada Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	13
2.2	Persentase Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	13
2.3	Perkembangan Jumlah Sekolah Menengah, Tahun Ajaran 2012/2013-2017/2018	14
2.4	Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018	16
2.5	Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun Ajaran 2017/2018	17
2.6	Persentase Ruang Kelas dengan Kondisi Baik Menurut Status Sekolah Tahun Ajaran 2017/2018	18
2.7	Persentase Guru yang Memiliki Ijazah D4/S1 atau Lebih, Tahun Ajaran 2016/2017-2017/2018	23
2.8	Persentase Guru Layak Mengajar Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	24
3.1	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD, 2018	31
3.2	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018	32
3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun, 2018	35
3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018	36
3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun, 2018	37

Gambar		Halaman
3.6	Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018	38
3.7	Angka Kesiapan Sekolah (AKS), 2018	40
3.8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018	41
3.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun Menurut	47
3.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Menurut Provinsi, 2018	48
3.11	Angka Partisipasi Kasar (APK), 2018	50
3.12	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018	53
3.13	Angka Partisipasi Murni (APM), 2018	55
3.14	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018	57
4.1	Perkembangan Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet, 2016-2018	63
4.2	Perkembangan Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Menurut Jenjang Pendidikan, 2016-2018	64
4.3	Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu, 2018	65
4.4	Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan, 2018	66
4.5	Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir, 2018	69
5.1	Rasio Angka Melek Huruf (AMH), 2018	76
5.2	Rasio Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas, 2018	77
5.3	Angka Bertahan SD/Sederajat, 2018	79

Gambar		Halaman
5.4	Persentase Anak Tidak Bersekolah, 2018	82
5.5	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%), 2018	83
5.6	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Tipe Daerah, 2018	83
5.7	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Jenis Kelamin, 2018	84
5.8	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2015-2018	87
5.9	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018	87
5.10	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi, 2018	88
5.11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Indonesia, 2018	89
5.12	Analisis Alur Pendidikan Penduduk Usia 21-24 Tahun, 2018	92

Daftar Tabel

Tabel		Halaman
2.1	Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	12
2.2	Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	15
2.3	Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	18
2.4	Jumlah dan Rasio Murid, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018	19
2.5	Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2015/2016-2017/2018	21
2.6	Jumlah dan Persentase Perpustakaan Terhadap Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018	21
2.7	Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018	25
3.1	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah, 2018	42
3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2018	46
3.3	Rasio APM, 2018	58
4.1	Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi Selama 3 Bulan Terakhir, 2018	62
4.2	Siswa yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama, 2018	67
4.3	Siswa yang Bekerja Menurut Status/Kedudukan Pekerjaan Utama, 2018	68
5.1	Angka Melek Huruf (AMH), 2018	75

Tabel		Halaman
5.2	Angka Naik Kelas, 2018	77
5.3	Angka Mengulang, 2018	78
5.4	Angka Melanjutkan, 2018	80
5.5	Angka Putus Sekolah, 2018	81
5.6	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Disabilitas, 2018	85
5.7	Tingkat Kelulusan Sekolah, 2018	90

<https://www.bps.go.id>

Daftar Tabel Lampiran

Tabel		Halaman
2.1	Jumlah Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018	109
2.2	Jumlah Peserta Didik (dalam ribuan) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018	110
2.3	Persentase Sekolah dan Peserta Didik Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018	111
2.4	Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Menurut Provinsi dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2017/2018	115
2.5	Persentase Ruang Kelas SMA dan SMK Menurut Provinsi dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2017/2018	116
2.6	Jumlah Perpustakaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018	117
2.7	Persentase Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018	118
2.8	Rasio Murid-Guru, Rasio Murid-Rombel, dan Rasio Rombel-Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP Menurut Provinsi, 2017/2018	119
2.9	Rasio Murid-Guru, Rasio Murid-Rombel, dan Rasio Rombel-Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMA dan SMK Menurut Provinsi, 2017/2018	120

Tabel	Halaman
2.10 Persentase Guru Layak Mengajar Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018	121
3.1 Persentase Penduduk Umur 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	122
3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	123
3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	126
3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	129
3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	132
3.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018	135
3.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	140
3.8 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	145
4.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	150
4.2 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	153

Tabel		Halaman
4.3	Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	156
4.4	Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	159
4.5	Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	162
4.6	Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	157
5.1	Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018	168
5.2	Rasio Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	173
5.3	Angka Mengulang Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	174
5.4	Angka Bertahan SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	175
5.5	Angka Bertahan SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2017	176
5.6	Angka Melanjutkan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	177

Tabel		Halaman
5.7	Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	178
5.8	Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018	179
5.9	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	184
5.10	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	185
5.11	Tingkat Kelulusan Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	186

Daftar Tabel Hasil Penghitungan *Sampling Error*

Tabel		Halaman
1	<i>Sampling Error</i> APK PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	189
2	<i>Sampling Error</i> APK PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	190
3	<i>Sampling Error</i> APK PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	191
4	<i>Sampling Error</i> APK PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	192
5	<i>Sampling Error</i> APM PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	193
6	<i>Sampling Error</i> APM PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	194
7	<i>Sampling Error</i> APM PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	195
8	<i>Sampling Error</i> APM PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	196
9	<i>Sampling Error</i> Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	197
10	<i>Sampling Error</i> Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	198
11	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	199

Tabel		Halaman
	Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	
12	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	200
13	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	201
14	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	202
15	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	203
16	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	204
17	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	205
18	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	206
19	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	207
20	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	208
21	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	209
22	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	210

Tabel		Halaman
23	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	211
24	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	212
25	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) PT Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	213
26	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) PT Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	214
27	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	215
28	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	216
29	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	217
30	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	218
31	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	219
32	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	220
33	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) PT Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	221
34	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) PT Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	222

Tabel		Halaman
35	<i>Sampling Error</i> Siswa Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	223
36	<i>Sampling Error</i> Siswa Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	224
37	<i>Sampling Error</i> Siswa Umur 10-24 Tahun yang yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	225
38	<i>Sampling Error</i> Siswa Umur 10-24 Tahun yang yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	226
39	<i>Sampling Error</i> Siswa Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	227
40	<i>Sampling Error</i> Siswa Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	228
41	<i>Sampling Error</i> Angka Melek Huruf 15-59 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	229
42	<i>Sampling Error</i> Angka Melek Huruf 15-59 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	230
43	<i>Sampling Error</i> Angka Melek Huruf 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	231

Tabel		Halaman
44	<i>Sampling Error</i> Angka Melek Huruf 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	232
45	<i>Sampling Error</i> Angka Mengulang Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	233
46	<i>Sampling Error</i> Angka Bertahan sampai dengan Kelas 5 SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	234
47	<i>Sampling Error</i> Angka Bertahan SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	235
48	<i>Sampling Error</i> Angka Melanjutkan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	236
49	<i>Sampling Error</i> Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018	237
50	<i>Sampling Error</i> Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018	238
51	<i>Sampling Error</i> Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018	239
52	<i>Sampling Error</i> Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018	240

tantangan pendidikan Indonesia

PENDAHULUAN

indikator pendidikan menjadi monitoring
pembangunan pendidikan

1



UUD 1945 Pasal 31

tiap-tiap Warga Negara

berhak mendapat



pengajaran

SDGs Tujuan 4

4 PENDIDIKAN
BERKUALITAS



Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Bab 1

PENDAHULUAN

Pendidikan, dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang makin besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara manusia hidup dan bertindak. Pendidikan pun menjadi investasi masa depan, karena dengan pendidikan manusia mampu menyesuaikan cara berpikirnya mengembangkan segala potensi diri, dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan menjadi modal dalam mengantarkan negara dan masyarakat berinteraksi pada skala global menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Secara internasional tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) khususnya pada tujuan ke empat yaitu memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Selanjutnya arah pembangunan pendidikan Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pada periode ketiga (RPJMN 2015-2019), saat ini pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

Tantangan Pendidikan Indonesia

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam rangka perbaikan pendidikan bangsa. Namun demikian beberapa persoalan pendidikan masih menjadi tantangan yang harus dibenahi, mulai dari permasalahan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan.

Beberapa capaian pembangunan Indonesia dari dimensi pendidikan dalam ukuran kaca mata global masih menunjukkan ketertinggalan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan ukuran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama empat tahun terakhir, IPM Indonesia terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan IPM dari 68,9 di tahun 2014, menjadi 70,81 di tahun 2017, angka tersebut masuk kategori “tinggi”. Namun dalam peringkat global, angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-116 dari 189 negara.



Sementara itu, Skor *Programme for International School Assessment (PISA)*, yang merupakan program penilaian tingkat dunia untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun melalui kemampuan sains, membaca, dan matematika, menempatkan Indonesia pada peringkat 62 untuk sains, 63 untuk kemampuan matematika, dan 64 untuk kemampuan membaca, dari 70 negara yang dievaluasi (pisaindonesia.wordpress.com). Capaian global tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca yang diukur melalui angka melek huruf tidaklah cukup. Angka melek huruf yang menunjukkan angka hampir seratus persen belum mampu mewakili ukuran kemampuan membaca masyarakat Indonesia.

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan masih rendahnya capaian pendidikan penduduk Indonesia. Artinya keterbatasan akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah masih menjadi faktor penyumbang bagi rendahnya daya saing bangsa .

Pencapaian hasil pendidikan antar wilayah perdesaan dan perkotaan, antara laki dan perempuan, antara penduduk miskin dan kaya, antara kelompok rentan masih menunjukkan adanya

kesenjangan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk memperkecil *gap* yang ada, namun kesenjangan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan manusia ini. Termasuk di dalamnya kesenjangan dalam pendidikan. Kesenjangan menghambat rakyat miskin untuk meningkatkan pendapatannya, juga menghalanginya untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan menjauhkannya dari sumber-sumber kehidupan lainnya. Sehingga upaya lebih dalam pemerataan pendidikan masih dibutuhkan agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, kemajuan teknologi menuntut manusia untuk secara cepat beradaptasi mengikuti perubahan jaman, yang secara implisit juga menuntut tersedianya sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Dalam hal ini diperlukan mutu pendidikan yang mampu mencetak manusia agar dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan lapangan kerja menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi fenomena sosial yang harus segera diselesaikan pemerintah dan instansi pendidikan. Harapannya nantinya ada relasi antara pendidikan dan kebutuhan nyata sesuai perkembangan cepat zaman.

Permasalahan mutu pendidikan juga harus diukur melalui kompetensi tenaga pengajar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan bahwa standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Sekalipun secara formal telah memiliki sertifikat pendidik, banyak guru yang

kompetensi pedagogik dan profesionalnya tidak memadai. Hasil uji kompetensi guru secara nasional rata-rata hanya mencapai 53,02. Angka tersebut masih belum mencapai angka standar kompetensi minimal yang ditetapkan, yakni 55,0 (Kompas, 15/9/2018).

Sejumlah langkah sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan Operasional Sekolah dan Kartu Indonesia Pintar menjadi bagian kebijakan pemerintah agar pendidikan merata untuk semua. Pemerintah juga memberikan Tunjangan profesi guru dengan harapan agar kesejahteraan mereka meningkat sehingga turut meningkatkan mutu pendidikan yang disampaikan kepada peserta didik. Sehingga langkah selanjutnya adalah bagaimana sinergi antara pemerintah, masyarakat dan instansi terkait untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang telah dijalankan sehingga sistem pendidikan Indonesia mampu menjadi penggerak kemajuan bangsa.

Indikator Pendidikan Menjadi Monitoring Pembangunan Pendidikan

Pendidikan dan pembangunan berada dalam suatu proses yang saling mengisi. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Parameter dari keberhasilan suatu sistem pendidikan adalah dengan melihat hasil capaian pendidikan. Hal ini juga menjadi satu cara untuk memprediksi masa depan bangsa. Untuk melihat sejauh mana hasil capaian pembangunan pendidikan di Indonesia diperlukan data indikator pendidikan.

Buku publikasi “Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan 2018” disusun untuk menyajikan data indikator

Akses pendidikan,
pemerataan, dan
mutu pendidikan
menjadi tantangan
pendidikan
Indonesia

pendidikan tersebut. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, pada tingkat nasional dan tingkat regional.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan data yang bersumber pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 serta data sekunder Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2017/2018. Data-data yang disajikan didisagregasi menurut jenis kelamin, status ekonomi, wilayah, dan status disabilitas, sehingga diharapkan mampu menggambarkan pemerataan pendidikan.

Pembahasan utama publikasi ini dirinci ke dalam lima bab. Bab pertama berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajian. Bab kedua menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan unsur penunjang peningkatan kualitas pendidikan. Bab ketiga berisi partisipasi pendidikan menurut jenjang pendidikan. Bab keempat memberikan penjelasan tentang kegiatan siswa yang mencakup akses terhadap teknologi dan informasi, siswa yang bekerja, dan siswa yang mengurus rumah tangga. Bab kelima membahas tentang hasil dan capaian proses pendidikan berupa pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf. Pada tabel lampiran ditampilkan informasi terkait indikator pendidikan pada level provinsi. Guna melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan dari teknik pengambilan sampel, penghitungan *sampling error* dari hasil estimasi beberapa indikator pendidikan ditampilkan pada bagian akhir publikasi ini. Sementara penjelasan keterwakilan sampel dan konsep definisi disajikan dalam catatan teknis.

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

kondisi dan kecukupan ruang kelas
jam sekolah dan peserta didik
kualifikasi dan beban kerja guru
perpustakaan mendukung proses pembelajaran

2



Perkembangan jumlah sekolah(%)



jumlah sekolah pada semua jenjang pendidikan meningkat,

Penurunan jumlah SD Negeri diimbangi dengan penambahan jumlah SD Swasta

Bab 2

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian dari standar pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung, seperti perabot (kursi dan meja), peralatan pendidikan (alat peraga), dan media pendidikan (papan tulis). Sementara itu, prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas dan perpustakaan (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007). Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Pada bab berikut disajikan data-data sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Jumlah Sekolah dan Peserta Didik

**Penggabungan
beberapa SD
Negeri
merupakan
bentuk penataan
sekolah dasar**

Pemerintah berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan *regrouping*/penggabungan sekolah dasar negeri yang masih berlanjut beberapa tahun belakangan. Kebijakan penggabungan sekolah menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kurangnya tenaga pengajar ataupun minimnya daya serap siswa. Hal tersebut dilakukan sehubungan

efektivitas dalam pembelajaran dan pengelolaan pendidikan, efisiensi dalam penganggaran, dan permasalahan kondisi geografis.

Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan tersebut adalah berkurangnya jumlah SD Negeri jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Namun demikian, penurunan jumlah sekolah dasar negeri tersebut diimbangi dengan bertambahnya Jumlah SD Swasta yang dibangun, sehingga jumlah sekolah dasar secara keseluruhan masih meningkat jumlahnya. Tabel 2.1 memperlihatkan perkembangan jumlah sekolah per jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir. Kenaikan jumlah sekolah tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan menengah, yaitu SMK (3,58 persen) dan SMP (3,17 persen).

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018

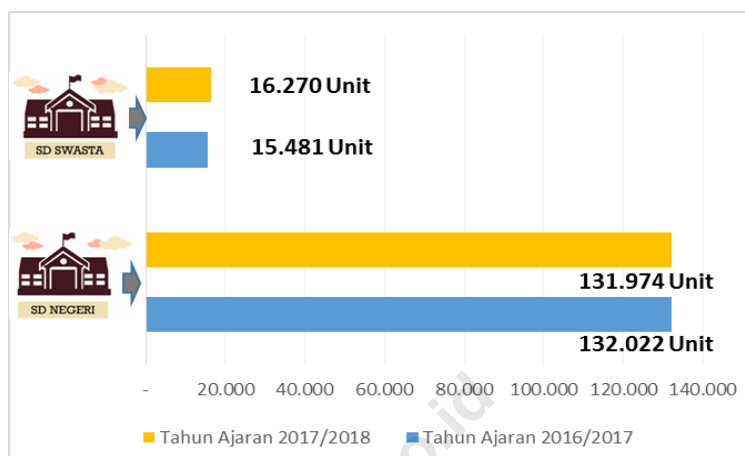
Jenjang Pendidikan	2016/2017	2017/2018	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	147 503	148 244	0,50
SMP	37 763	38 960	3,17
SMA	13 144	13 495	2,67
SMK	13 236	13 710	3,58

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga swasta dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan pemerintah dalam bentuk penggabungan sekolah negeri seolah ditanggapi oleh swasta dengan menambah jumlah sekolah swasta. Sebagaimana data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada Tahun Ajaran 2017/2018 yang menunjukkan adanya penurunan jumlah SD Negeri sebanyak 48 sekolah dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Sementara jumlah SD yang dikelola swasta jumlahnya justru bertambah 789 sekolah.

Jumlah SD Negeri menurun, Jumlah SD Swasta meningkat

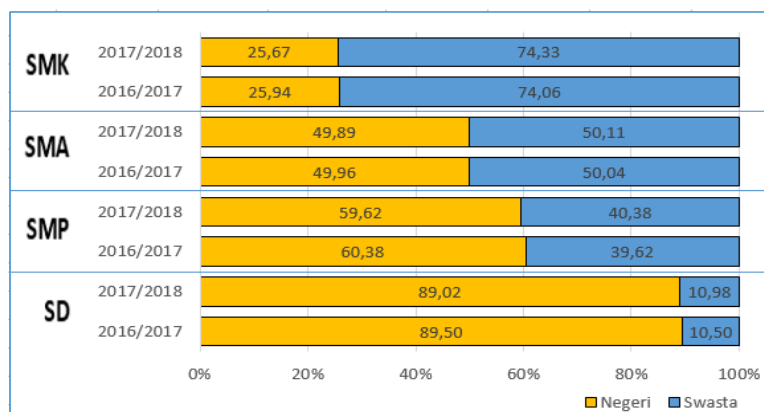
Gambar 2.1 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah pada Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kontribusi pihak swasta sebagai penyelenggara pendidikan terlihat semakin besar dibanding tahun sebelumnya. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada jenjang sekolah dasar, pemerintah mendominasi dalam penyediaan bangunan sekolah, namun semakin tinggi jenjang pendidikan nampak kontribusi swasta justru lebih besar.

Gambar 2.2 Persentase Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018

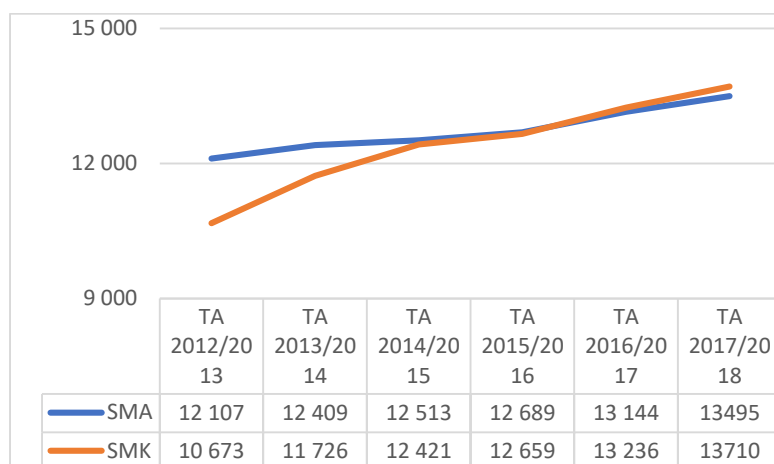


Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan mencetak lulusan pendidikan menengah yang siap kerja menjadi solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi pengangguran kaum muda dan cara yang baik untuk menyesuaikan orang-orang terlatih dengan pekerjaan teknis. Kebijakan tersebut juga mewadahi sebagian besar anak muda yang memutuskan untuk tak melanjutkan karier akademis, karena ingin cepat bekerja. Harapan pemerintah akan cita-cita tersebut diwujudkan dengan terus menambah jumlah sekolah kejuruan.

Gambar 2.3 menunjukkan perkembangan jumlah bangunan SMK dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun Ajaran 2012/2013, jumlah SMA lebih banyak dari SMK namun sejak Tahun Ajaran 2016/2017 keadaan berbalik, sehingga jumlah SMK lebih banyak dari SMA. Penambahan jumlah SMK tersebut juga menjadi suatu bentuk fokus pembangunan pendidikan menengah yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud tahun 2015-2019, yakni meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja.

Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Sekolah Menengah, Tahun Ajaran 2012/2013-2017/2018



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bertambahnya jumlah sekolah kejuruan ternyata telah didukung dengan pertambahan jumlah peserta didiknya. Data Kemdikbud menunjukkan jumlah peserta didik SMK lebih banyak dibandingkan jumlah peserta didik SMA. Hal ini menunjukkan tingginya minat anak melanjutkan ke sekolah kejuruan, sebagaimana harapan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja melalui lulusan-lulusan sekolah kejuruan sebagai tenaga kerja siap pakai dan terampil.

Renstra Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2005-2009 menargetkan rasio murid SMK dan SMA sebesar 40:60 pada tahun 2009. Kini setelah 8 tahun, perbandingan peserta didik SMK dan SMA hampir sama, bahkan SMK sedikit lebih besar.

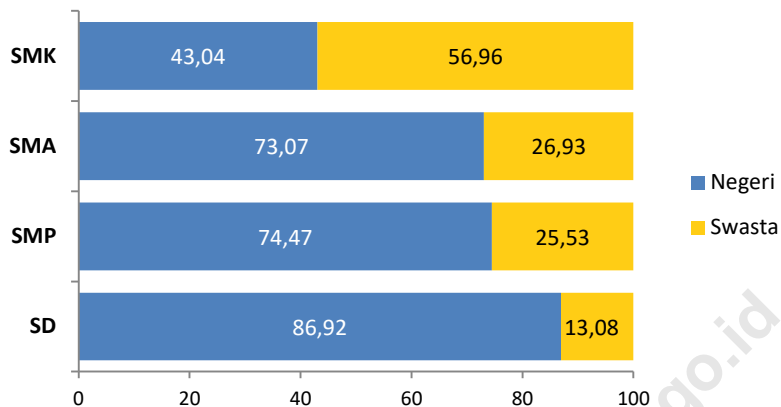
Tabel 2.2 Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018

Jenjang Pendidikan	2016/2017 (000)	2017/2018 (000)
(1)	(2)	(3)
SD	25 618,1	25 486,5
SMP	10 145,4	10 125,7
SMA	4 659,5	4 783,6
SMK	4 682,9	4 904,0

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dilihat dari status sekolah, sebagian besar peserta didik bersekolah di sekolah negeri. Daya tarik sekolah negeri diantaranya adalah biaya sekolah yang rendah dikarenakan masih memperoleh subsidi dari pemerintah. Pola ini terlihat pada semua jenjang pendidikan kecuali SMK. Persentase murid SMK yang bersekolah di SMK swasta lebih besar dibandingkan SMK negeri. Hal ini sejalan dengan jumlah bangunan sekolah SMK swasta yang lebih banyak dari SMK negeri.

Gambar 2.4 Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018

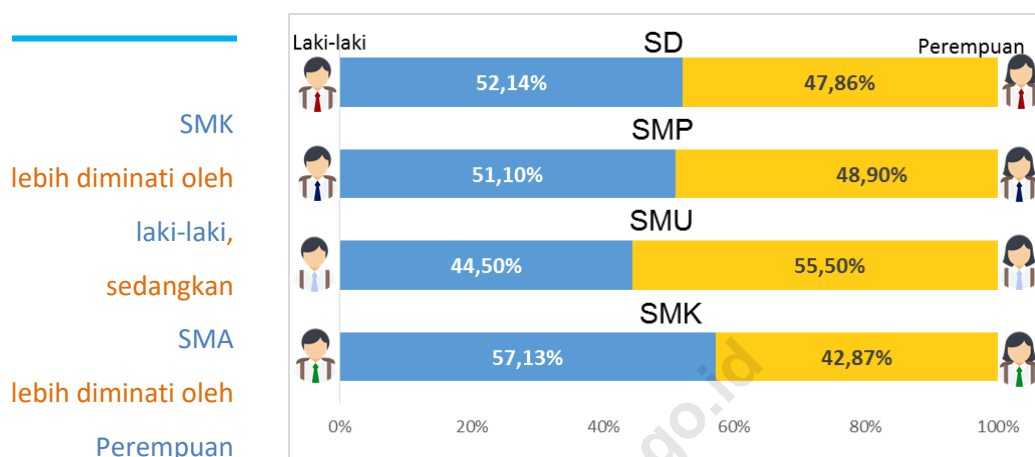


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Terkait isu pemerataan pendidikan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) goal keempat yakni pendidikan berkualitas adalah menjamin laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Terbukanya akses perempuan untuk bersekolah dapat menekan kesenjangan pendidikan antar jenis kelamin. Pemerataan pendidikan tidak hanya memastikan pembangunan pendidikan menjangkau seluruh wilayah, melainkan juga menjangkau seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Data Kemdikbud memperlihatkan peserta didik perempuan masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, baik SD maupun SMP, persentase peserta didik perempuan sekitar 47-49 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan menengah. Peserta didik perempuan rupanya lebih memilih untuk melanjutkan ke jenjang SMA, sebaliknya, siswa laki-laki lebih memilih sekolah kejuruan. Hal ini mungkin disebabkan jurusan pendidikan yang disediakan oleh sekolah kejuruan lebih banyak yang sesuai untuk keterampilan laki-laki.

Gambar 2.5 Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun Ajaran 2017/2018



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kondisi dan Kecukupan Ruang Kelas

Fasilitas belajar yang aman menjadi satu pilar untuk memastikan sekolah yang aman bagi siswa. Penyediaan sarana prasarana sekolah yang sesuai standar mutu pendidikan akan mendukung proses pembelajaran yang kondusif. Namun sayangnya, di tengah upaya memacu mutu pendidikan, justru masih banyak ruang kelas dalam kondisi rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat/total. Meski ada perbaikan kondisi di tahun ajaran 2017/2018, namun persentase ruang kelas yang rusak dan rusak berat masih di atas 50 persen.

Pada tabel 2.3 terlihat bahwa ruang kelas dengan kondisi rusak, tertinggi adalah pada jenjang SD. Pada jenjang pendidikan dasar persentase ruang kelas yang rusak lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan menengah. Namun demikian pada jenjang SMA persentase ruang kelas dengan kondisi baik nyatanya juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepertinya dibutuhkan tata kelola anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada penyelesaian hal mendasar dalam peningkatan kualitas pendidikan.

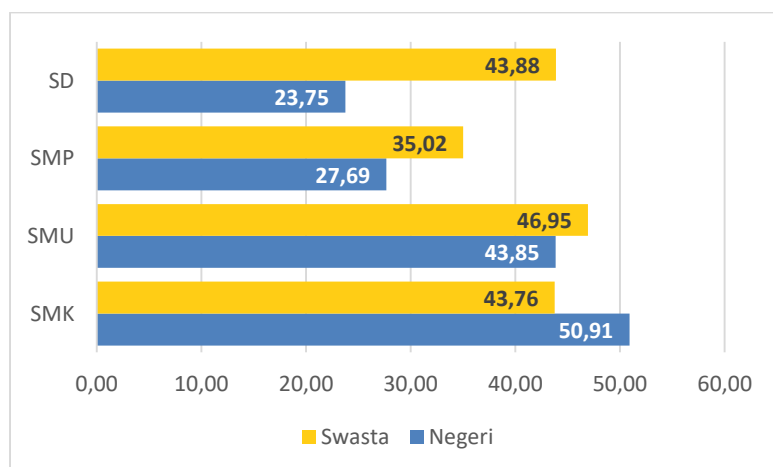
Tabel 2.3 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018

Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas TA 2016/2017			Kondisi Ruang Kelas TA 2017/2018		
	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	25,74	63,95	10,31	26,41	63,59	10,00
SMP	28,73	62,57	8,71	29,70	61,46	8,84
SMA	45,66	50,00	4,34	44,79	50,84	4,36
SMK	45,66	50,77	3,57	46,67	50,44	2,89

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dilihat menurut status sekolahnya, secara umum persentase ruang kelas dengan kondisi baik di sekolah swasta lebih besar dibandingkan sekolah negeri. Hal ini terjadi di hampir semua jenjang pendidikan. Harapannya dengan meningkatnya anggaran pemerintah untuk pendidikan mampu mengubah wajah infrastuktur pendidikan nasional.

Gambar 2.6 Persentase Ruang Kelas dengan Kondisi Baik Menurut Status Sekolah Tahun Ajaran 2017/2018



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ruang kelas dengan kondisi baik masih di bawah 50 %

Kondisi ruang kelas di sekolah swasta lebih baik dibandingkan di sekolah negeri

Sebagai bagian dari pemenuhan prasarana sekolah, patut juga diperhatikan bagaimana kecukupan antara ruang kelas yang tersedia dan jumlah murid. Untuk melihat kecukupan ruang kelas yang tersedia, dapat dilihat dari ukuran rasio rombongan belajar (rombel) per kelas. Dalam data pokok pendidikan Kemdikbud, rombongan belajar atau rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah. Keberadaan jumlah rombongan belajar dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk menetapkan jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh guru.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 mengatur bahwa pada jenjang SD, satu rombel layaknya terdiri dari 20-28 murid, jenjang SMP satu rombel terdiri dari 20-32 murid, jenjang SMA terdiri dari 20-36 murid, sedangkan SMK 15-36 murid. Sehingga secara rata-rata rasio murid per rombongan belajar sekolah di Indonesia telah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam peraturan tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah dan Rasio Murid, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Rasio Murid per Rombel	Rasio Rombel per Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	25 486 506	1 115 194	1 072 136	23	1,04
SMP	10 125 724	358 361	358 361	28	1,00
SMA	4 783 645	161 071	160 950	30	1,00
SMK	4 904 031	176 572	162 426	28	1,09

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selain rasio murid per rombel, rasio pendidikan lain yang perlu mendapat perhatian adalah rasio rombel per kelas. Idealnya jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Kondisi tersebut sudah terwujud pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Angka rasio rombel per kelas yang lebih dari satu menunjukkan jumlah rombel lebih banyak dari ruang kelas yang tersedia. Kondisi tersebut terjadi pada jenjang SD dan SMK. Pada jenjang SD, dari sekitar 1,115 ribu rombel hanya tersedia 1,072 ribu kelas. Artinya, terdapat sekitar 43 ribu rombongan belajar yang tidak memiliki kelas. Kekurangan ruang kelas biasanya diatasi dengan penggunaan ruang kelas secara bergantian.

Perpustakaan Mendukung Proses Pembelajaran

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Sejalan dengan cita-cita tersebut, dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa salah satu standar sarana dan prasarana sekolah adalah tersedianya ruang perpustakaan. Diharapkan perpustakaan sekolah menjadi sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah untuk mendorong terwujudnya kualitas pendidikan Indonesia yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah melalui Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 menetapkan sasaran pembangunan ruang perpustakaan. Dalam Renstra tersebut pemerintah menetapkan target membangun 1.220 ruang perpustakaan SD dan 700 perpustakaan SMP per tahun sepanjang 2015-2019. Sejalan dengan rencana strategis tersebut, secara umum jumlah perpustakaan sekolah di semua jenjang pendidikan telah mengalami peningkatan. Sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 2.5, peningkatan tersebut telah sesuai dengan target pemerintah.

Tabel 2.5 Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2015/2016-2017/2018

Jenjang Pendidikan	TA 2015/2016	TA 2016/2017	TA 2017/2018
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	78 604	81 714	94 550
SMP	17 901	18 510	19 293
SMA	5 265	5 626	6 118
SMK	2 318	2 665	2 890

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 83 menyebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah berkewajiban untuk menyelenggarakan perpustakaan, maka seharusnya jumlah perpustakaan sekolah akan sejalan dengan jumlah bangunan sekolah. Kecukupan ketersediaan perpustakaan dapat dilihat dari persentase perpustakaan terhadap sekolah. Secara umum, ketersediaan perpustakaan belum mencapai seratus persen, artinya belum semua sekolah dilengkapi dengan perpustakaan. Pada jenjang SMK misalnya, hanya 6 dari 10 sekolah yang dilengkapi dengan perpustakaan.

Tabel 2.6 Jumlah dan Persentase Perpustakaan Terhadap Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018

Sekitar 4 dari 10 SD swasta belum dilengkapi perpustakaan sekolah

Jenjang Pendidikan	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	94 550	71,64	9 386	57,69	103 936	70,11
SMP	19 293	83,06	10 737	68,25	30 030	77,08
SMA	6 118	90,88	4 744	70,15	10 862	80,49
SMK	2 890	82,13	5 961	58,49	8 851	64,56

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Masih belum tersedianya perpustakaan di setiap sekolah terjadi pada sekolah negeri dan swasta. Persentase perpustakaan terhadap sekolah negeri lebih besar dibandingkan perpustakaan di sekolah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah swasta yang belum dilengkapi dengan perpustakaan. Pemerintah selaku regulator hendaknya memberikan perhatian terhadap hal ini, khususnya pada jenjang pendidikan SD sebagai jenjang awal dimana budaya gemar membaca seharusnya telah dipupuk.

Kualifikasi dan Beban Kerja Guru

Guru menjadi figur sentral dalam peningkatan mutu pendidikan suatu bangsa. Kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar sangat berperan dalam proses pembelajaran. Sehingga peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dengan meningkatkan sarana prasarananya, melainkan juga dengan menetapkan standar kualitas tenaga pengajarnya. Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik tenaga pengajar dapat dilihat melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1) sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007. Kemdikbud mendefinisikan guru dengan kualifikasi pendidikan tersebut sebagai guru layak mengajar (*qualified teacher*).

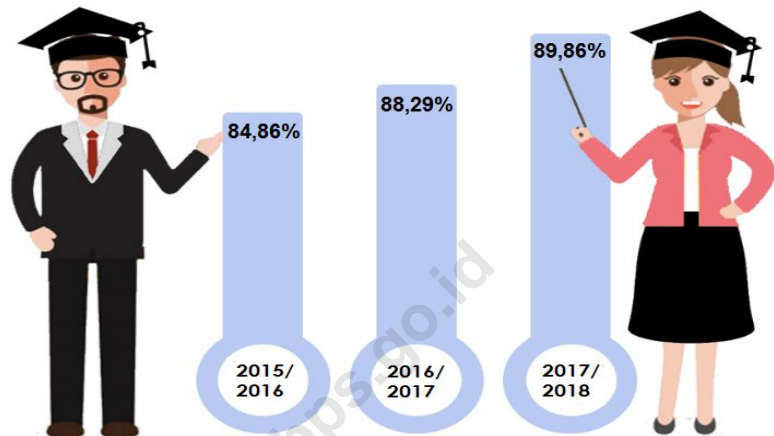
Gambar 2.7 menunjukkan perkembangan seluruh guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang layak

Guru Layak
Mengajar
adalah
Guru kualifikasi
akademik minimum
D4 atau S1

(Permendiknas RI
Nomor 16 Tahun 2007)

mengajar dalam tiga tahun terakhir. Terlihat pada gambar, persentase guru layak mengajar meningkat setiap tahun.

Gambar 2.7 Persentase Guru yang Memiliki Ijazah D4/S1 atau Lebih, Tahun Ajaran 2016/2017-2017/2018



Sekitar 9 dari 10
Guru terdefinisi
sebagai Guru
Layak Mengajar

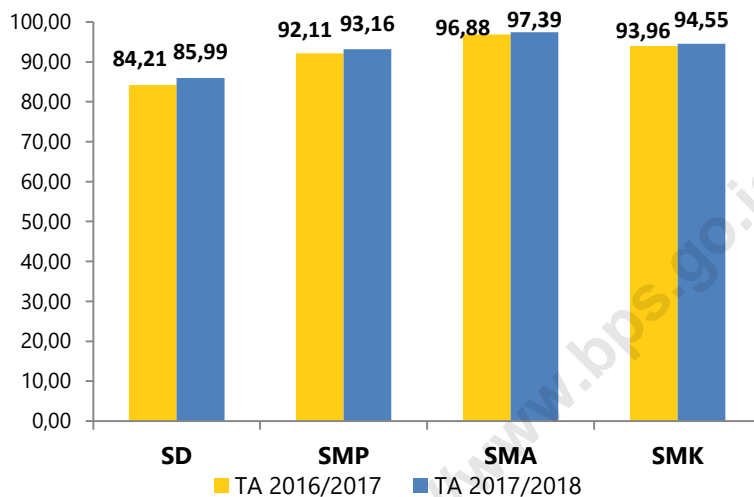
Catatan: Kepala Sekolah termasuk Guru
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data pendidikan guru menurut jenjang pendidikan pada Gambar 2.8 menunjukkan bahwa persentase guru layak mengajar meningkat di semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMP ke atas persentase guru layak mengajar telah mencapai lebih dari 90 persen. Sedangkan guru layak mengajar pada jenjang pendidikan SD masih belum mencapai 90 persen, persentase tersebut paling rendah dibandingkan jenjang pendidikan lain. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar persentase guru layak mengajar.

Peningkatan persentase guru layak mengajar tentunya belum cukup mampu mengukur bagaimana kualitas tenaga pengajar. Masih ada kualifikasi lain yang masih perlu diperhatikan seiring upaya peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Sekalipun secara formal telah memenuhi kualifikasi pendidikan, namun masih banyak guru yang kompetensi pedagogik dan profesionalnya tidak memadai. Hasil uji kompetensi guru secara nasional rata-rata hanya mencapai

53,02. Angka tersebut masih belum mencapai angka standar kompetensi minimal yang ditetapkan, yakni 55,0 (Kompas, 15/9/2018).

Gambar 2.8 Persentase Guru Layak Mengajar Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018



Catatan: Kepala Sekolah termasuk Guru
 Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Beban kerja guru secara tidak langsung turut mempengaruhi bagaimana kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas. Beban kerja guru dapat diukur melalui rasio murid-guru. Rasio murid-guru ialah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Guru yang dimaksud termasuk guru layak dan tidak layak mengajar. Sehingga rasio murid-guru mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin besar rasio murid-guru, semakin kecil akses murid terhadap guru. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa secara individu sehingga mendukung prestasi siswa menjadi lebih baik. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan bahwa pada jenjang SD,SMP, SMA idealnya 1 guru bertanggungjawab pada 20 murid.

Standar Ideal
Rasio Murid-Guru
 SD, SMP, SMA →
20:1
 SMK → **15:1**
 (PP No 74 Tahun
 2008 Pasal 17)

**Pada Tahun
Ajaran 2017/2018**
Secara rata-rata 1
orang guru
bertanggung jawab
terhadap 16-17
siswa

Sedangkan pada jenjang TK, MI, MTs, MA idealnya 1 guru bertanggungjawab terhadap 15 murid.

Data Kemdikbud pada Tabel 2.7 menunjukkan bahwa secara rata-rata pada setiap jenjang pendidikan, seorang guru bertanggung jawab terhadap 16 sampai 17 murid. Rasio murid guru tersebut sudah memenuhi standar ideal sebagaimana yang tertuang pada peraturan.

Tabel 2.7 Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	25 486 506	1 485 602	17
SMP	10 125 724	628 052	16
SMA	4 783 645	307 751	16
SMK	4 904 031	292 212	17

Catatan: Kepala Sekolah termasuk Guru

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio murid-guru sering digunakan untuk membandingkan kualitas sistem pendidikan antarnegara. Akan tetapi, ukuran ini lemah terkait dengan perbedaan sistem pembelajaran dan kualitas pendidikan. Keterbandingan rasio murid-guru antarnegara dipengaruhi oleh definisi 'guru' dan perbedaan ukuran kelas pada masing-masing tingkatan/kelas serta jumlah jam mengajar. Selain itu juga ada perbedaan sistem tenaga pendidik seperti guru *part time* dan pembagian *shift* mengajar (data.worldbank.org; edglossary.org). Di Indonesia sendiri, Kepala Sekolah turut dimasukkan dalam penghitungan rasio murid-guru, yang faktanya, seorang kepala sekolah sering kali tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar seperti guru.

pendidikan anak usia dini
angka **PARTISIPASI** Murni
partisipasi kasar **SEKOLAH** APS
APK PAUD

3

SD/ sederajat

97,58



SMP/ sederajat

78,84



SM/ sederajat

60,67



PT (19-24)

18,59



69 dari 100 anak usia 7-12 tahun
bersekolah sesuai pada jenjangnya,
yaitu **SD/ sederajat**

Bab 3

PARTISIPASI SEKOLAH

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28c dan 31. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, termasuk juga penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan keempat SDGs menjamin kualitas pendidikan inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan pada RPJMN 2015-2019 adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, dengan target sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

- Angka Partisipasi PAUD sebesar 77,2 persen
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 94,8 persen
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,1 persen
- APM SMP/MTs sebesar 82,0 persen
- APK SMP/MTs/Paket B sebesar 106,9 persen
- APM SMA/MA/SMK sebesar 67,5 persen
- APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 91,6 persen
- APK Perguruan Tinggi sebesar 36,7 persen

Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah diberikan pemerintah, juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2018 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Pendidikan Anak Usia Dini

Pada awal kehidupan, khususnya sejak di dalam kandungan hingga usia tiga tahun, seorang anak membutuhkan nutrisi, perlindungan, serta stimulasi untuk pengembangan kesehatan otaknya. Dalam proses pembentukan otak, hubungan saraf dibentuk oleh gen dan yang hal-hal yang dialaminya seperti nutrisi yang baik, stimulasi berbicara, cara bermain, perhatian responsif dari orang yang mengasuhnya, dsb. Kombinasi antara hal-hal alamiah dan pengasuhan inilah yang akan membentuk fondasi masa depan seorang anak.

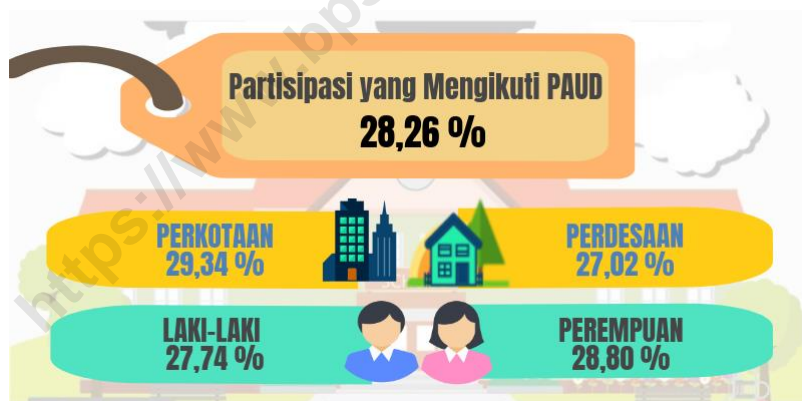
Masa awal anak-anak adalah periode yang paling cepat dalam kehidupan manusia. Sejak 0 hingga 8 tahun merupakan masa-masa penting untuk melengkapi kesehatan kognitif, emosional, dan pertumbuhan fisik anak. UNICEF pada publikasinya *Early Childhood Development : The key to a full and productive life* menyebutkan bahwa banyak perkembangan motorik anak yang dapat ditingkatkan pada usia 2 s.d. 5 tahun seperti mempelajari bakat baru, bahasa, mengontrol tangan dan jari, banyak bertanya, meluapkan perasaan, hingga keinginan berbagi serta bermain bersama teman.

Melihat pentingnya pembentukan anak sebagai dasar penentu kualitas bangsa di masa mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan dukungan penuh dengan pendidikan awal pada anak melalui program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun pra-SD. Kebijakan lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas PAUD untuk daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), termasuk juga wilayah perbatasan. Selain itu, pemerintah juga telah merintis program PAUD baru bagi desa-desa yang belum terdapat layanan anak usia dini, sejalan dengan program satu desa satu PAUD.

Pemerintah berkomitmen dalam mengembangkan akses serta mutu PAUD dengan penerbitan Peraturan Presiden

Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Selanjutnya, dalam peningkatan mutu kelembagaan PAUD, pemerintah mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 84 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Hal-hal mengenai syarat pendirian PAUD, standar tingkat pencapaian pengembangan anak pada PAUD, standar isi, proses, dan penilaian PAUD, tenaga pendidik, hingga proses penutupan PAUD telah diatur secara lengkap pada peraturan tersebut.

Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Secara umum, pada tahun 2018 partisipasi anak usia 0-6 tahun mengikuti PAUD telah mencapai 28,26 persen. Berdasarkan jenis kelamin, persentase anak perempuan 0-6 tahun yang mengikuti PAUD sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki yaitu 28,80 persen berbanding 27,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan dan perbedaan sikap untuk partisipasi PAUD dari sisi gender. Jika melihat lebih lanjut, partisipasi PAUD di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu 29,34 persen berbanding 27,02 persen dengan selisih yang hanya sebesar 2,32 persen pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa usaha pemerintah

dalam meningkatkan fasilitas PAUD dan fasilitas untuk mengakses PAUD di perdesaan semakin membaik, namun tetap perlu ditingkatkan.

Status ekonomi rumah tangga dapat digambarkan melalui kelompok pengeluaran rumah tangga yang terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu kuintil 1, 2, 3, 4 dan 5. Kuintil 1 merupakan kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terbawah. Semakin tinggi kuintil menggambarkan kelompok pengeluaran yang juga semakin besar. Dengan demikian, kelompok pengeluaran tertinggi terdapat pada kuintil 5.

Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, persentase partisipasi anak 0-6 tahun yang mengikuti PAUD meningkat seiring semakin tingginya status ekonomi rumah tangga. Lebih lanjut terlihat pada gambar 3.2 bahwa persentase anak 0-6 tahun pada kuintil 1 yang mengikuti PAUD hanya 24,12 persen, dibandingkan dengan kuintil 5 yaitu kelompok status ekonomi teratas yaitu sebesar 34,36 persen. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat kesenjangan bagi anak untuk berpartisipasi mengikuti PAUD, tergantung pada lapisan ekonomi rumah tangga masing-masing. Tentu ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, untuk meningkatkan layanan PAUD agar bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, tanpa ada sedikitpun pengecualian.

Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, partisipasi PAUD pada anak usia 0-6 tahun juga semakin besar

Gambar 3.2 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018



Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas Maret 2018

Apabila disandingkan dengan target pencapaian pada tahun 2019, RPJMN yang sebesar 77,2 persen, partisipasi PAUD anak 0-6 tahun pada tahun 2018 masih cukup jauh dari target dengan nilai yang hanya sebesar 28,26 persen. Tentu kerja keras yang ekstra dari segala pihak masih sangat diperlukan jika pemerintah ingin melampaui target ini pada tahun 2019 nanti.

Selain partisipasi PAUD, publikasi ini juga menyajikan indikator lain terkait PAUD yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK PAUD merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah, baik Taman Kanak-Kanak (TK)/Bushtanul Athfal (BA)/Raudhatul Athfal (RA) maupun berbagai jenis PAUD lainnya (kecuali kelompok bermain dan tempat penitipan anak), terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang bersesuaian. Pada perhitungan APK PAUD dan APM PAUD menggunakan dua kelompok umur yaitu 3-5 tahun dan 3-6 tahun. Perbedaan tersebut dilakukan karena kelompok umur 3-5 tahun sesuai dengan penetapan UNESCO dalam penghitungan indikator pendidikan usia dini, sedangkan kelompok umur 3-6 tahun sesuai yang tercantum dalam Renstra Kemdikbud 2015-2019. Oleh karena itu, agar keterbandingan keduanya tetap dapat dicermati, maka pengelompokan kedua jenis kelompok umur tetap dilakukan.

APK PAUD anak penyandang disabilitas baik 3-5 tahun maupun 3-6 tahun lebih tinggi dibandingkan bukan penyandang disabilitas.



Penyediaan pendidikan yang berkualitas merupakan poin ke-empat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang lebih dikenal dengan Agenda Pendidikan 2030. Target ini salah satunya mengarah untuk memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar. Secara nasional, pada tahun 2018 APK PAUD untuk kelompok umur 3-6 tahun meningkat menjadi 37,92 persen. Hal ini menandakan bahwa dari 10 anak usia 3-6 tahun, setidaknya terdapat 3-4 anak diantaranya mengenyam pendidikan anak usia dini. Angka ini

masih cukup jauh di bawah target pembangunan yaitu sebesar 77,2 persen pada tahun 2019.

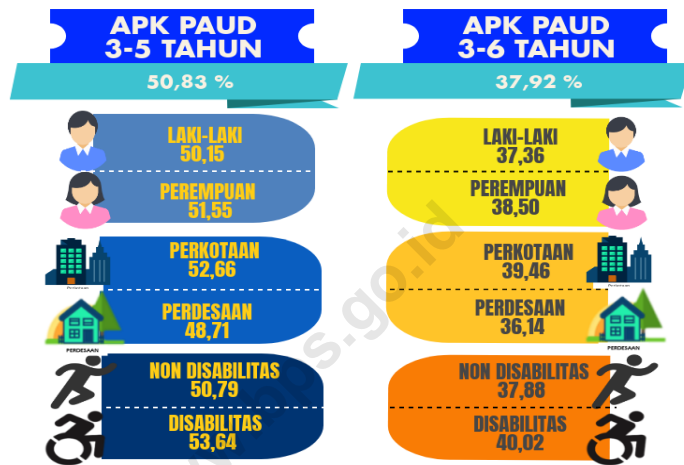
Seperti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, APK PAUD disabilitas menggambarkan proporsi murid PAUD penyandang disabilitas terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 3-5 tahun atau 3-6 tahun. Jika ditelaah lebih dalam, APK PAUD anak penyandang disabilitas usia 3-5 tahun maupun 3-6 tahun sedikit lebih tinggi dibandingkan anak bukan penyandang disabilitas. Kondisi ini disebabkan oleh penyandang disabilitas biasanya tidak tepat umur mengikuti sekolah sesuai dengan jenjangnya. Penyebabnya dapat bermacam-macam seperti tidak naik kelas atau terlambat masuk sekolah yang diakibatkan oleh keterbatasan yang mereka miliki. Secara tidak langsung, hal tersebut mungkin akan meningkatkan jumlah murid PAUD penyandang disabilitas yang terhambat memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yang akhirnya juga akan membuat APK PAUD penyandang disabilitas lebih tinggi.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APK PAUD anak perempuan baik kelompok umur 3-5 tahun maupun 3-6 tahun cenderung sama dengan APK PAUD anak laki-laki dengan perbedaan sekitar satu persen saja. Hal ini mengindikasikan bahwa anak perempuan juga mendapatkan perlakuan dan akses yang sama dalam memperoleh pendidikan, khususnya PAUD. Fakta ini sejalan dengan prinsip fundamental dan pengarusutamaan gender yang diusung dalam target pencapaian SDGs 2030.

Menurut tipe daerah, terdapat kesenjangan APK PAUD daerah perkotaan dan perdesaan yaitu 52,66 persen berbanding 48,71 persen untuk kelompok umur 3-5 tahun dan 39,46 persen berbanding 36,14 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun. Walaupun masih terdapat perbedaan APK PAUD antara perkotaan dan perdesaan, kesenjangannya dari tahun ke tahun kian menurun. Hal ini menandakan bahwa akses dan fasilitas PAUD sudah cukup meningkat dibandingkan tahun lalu,

meskipun sudah menjadi tugas pemerintah untuk lebih meningkatkan dan pemeratakan fasilitas pendidikan, agar masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun, 2018

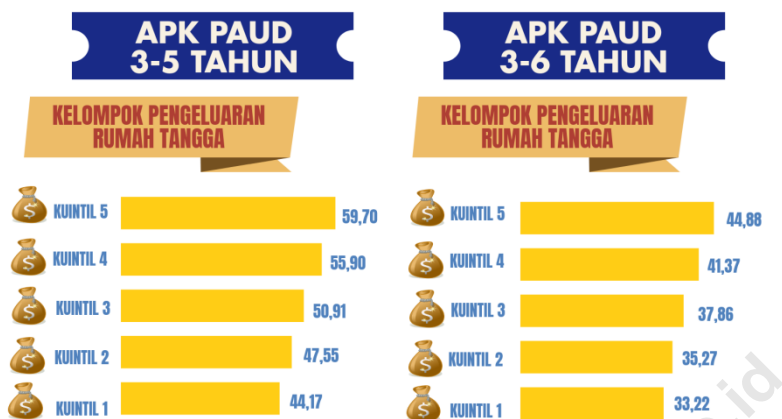


Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, semakin tinggi APK PAUD. Melalui data dapat terlihat bahwa ketimpangan antara kelompok rumah tangga dengan status ekonomi terendah (kuintil 1) dibandingkan kelompok rumah tangga dengan status ekonomi tertinggi (kuintil 5), lebih besar daripada ketimpangan berdasarkan tipe daerah maupun jenis kelamin. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi cenderung lebih berperan dalam menentukan partisipasi seseorang mengikuti PAUD.

Kelompok kuintil 1 memiliki persentase APK PAUD terkecil dibanding kelompok lainnya yaitu sebesar 44,17 persen untuk kelompok umur 3-5 tahun dan 33,22 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun. Sebaliknya, persentase pada kelompok status ekonomi teratas (kuintil 5) memiliki persentase APK PAUD terbesar yaitu 59,70 persen untuk kelompok 3-5 tahun dan 44,88 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018

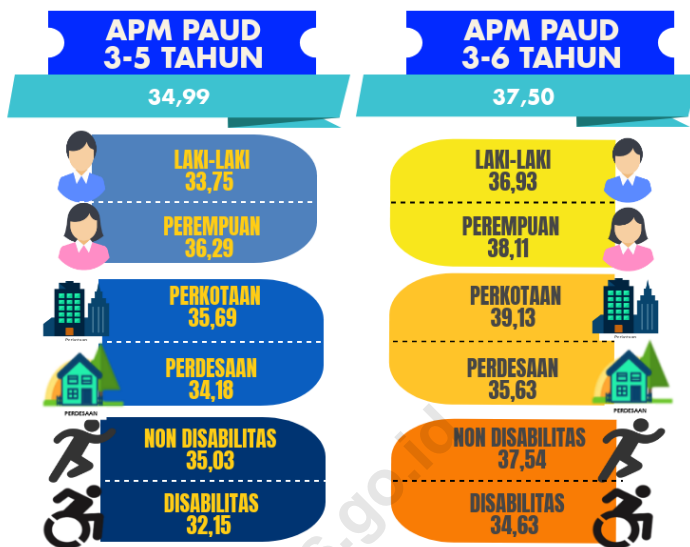


Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Orang tua zaman *now* lebih memilih memasukkan anaknya, khususnya yang berusia 6 tahun, pada pendidikan prasekolah sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari perbedaan yang cukup besar antara APK PAUD usia 3-5 tahun dan APK PAUD usia 3-6 tahun. Perbedaan tersebut menandakan bahwa kontribusi anak usia 6 tahun terhadap murid PAUD secara keseluruhan cukup besar. Di sisi lain, orang tua banyak yang lebih memahami bahwa usia 7 tahun merupakan usia ideal anak secara fisik maupun psikis untuk memasuki jenjang sekolah dasar.

Proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dikenal sebagai APM PAUD. APM PAUD menunjukkan persentase anak yang benar-benar mengenyam PAUD pada usia yang bersesuaian. Sejalan dengan APK PAUD, pada kelompok umur 3-5 tahun, APM PAUD anak perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yaitu 36,29 persen berbanding 33,75 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur 3-6 tahun, APM PAUD anak perempuan (38,11 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (36,93 persen).

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, APM PAUD daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini terjadi pada kelompok umur 3-5 tahun dan 3-6 tahun. Tingginya persentase ibu pekerja serta mobilitas ibu rumah tangga di daerah perkotaan cenderung mendorong mereka untuk menitipkan anak ke tempat yang menyediakan pendidikan untuk anak usia dini sehingga anak tetap berada dalam pengawasan, disamping mendapatkan berbagai manfaat lainnya dalam mengikuti PAUD seperti belajar berbagi, bersosialisasi, dsb

Sejalan dengan APK PAUD usia 3-5 tahun yang lebih tinggi dibandingkan APK PAUD usia 3-6 tahun, dapat terlihat juga bahwa selisih APK dan APM PAUD kelompok umur 3-5 tahun cenderung besar yaitu sekitar 15,84 persen, sedangkan untuk kelompok umur 3-6 tahun APK dan APM nya cenderung tidak berbeda signifikan. Hal ini juga mendukung pernyataan masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya yang berusia 6 tahun ke PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar.

APM PAUD bukan penyandang disabilitas, baik umur 3-5 tahun maupun 3-6 tahun lebih tinggi dibandingkan penyandang disabilitas. APM PAUD usia 3-5 tahun sebesar 35,03 persen (bukan penyandang disabilitas) dan 32,15 persen (penyandang disabilitas). APM PAUD usia 3-6 tahun sebesar 37,54 persen (bukan penyandang disabilitas) dan 34,63 persen (penyandang disabilitas).

Sama halnya dengan APK PAUD, APM PAUD juga memiliki pola searah dengan kelompok pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi status ekonomi, semakin tinggi APM PAUD. Hal ini terjadi pada kedua kelompok umur. Kesenjangan APM PAUD berdasarkan kelompok pengeluaran cukup tinggi. Kelompok Kuintil 1 (status ekonomi terbawah) memiliki APM PAUD terkecil, yaitu sebesar 30,54 persen untuk kelompok umur 3-5 tahun dan 32,78 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun. Sebaliknya, kelompok ekonomi teratas (kuintil 5) memiliki APM PAUD tertinggi sebesar 43,44 persen untuk kelompok umur 3-5 tahun dan 44,29 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun.

Gambar 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Unicef dalam *School Readiness: a conceptual framework*, 2012 menyatakan bahwa dimensi kesiapan sekolah (*school readiness*) terdiri dari anak yang siap, sekolah yang siap, dan

keluarga yang siap. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesiapan anak untuk sekolah bukan hanya ditentukan oleh anak itu sendiri, namun juga ditentukan oleh berbagai hal khususnya dari lingkungan sekolah yang mendukung kelancaran proses transisi anak ke pendidikan dasar dan sikap serta keterlibatan orang tua dalam mendampingi dan membimbing perkembangan anak. Lembaga pendidikan nasional di Amerika, *National Educational Goal Panel* (1997) mengidentifikasi lima domain perkembangan dan pembelajaran anak yaitu perkembangan fisik dan motorik, perkembangan emosi dan sosial, perkembangan bahasa, kognisi dan pengetahuan umum, serta perasaan yang positif akan belajar (*California Childcare Health Program*, 2006). Keberadaan PAUD dianggap dapat memfasilitasi komponen-komponen tersebut guna mendukung perkembangan dan pembelajaran anak dalam menghadapi pendidikan dasar yang sesungguhnya. Untuk melihat kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat) dibentuklah suatu indikator yaitu Angka Kesiapan Sekolah (AKS). AKS menggambarkan proporsi siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya pernah mengikuti PAUD terhadap seluruh anak yang duduk di kelas 1 SD.

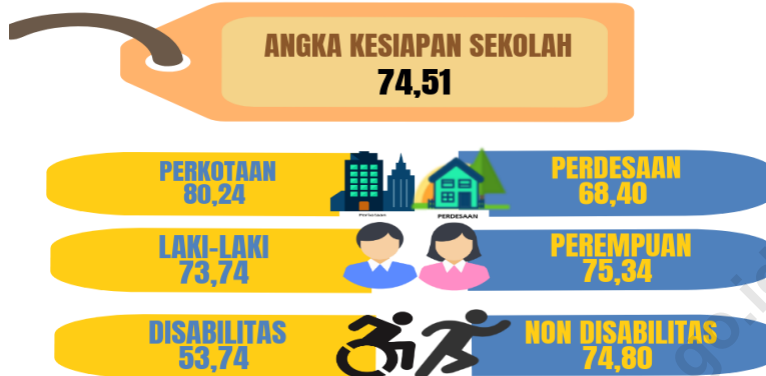
Mayoritas anak Indonesia pada tahun 2018 sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD/Sederajat). Hal ini ditunjukkan melalui Gambar 3.7 bahwa AKS anak mencapai 74,51 persen yang artinya setidaknya 7 dari 10 anak yang duduk di kelas 1 SD/Sederajat sudah memiliki kesiapan untuk terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Jika dikaji menurut jenis kelamin, anak laki-laki dan perempuan memiliki AKS yang nilainya hampir sama, yaitu AKS anak perempuan berada sedikit lebih tinggi di atas AKS anak laki-laki (75,34 persen berbanding 73,74 persen). Artinya, tidak terdapat perbedaan yang berarti antara anak perempuan dan anak laki-laki untuk masalah kesiapan sekolah. Hal tersebut juga

sejalan dengan nilai APK dan APM PAUD pada pembahasan sebelumnya, dimana anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan.



Gambar 3.7 Angka Kesiapan Sekolah (AKS), 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

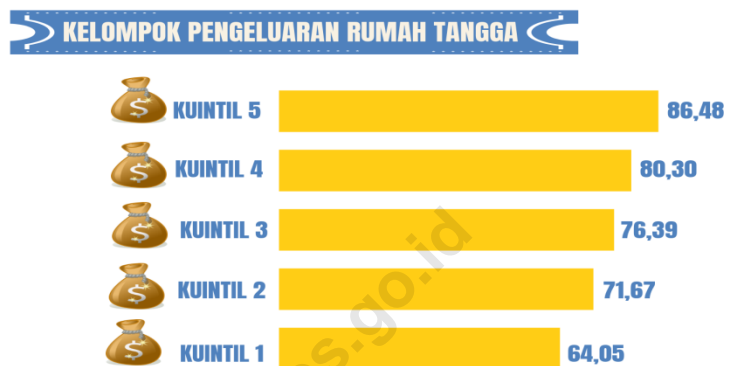
Sementara itu, anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki AKS yang lebih tinggi (80,24 persen) dibandingkan anak-anak yang tinggal di perdesaan (68,40 persen). Jika diperhatikan, terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara AKS anak di wilayah perkotaan dengan perdesaan yang nilainya hampir mencapai 12 persen. Wilayah perkotaan dengan segala macam kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki mampu memberikan stimulus yang tinggi terhadap masyarakat di perkotaan untuk mengikutsertakan anak mereka ke dalam berbagai jenis pendidikan anak usia dini, sedangkan fasilitas PAUD di perdesaan masih belum maksimal menjangkau anak untuk mengikuti PAUD sebelum mengenyam bangku SD.

Pola AKS yang searah juga terlihat dari status ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi kelompok kuintil (status ekonomi rumah tangga), kesiapan sekolah anak juga semakin meningkat. Hal ini terlihat pada kuintil 1, nilai AKS hanya 64,05 persen, sedangkan pada kuintil tertinggi (kuintil 5) AKS mencapai 86,48 persen. Perbedaan pada kuintil terendah dan tertinggi mencapai lebih dari 20 persen. Hal tersebut semakin mendukung

Setidaknya **7** dari **10** anak yang duduk di bangku SD kelas 1 pada tahun 2018 telah memiliki kesiapan untuk bersekolah

pernyataan bahwa seharusnya perhatian pemerintah terhadap partisipasi PAUD, khususnya pada kelompok masyarakat dengan status ekonomi terbawah (kuintil 1) lebih ditingkatkan lagi, agar keadilan dari sisi ekonomi dapat tercapai.

Gambar 3.8 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Angka Partisipasi Sekolah



Masih terdapat setidaknya **6** dari **100** penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 70,81, meningkat 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2016. Hal ini menandakan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hidup yang merupakan dimensi pembentuk IPM di Indonesia semakin meningkat. Salah satu bentuk peningkatan kualitas dan pemanfaatan fasilitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa pada tahun 2018 persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,7 persen, yang masih sekolah sebesar 25,22 persen, dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 68,08 persen. Menurut jenis kelamin, partisipasi sekolah penduduk usia 5

tahun ke atas perempuan dan laki-laki cenderung tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, berdasarkan daerah tempat tinggal, masih terdapat sekitar 8,57 penduduk usia 5 tahun ke atas di perdesaan yang belum pernah sekolah, dibandingkan di perkotaan yang hanya sekitar 5,16 persen penduduk yang belum sekolah. Melihat hal tersebut, tentunya perhatian pemerintah harus lebih ekstra, khususnya untuk daerah perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan agar partisipasi sekolah masyarakat dapat ditingkatkan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah, 2018

Karakteristik Demografi	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,70	25,22	68,08
Jenis Kelamin			
Laki-laki	5,53	25,54	68,93
Perempuan	7,88	24,89	67,23
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	5,16	25,83	69,01
Perdesaan	8,57	24,47	66,96
Status Disabilitas			
Non Disabilitas	6,17	25,83	68,00
Disabilitas	23,91	5,48	70,62
Kelompok umur			
5	97,73	2,26	0,01
6	56,54	43,10	0,36
7 – 12	0,58	99,22	0,20
13 – 15	0,53	95,36	4,11
16 – 18	0,69	71,99	27,32
19 – 24	0,69	24,40	74,91
25+	5,45	0,86	93,69
Status Ekonomi Rumah Tangga			
Kuintil 1	10,40	26,01	63,58
Kuintil 2	7,72	26,09	66,19
Kuintil 3	6,47	25,34	68,19
Kuintil 4	5,46	24,09	70,45
Kuintil 5	3,64	24,61	71,75

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48 persen, dan masih ada sebesar 23,91 persen yang belum pernah mencicipi bangku sekolah sama sekali. Jika kembali lagi mengingat bahwa salah satu cita-cita luhur Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pada setiap lapisan kelompok masyarakat tanpa terkecuali, maka tentu wajar jika pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras lebih giat lagi dalam peningkatan kualitas pendidikan agar keadilan terutama di bidang pendidikan dapat tercapai. Jika hal tersebut telah terjadi, maka ketimpangan partisipasi sekolah antara penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas tentu tidak akan terjadi.

Semakin tinggi kelompok umur sekolah, semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Lebih lanjut, terlihat bahwa partisipasi sekolah terfokus pada kelompok umur 7-18 tahun. Hal ini sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Meskipun demikian, persentase partisipasi sekolah harus lebih ditingkatkan lagi, khususnya kelompok umur sekolah menengah (SM) yaitu 16-18 tahun, karena pada tahun 2018, setidaknya hanya 1 dari 4 penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan hingga sekolah menengah harus lebih ditingkatkan lagi agar program wajib 12 tahun mencapai targetnya dengan maksimal. Dapat terlihat juga bahwa masih terdapat 5,45 persen penduduk usia 25 tahun ke atas yang tidak/belum pernah mengenyam pendidikan atau masih ada setidaknya 5 dari 100 penduduk di atas 25 tahun yang belum pernah merasakan bangku sekolah seumur hidup mereka. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan terdahulu belum dapat menggapai seluruh lapisan masyarakat.

Hal menarik lainnya, terdapat hampir 43,10 persen penduduk usia 6 tahun dengan status masih bersekolah. Hal tersebut menandakan bahwa sudah banyak penduduk usia 6 tahun yang mengikuti pendidikan SD/ sederajat, di mana rentang

usia 6 sampai 7 tahun sudah dapat didaftarkan ke SD sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018. Sementara itu, partisipasi sekolah kelompok umur pendidikan tinggi 19-24 tahun yaitu sekitar 24,40 persen. Hal itu menggambarkan bahwa hanya 1 dari 4 penduduk usia 19-24 tahun yang masih mengenyam pendidikan sekolah.

Di sisi lain, walaupun angkanya relatif kecil, namun masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah sekolah pada usia 7 tahun ke atas. Angka tersebut meningkat seiring pertambahan usia, begitu pula dengan persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi. Angka terbesar yaitu pada kelompok umur 25 tahun ke atas, yaitu sekitar 5,45 persen yang tidak/belum pernah sekolah dan 93,69 persen yang tidak sekolah lagi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas cenderung putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Keberhasilan pendidikan di suatu bangsa akan menciptakan sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi yang pada akhirnya menjadi generasi harapan bangsa, *engine of growth*, dan lokomotif pembangunan. Di sinilah peran penting penduduk usia sekolah 7-24 tahun diperlukan karena mereka menjadi bagian dari komposisi penduduk yang akan memanfaatkan peluang tersebut mengingat usia 7-24 tahun merupakan rentang usia sekolah, dimana hendaknya mereka yang berada pada rentang usia tersebut masih aktif dalam mengenyam pendidikan di bangku sekolah tanpa terkecuali.

Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat

digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Publikasi ini menggunakan dua kelompok umur perguruan tinggi yaitu 19-24 tahun dan 19-23 tahun. Kelompok umur 19-23 tahun mengacu pada metadata indikator SDGs, sedangkan kelompok umur 19-24 tahun tetap dipertahankan untuk menjaga keterbandingan data dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa APS terbesar yaitu pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,22 persen atau dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, nilai APS semakin menurun yang menandakan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya juga semakin menurun. Terlihat pula APS untuk kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SM/ sederajat relatif kecil mengingat hanya sekitar 72 persen anak usia 16-18 tahun melanjutkan ke sekolah menengah, di saat negara kita sedang gencar mengusahakan wajib belajar 12 tahun untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Menurut tipe daerah, APS untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok umur 19-24 tahun dan 19-23 tahun yang merupakan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi, dengan perbedaan sekitar 15 dan 16 persen.

Jika dilihat lebih dalam, ketersediaan perguruan tinggi di perdesaan memang masih minim, selain itu biaya pendidikan yang relatif tinggi kerap kali menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Di tambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang, khususnya di perdesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2018

Karakteristik Demografi	Kelompok umur				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	99,22	95,36	71,99	24,40	27,92
Jenis Kelamin					
Laki-laki	99,17	94,51	70,98	24,03	27,36
Perempuan	99,27	96,26	73,04	24,79	28,50
Daerah Tempat Tinggal					
Perkotaan	99,62	96,46	76,05	30,65	34,83
Perdesaan	98,78	94,13	67,16	15,83	18,29
Status Disabilitas					
Non Disabilitas	99,29	95,58	72,32	24,53	28,06
Disabilitas	91,12	69,38	35,68	12,96	14,70
Status Ekonomi Rumah Tangga					
Kuintil 1	98,64	92,05	59,52	12,60	14,59
Kuintil 2	99,32	94,46	69,45	15,59	18,08
Kuintil 3	99,35	96,20	74,03	19,28	22,43
Kuintil 4	99,43	97,07	74,91	25,80	29,58
Kuintil 5	99,56	98,19	82,43	42,86	48,46

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Gambar 3.9 memperlihatkan penyebaran angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP (7-15 tahun) di seluruh provinsi di Indonesia. APS 7-15 tahun Indonesia pada tahun 2018 sebesar 97,96 persen. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki APS 7-15 tahun lebih dari 95 persen. APS tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dengan angka sebesar 99,85 persen. Sebaliknya, APS penduduk usia 7-15 tahun terendah di Papua, yaitu sebesar 81,69 persen. Selain jauh dari angka nasional, ketimpangan APS antara Papua dan provinsi lainnya juga cukup tinggi.

Gambar 3.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun Menurut Provinsi, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018



APS 7-15 tahun dan 7-18 tahun Provinsi Papua sebesar 81,69 dan 77,77, jauh dari angka APS nasional

Salah satu agenda pendidikan yang digaungkan pada program pembangunan 2015-2019 adalah melalui Program Indonesia Pintar, wacana pendidikan ke depan akan memberlakukan wajib belajar 12 tahun untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Gambaran mengenai APS penduduk usia 7-18 tahun sebagai kelompok umur yang bersesuaian dengan pendidikan SD/ sederajat hingga SM/ sederajat terlihat pada gambar 3.10.

Berdasarkan gambar 3.10 secara nasional nilai APS untuk kelompok umur 7-18 tahun mencapai angka 91,60 persen, lebih rendah dari APS kelompok umur 7-15 tahun. Papua merupakan satu-satunya provinsi yang nilai APS 7-18 tahunnya masih jauh dari angka nasional yaitu sekitar 77,77 persen. Tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas masih menjadi kendala yang harus segera terselesaikan dengan baik. Pemerintah perlu mengupayakan agar anak-anak di Indonesia bisa mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat menengah ke atas, misalnya menyediakan sekolah menengah untuk daerah-daerah yang belum memiliki SMA atau SMK.

Gambar 3.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Menurut Provinsi, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Angka Partisipasi Kasar

Kecerdasan anak berkembang sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan. Hasil riset menunjukkan bahwa sekitar 50 persen kapabilitas kecerdasan orang dewasa terjadi saat anak berusia hingga 4 tahun, akan terus meningkat menjadi 80 persen sampai berusia 8 tahun (Kemdikbud, 2017). Fase perkembangan tersebut berkenaan dengan usia anak memasuki sekolah dasar yang merupakan fase awal dari seluruh jenjang pendidikan yang ditempuh. Tahapan ini menjadi sangat penting karena pada masa tersebut anak akan belajar mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka terkait minat, bakat, akademis, dan juga karakter yang terus akan dibawa hingga memasuki tingkat pendidikan selanjutnya. Jika pondasi awal pendidikan telah dibangun dengan baik, maka anak tinggal melanjutkan apa yang telah mereka kembangkan sebelumnya dengan lebih baik lagi untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah selayaknya persentase mereka yang mengenyam pendidikan pada jenjang SD/ sederajat



**APK
SD/Sederajat
bernilai lebih dari
100 yang artinya
jumlah murid
SD/sederajat
lebih banyak
dibandingkan
jumlah anak
dengan usia yang
bersesuaian**

tersebut cenderung tinggi. Hal ini tergambar melalui nilai APK SD/sederajat.

Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut digambarkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK). Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya siswa yang sekolah walupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Gambar 3.11 memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD/sederajat sampai PT. APK untuk jenjang pendidikan SD/sederajat adalah sebesar 108,61 persen, APK SMP/sederajat sebesar 91,52 persen, APK SM/sederajat sebesar 80,68 persen, APK untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (usia 19-24 tahun) sebesar 25,12 persen, dan APK untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (usia 19-23 tahun) sebesar 30,19 persen. APK pada jenjang pendidikan SD/sederajat melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar *range* 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang masih bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia SD (7-12 tahun). Berbagai hal bisa menjadi alasan, antara lain orang tua yang terkadang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, angka mengulang kelas yang tinggi, dsb.

Gambar 3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK), 2018

	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi (19-24 tahun)	Perguruan Tinggi (19-23 tahun)
TOTAL	108,61	91,52	80,68	25,12	30,19
Laki-laki	108,91	90,82	80,33	23,59	28,34
Perempuan	108,29	92,25	81,04	26,70	32,09
Perkotaan	107,22	92,60	86,64	33,81	40,39
Perdesaan	110,15	90,31	73,57	13,17	15,97
Non Disabilitas	108,61	91,76	81,08	25,28	30,39
Disabilitas	108,75	62,74	37,58	9,59	11,35

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga akan semakin rendah. APK SMP/sederajat pada tahun 2018 sebesar 91,52 persen. Walaupun angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 90,23 persen, namun target pemenuhan RPJMN untuk tahun 2019 masih cukup jauh yaitu mencapai 106,9 persen untuk APK SMP/sederajat. Begitu juga APK SD/sederajat (108,61 persen) dan APK SM/sederajat (80,68 persen), yang masih harus ditingkatkan demi tercapainya APK SD/sederajat yaitu 114,1 persen dan APK SM/sederajat 91,6 persen sesuai target RPJMN 2019. Bukan hanya itu, APK PT 19-23 tahun (yang dipakai pada RPJMN) juga belum bisa melampaui target 2019 (36,7 persen) yang hanya mampu mencapai 30,19 persen, meskipun dengan perbedaan yang tidak begitu tinggi. Dengan tenggat waktu yang tidak panjang lagi, pemerintah harus memutar otak lebih keras agar target APM tahun 2019 di setiap jenjang pendidikan dapat terpenuhi. Butuh kerja keras yang cukup solid antara pemerintah dan masyarakat luas demi tercapainya cita-cita bangsa di bidang pendidikan ini.

Mungkin tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan bukan hanya milik laki-laki, perempuan pun memiliki

kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sudah tidak ada lagi diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan di Indonesia seperti yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Hal ini terlihat dari data APK laki-laki dan perempuan yang cenderung tidak terdapat perbedaan yang berarti. Hanya pada jenjang PT, APK PT perempuan baik pada usia 19-24 tahun maupun 19-23 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Fakta ini mengindikasikan bahwa para perempuan yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tidak terbatas pada rentang usia 19-24 tahun dan 19-23 tahun saja, akan tetapi banyak dari mereka yang berada di luar rentang tersebut tetap memiliki semangat dalam menuntut ilmu pada tingkat pendidikan tinggi.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah mencapai APK SD melebihi angka 100 persen, kecuali Papua yang hanya mencapai 94,47 persen (Tabel Lampiran 3.7.5). Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SD/ sederajat di Indonesia sudah cukup merata, bahkan beberapa daerah memiliki APK SD/ sederajat yang lebih besar dari APK nasional. Jika ditelaah lebih jauh, Papua juga memiliki APK SM/ sederajat yang paling rendah dibandingkan provinsi lain (65,07 persen). Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada daerah yang memiliki partisipasi sekolah yang rendah, misalnya untuk provinsi Papua agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pendidikan masih menjadi hal utama yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan, mengingat kondisi geografis Papua yang berbukit-bukit menyebabkan banyak wilayah yang masih tertinggal.

Dari gambar 3.11 terlihat bahwa terdapat ketimpangan APK di setiap jenjang pendidikan antara penduduk yang mengalami disabilitas dan tidak mengalami disabilitas. APK SD/ sederajat penduduk dengan disabilitas dan tanpa disabilitas cenderung tidak terdapat perbedaan, namun seiring meningkatnya jenjang pendidikan, kesenjangan tersebut

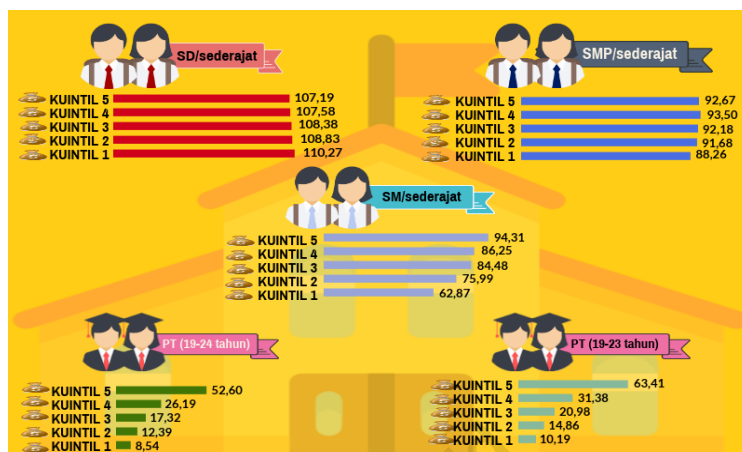
semakin melebar. APK PT 19-24 tahun penduduk bukan penyandang disabilitas 2,6 kali lebih besar dibandingkan APK PT/ sederajat penduduk penyandang disabilitas (25,28 persen berbanding 9,59 persen). Terlihat pula bahwa perbedaan yang cukup jauh antara APK PT 19-23 tahun bukan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas yaitu 30,39 persen berbanding 11,35 persen.

Ekonomi suatu rumah tangga berperan penting dalam menentukan pendidikan anggota rumah tangga tersebut, walaupun dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lainnya. Mengingat bahwa di negara kita, pendidikan 'gratis' yang sebenarnya belum dapat terlaksana. Walaupun biaya di beberapa jenjang pendidikan sudah mulai ditiadakan, tapi kenyataannya pendidikan memang membutuhkan biaya ekstra dari sisi seragam, buku pelajaran, dan berbagai penunjang lain. Sehingga proses pendidikan anggota rumah tangga dapat ikut terhenti ketika perekonomian rumah tangga tersebut tersendat. Apalagi biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang semakin hari semakin meningkat, mengakibatkan rumah tangga dengan ekonomi rendah semakin sulit dalam memenuhi biaya pendidikan anggota rumah tangganya.

Tidak bisa ditampik bahwa tinggi rendahnya status ekonomi rumah tangga akan memengaruhi proses pendidikan seorang anak. Bayangkan saja jika sebuah keluarga yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah mengalami kesulitan, akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang juga cukup tinggi. Masing-masing keluarga tentu mempunyai kapasitas berbeda, termasuk untuk membiayai pendidikan anggota rumah tangganya.

Hasil olah Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan antar penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi APK pada setiap jenjang pendidikan. Kesenjangan tersebut juga semakin

Gambar 3.12 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018



APK perguruan tinggi memiliki kesenjangan paling tinggi antara kelompok ekonomi terbawah (Kuintil 1) dan teratas (Kuintil 5)

meningkat seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Kesenjangan yang paling besar terlihat pada jenjang PT kelompok umur 19-24 tahun, pada kuintil 1 (status ekonomi rumah tangga terendah) APK PT hanya sebesar 8,54 persen, sedangkan pada kuintil 5 (status ekonomi tertinggi) APK PT mencapai 52,60 persen. Hal ini dijelaskan dengan semakin meningkatnya kebutuhan finansial di bidang pendidikan seiring meningkatnya jenjang pendidikan tersebut. Hal ini tentunya harus menjadi catatan tersendiri bagi para pemangku kebijakan untuk menekan biaya pendidikan, khususnya pada jenjang PT.

Hal menarik terlihat bahwa pada kategori SD/ sederajat, semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, maka nilai APK SD/ sederajat perlahan-lahan semakin menurun. Pada kelompok kuintil 1 (status ekonomi terendah) APK SD/ sederajat mencapai 110,27 persen, sedangkan pada kuintil 5 (status ekonomi tertinggi) APK SD/ sederajat hanya mencapai 107,19 persen. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui definisi APK itu sendiri terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APK yang semakin mendekati 100 persen menggambarkan semakin besar persentase anak yang sekolah sesuai rentang usia jenjang pendidikan yang bersesuaian. Dari

pengertian tersebut, dapat dimungkinkan bahwa pada kuintil 1 masih terdapat orang tua yang menyekolahkan anaknya di jenjang SD meskipun usianya belum mencapai usia sekolah, masih banyak kejadian siswa telat mendaftarkan sekolah, dan terdapatnya pengulangan kelas pada jenjang pendidikan tersebut. Di sisi lain, pada kuintil 5 orang tua lebih banyak yang telah memilih untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang usia yang bersesuaian, termasuk orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya yang berusia 6 tahun ke PAUD sebelum memasukkan ke sekolah dasar pada tahun berikutnya.

Angka Partisipasi Murni












Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM) yang mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Gambar 3.13 memperlihatkan APM jenjang pendidikan SD sampai dengan APM jenjang PT. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Namun, jika disandingkan dengan target capaian dari APM SD/MI yang terdapat di dalam RPJMN tahun 2015-2019, nilai capaian APM SD/ sederajat pada tahun 2018 telah melampaui target RPJMN tahun 2019 yaitu sebesar 97,58 persen melampaui 91,3 persen yang merupakan target tahun berakhirnya RPJMN 2015-2019.

Dapat dilihat bahwa pola APM memiliki kemiripan dengan pola APK pada tahun 2018. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 97,58 persen kemudian semakin menurun

seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, APM untuk setiap jenjang pendidikan laki-laki dan perempuan cenderung sama dan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Menurut wilayah tempat tinggal, APM perkotaan dan perdesaan terdapat sedikit perbedaan yang seiring meningkatnya jenjang pendidikan perbedaan tersebut juga semakin besar, namun hal ini tidak terlihat pada APM SD/ sederajat di perkotaan dan perdesaan yang memiliki nilai cenderung sama.

Gambar 3.13 Angka Partisipasi Murni (APM), 2018

	 SD/ sederajat	 SMP/ sederajat	 SM/ sederajat	 Perguruan Tinggi (19-24 tahun)	 Perguruan Tinggi (19-23 tahun)
TOTAL	97,58	78,84	60,67	18,59	20,94
 Laki-laki	97,79	78,18	59,74	17,33	19,32
 Perempuan	97,37	79,55	61,64	19,89	22,62
 Perkotaan	97,74	80,61	64,65	24,75	27,79
 Perdesaan	97,40	76,86	55,93	10,12	11,40
 Non Disabilitas	97,64	79,10	61,00	18,70	21,08
 Disabilitas	89,81	48,78	24,74	7,74	8,70

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Disparitas keadaan disabilitas terlihat dari nilai APM di setiap jenjang pendidikan. Kesenjangan tertinggi terdapat pada jenjang SM/ sederajat, yaitu APM SM/ sederajat penyandang disabilitas sebesar 24,74 persen dibandingkan APM SM/ sederajat bukan penyandang disabilitas sebesar 61 persen. Hal ini menandakan bahwa 3 dari 5 penduduk bukan penyandang disabilitas usia 16-18 tahun masih bersekolah SM/ sederajat, sedangkan di antara 4 orang penyandang disabilitas usia 16-18 tahun, hanya 1 di antaranya yang masih bersekolah SM/ sederajat. Pada kenyataannya angka ini belum sejalan dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa terkecuali, termasuk juga

penyandang disabilitas. Hal ini yang harus terus menjadi perhatian semua pihak agar keadilan untuk semua dalam dunia pendidikan dapat tercapai.

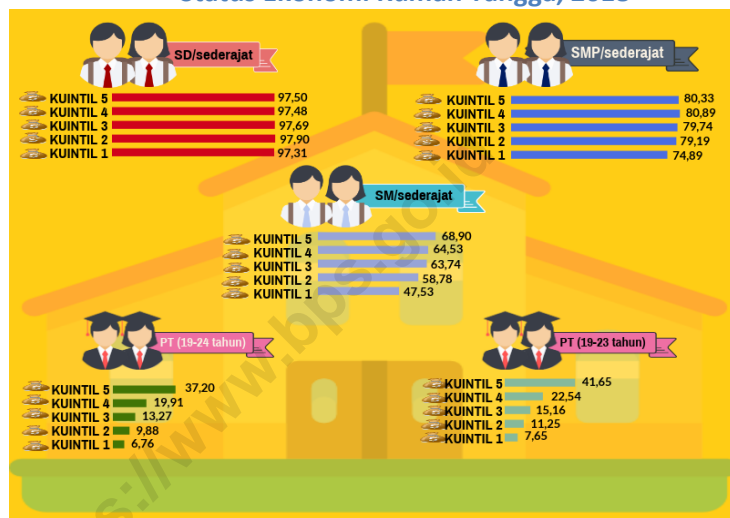
Pada tahun 2018, APM antar jenjang pendidikan memiliki kemiripan pola dengan APK yaitu jenjang pendidikan SD/ sederajat menghasilkan APM paling tinggi dari seluruh jenjang pendidikan, yaitu sebesar 97,58 persen. Kondisi APM SD/ sederajat (seperti yang telah dipaparkan sebelumnya) telah melampaui target RPJMN 2019, sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada nilai APM dari jenjang SMP/ sederajat dan SM/ sederajat yang memiliki target sebesar 82 persen dan 67,5 persen pada tahun 2019. Namun demikian, masih terdapat waktu hingga satu tahun ke depan untuk menjalankan dan mengevaluasi pembangunan pendidikan yang sudah dirancang demi mengejar ketertinggalan.

Kesenjangan APM antara perdesaan dan perkotaan semakin terlihat seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan paling tinggi terlihat pada jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu persentase APM daerah perkotaan lebih tinggi dari perdesaan dengan perbedaan yang mencapai lebih dari 14 persen (24,75 persen berbanding 10,12 persen) untuk kelompok umur 19-24 tahun dan lebih dari 16 persen (27,79 persen berbanding 11,4 persen) untuk kelompok umur 19-23 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa APM perempuan pada jenjang SMP/ sederajat ke atas lebih tinggi dibandingkan APM laki-laki, walaupun perbedaannya tidak lebih dari tiga persen. Jika dilihat berdasarkan status ekonomi rumah tangga, APM untuk setiap jenjang pendidikan meningkat seiring semakin meningkatnya status ekonomi rumah tangga yang ditandai dengan kuintil yang lebih tinggi.

Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, terlihat pola searah yang cenderung meningkat pada APM seiring semakin tingginya perekonomian rumah tangga. Hal ini terjadi hampir pada setiap jenjang pendidikan, kecuali APM SD/ sederajat yang

memiliki pola berbeda. Pada rentang SD/ sederajat, kuintil 2 memiliki APM yang paling tinggi diantara kuintil lainnya yaitu sebesar 97,90 persen, sedangkan kuintil 1 (status ekonomi rumah tangga terendah) sama dengan jenjang pendidikan lainnya yang memiliki APM SD/ sederajat terendah yaitu 97,31 persen.

Gambar 3.14 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018



APM SD/ Sederajat pada status ekonomi **kuintil 2** bernilai paling **besar** dibandingkan kelompok kuintil lainnya

Tabel 3.3 memperlihatkan rasio APM pada masing-masing jenjang pendidikan. Rasio APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, yaitu sebesar 99,57 persen. Angka ini semakin meningkat seiring semakin tingginya jenjang pendidikan rasio APM jenjang SMP/ sederajat sebesar 101,76 persen, untuk jenjang SM/ sederajat 103,2 persen, dan untuk jenjang PT sebesar 114,78 persen.

Sesuai prinsip fundamental dan pengarusutamaan gender yang diusung dalam target pencapaian SDGs 2030, kesetaraan gender juga diperlukan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan dasar. Rasio APM digunakan untuk melihat apakah pencapaian kesetaraan gender dalam aspek pendidikan telah terpenuhi atau belum. Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Nilai rasio APM sebesar 100

persen menunjukkan APM perempuan sama dengan APM laki-laki, artinya kesetaraan gender sudah terwujud.

Tabel 3.3 Rasio APM, 2018

Karakteristik Demografi	Rasio APM				
	SD	SMP	SM	PT	PT1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	99,57	101,76	103,19	114,78	117,11
Perkotaan	99,39	100,42	101,06	112,55	114,51
Perdesaan	99,77	103,33	105,57	119,64	122,48

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Rasio APM SD/ sederajat yang belum mencapai angka 100 persen terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Artinya, penduduk laki-laki yang bersekolah tepat waktu di jenjang pendidikan SD/ sederajat lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Akan tetapi, seiring meningkatnya tingkat pendidikan, persentase perempuan yang bersekolah tepat waktu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Lebih dalam lagi, rasio APM penduduk di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Hal ini dimungkinkan oleh kecenderungan penduduk laki-laki di perdesaan yang lebih memilih meninggalkan bangku sekolah ketika menginjak usia yang cukup untuk bekerja.

mengurus rumah tangga
siswa dalam dunia kerja
KEGIATAN SISWA pekerja dan status pekerjaan
akses teknologi informasi dan komunikasi oleh siswa

Persentase siswa usia 10-24 th yang bekerja selama seminggu terakhir



7 dari 100 siswa usia 10-24 th bekerja

Bab 4

KEGIATAN SISWA

Bersekolah merupakan kegiatan yang menyita waktu terbanyak bagi siswa, khususnya yang bersekolah di jalur formal. Selain bersekolah, siswa dapat melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut dapat menunjang pendidikannya atau sebaliknya, melalaikannya dari tanggung jawab seorang siswa. Pada bab ini akan dibahas beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa seperti mengakses teknologi informasi dan komunikasi (telepon seluler, komputer, dan internet), bekerja, serta membantu mengurus rumah tangga.

Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Siswa

Pada era milenial ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang pesat bersinggungan dengan hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali siswa. Salah satu bentuk TIK yang familiar di tengah kaum pelajar adalah telepon seluler. Sekitar 67 persen siswa berusia 5-24 tahun menggunakan telepon seluler dalam tiga bulan terakhir (lihat Tabel 4.1).



Akses TIK oleh siswa usia 5-24 tahun di perkotaan lebih tinggi dibandingkan siswa di perdesaan

Penggunaan telepon seluler sudah lumrah di kalangan siswa. Bahkan pihak sekolah perlu membuat peraturan khusus yang melarang siswa membawa telepon seluler ke sekolah (<https://radarlombok.co.id>). Penggunaan telepon seluler pada saat jam pelajaran di sekolah dapat mengalihkan konsentrasi pelajar sehingga berdampak pada penurunan prestasi belajar (<http://lampung.tribunnews.com>). Selain itu, melalui telepon seluler siswa bisa mengakses berbagai konten negatif di dunia maya (<https://nasional.tempo.co>).

Penggunaan telepon seluler oleh siswa perkotaan lebih tinggi dibandingkan siswa di perdesaan. Sementara itu, semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga, semakin besar

siswa yang menggunakan telepon seluler, komputer, maupun internet. Dilihat dari status disabilitas, siswa yang memiliki gangguan fungsional lebih sedikit yang terpapar teknologi informasi dan komunikasi

Tabel 4.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi Selama 3 Bulan Terakhir, 2018

Karakteristik	Akses TIK		
	Menggunakan telepon seluler	Menggunakan komputer	Menggunakan internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	67,36	32,04	45,75
Tipe Daerah			
Perkotaan	72,41	41,14	55,36
Perdesaan	61,04	20,67	33,73
Jenis Kelamin			
Laki-laki	66,22	30,94	44,26
Perempuan	68,54	33,18	47,28
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga			
Kuintil 1	50,29	14,66	24,48
Kuintil 2	60,75	21,20	35,33
Kuintil 3	68,07	28,63	44,71
Kuintil 4	74,42	38,07	54,52
Kuintil 5	84,96	59,97	72,09
Status Disabilitas			
Non Disabilitas	67,50	32,13	45,88
Disabilitas	46,45	19,20	26,12
Jenjang Pendidikan			
SD/ sederajat	46,91	11,45	16,64
SMP/ sederajat	81,72	40,12	62,77
SM/ sederajat	94,05	59,68	85,52
PT	98,36	77,27	94,41



Siswa usia 5-24 tahun dengan disabilitas lebih sedikit yang terpapar teknologi informasi dan komunikasi

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar persentase siswa yang menggunakan telepon seluler. Angka pada tingkat pendidikan SD/ sederajat jauh di bawah tingkat pendidikan lain. Pada jenjang pendidikan

menengah dan tinggi hampir semua siswa menggunakan telepon seluler.

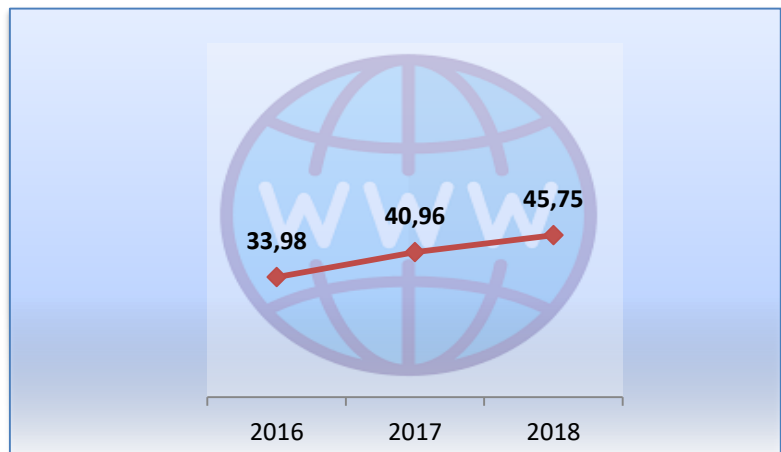
Sementara itu, penggunaan komputer (PC/Desktop, laptop, notebook, tablet) di kalangan siswa tidak terlalu besar. Sepertiga siswa menggunakan komputer dalam tiga bulan terakhir. Kontribusi terbesar yakni dari mahasiswa (perguruan tinggi), dimana sekitar 77 persen mahasiswa menggunakan komputer. Pada jenjang pendidikan perguruan tinggi sistem pembelajaran/perkuliahannya menuntut penggunaan komputer.

Era telepon pintar atau lazim disebut *smartphone* didukung dengan ketersediaan jaringan internet membuka akses informasi dan komunikasi yang cepat. Mudah-mudahan mengakses informasi mendorong sistem pengajaran menjadi lebih terbuka akan pengetahuan tambahan (wawasan) yang diperoleh dari luar bangku sekolah. Siswa pun bersinggungan dengan internet dalam kesehariannya, entah untuk menyelesaikan tugas sekolah ataupun untuk kepentingan lainnya.

Gambar 4.1 Perkembangan Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet, 2016-2018



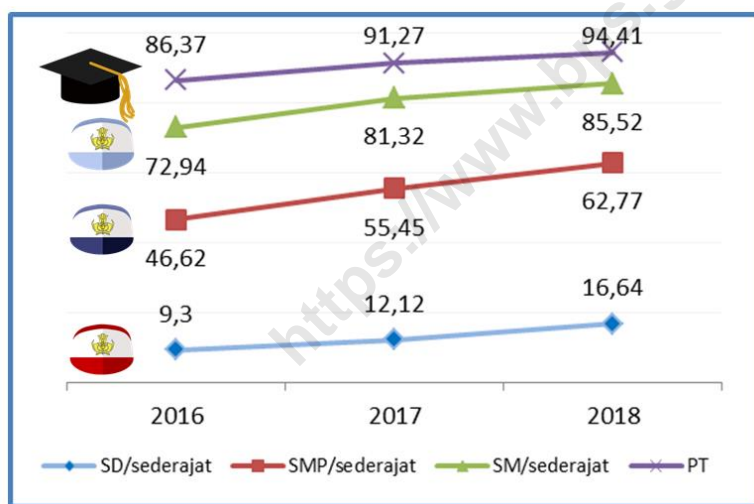
Persentase siswa usia 5-24 tahun yang menggunakan internet terus meningkat setiap tahun



Sumber : BPS, Susenas Maret 2016, 2017, 2018

Sejak 2016, siswa usia 5-24 tahun yang menggunakan internet terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu dari 33,98 persen pada tahun 2016 menjadi 45,75 persen pada tahun 2018 (lihat Gambar 4.1). Peningkatan ini juga terlihat pada semua jenjang pendidikan, termasuk SD (lihat Gambar 4.2). Hal ini menyiratkan internet bersinggungan dengan siapa saja, terlepas dari tuntutan tugas sekolah atau faktor lainnya. Adapun dilihat dari jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar persentase siswa yang menggunakan internet.

Gambar 4.2 Perkembangan Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Menurut Jenjang Pendidikan, 2016-2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2016, 2017, 2018

Internet bagai mata pisau. Di satu sisi internet memudahkan siswa untuk menambah wawasan yang mendukung materi pelajaran di sekolah. Di sisi lain aplikasi internet yang sifatnya *entertaining* cenderung melenakan sehingga menurunkan prestasi siswa di sekolah. Siswa yang menggunakan internet seyognya disikapi dengan bijak, misalnya dengan pendampingan orang tua.

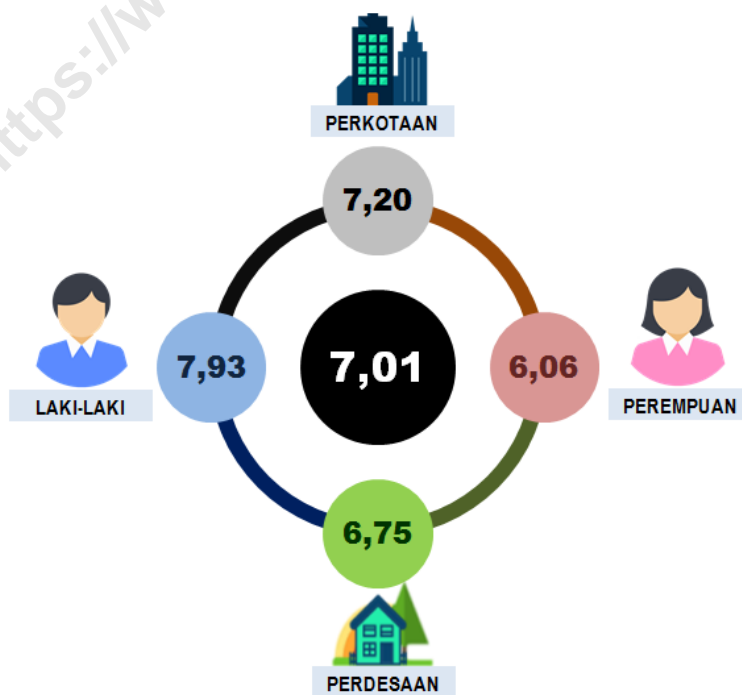
Siswa dalam Dunia Kerja

Bolehkah siswa bekerja? Jawabannya akan relatif berbeda masing-masing orang. Siswa yang tinggal di rumah tangga miskin terkadang harus turut serta mencari nafkah demi membantu perekonomian keluarga. Siswa yang bekerja harus membagi waktunya untuk sekolah, belajar di rumah, dan bekerja. Jika waktu mereka habis digunakan untuk bekerja, mereka akan ketinggalan pelajaran di sekolah atau bahkan meninggalkan bangku sekolah. Faktanya, siswa usia 13-15 tahun dibolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial serta tidak mengganggu waktu sekolah. Hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69.



7 dari 100 siswa
usia 10-24 tahun
bekerja selama
seminggu terakhir

Gambar 4.3 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir, 2018

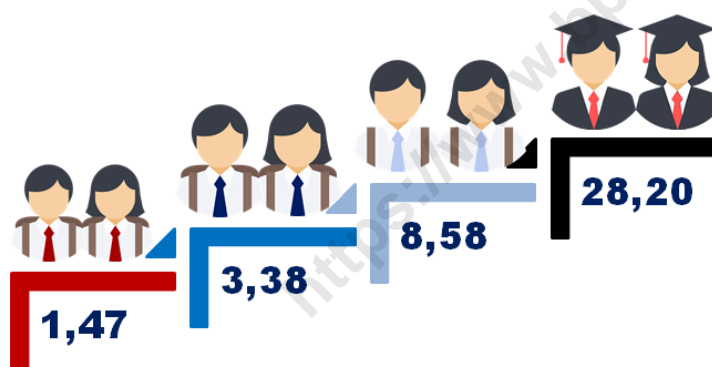


Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Sekitar 7 dari 100 siswa usia 10-24 tahun bekerja selama seminggu terakhir. Angka ini relatif sama baik di perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, persentase siswa laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan siswa perempuan (7,93 persen berbanding 6,06 persen).

Adapun dari aspek jenjang pendidikan, sedikitnya 1 dari 100 siswa SD bekerja. Pada jenjang pendidikan SM dan PT dimana dari segi usia sudah cukup matang dan mandiri, angkanya semakin besar. Sedikitnya 1 dari 4 mahasiswa bekerja selama seminggu terakhir.

Gambar 4.4 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Fenomena mahasiswa yang bekerja merupakan hal yang lumrah. Di Inggris, penelitian yang dilakukan oleh *Endsleigh and the National Union of Students* mengungkapkan alasan mahasiswa Inggris yang bekerja. Selain untuk meringankan biaya kuliah, sebagian besar dari mereka bekerja untuk mengembangkan keterampilan tambahan dan memperkaya *Curriculum Vitae* (CV) mereka (<https://www.bbc.com>).

Di Indonesia sendiri motivasi mahasiswa bekerja tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian di Inggris. Penelitian yang dilakukan oleh pihak lain di Yogyakarta menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa melakukan kerja paruh waktu adalah



Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar persentase siswa yang bekerja

berusaha membuktikan bahwa mahasiswa dapat mandiri sebagai implementasi dari proses pendewasaannya. Motivasi lainnya adalah mencari pengalaman sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja dan untuk membantu biaya kuliah maupun kebutuhan lainnya (Kurniawati, 2007).

Dilihat dari lapangan pekerjaan, lebih dari separuh siswa yang bekerja, bekerja di bidang jasa. Jenis lapangan usaha yang termasuk jasa antara lain perdagangan, baik besar maupun eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, hiburan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Lapangan usaha tersebut cenderung membuka kesempatan kerja tanpa memperhatikan keterampilan calon pekerjanya. Hal ini membuka peluang yang besar bagi siswa yang ingin bekerja.

Tabel 4.2 Siswa yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama, 2018



Lapangan usaha di bidang jasa menampung lebih banyak siswa yang bekerja

Karakteristik	Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	22,13	19,52	58,35
Tipe Daerah			
Perkotaan	5,04	22,87	72,09
Perdesaan	45,98	14,85	39,17
Jenis Kelamin			
Laki-laki	27,71	21,28	51,02
Perempuan	14,60	17,16	68,24

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Sementara itu, hampir separuh siswa yang bekerja di perdesaan masuk ke dalam sektor pertanian. Adapun di perkotaan, mayoritas siswa bekerja di bidang jasa. Persentase siswa yang bekerja pada bidang manufaktur jauh lebih besar di perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Siswa Pekerja dan Status Pekerjaan

Secara umum, separuh siswa usia 10-24 tahun yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan. Sekitar 28 persen siswa bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Pola yang sama terlihat baik pada siswa laki-laki maupun perempuan.

Dilihat dari tipe daerah, hampir 70 persen siswa bekerja sebagai buruh di perkotaan. Hanya kurang dari 15 persen sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Sebaliknya, hampir separuh siswa yang bekerja di perdesaan berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Hal ini sejalan dengan dominasi lapangan usaha pertanian di perdesaan, dimana bidang pertanian umumnya mengandalkan anggota keluarga untuk menekan ongkos produksi.



Sebagian besar siswa bekerja sebagai buruh/karyawan

Tabel 4.3 Siswa yang Bekerja Menurut Status/Kedudukan Pekerjaan Utama, 2018

Karakteristik	Status/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama				
	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh	Buruh/Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja keluarga/tidak dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	9,00	1,89	54,41	6,00	28,71
Tipe Daerah					
Perkotaan	9,89	1,52	68,94	5,12	14,52
Perdesaan	7,75	2,39	34,14	7,22	48,50
Jenis Kelamin					
Laki-laki	9,27	2,34	50,77	8,61	29,01
Perempuan	8,63	1,27	59,33	2,48	28,29
Jenjang Pendidikan					
SD/ sederajat	5,91	0,04	12,62	7,27	74,16
SMP/ sederajat	6,25	1,27	23,14	8,48	60,86
SM/ sederajat	7,33	2,03	51,77	6,15	32,73
PT	11,36	2,25	71,52	4,98	9,89

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

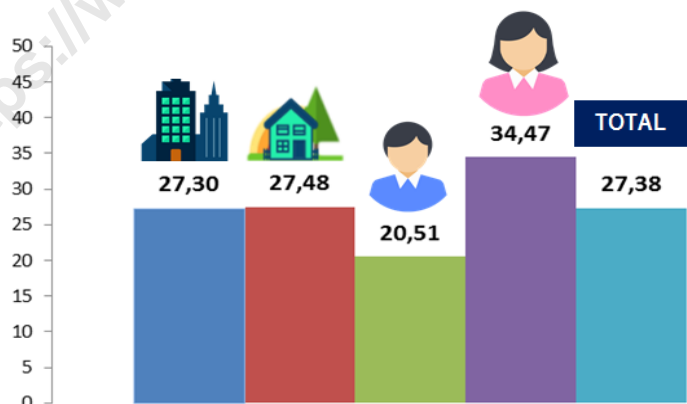
Sementara itu, dari siswa SD/ sederajat yang bekerja, sebagian besar dari mereka (74,16 persen) adalah pekerja

keluarga/tidak dibayar. Pola yang sama juga terlihat di jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Namun seiring bertambahnya tingkat pendidikan, semakin menurun persentase siswa yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan semakin besar persentase siswa yang bekerja sebagai buruh/karyawan.

Siswa dalam Kegiatan Mengurus Rumah Tangga

Kegiatan siswa lainnya adalah membantu mengurus rumah tangga. Makna mengurus rumah tangga bisa positif dan negatif. Positif bila dilakukan di luar jam sekolah dan bertujuan untuk membantu tanpa mengabaikan urusan sekolah. Sebaliknya, akan bernilai negatif jika menyita waktu sehingga mengorbankan kewajiban sebagai siswa.

Gambar 4.5 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir, 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018



1 dari 3 siswa perempuan usia 10-24 tahun mengurus rumah tangga selama seminggu terakhir

Hasil Susenas 2018 menunjukkan sedikitnya 1 dari 4 siswa usia 10-24 tahun mengurus rumah tangga, baik di perkotaan maupun perdesaan. Adapun dilihat dari jenis kelamin, persentase siswa perempuan yang mengurus rumah tangga lebih besar dibandingkan siswa laki-laki. Hal ini sesuai dengan paradigma masyarakat Indonesia yang menilai pekerjaan rumah tangga merupakan ranah perempuan.

rata-rata lama sekolah
angka **HASIL DAN**
melek huruf **CAPAIAN**
hasil **PROSES** pendidikan tingkat
angka **PENDIDIKAN**
putus sekolah

5

AMH 95,66
15+ persen



☞ masih ada **5** dari **100**
penduduk usia 15 tahun ke atas yang
tidak bisa baca/tulis ☞



8,58 RLS
tahun **15+**

rata-rata lama sekolah
penduduk usia
15 tahun ke atas
setara dengan
kelas 2 SMP/ sederajat

Bab 5

HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berperan sebagai katalisator pembangunan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia mengalami pergeseran. Dulu, ketika negeri ini baru memproklamkan kemerdekaannya di masa orde lama, tujuan pembangunan pendidikan adalah menanamkan jiwa patriotisme, mengingat saat itu Indonesia baru terlepas dari penjajahan yang kasat mata. Kemudian, di masa pemerintahan orde baru tujuan tersebut beralih untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang menekankan pada kuantitas pembangunan yang fokusnya pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Kini setelah 73 tahun Indonesia merdeka, pembangunan pendidikan Indonesia sudah mulai menekankan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia, seperti yang tertera pada Nawacita ke lima. Adapun beberapa sasaran pembangunan pendidikan yang ingin dicapai pada RPJMN 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah sebagaimana tersebut dalam Renstra Kemdikbud 2015-2019;
2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antar daerah;

Guna mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan target yang harus

dicapai setiap tahunnya selama 2015-2019. Sehingga tujuan pembangunan pendidikan dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua dapat tercapai.

Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian pembangunan yang digunakan dalam buku ini, antara lain : Angka Melek Huruf (AMH) penduduk kelompok umur muda dan dewasa, angka naik kelas, angka mengulang, angka bertahan kelas 5 SD/ sederajat, angka melanjutkan, angka putus sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas dan tingkat kelulusan sekolah.

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan persentase penduduk yang mampu membaca dan sekaligus menulis minimal dalam kalimat sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. AMH diharapkan dapat mengukur seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu AMH menjadi salah satu indikator pencapaian target SDGs, yang menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tahun ini, AMH 15 tahun ke atas mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 95,66 persen. Meskipun demikian, besaran ini belum dapat memenuhi target dari Renstra Kemendikbud yang besarnya mencapai 96,59 persen pada tahun 2018 serta target dari RPJMN yang besarnya pada tahun 2019 minimal mencapai 96,1 persen. Hal ini mengingat adanya penduduk lansia pada



Perlu upaya lebih
keras untuk
membebaskan
penduduk dari
buta aksara

kelompok umur tersebut yang sulit terjangkau dalam program keaksaraan fungsional mengingat program tersebut dilaksanakan khusus usia 15-59 tahun.



Penyandang disabilitas menjadi kelompok dengan AMH paling rendah

Akan tetapi, kita cukup bangga dengan pencapaian AMH usia 15-59 tahun yang telah melampaui besaran yang ditargetkan oleh Renstra Kemendikbud tahun 2018. Melalui pencapaian ini, diharapkan kemampuan literasi penduduk Indonesia terhadap informasi yang tersedia semakin meningkat tajam, tidak hanya sekedar membaca tanpa meresapi dan memahami apa yang mereka baca. Dalam pembangunan berkelanjutan, kemampuan literasi penduduk bersifat *multiple effect*, di mana hal tersebut akan berdampak terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, misalnya pemberantasan kemiskinan, penurunan angka kematian, dan sebagainya.

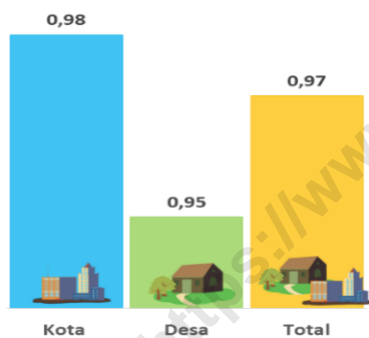
Tabel 5. 1 Angka Melek Huruf (AMH), 2018

Karakteristik	Kelompok Umur (tahun)		
	15-24	15-59	15+
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	99,71	98,07	95,66
Tipe Daerah			
Perkotaan	99,93	99,18	97,56
Perdesaan	99,42	96,67	93,30
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,72	98,70	97,33
Perempuan	99,70	97,44	93,99
Status Disabilitas			
Non Disabilitas	99,77	98,19	96,34
Disabilitas	93,21	91,04	76,67
Status Ekonomi			
Kuintil 1	99,35	96,01	90,85
Kuintil 2	99,72	97,71	94,73
Kuintil 3	99,76	98,27	96,16
Kuintil 4	99,79	98,55	97,05
Kuintil 5	99,86	99,40	98,78

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Berdasarkan Tabel 5.1, tiga hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam memacu peningkatan AMH 15 tahun ke atas yakni penduduk di perdesaan, penduduk perempuan dan penyandang disabilitas. Sementara itu, sebaran AMH menurut provinsi menunjukkan bahwa rata-rata 9 dari 10 penduduk di masing-masing provinsi sudah melek huruf, kecuali di provinsi Papua. 8 dari 10 penduduk penduduk Papua pada kelompok umur 15-24 tahun sudah melek huruf. Namun pada kelompok umur 15-59 dan 15 tahun ke atas, angka melek huruf tersebut lebih rendah lagi, khususnya terlihat di Papua perdesaan yang secara rata-rata baru 7 dari 10 penduduknya yang melek huruf (Lampiran Tabel 5.1).

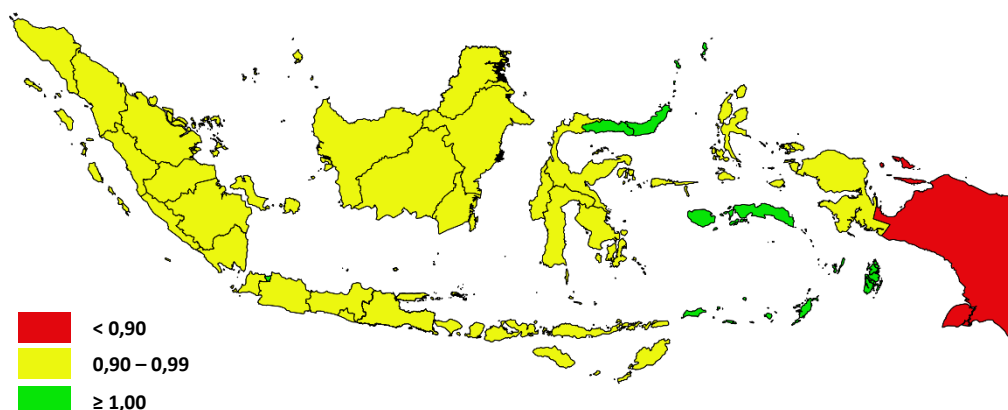
Gambar 5.1 Rasio Angka Melek Huruf (AMH), 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Rasio Angka Melek Huruf menunjukkan perbandingan AMH antara penduduk perempuan dan laki-laki. Gambar 5.1 menunjukkan bahwa rasio AMH hanya sedikit menunjukkan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut sedikit lebih lebar di perdesaan. Hal ini terjadi di beberapa provinsi, namun di Provinsi Papua wilayah perdesaan ketimpangan tersebut lebih nyata terlihat (Lampiran Tabel 5.2). Sementara itu pada Gambar 5.2 terlihat bahwa, ada empat provinsi yang sudah setara AMH penduduk perempuan dan laki-laki, yakni Gorontalo, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Maluku artinya penduduk laki-laki dan perempuan memiliki capaian yang sama dalam hal literasi aksara.

Gambar 5.2 Rasio Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Hasil Proses Pendidikan

Capaian proses pendidikan penduduk yang masih bersekolah dapat diukur melalui angka mengulang, angka naik kelas, angka bertahan dan angka melanjutkan. Berdasarkan hasil Susenas 2018, angka naik kelas untuk siswa kelas 6 SD/ sederajat sudah lebih dari 95 persen. Angka naik kelas siswa SD/ sederajat di perkotaan sedikit lebih rendah dibandingkan di perdesaan. Sementara itu, siswa perempuan SD/ sederajat yang naik kelas relatif lebih tinggi dari laki-laki.

Tabel 5.2 Angka Naik Kelas, 2018

Karakteristik	Naik ke Kelas								
	2 SD	3 SD	4 SD	5 SD	6 SD	8 SMP	9 SMP	11 SMA	12 SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	93,08	94,54	94,91	94,17	95,35	96,01	93,97	92,40	92,59
Tipe Daerah									
Perkotaan	93,18	94,49	95,36	94,15	94,94	97,05	94,94	93,47	93,77
Perdesaan	92,97	94,60	94,41	94,19	95,79	94,85	92,80	90,99	90,78
Jenis Kelamin									
Laki-laki	93,05	94,50	95,06	94,21	94,94	95,44	93,19	91,71	92,10
Perempuan	93,12	94,59	94,74	94,13	95,75	96,62	94,76	93,12	93,07

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Angka naik kelas juga dapat mencerminkan kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses belajar. Tabel 5.2 menunjukkan persentase siswa yang naik ke kelas 8 SMP (96,01 %) lebih tinggi dibandingkan persentase siswa yang naik ke kelas 9 SMP (93,97 %). Pola berbeda terjadi pada jenjang SM/Sederajat, di mana siswa yang naik ke kelas 11 SMA lebih rendah dibandingkan siswa yang naik ke kelas 12 SMA. Kemungkinan hal ini terjadi karena para siswa SMP tersebut berada pada fase remaja awal (13-15 tahun) yang dalam proses perkembangan psikologinya mengalami proses adaptasi terhadap lingkungan dan cara belajar. Secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh terhadap capaian proses belajar yang sedang ditempuh.

Selain angka naik kelas, Susenas juga menggambarkan angka mengulang, yang didefinisikan sebagai proporsi siswa yang terdaftar pada suatu tingkat kelas di tahun tertentu dan menduduki kelas yang sama di tahun berikutnya, atau bisa disebut proporsi siswa yang tinggal kelas.

Tabel 5.3 Angka Mengulang, 2018

Karakteristik	Jenjang Pendidikan		
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	4,66	3,17	3,00
Tipe Daerah			
Perkotaan	4,70	2,85	2,73
Perdesaan	4,62	3,55	3,43
Jenis Kelamin			
Laki-laki	4,65	3,31	3,16
Perempuan	4,68	3,03	2,85

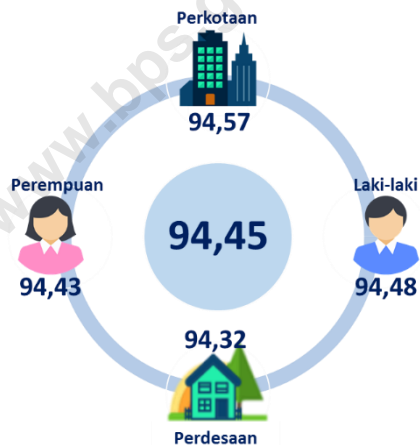
Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Proporsi siswa yang tinggal kelas pada jenjang pendidikan SD/ sederajat lebih besar dibandingkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Proporsi siswa yang tinggal kelas, baik di

perkotaan maupun perdesaan, laki-laki maupun perempuan menunjukkan besaran persentase yang relatif sama (Tabel 5.3).

Indikator lain yang juga dapat menggambarkan capaian proses pendidikan di Indonesia adalah angka bertahan SD/ sederajat yang menunjukkan potensi anak yang baru masuk SD/ sederajat untuk dapat bertahan sampai dengan kelas lima. Angka bertahan SD/ sederajat juga digunakan untuk memantau pelaksanaan pendidikan dasar yang universal. Angka yang mendekati 100 menunjukkan tingginya tingkat bertahan dan rendahnya kejadian putus sekolah di jenjang SD/ sederajat (UNESCO, 2009).

Gambar 5.3 Angka Bertahan Kelas 5 SD/ Sederajat, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Potensi anak Indonesia untuk mencapai kelas 5 SD/ sederajat sudah lebih dari 90 persen. Pada tahun 2018, sedikitnya 94 dari 100 anak yang baru masuk SD/ sederajat dapat bertahan untuk tetap bersekolah sampai dengan kelas lima. Apabila dilihat menurut agregasi spasial, potensi anak untuk mencapai kelas lima SD/ sederajat relatif tidak jauh berbeda antara perkotaan dan perdesaan, demikian juga antara laki-laki dan perempuan.

Persentase anak sekolah yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi digambarkan melalui

indikator angka keberlanjutan pendidikan. Angka melanjutkan memberikan informasi terkait akses atau transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan menjadi indikator output jika dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih rendah, dan menjadi indikator input apabila dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka melanjutkan sekolah juga menggambarkan adanya seleksi oleh suatu sistem pendidikan karena faktor keilmuan maupun faktor ekonomi.

Tabel 5.4 Angka Melanjutkan, 2018

Karakteristik	Jenjang Pendidikan	
	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)
Total	93,47	85,50
Tipe Daerah		
Perkotaan	94,39	87,82
Perdesaan	92,48	82,81
Jenis Kelamin		
Laki-laki	94,10	85,08
Perempuan	92,77	85,93

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Angka melanjutkan ke jenjang SMP sebesar 93,47 persen dan jenjang SMA sebesar 85,52 persen. Capaian tersebut sudah memenuhi target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam Renstra periode 2015-2019 yang menargetkan angka melanjutkan ke jenjang SMP sebesar 83,64 persen dan SMA sebesar 82 persen (Tabel 5.4).

Perbedaan angka melanjutkan di perdesaan dan perkotaan memberikan gambaran bahwa masih ada perbedaan kemudahan akses pendidikan antara perkotaan dan perdesaan. Tabel 5.5 juga menunjukkan bahwa faktor akses tersebut semakin nyata terlihat seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil persentase

penduduk yang melanjutkan sekolah dan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan juga terlihat melebar.

Angka Putus Sekolah



Semakin Tinggi
Jenjang
Pendidikan,
Semakin Banyak
Siswa Putus
Sekolah

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah. Renstra Kemendikbud memiliki target angka putus sekolah hanya sebesar satu persen pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA). Jenjang pendidikan SD sudah mencapai target tersebut (0,51 persen), sementara angka putus sekolah SMP maupun SMA masih belum dapat mencapai target tersebut (1,67 persen dan 2,94 persen).

Tabel 5.5 Angka Putus Sekolah, 2018

Karakteristik	Jenjang Pendidikan		
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	0,51	1,67	2,94
Tipe Daerah			
Perkotaan	0,45	1,13	2,24
Perdesaan	0,59	2,30	4,05
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,59	2,17	3,19
Perempuan	0,44	1,15	2,69





Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.5 menunjukkan pola bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Pada tahun 2018, lima dari 1000 anak SD putus sekolah. Namun angka tersebut semakin besar pada jenjang SM/Sederajat, dimana 29 dari 1000 anak SM/Sederajat putus sekolah.

Sejalan dengan angka melanjutkan, angka putus sekolah di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Selisih angka perkotaan dan perdesaan semakin besar seiring

meningkatnya jenjang pendidikan. Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan pada seluruh jenjang pendidikan.

Gambar 5.4 Persentase Anak Tidak Bersekolah, 2018

	7-12	13-15	16-18
 PERKOTAAN	0,38 %	3,54 %	23,95 %
 PERDESAAN	1,22 %	5,87 %	32,84 %
 LAKI-LAKI	0,83 %	5,49 %	29,02 %
 PEREMPUAN	0,73 %	3,74 %	26,96 %
TOTAL	0,78 %	4,64 %	28,01 %

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

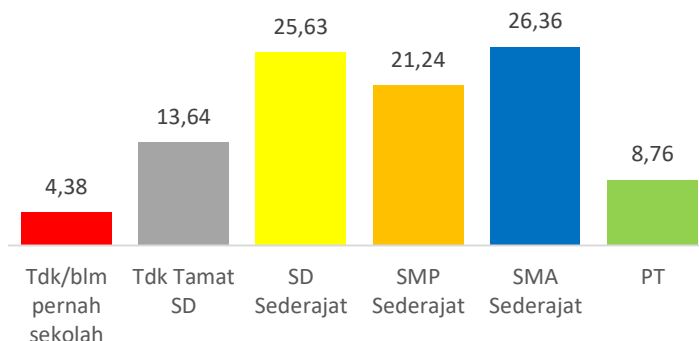
Semakin bertambahnya umur, maka persentase anak yang tidak bersekolah semakin meningkat. Persentase anak yang tidak bersekolah lebih banyak dijumpai pada wilayah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Sementara itu, persentase anak laki-laki yang tidak bersekolah lebih besar dibandingkan perempuan.

Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia mencapai pendidikan menengah. Data Susenas menunjukkan bahwa hanya satu dari empat penduduk 15 tahun ke atas telah tamat SM/Sederajat, dan hanya sekitar delapan persen yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Sepuluh
Penduduk Umur
15 Tahun ke Atas
Minimal Tamat
SMP

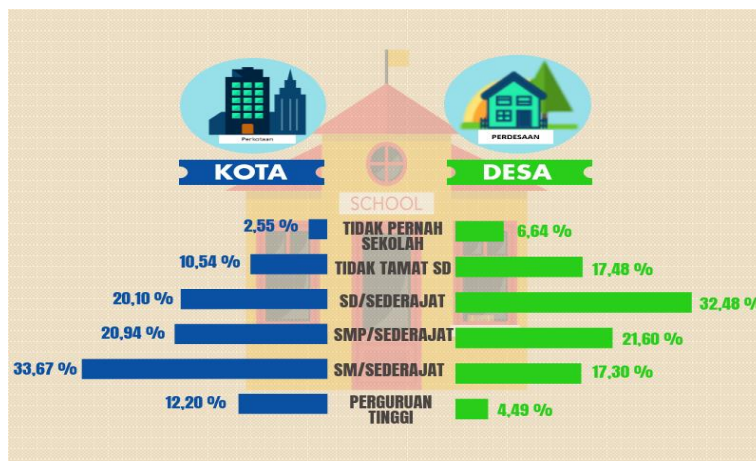
Gambar 5.5 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%), 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan perdesaan terlihat pada Gambar 5.6. Persentase penduduk di perdesaan yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat Sekolah Dasar lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk di perdesaan sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar (32,48 persen), sedangkan sebagian besar penduduk perkotaan telah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SM/Sederajat (33,67 persen).

Gambar 5.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Tipe Daerah, 2018

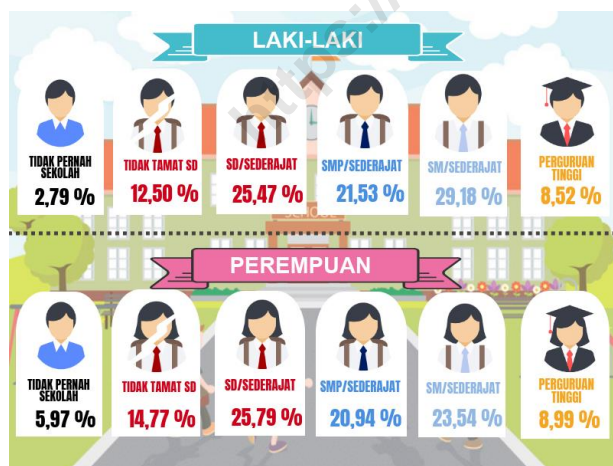


Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan juga masih menunjukkan adanya kesenjangan. Hal ini terlihat dari lebih tingginya proporsi penduduk perempuan dibandingkan laki-laki yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD (Gambar 5.7). Sementara, pada jenjang SMP dan SMA terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki yang tamat SMP/ sederajat dan SM/ Sederajat lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan dengan kesenjangan yang cukup nyata pada tamatan SM/ Sederajat (29,18 persen dan 23,54 persen).

Kesenjangan ini terjadi karena penghitungan angka tingkat pendidikan juga melibatkan penduduk dewasa dan tua, di mana pada masa lalu, perempuan memang memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Hal tersebut tidak terjadi lagi saat ini, yang ditandai dengan angka partisipasi yang relatif berimbang antara laki-laki dengan perempuan.

Gambar 5.7 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Sebagaimana tujuan pembangunan pendidikan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, maka pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh umur, tempat, dan waktu. Salah

satunya pemerintah juga harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan ekonomi.

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa status ekonomi masih membedakan capaian tingkat pendidikan penduduk. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan. Pada jenjang pendidikan SMA ke atas, ketimpangan pendidikan antara status ekonomi terbawah (kuintil 1) dan teratas (kuintil 5) nyata terlihat. Bahkan, kesenjangan tersebut semakin melebar pada jenjang Perguruan Tinggi. Sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, bahwa persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tamat PT dari rumah tangga dengan status ekonomi teratas (kuintil 5) jauh lebih besar dibanding rumah tangga dengan status ekonomi terbawah (kuintil 1), yaitu 23,98 persen berbanding 1,58 persen.

Tabel 5.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Disabilitas, 2018

Karakteristik	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelompok Pengeluaran						
Kuintil 1	8,50	19,67	34,35	21,17	14,74	1,58
Kuintil 2	5,41	15,98	31,59	23,59	20,72	2,72
Kuintil 3	4,01	13,74	27,51	23,61	26,41	4,72
Kuintil 4	3,05	12,09	23,47	21,93	30,84	8,63
Kuintil 5	1,58	7,83	13,31	16,40	36,90	23,98
Status Disabilitas						
Non Disabilitas	3,71	13,02	25,68	21,67	26,95	8,97
Disabilitas	22,86	30,92	24,31	9,13	9,89	2,90

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya.

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Begitu juga yang terjadi pada kalangan penyandang disabilitas, dimana sebagian besar dari mereka masih mendominasi di tingkat pendidikan rendah (tidak tamat SD/sederajat, dan tidak/belum pernah sekolah) yang

besarannya melebihi 50 persen. Dibandingkan dengan tingkat pendidikan penduduk 15 tahun ke atas yang bukan penyandang disabilitas terlihat bahwa kesenjangan tingkat pendidikan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas melebar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa diharapkan mampu merangkul erat para generasi penerus bangsa penyandang disabilitas untuk ikut serta berpartisipasi dalam dunia pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

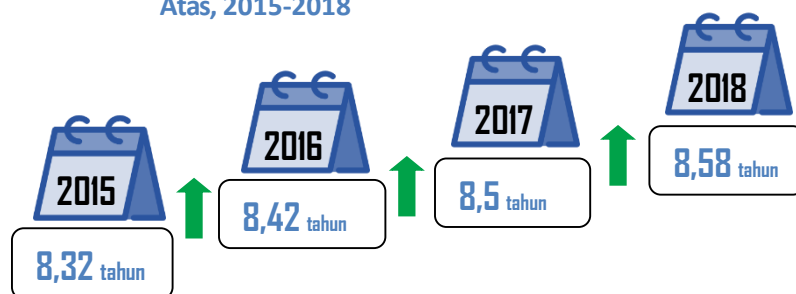
Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Melalui indikator ini, maka dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, sejak tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun ini mencapai titik tertinggi, yaitu 8,58 tahun (setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat).

Meskipun demikian, angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2018 belum dapat memenuhi target dari Renstra Kemendikbud sebesar 8,7 tahun. Sementara target RPJMN pada tahun 2019 Rata-rata Lama Sekolah penduduk 15 tahun ke atas sebesar 8,8 tahun. Mengingat singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketertinggalan ini, dibutuhkan kerja keras yang bersinergi dari seluruh pihak terkait dan pemantauan secara intensif terhadap capaian indikator ini.

Perlu kerja keras
dan sinergi
semua pihak
guna memenuhi
target Rata-rata
Lama Sekolah
dalam RPJMN

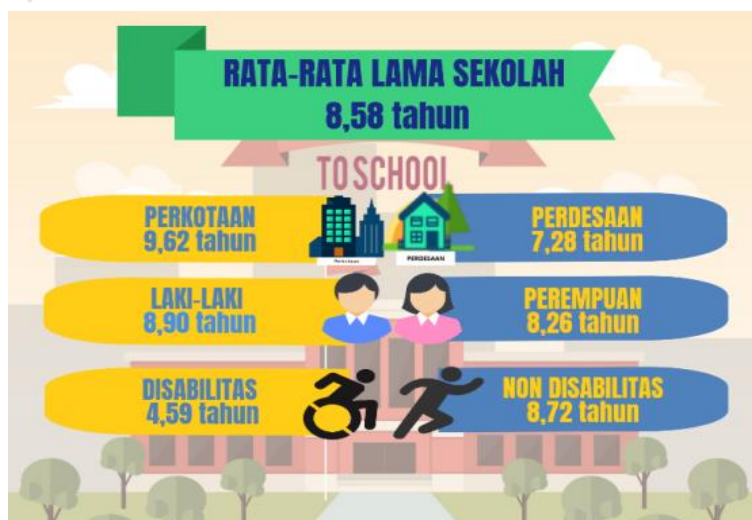
Gambar 5.8 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2015-2018



Sumber: BPS, Susenas Kor 2015-2018

Perbandingan kehidupan desa-kota senantiasa menampilkan cerita tersendiri tentang ketimpangan yang tak berkesudahan dan kita belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini tercermin melalui capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Penduduk perkotaan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 7 SMP/ sederajat.

Gambar 5.9 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Namun ketimpangan capaian tersebut tidak begitu nyata apabila dilihat perbandingannya antara penduduk laki-laki dan perempuan. Rata-rata bersekolah laki-laki sedikit lebih lama dibandingkan perempuan, dan laki-laki telah mencapai target RPJMN dengan capaian rata-rata lama sekolah 8,9 tahun. Yang cukup menjadi perhatian adalah tingginya kesenjangan angka Rata-rata Lama Sekolah antara para penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, dimana selisihnya sekitar 4 tahun. Jika mereka yang bukan penyandang disabilitas mampu bersekolah sampai kelas 8 SMP/ sederajat, para penyandang disabilitas hanya mampu bersekolah sampai kelas 4 SD/ sederajat saja. Sepertinya, penerapan pendidikan inklusif yang sudah memiliki payung hukum juga perlu didukung dengan kemudahan akses dalam menjangkau sarana pendidikan inklusif yang tersedia selama ini.

Gambar 5.10 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi, 2018



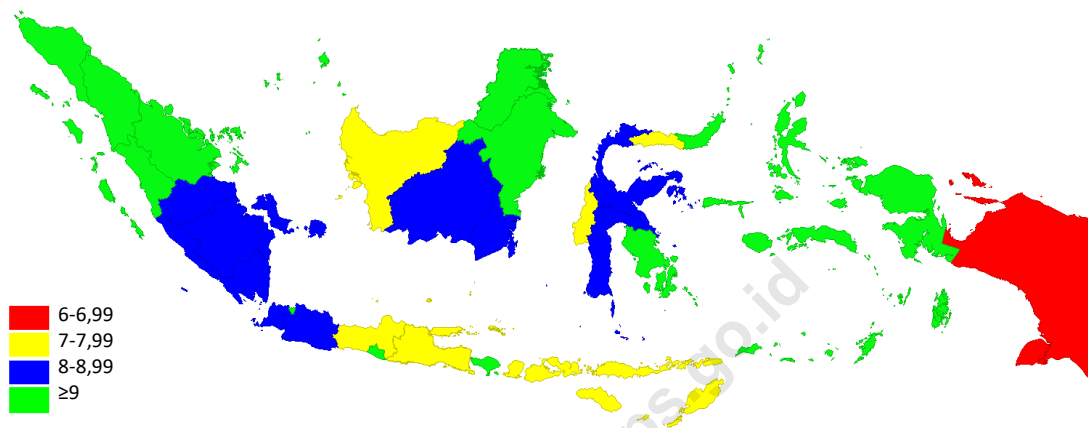
Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya.

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Sebagaimana pada indikator pendidikan lainnya, status ekonomi juga memberikan konsekuensi pada capaian rata-rata lama bersekolah. Seiring peningkatan status ekonomi, rata-rata lama bersekolah turut meningkat. Dibandingkan dengan kuintil

1 yang rata-rata penduduknya bersekolah sampai kelas 6 SD/ sederajat, penduduk pada kuintil 5 rata-rata sudah bersekolah sampai kelas 11 SM/ sederajat.

Gambar 5.11 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Indonesia, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Secara geografis, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas bervariasi. Provinsi dengan rata-rata lama sekolah di atas 9 tahun tersebar di berbagai wilayah (ditandai dengan area berwarna hijau). DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan rata-rata lama sekolah penduduknya lebih dari 10 tahun. Di sisi lain, penduduk 15 tahun ke atas di Papua rata-rata bersekolah hanya sampai kelas 6 SD/ sederajat.

Tingkat Kelulusan Sekolah

Tingkat kelulusan sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam SDGs yang mampu menggambarkan capaian pendidikan penduduk yang dilihat melalui minimal jenjang pendidikan yang ditamatkan pada usia referensi tertentu. Usia referensi diperoleh dengan menambah 3-5 tahun di atas usia yang biasanya siswa sudah duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan tertentu. Misalnya pada jenjang SD, seorang anak umumnya telah duduk di kelas 6 SD pada usia 12 tahun. Maka usia referensi untuk perhitungan tingkat kelulusan SD ke atas adalah penduduk pada kelompok umur yang lebih tua 3 sampai

5 tahun di atas usia 12 tahun, yaitu penduduk usia 15-17 tahun. Terdapat tiga kelompok usia referensi yang digunakan dalam mengukur capaian tingkat kelulusan sekolah, yaitu : tingkat kelulusan SD penduduk usia 15-17 tahun, tingkat kelulusan SMP penduduk usia 18-20 tahun, dan tingkat kelulusan SMA penduduk usia 21-24 tahun.

Tingkat kelulusan sekolah menggambarkan banyaknya penduduk dalam rentang usia referensi yang masuk tepat waktu dan lulus tepat waktu pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, untuk penghitungan tingkat kelulusan jenjang SD adalah dengan menggunakan penduduk pada rentang usia 15-17 tahun. Dengan asumsi semua anak masuk SD tepat pada usia 7 tahun, tidak ada anak yang *drop out*, mengulang kelas, atau terlambat lulus maka seharusnya mereka yang berada pada rentang usia tersebut telah menyelesaikan pendidikannya minimal sampai tamat SD.

Tabel 5.7 Tingkat Kelulusan Sekolah, 2018

Karakteristik	Usia 15-17 Tahun	Usia 18-20 Tahun	Usia 21-24 Tahun
	Lulus SD/ sederajat	Lulus SMP/ sederajat	Lulus SM/ Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	96,75	85,54	56,25
Tipe Daerah			
Perkotaan	97,93	90,70	66,15
Perdesaan	95,37	78,62	42,10
Jenis Kelamin			
Laki-laki	95,93	83,68	55,80
Perempuan	97,61	87,50	56,71

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

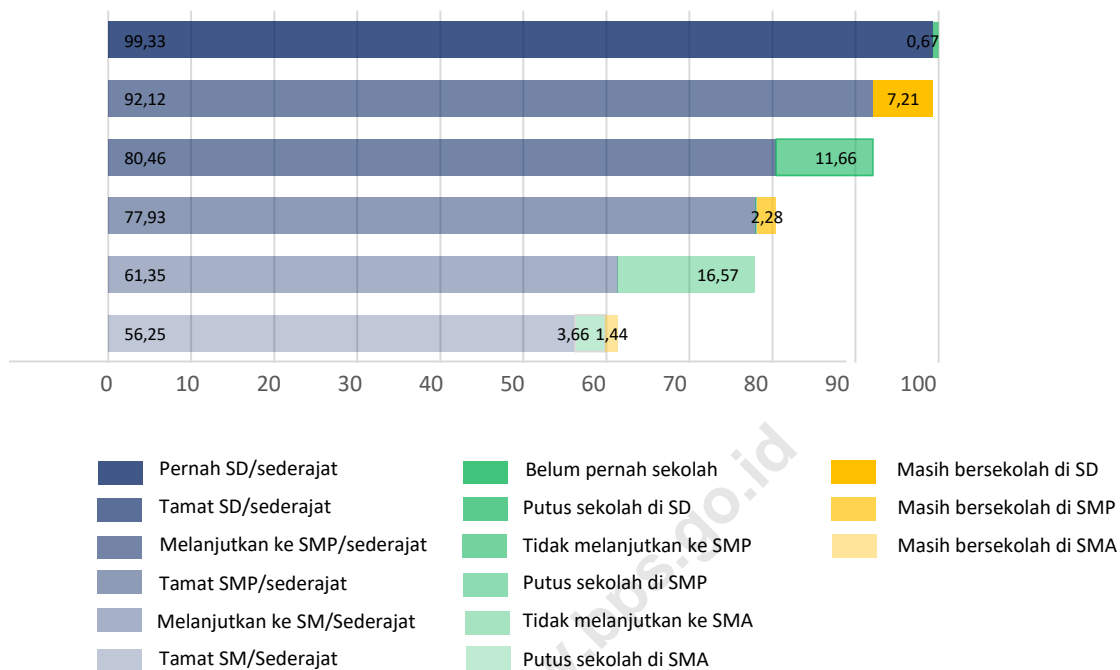
Tabel 5.7 menunjukkan bahwa penduduk usia 15-17 tahun yang telah lulus minimal pada jenjang SD/ sederajat adalah 96,75 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia 15-17 tahun ada sebanyak 96 orang yang lulus minimal pada jenjang SD/ sederajat. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka tingkat kelulusan sekolah yang dihasilkan semakin rendah.

Tingkat pendidikan penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan dengan kesenjangan yang semakin melebar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Sementara itu, tingkat kelulusan sekolah pada penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Gambar 5.12 memperlihatkan alur pendidikan penduduk usia 21-24 tahun dari jenjang SD/ sederajat sampai SM/ Sederajat. Terdapat sekitar 99 persen penduduk usia 21-24 pernah berada pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Dari besaran tersebut, 92,12 persen diantaranya tamat SD/ sederajat dan hanya 80,46 persen yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/ sederajat. Selanjutnya, dari sekitar 80 persen tersebut, ada 77,93 persen yang mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat. Sayangnya, dari sekitar 77 persen tersebut, hanya 61,35 persen saja yang mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SM/ Sederajat. dan dari sekitar 61 persen tersebut akhirnya 56,25 persen penduduk usia 21-24 tahun berhasil tamat pada jenjang SM/ Sederajat.

Yang cukup menarik dari alur analisis pendidikan ini adalah angka tidak melanjutkan sekolah penduduk usia 21-24 tahun yang persentasenya semakin membesar seiring meningkatnya jenjang pendidikan, di mana mereka yang tidak melanjutkan pendidikan dari SMP/ sederajat ke SM/ Sederajat menempati persentase tertinggi, yakni 17 persen. Linieritas biaya pendidikan dan jenjang pendidikan diduga menjadi penyebab terjadinya kondisi ini selain rendahnya kemampuan akademik siswa dalam beradaptasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta faktor lainnya.

Gambar 5.12 Analisis Alur Pendidikan Penduduk Usia 21-24 Tahun, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

DAFTAR PUSTAKA



Daftar
Pustaka



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemendikbud. 2017. Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2017/2018. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta: Bappenas.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: Depdiknas.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Sumber Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, UUD 1945 Ayat 31
(<https://www.jpnn.com/news/kemendikbud-wajibkan-paud-1-tahun-sebelum-masuk-sd>).
- School Readiness and Health, California Childcare Health Program 2006
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). 2009. *Education Indicators Technical Guidelines*.

CATATAN TEKNIS



CATATAN TEKNIS

Susenas

merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pencacahan bulan September dengan ukuran sampel kecil mencakup 75.000 rumah tangga sampel untuk menghasilkan data yang representatif untuk estimasi provinsi dan nasional.

Tipe Daerah Tempat Tinggal

menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

Rumah Tangga Biasa

adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT)

adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART)

adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga

yakni orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Status ekonomi rumah tangga

diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya.

Status ekonomi rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil I dan II untuk status ekonomi terendah, kuintil III dan IV untuk status ekonomi menengah, dan kuintil V untuk status ekonomi tertinggi.

Rasio murid-guru

adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

Rasio murid-kelas

adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Pendidikan formal

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/SDLB/MI/ sederajat, SMP/SMPLB/MTs/ sederajat, SM/SMLB/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan nonformal

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal

adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan kesetaraan

adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan anak usia dini (PAUD)

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tamat sekolah

adalah jika responden telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tidak punya ijazah SD

adalah kepala ruta/anggota ruta yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A Setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga kepala ruta/anggota ruta yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

SD/SDLB

adalah Sekolah Dasar atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, dan/atau sekolah dasar pamong).

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SD.

SMP/SMPLB

adalah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama).

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SMP.

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)

adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), atau yang sederajat (Sekolah Menengah Luar Biasa, HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAAs)).

Madrasah Aliyah (MA)

adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SMA.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

Program Diploma 1/2

adalah program D1/D2 pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Diploma 1/2 pada pendidikan formal.

Program Diploma 1 hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

Program Diploma 3/sarjana muda

adalah program D3 atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda.

Program Diploma 4/sarjana

adalah program pendidikan Diploma 4 atau Strata 1 pada suatu perguruan tinggi.

S2/S3

adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), strata 2 atau 3 pada suatu perguruan.

Paket A/B/C

merupakan pendidikan kesetaraan dengan tujuan memperluas akses pendidikan dasar sembilan tahun melalui program Paket A dan Paket B serta pendidikan menengah melalui program Paket C.

Menurut UU No.20 tahun 2003 pasal 26 ayat, pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yg mencakup Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/MA.

Tidak/belum pernah sekolah

adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah

adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi

adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM)

adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK PAUD 3-5 tahun

adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak umur 3-5 tahun.

APK PAUD 3-6 tahun

adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak usia 3-6 tahun.

APM PAUD 3-5 tahun

adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) berumur 3-5 tahun, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak usia 3-5 tahun.

APM PAUD 3-6 tahun

adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) berumur 3-6 tahun, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak umur 3-6 tahun.

Rasio APM (SD/SMP/SMA)

adalah perbandingan APM murid/mahasiswa perempuan terhadap APM murid/mahasiswa laki-laki pada tiap jenjang dan jalur pendidikan, dinyatakan dalam persentase.

Angka Melek Huruf

adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.

Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama

sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Angka Kesiapan Sekolah

adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD.

Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan

adalah persentase siswa kelas x suatu jenjang pendidikan pada tahun ajaran lalu yang masih duduk di kelas x pada tahun ajaran sekarang, terhadap anak kelas x pada tahun ajaran lalu.

Angka Melanjutkan pada Jenjang SD ke SMP

adalah persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran lalu.

Angka Melanjutkan pada jenjang SMP ke SM

adalah persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SM pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran lalu.

Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan

adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Angka Bertahan SD

adalah presentase siswa kelas 1 SD yang diharapkan bisa secara terus menerus mencapai kelas terakhir SD.

Tingkat Kelulusan Sekolah

adalah presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Tingkat kelulusan sekolah SD dihitung sebagai persentase penduduk usia 15-17 tahun yang minimal telah tamat SD. Terdapat tiga kelompok usia referensi

yang digunakan dalam mengukur capaian tingkat kelulusan sekolah, yaitu : tingkat kelulusan SD penduduk usia 15-17 tahun, tingkat kelulusan SMP penduduk usia 18-20 tahun, dan tingkat kelulusan SMA penduduk usia 21-24 tahun.

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL



Tabel 2.1 Jumlah Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3.447	1.115	516	206
Sumatra Utara	9.649	2.525	1.064	978
Sumatra Barat	4.161	798	322	206
Riau	3.653	1.142	440	286
Jambi	2.454	662	223	171
Sumatera Selatan	4.662	1.312	594	294
Bengkulu	1.375	419	136	95
Lampung	4.660	1.334	484	457
Kep. Bangka Belitung	807	210	67	54
Kep. Riau	921	344	125	94
DKI Jakarta	2.579	1.128	502	579
Jawa Barat	19.533	5.101	1.584	2.846
Jawa Tengah	19.027	3.285	858	1.569
DI Yogyakarta	1.842	435	165	218
Jawa Timur	19.312	4.607	1.524	1.983
Banten	4.562	1.421	529	668
Bali	2.444	404	159	176
Nusa Tenggara Barat	3.174	894	313	295
Nusa Tenggara Timur	5.056	1.644	509	276
Kalimantan Barat	4.381	1.295	418	199
Kalimanta Tengah	2.625	822	239	134
Kalimantan Selatan	2.911	598	186	123
Kalimantan Timur	1.869	625	215	219
Kalimantan Utara	463	169	59	28
Sulawesi Utara	2.227	714	225	186
Sulawesi Tengah	2.889	833	211	182
Sulawesi Selatan	6.422	1.643	582	435
Sulawesi Tenggara	2.310	747	286	153
Gorontalo	935	329	61	56
Sulawesi Barat	1.327	358	88	132
Maluku	1.772	633	275	108
Maluku Utara	1.305	473	193	121
Papua Barat	1.016	296	118	52
Papua	2.474	645	225	131
Indonesia	148.244	38.960	13.495	13710

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.2 Jumlah Peserta Didik (dalam ribuan) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018

Provinsi (1)	SD (2)	SMP (3)	SMA (4)	SMK (5)
Aceh	490,3	192,7	137,4	54,5
Sumatra Utara	1.735,1	666,9	368,9	298,6
Sumatra Barat	640,0	218,4	145,4	86,6
Riau	798,2	263,1	151,4	92,5
Jambi	389,4	126,7	75,4	48,9
Sumatera Selatan	933,6	355,3	204,6	111,6
Bengkulu	214,2	90,0	48,6	27,4
Lampung	842,7	315,1	152,6	138,1
Kep. Bangka Belitung	160,7	60,6	26,2	23,9
Kep. Riau	226,3	86,8	41,6	28,8
DKI Jakarta	828,7	368,5	171,6	219,3
Jawa Barat	4.508,4	1.796,0	671,1	1.051,0
Jawa Tengah	2.857,4	1.194,7	402,8	776,3
DI Yogyakarta	293,6	128,5	55,3	88,7
Jawa Timur	2.838,9	1.255,0	535,6	736,4
Banten	1.195,7	424,4	182,9	250,4
Bali	399,6	194,8	86,7	96,6
Nusa Tenggara Barat	512,7	179,5	103,7	70,6
Nusa Tenggara Timur	776,8	337,5	181,1	78,6
Kalimantan Barat	594,5	238,7	122,3	65,1
Kalimanta Tengah	287,8	109,9	56,6	32,9
Kalimantan Selatan	381,2	120,8	65,8	55,8
Kalimantan Timur	413,0	156,5	72,3	74,5
Kalimantan Utara	78,6	31,6	16,2	9,1
Sulawesi Utara	240,6	120,3	59,4	50,3
Sulawesi Tengah	343,7	132,9	71,7	45,2
Sulawesi Selatan	928,0	384,0	234,1	130,5
Sulawesi Tenggara	320,3	130,2	90,0	32,6
Gorontalo	123,5	50,9	27,2	19,2
Sulawesi Barat	161,0	62,9	28,8	27,0
Maluku	228,8	97,1	69,7	21,6
Maluku Utara	158,3	61,5	38,2	16,7
Papua Barat	136,4	47,7	26,5	13,2
Papua	448,5	126,5	61,8	31,3
Indonesia	25.486,5	10.125,7	4.783,6	4.904,0

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.3.1 Persentase Sekolah dan Peserta Didik Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018

SD

Provinsi	Sekolah		Peserta Didik	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,46	3,54	95,22	4,78
Sumatra Utara	86,02	13,98	81,11	18,89
Sumatra Barat	95,31	4,69	93,25	6,75
Riau	87,46	12,54	85,21	14,79
Jambi	95,11	4,89	93,30	6,70
Sumatera Selatan	92,51	7,49	92,33	7,67
Bengkulu	95,27	4,73	93,44	6,56
Lampung	93,52	6,48	92,42	7,58
Kep. Bangka Belitung	93,43	6,57	92,53	7,47
Kep. Riau	74,48	25,52	71,07	28,93
DKI Jakarta	61,42	38,58	70,33	29,67
Jawa Barat	90,84	9,16	89,82	10,18
Jawa Tengah	94,21	5,79	90,91	9,09
DI Yogyakarta	78,07	21,93	73,00	27,00
Jawa Timur	91,11	8,89	87,87	12,13
Banten	86,63	13,37	86,01	13,99
Bali	95,05	4,95	90,27	9,73
Nusa Tenggara Barat	94,71	5,29	95,89	4,11
Nusa Tenggara Timur	64,72	35,28	62,59	37,41
Kalimantan Barat	94,29	5,71	91,24	8,76
Kalimanta Tengah	92,57	7,43	87,26	12,74
Kalimantan Selatan	95,40	4,60	92,84	7,16
Kalimantan Timur	88,50	11,50	86,92	13,08
Kalimantan Utara	92,44	7,56	92,15	7,85
Sulawesi Utara	61,74	38,26	62,26	37,74
Sulawesi Tengah	92,07	7,93	93,12	6,88
Sulawesi Selatan	95,80	4,20	94,58	5,42
Sulawesi Tenggara	97,53	2,47	97,91	2,09
Gorontalo	97,75	2,25	97,95	2,05
Sulawesi Barat	98,34	1,66	98,42	1,58
Maluku	69,75	30,25	71,53	28,47
Maluku Utara	84,37	15,63	84,39	15,61
Papua Barat	61,22	38,78	61,17	38,83
Papua	62,93	37,07	62,94	37,06
Indonesia	89,02	10,98	86,92	13,08

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.3.2 Persentase Sekolah dan Peserta Didik Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018

SMP

Provinsi	Sekolah		Peserta Didik	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	79,46	20,54	86,22	13,78
Sumatra Utara	51,84	48,16	67,89	32,11
Sumatra Barat	84,21	15,79	90,95	9,05
Riau	72,68	27,32	81,42	18,58
Jambi	83,84	16,16	89,20	10,80
Sumatera Selatan	66,69	33,31	80,97	19,03
Bengkulu	90,45	9,55	94,81	5,19
Lampung	51,50	48,50	74,66	25,34
Kep. Bangka Belitung	75,71	24,29	86,09	13,91
Kep. Riau	63,95	36,05	79,82	20,18
DKI Jakarta	26,68	73,32	58,28	41,72
Jawa Barat	38,72	61,28	64,84	35,16
Jawa Tengah	53,88	46,12	78,00	22,00
DI Yogyakarta	49,20	50,80	70,19	29,81
Jawa Timur	37,42	62,58	68,53	31,47
Banten	38,56	61,44	60,78	39,22
Bali	63,12	36,88	78,37	21,63
Nusa Tenggara Barat	67,34	32,66	85,70	14,30
Nusa Tenggara Timur	75,79	24,21	76,88	23,12
Kalimantan Barat	76,14	23,86	82,78	17,22
Kalimanta Tengah	83,82	16,18	86,19	13,81
Kalimantan Selatan	86,62	13,38	91,00	9,00
Kalimantan Timur	68,80	31,20	80,66	19,34
Kalimantan Utara	84,02	15,98	90,92	9,08
Sulawesi Utara	65,41	34,59	73,46	26,54
Sulawesi Tengah	86,55	13,45	91,86	8,14
Sulawesi Selatan	75,84	24,16	85,39	14,61
Sulawesi Tenggara	91,30	8,70	95,56	4,44
Gorontalo	95,14	4,86	96,46	3,54
Sulawesi Barat	85,20	14,80	92,04	7,96
Maluku	77,57	22,43	79,38	20,62
Maluku Utara	73,15	26,85	78,64	21,36
Papua Barat	72,97	27,03	72,82	27,18
Papua	72,56	27,44	74,17	25,83
Indonesia	59,62	40,38	74,47	25,53

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.3.3 Persentase Sekolah dan Peserta Didik Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018

SMA

Provinsi	Sekolah		Peserta Didik	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	76,55	23,45	89,07	10,93
Sumatra Utara	39,85	60,15	62,56	37,44
Sumatra Barat	71,74	28,26	89,27	10,73
Riau	67,05	32,95	84,78	15,22
Jambi	69,06	30,94	88,21	11,79
Sumatera Selatan	54,55	45,45	75,51	24,49
Bengkulu	77,94	22,06	93,85	6,15
Lampung	47,52	52,48	74,12	25,88
Kep. Bangka Belitung	64,18	35,82	83,80	16,20
Kep. Riau	65,60	34,40	85,06	14,94
DKI Jakarta	24,70	75,30	51,46	48,54
Jawa Barat	31,25	68,75	65,73	34,27
Jawa Tengah	42,19	57,81	75,33	24,67
DI Yogyakarta	41,82	58,18	67,85	32,15
Jawa Timur	27,76	72,24	60,68	39,32
Banten	27,98	72,02	62,03	37,97
Bali	49,06	50,94	72,90	27,10
Nusa Tenggara Barat	49,52	50,48	81,19	18,81
Nusa Tenggara Timur	64,24	35,76	69,04	30,96
Kalimantan Barat	61,00	39,00	72,88	27,12
Kalimanta Tengah	75,73	24,27	90,29	9,71
Kalimantan Selatan	71,51	28,49	87,28	12,72
Kalimantan Timur	62,79	37,21	84,92	15,08
Kalimantan Utara	69,49	30,51	82,24	17,76
Sulawesi Utara	52,44	47,56	73,83	26,17
Sulawesi Tengah	79,62	20,38	91,69	8,31
Sulawesi Selatan	57,56	42,44	84,02	15,98
Sulawesi Tenggara	81,12	18,88	93,09	6,91
Gorontalo	90,16	9,84	94,83	5,17
Sulawesi Barat	84,09	15,91	94,63	5,37
Maluku	73,82	26,18	81,23	18,77
Maluku Utara	67,36	32,64	82,54	17,46
Papua Barat	62,71	37,29	74,02	25,98
Papua	59,11	40,89	68,91	31,09
Indonesia	49,89	50,11	73,07	26,93

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.3.4 Persentase Sekolah dan Peserta Didik Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018

SMK

Provinsi	Sekolah		Peserta Didik	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	70,39	29,61	88,38	11,62
Sumatra Utara	27,10	72,90	41,50	58,50
Sumatra Barat	52,91	47,09	80,05	19,95
Riau	41,26	58,74	59,58	40,42
Jambi	58,48	41,52	77,24	22,76
Sumatera Selatan	38,44	61,56	57,40	42,60
Bengkulu	67,37	32,63	86,51	13,49
Lampung	23,19	76,81	42,92	57,08
Kep. Bangka Belitung	62,96	37,04	76,28	23,72
Kep. Riau	31,91	68,09	61,82	38,18
DKI Jakarta	10,88	89,12	20,78	79,22
Jawa Barat	9,84	90,16	26,75	73,25
Jawa Tengah	15,11	84,89	33,11	66,89
DI Yogyakarta	22,94	77,06	50,28	49,72
Jawa Timur	14,78	85,22	41,93	58,07
Banten	11,23	88,77	28,58	71,42
Bali	28,98	71,02	46,77	53,23
Nusa Tenggara Barat	30,17	69,83	71,00	29,00
Nusa Tenggara Timur	52,90	47,10	61,20	38,80
Kalimantan Barat	51,76	48,24	68,01	31,99
Kalimanta Tengah	67,16	32,84	83,36	16,64
Kalimantan Selatan	49,59	50,41	76,12	23,88
Kalimantan Timur	39,27	60,73	61,35	38,65
Kalimantan Utara	60,71	39,29	87,70	12,30
Sulawesi Utara	46,24	53,76	65,52	34,48
Sulawesi Tengah	54,40	45,60	73,64	26,36
Sulawesi Selatan	38,39	61,61	69,19	30,81
Sulawesi Tenggara	64,05	35,95	81,91	18,09
Gorontalo	71,43	28,57	87,19	12,81
Sulawesi Barat	43,94	56,06	70,48	29,52
Maluku	72,22	27,78	72,29	27,71
Maluku Utara	52,07	47,93	57,31	42,69
Papua Barat	59,62	40,38	73,14	26,86
Papua	56,49	43,51	62,15	37,85
Indonesia	25,67	74,33	43,04	56,96

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.4 Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Menurut Provinsi dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2017/2018

Provinsi	SD			SMP		
	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	56,14	39,63	4,23	57,96	38,83	3,21
Sumatra Utara	21,65	67,74	10,61	29,68	62,14	8,18
Sumatra Barat	23,88	68,54	7,58	27,29	66,55	6,16
Riau	31,32	66,11	2,56	34,89	62,26	2,85
Jambi	24,58	66,49	8,93	27,67	64,46	7,87
Sumatera Selatan	24,37	64,60	11,04	21,39	63,87	14,73
Bengkulu	31,39	60,49	8,12	31,88	59,31	8,81
Lampung	28,73	64,84	6,43	31,91	60,10	7,99
Kep. Bangka Belitung	29,92	61,97	8,11	30,33	62,62	7,05
Kep. Riau	19,36	67,69	12,95	21,45	68,30	10,25
DKI Jakarta	27,15	62,85	9,99	24,56	61,68	13,76
Jawa Barat	20,03	65,09	14,88	23,76	63,94	12,30
Jawa Tengah	21,42	65,64	12,93	25,68	63,16	11,16
DI Yogyakarta	25,34	66,15	8,52	26,03	64,96	9,02
Jawa Timur	29,87	62,67	7,46	29,91	65,59	4,50
Banten	38,46	57,18	4,36	38,90	57,21	3,89
Bali	33,39	55,08	11,52	29,47	59,19	11,33
Nusa Tenggara Barat	29,18	56,12	14,70	28,87	58,90	12,24
Nusa Tenggara Timur	24,43	63,53	12,04	27,05	63,49	9,46
Kalimantan Barat	23,72	58,36	17,92	26,42	58,84	14,74
Kalimanta Tengah	26,54	62,13	11,33	25,06	61,42	13,52
Kalimantan Selatan	39,17	57,68	3,15	49,20	47,68	3,12
Kalimantan Timur	23,21	63,94	12,85	24,77	62,30	12,93
Kalimantan Utara	16,88	62,89	20,23	22,65	62,28	15,07
Sulawesi Utara	22,48	63,94	13,58	22,37	67,60	10,03
Sulawesi Tengah	21,84	67,27	10,89	17,48	66,69	15,83
Sulawesi Selatan	19,75	63,13	17,12	24,53	58,79	16,68
Sulawesi Tenggara	33,40	58,93	7,67	38,29	55,19	6,51
Gorontalo	39,25	55,76	4,99	43,89	51,00	5,11
Sulawesi Barat	33,72	56,64	9,64	35,00	57,42	7,58
Maluku	40,95	54,40	4,65	42,48	52,55	4,97
Maluku Utara	20,51	62,51	16,99	24,58	65,88	9,55
Papua Barat	21,63	58,33	20,04	25,43	57,82	16,75
Papua	28,33	62,23	9,44	38,06	55,99	5,95
Indonesia	26,41	63,59	10,00	29,70	61,46	8,84

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.5 Persentase Ruang Kelas SMA dan SMK Menurut Provinsi dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2017/2018

Provinsi	SMA			SMK		
	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	64,50	34,59	0,91	51,50	46,90	1,60
Sumatra Utara	45,20	50,34	4,45	45,39	51,18	3,43
Sumatra Barat	51,04	46,25	2,71	45,19	52,49	2,33
Riau	45,37	53,10	1,53	53,91	43,95	2,14
Jambi	46,59	50,43	2,98	45,37	51,83	2,80
Sumatera Selatan	27,91	64,01	8,08	42,41	53,98	3,61
Bengkulu	46,79	48,84	4,37	49,25	47,27	3,48
Lampung	50,62	45,52	3,86	56,18	43,39	0,43
Kep. Bangka Belitung	48,90	45,88	5,21	45,14	50,91	3,95
Kep. Riau	31,61	64,53	3,87	37,47	58,21	4,32
DKI Jakarta	43,58	51,74	4,68	48,94	49,19	1,87
Jawa Barat	39,66	54,85	5,49	42,18	54,80	3,02
Jawa Tengah	45,53	50,14	4,34	50,22	48,44	1,34
DI Yogyakarta	41,81	55,48	2,71	46,11	52,38	1,51
Jawa Timur	55,50	42,51	1,99	45,92	50,82	3,26
Banten	53,77	43,59	2,64	49,92	48,81	1,26
Bali	49,20	47,00	3,80	47,96	50,17	1,87
Nusa Tenggara Barat	45,03	49,24	5,72	46,65	49,82	3,53
Nusa Tenggara Timur	43,81	52,22	3,97	52,44	45,42	2,14
Kalimantan Barat	39,55	50,85	9,60	43,29	54,21	2,50
Kalimanta Tengah	27,52	65,32	7,16	46,56	48,62	4,82
Kalimantan Selatan	54,48	44,87	0,65	59,50	40,50	0,00
Kalimantan Timur	31,96	61,34	6,69	49,29	47,00	3,71
Kalimantan Utara	34,37	55,91	9,73	42,97	51,04	5,99
Sulawesi Utara	26,31	67,88	5,81	45,50	49,75	4,75
Sulawesi Tengah	30,59	66,74	2,67	40,07	58,75	1,18
Sulawesi Selatan	30,01	63,26	6,73	43,17	53,75	3,08
Sulawesi Tenggara	48,23	46,92	4,85	40,81	54,36	4,82
Gorontalo	57,43	40,35	2,22	52,62	45,98	1,40
Sulawesi Barat	50,52	47,42	2,07	59,20	38,62	2,18
Maluku	47,38	50,48	2,13	50,00	49,82	0,18
Maluku Utara	30,88	63,36	5,76	42,42	51,16	6,42
Papua Barat	50,66	43,64	5,70	46,01	48,76	5,22
Papua	43,96	53,66	2,38	60,65	38,39	0,97
Indonesia	44,79	50,84	4,36	46,67	50,44	2,89

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.6 Jumlah Perpustakaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2.734	920	445	153
Sumatra Utara	5.497	1.971	878	665
Sumatra Barat	2.800	672	276	158
Riau	2.050	811	342	141
Jambi	1.624	517	192	125
Sumatera Selatan	3.039	1.035	505	196
Bengkulu	1.052	353	123	73
Lampung	2.884	1.053	383	295
Kep. Bangka Belitung	795	189	65	47
Kep. Riau	664	257	102	60
DKI Jakarta	1.899	1.003	450	486
Jawa Barat	10.316	3.688	1.159	1.568
Jawa Tengah	13.213	2.960	818	1.187
DI Yogyakarta	1.628	419	161	187
Jawa Timur	12.054	3.472	1.116	1.163
Banten	2.433	1.035	390	386
Bali	1.940	372	146	126
Nusa Tenggara Barat	2.303	609	233	147
Nusa Tenggara Timur	3.384	1.116	383	186
Kalimantan Barat	2.872	956	324	132
Kalimanta Tengah	1.561	569	186	90
Kalimantan Selatan	1.990	560	171	92
Kalimantan Timur	1.183	498	173	151
Kalimantan Utara	274	128	43	20
Sulawesi Utara	1.464	613	196	128
Sulawesi Tengah	1.815	565	183	114
Sulawesi Selatan	4.941	1.313	498	299
Sulawesi Tenggara	1.652	590	243	111
Gorontalo	792	251	57	48
Sulawesi Barat	794	266	65	67
Maluku	1.034	393	202	83
Maluku Utara	748	271	127	60
Papua Barat	382	202	82	33
Papua	739	403	145	74
Indonesia	94.550	30.030	10.862	8.851

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.7 Persentase Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	79,32	82,51	86,24	74,27
Sumatra Utara	56,97	78,06	82,52	68,00
Sumatra Barat	67,29	84,21	85,71	76,70
Riau	56,12	71,02	77,73	49,30
Jambi	66,18	78,10	86,10	73,10
Sumatera Selatan	65,19	78,89	85,02	66,67
Bengkulu	76,51	84,25	90,44	76,84
Lampung	61,89	78,94	79,13	64,55
Kep. Bangka Belitung	98,51	90,00	97,01	87,04
Kep. Riau	72,10	74,71	81,60	63,83
DKI Jakarta	73,63	88,92	89,64	83,94
Jawa Barat	52,81	72,30	73,17	55,09
Jawa Tengah	69,44	90,11	95,34	75,65
DI Yogyakarta	88,38	96,32	97,58	85,78
Jawa Timur	62,42	75,36	73,23	58,65
Banten	53,33	72,84	73,72	57,78
Bali	79,38	92,08	91,82	71,59
Nusa Tenggara Barat	72,56	68,12	74,44	49,83
Nusa Tenggara Timur	66,93	67,88	75,25	67,39
Kalimantan Barat	65,56	73,82	77,51	66,33
Kalimanta Tengah	59,47	69,22	77,82	67,16
Kalimantan Selatan	68,36	93,65	91,94	74,80
Kalimantan Timur	63,30	79,68	80,47	68,95
Kalimantan Utara	59,18	75,74	72,88	71,43
Sulawesi Utara	65,74	85,85	87,11	68,82
Sulawesi Tengah	62,82	67,83	86,73	62,64
Sulawesi Selatan	76,94	79,91	85,57	68,74
Sulawesi Tenggara	71,52	78,98	84,97	72,55
Gorontalo	84,71	76,29	93,44	85,71
Sulawesi Barat	59,83	74,30	73,86	50,76
Maluku	58,35	62,09	73,45	76,85
Maluku Utara	57,32	57,29	65,80	49,59
Papua Barat	37,60	68,24	69,49	63,46
Papua	29,87	62,48	64,44	56,49
Indonesia	63,78	77,08	80,49	64,56

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.8 Rasio Murid-Guru, Rasio Murid-Rombel, dan Rasio Rombel-Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP Menurut Provinsi, 2017/2018

Provinsi	SD			SMP		
	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11	20	0,99	9	24	0,88
Sumatra Utara	17	23	1,03	16	30	0,96
Sumatra Barat	16	21	1,01	12	27	0,95
Riau	17	24	1,08	15	28	0,99
Jambi	15	21	1,04	13	26	0,93
Sumatera Selatan	17	24	1,13	15	30	1,02
Bengkulu	15	20	1,00	14	26	0,94
Lampung	16	23	1,06	15	28	0,95
Kep. Bangka Belitung	20	25	0,97	20	30	0,95
Kep. Riau	18	24	1,16	18	30	0,99
DKI Jakarta	22	28	1,06	20	30	1,00
Jawa Barat	23	28	1,14	22	32	1,04
Jawa Tengah	17	22	0,99	17	29	0,98
DI Yogyakarta	16	22	0,98	15	28	0,95
Jawa Timur	15	21	1,00	16	28	1,00
Banten	22	28	1,13	21	31	0,99
Bali	17	23	1,00	17	31	1,14
Nusa Tenggara Barat	14	23	1,04	11	26	0,99
Nusa Tenggara Timur	16	21	0,96	14	27	1,04
Kalimantan Barat	17	19	1,06	17	28	0,97
Kalimanta Tengah	13	17	1,00	13	24	0,93
Kalimantan Selatan	14	19	0,99	14	26	0,93
Kalimantan Timur	18	24	1,09	17	28	1,00
Kalimantan Utara	15	20	1,10	14	26	1,11
Sulawesi Utara	15	17	0,99	15	25	0,98
Sulawesi Tengah	14	18	0,99	14	25	0,95
Sulawesi Selatan	14	20	1,03	14	26	0,97
Sulawesi Tenggara	15	20	1,01	13	24	0,95
Gorontalo	16	20	0,96	14	24	0,99
Sulawesi Barat	13	18	1,00	14	26	0,97
Maluku	15	19	1,04	13	24	0,97
Maluku Utara	17	19	1,02	13	24	1,01
Papua Barat	19	19	1,07	14	25	0,99
Papua	28	25	1,07	17	29	0,99
Indonesia	17	23	1,04	16	29	0,99

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.9 Rasio Murid-Guru, Rasio Murid-Rombel, dan Rasio Rombel-Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMA dan SMK Menurut Provinsi, 2017/2018

Provinsi	SMA			SMK		
	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10	25	0,94	9	22	1,05
Sumatra Utara	17	32	0,98	17	27	0,99
Sumatra Barat	13	29	0,99	12	26	1,12
Riau	14	29	1,01	13	25	1,05
Jambi	14	29	1,00	12	25	0,99
Sumatera Selatan	15	31	0,99	16	29	1,10
Bengkulu	13	28	0,97	11	23	1,00
Lampung	15	29	0,97	15	27	1,06
Kep. Bangka Belitung	17	30	0,97	16	29	0,95
Kep. Riau	15	30	0,97	14	25	1,06
DKI Jakarta	15	29	0,94	21	30	0,99
Jawa Barat	19	32	1,03	22	30	1,11
Jawa Tengah	17	31	0,97	18	29	1,09
DI Yogyakarta	13	27	0,96	13	26	1,07
Jawa Timur	17	30	1,03	18	29	1,16
Banten	19	31	1,01	23	30	1,14
Bali	16	31	1,05	17	31	1,23
Nusa Tenggara Barat	12	30	1,01	11	26	1,13
Nusa Tenggara Timur	14	28	1,08	12	24	1,09
Kalimantan Barat	18	31	1,00	18	28	1,09
Kalimanta Tengah	13	26	1,01	13	24	0,98
Kalimantan Selatan	15	29	1,02	15	28	1,11
Kalimantan Timur	17	29	1,07	16	26	1,09
Kalimantan Utara	14	28	1,05	12	26	1,11
Sulawesi Utara	13	25	0,98	13	21	1,03
Sulawesi Tengah	16	29	1,02	13	23	1,01
Sulawesi Selatan	16	30	0,99	13	24	1,02
Sulawesi Tenggara	14	27	0,98	10	21	1,03
Gorontalo	16	29	0,98	12	23	0,94
Sulawesi Barat	15	29	0,99	13	24	1,03
Maluku	12	26	1,05	9	20	1,12
Maluku Utara	14	25	1,03	10	19	1,07
Papua Barat	12	25	1,01	11	22	1,05
Papua	15	29	1,00	11	22	1,01
Indonesia	16	30	1,00	17	28	1,09

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.10 Persentase Guru*) Layak Mengajar) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018**

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	79,57	92,50	97,63	96,29
Sumatera Utara	79,43	91,61	96,38	93,39
Sumatera Barat	91,15	91,81	97,82	97,15
Riau	85,22	90,97	96,31	94,18
Jambi	77,91	93,06	97,91	94,58
Sumatera Selatan	80,70	91,91	97,30	93,21
Bengkulu	83,44	93,49	98,55	94,73
Lampung	81,77	88,69	95,63	89,28
Kep. Bangka Belitung	83,05	91,36	96,44	92,47
Kep. Riau	88,50	92,60	97,51	93,93
DKI Jakarta	92,74	95,66	97,94	95,44
Jawa Barat	92,70	94,14	97,20	93,21
Jawa Tengah	92,95	95,44	97,91	95,87
DI Yogyakarta	90,87	93,08	97,82	95,91
Jawa Timur	92,76	96,22	98,23	96,07
Banten	90,44	94,42	96,45	93,70
Bali	93,27	95,88	97,80	94,93
Nusa Tenggara Barat	83,98	95,84	98,51	96,10
Nusa Tenggara Timur	73,69	88,69	96,81	91,94
Kalimantan Barat	74,58	86,90	95,35	91,53
Kalimanta Tengah	82,50	92,82	97,03	95,40
Kalimantan Selatan	87,34	95,37	98,04	95,60
Kalimantan Timur	85,70	94,48	97,71	94,20
Kalimantan Utara	75,80	93,14	97,20	97,00
Sulawesi Utara	76,06	85,98	97,16	94,39
Sulawesi Tengah	69,58	92,22	97,04	94,06
Sulawesi Selatan	88,35	95,57	98,80	96,75
Sulawesi Tenggara	80,73	93,92	98,58	95,58
Gorontalo	86,63	92,50	99,05	95,02
Sulawesi Barat	68,02	88,22	96,51	91,73
Maluku	65,56	79,52	95,72	91,26
Maluku Utara	54,72	86,12	95,33	90,82
Papua Barat	76,29	94,86	97,77	94,84
Papua	58,89	87,21	97,40	93,46
Indonesia	85,99	93,16	97,39	94,55

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Note: *) Kepala Sekolah termasuk Guru

**) Guru layak mengajar adalah guru yang berijazah D4/S1 atau lebih tinggi

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Umur 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,87	24,64	26,24
Sumatera Utara	23,61	19,23	21,41
Sumatera Barat	22,00	21,59	21,77
Riau	22,71	22,41	22,53
Jambi	23,87	26,83	25,91
Sumatera Selatan	23,43	22,04	22,54
Bengkulu	26,76	22,92	24,17
Lampung	26,28	25,51	25,73
Kep. Bangka Belitung	32,34	25,74	29,28
Kepulauan Riau	20,27	29,74	21,54
DKI Jakarta	29,46	-	29,46
Jawa Barat	26,88	24,45	26,26
Jawa Tengah	37,77	34,71	36,27
DI Yogyakarta	46,13	54,96	48,45
Jawa Timur	40,07	38,72	39,43
Banten	26,76	17,15	23,87
Bali	26,65	20,84	24,76
Nusa Tenggara Barat	26,69	28,40	27,62
Nusa Tenggara Timur	25,60	24,33	24,60
Kalimantan Barat	20,21	15,59	17,11
Kalimantan Tengah	28,14	29,31	28,88
Kalimantan Selatan	33,10	33,51	33,32
Kalimantan Timur	23,82	27,99	25,23
Kalimantan Utara	18,29	29,45	22,99
Sulawesi Utara	24,59	29,69	27,19
Sulawesi Tengah	25,97	31,41	29,92
Sulawesi Selatan	24,17	24,81	24,55
Sulawesi Tenggara	27,78	24,40	25,67
Gorontalo	33,01	37,85	36,04
Sulawesi Barat	29,57	30,21	30,06
Maluku	20,48	26,38	24,14
Maluku Utara	21,16	29,24	27,08
Papua Barat	18,74	20,55	19,83
Papua	17,70	8,43	10,91
Indonesia	29,34	27,02	28,26

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	49,45	45,82	47,65
Sumatera Utara	33,85	34,92	34,39
Sumatera Barat	41,69	44,41	43,04
Riau	41,15	39,28	40,24
Jambi	34,60	37,19	35,99
Sumatera Selatan	30,68	34,35	32,50
Bengkulu	49,30	37,76	43,48
Lampung	39,09	48,98	43,97
Kep. Bangka Belitung	59,78	51,54	55,72
Kepulauan Riau	33,75	38,21	35,79
DKI Jakarta	52,36	53,54	52,90
Jawa Barat	47,58	48,46	48,01
Jawa Tengah	70,06	68,28	69,21
DI Yogyakarta	85,64	96,14	91,04
Jawa Timur	79,46	79,40	79,43
Banten	45,05	45,00	45,03
Bali	49,63	54,59	51,94
Nusa Tenggara Barat	56,75	52,41	54,60
Nusa Tenggara Timur	46,89	40,69	44,00
Kalimantan Barat	32,75	35,57	34,11
Kalimantan Tengah	47,77	49,60	48,66
Kalimantan Selatan	67,16	59,14	63,09
Kalimantan Timur	38,60	41,40	40,00
Kalimantan Utara	28,08	37,05	32,56
Sulawesi Utara	38,61	38,49	38,55
Sulawesi Tengah	49,27	49,98	49,62
Sulawesi Selatan	48,09	37,83	43,06
Sulawesi Tenggara	38,00	45,30	41,58
Gorontalo	53,72	68,70	60,16
Sulawesi Barat	55,26	59,58	57,31
Maluku	29,90	29,55	29,73
Maluku Utara	33,89	44,98	39,39
Papua Barat	29,33	37,10	33,07
Papua	25,64	28,03	26,84
Indonesia	52,45	52,89	52,66

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	35,97	47,31	41,33
Sumatera Utara	29,18	30,31	29,73
Sumatera Barat	36,69	41,29	38,98
Riau	36,89	41,33	39,02
Jambi	43,76	45,68	44,71
Sumatera Selatan	34,09	35,65	34,86
Bengkulu	36,60	38,01	37,27
Lampung	45,63	44,78	45,24
Kep. Bangka Belitung	36,47	44,93	40,79
Kepulauan Riau	47,53	59,87	53,31
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	46,16	46,92	46,53
Jawa Tengah	63,13	62,88	63,01
DI Yogyakarta	94,93	122,43	109,26
Jawa Timur	74,77	77,56	76,15
Banten	21,30	34,93	28,04
Bali	43,89	39,35	41,66
Nusa Tenggara Barat	52,15	56,47	54,29
Nusa Tenggara Timur	42,21	44,63	43,40
Kalimantan Barat	25,85	30,15	27,85
Kalimantan Tengah	48,35	51,04	49,70
Kalimantan Selatan	62,96	67,00	64,97
Kalimantan Timur	53,45	45,34	49,15
Kalimantan Utara	58,22	58,08	58,14
Sulawesi Utara	45,30	45,43	45,37
Sulawesi Tengah	60,77	56,23	58,46
Sulawesi Selatan	45,30	43,92	44,62
Sulawesi Tenggara	42,01	39,95	41,04
Gorontalo	66,04	75,47	70,40
Sulawesi Barat	53,22	61,91	57,40
Maluku	46,19	49,83	47,86
Maluku Utara	51,11	50,74	50,94
Papua Barat	35,56	39,47	37,45
Papua	13,44	15,20	14,29
Indonesia	47,47	50,01	48,71

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(2)	(3)	(4)
(1)			
Aceh	40,11	46,83	43,33
Sumatera Utara	31,49	32,64	32,06
Sumatera Barat	38,84	42,63	40,73
Riau	38,48	40,55	39,48
Jambi	41,11	42,89	42,01
Sumatera Selatan	32,79	35,16	33,97
Bengkulu	40,51	37,93	39,26
Lampung	43,79	46,07	44,87
Kep. Bangka Belitung	49,08	48,39	48,73
Kepulauan Riau	35,61	41,25	38,20
DKI Jakarta	52,36	53,54	52,90
Jawa Barat	47,22	48,06	47,63
Jawa Tengah	66,77	65,64	66,23
DI Yogyakarta	88,05	103,09	95,81
Jawa Timur	77,25	78,55	77,89
Banten	38,10	42,10	40,10
Bali	47,81	49,41	48,57
Nusa Tenggara Barat	54,24	54,63	54,43
Nusa Tenggara Timur	43,29	43,80	43,54
Kalimantan Barat	28,02	31,94	29,86
Kalimantan Tengah	48,14	50,53	49,32
Kalimantan Selatan	64,89	63,32	64,10
Kalimantan Timur	43,53	42,82	43,17
Kalimantan Utara	40,25	46,19	43,30
Sulawesi Utara	42,00	42,42	42,21
Sulawesi Tengah	57,58	54,61	56,08
Sulawesi Selatan	46,41	41,49	44,00
Sulawesi Tenggara	40,48	42,09	41,25
Gorontalo	61,39	73,11	66,67
Sulawesi Barat	53,69	61,39	57,38
Maluku	40,09	41,81	40,89
Maluku Utara	46,74	49,16	47,89
Papua Barat	33,20	38,57	35,79
Papua	16,42	18,52	17,45
Indonesia	50,15	51,55	50,83

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	36,25	34,04	35,16
Sumatera Utara	25,46	26,71	26,08
Sumatera Barat	31,03	33,16	32,08
Riau	29,81	27,58	28,71
Jambi	25,19	30,00	27,65
Sumatera Selatan	23,27	27,13	25,14
Bengkulu	35,22	26,68	30,89
Lampung	29,67	35,77	32,74
Kep. Bangka Belitung	42,17	39,67	40,99
Kepulauan Riau	26,87	27,00	26,93
DKI Jakarta	40,68	38,82	39,80
Jawa Barat	35,65	36,92	36,26
Jawa Tengah	52,84	51,90	52,40
DI Yogyakarta	63,56	68,96	66,39
Jawa Timur	57,77	59,11	58,43
Banten	33,48	34,42	33,95
Bali	37,11	37,95	37,52
Nusa Tenggara Barat	42,08	38,57	40,33
Nusa Tenggara Timur	35,69	31,80	33,90
Kalimantan Barat	25,17	26,23	25,69
Kalimantan Tengah	38,56	37,99	38,28
Kalimantan Selatan	47,84	45,67	46,78
Kalimantan Timur	28,68	31,25	29,96
Kalimantan Utara	22,10	28,28	25,23
Sulawesi Utara	29,12	26,99	28,08
Sulawesi Tengah	37,58	36,23	36,90
Sulawesi Selatan	34,81	27,58	31,28
Sulawesi Tenggara	28,79	34,75	31,69
Gorontalo	42,73	46,93	44,70
Sulawesi Barat	45,07	40,33	42,60
Maluku	22,39	21,74	22,08
Maluku Utara	24,34	34,61	29,25
Papua Barat	23,01	27,45	25,21
Papua	19,02	22,52	20,72
Indonesia	39,25	39,68	39,46

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	26,72	33,93	30,19
Sumatera Utara	22,27	22,91	22,59
Sumatera Barat	27,04	30,64	28,83
Riau	28,66	30,78	29,70
Jambi	32,46	34,57	33,49
Sumatera Selatan	24,44	26,82	25,60
Bengkulu	27,31	28,27	27,76
Lampung	34,35	32,30	33,38
Kep. Bangka Belitung	27,15	33,65	30,46
Kepulauan Riau	33,10	39,33	36,11
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	34,27	35,25	34,74
Jawa Tengah	46,38	47,64	46,99
DI Yogyakarta	71,83	85,82	79,38
Jawa Timur	54,16	56,23	55,18
Banten	15,17	25,12	20,07
Bali	33,14	29,21	31,19
Nusa Tenggara Barat	38,74	41,77	40,25
Nusa Tenggara Timur	30,99	33,52	32,22
Kalimantan Barat	19,91	22,08	20,95
Kalimantan Tengah	36,87	38,51	37,70
Kalimantan Selatan	46,10	49,31	47,69
Kalimantan Timur	37,57	35,24	36,39
Kalimantan Utara	42,37	43,06	42,73
Sulawesi Utara	34,75	35,57	35,18
Sulawesi Tengah	45,41	41,81	43,57
Sulawesi Selatan	32,93	32,58	32,76
Sulawesi Tenggara	31,97	29,63	30,85
Gorontalo	51,63	55,47	53,47
Sulawesi Barat	40,17	44,93	42,50
Maluku	36,23	36,40	36,31
Maluku Utara	37,25	37,69	37,46
Papua Barat	27,11	30,46	28,72
Papua	9,88	11,62	10,71
Indonesia	35,18	37,14	36,14

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	29,67	33,97	31,76
Sumatera Utara	23,86	24,82	24,34
Sumatera Barat	28,75	31,72	30,22
Riau	29,11	29,52	29,31
Jambi	30,32	33,13	31,71
Sumatera Selatan	24,01	26,93	25,43
Bengkulu	29,82	27,72	28,80
Lampung	33,05	33,36	33,20
Kep. Bangka Belitung	35,48	36,76	36,10
Kepulauan Riau	27,81	28,84	28,31
DKI Jakarta	40,68	38,82	39,80
Jawa Barat	35,30	36,48	35,87
Jawa Tengah	49,74	49,81	49,77
DI Yogyakarta	65,68	73,49	69,80
Jawa Timur	56,07	57,75	56,90
Banten	27,96	31,62	29,77
Bali	35,86	35,10	35,49
Nusa Tenggara Barat	40,25	40,32	40,29
Nusa Tenggara Timur	32,04	33,17	32,58
Kalimantan Barat	21,57	23,45	22,47
Kalimantan Tengah	37,47	38,33	37,90
Kalimantan Selatan	46,91	47,65	47,27
Kalimantan Timur	31,74	32,66	32,20
Kalimantan Utara	30,67	34,81	32,80
Sulawesi Utara	31,95	31,61	31,78
Sulawesi Tengah	43,26	40,33	41,77
Sulawesi Selatan	33,68	30,57	32,16
Sulawesi Tenggara	30,75	31,63	31,17
Gorontalo	48,30	52,36	50,23
Sulawesi Barat	41,22	43,85	42,53
Maluku	30,89	30,63	30,77
Maluku Utara	33,94	36,87	35,31
Papua Barat	25,58	29,29	27,39
Papua	12,10	14,34	13,17
Indonesia	37,36	38,50	37,92

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(2)	(3)	(4)
(1)			
Aceh	34,22	34,97	34,59
Sumatera Utara	24,87	26,51	25,69
Sumatera Barat	18,20	25,17	21,67
Riau	22,22	18,17	20,25
Jambi	19,76	31,49	26,06
Sumatera Selatan	26,07	29,45	27,75
Bengkulu	26,87	24,34	25,59
Lampung	25,29	32,00	28,60
Kep. Bangka Belitung	43,88	36,64	40,31
Kepulauan Riau	19,95	21,28	20,56
DKI Jakarta	33,38	33,06	33,23
Jawa Barat	30,41	33,15	31,74
Jawa Tengah	51,05	52,57	51,77
DI Yogyakarta	54,03	58,23	56,19
Jawa Timur	52,96	55,63	54,29
Banten	29,23	33,25	31,24
Bali	27,52	23,98	25,87
Nusa Tenggara Barat	34,72	31,92	33,33
Nusa Tenggara Timur	32,65	34,65	33,58
Kalimantan Barat	23,88	24,44	24,15
Kalimantan Tengah	34,40	35,22	34,80
Kalimantan Selatan	43,30	44,80	44,06
Kalimantan Timur	22,83	25,93	24,38
Kalimantan Utara	15,30	19,76	17,53
Sulawesi Utara	29,12	27,92	28,56
Sulawesi Tengah	34,53	33,55	34,05
Sulawesi Selatan	30,97	24,10	27,60
Sulawesi Tenggara	31,10	37,85	34,41
Gorontalo	39,97	44,01	41,70
Sulawesi Barat	41,00	36,30	38,78
Maluku	24,35	23,40	23,89
Maluku Utara	18,61	37,15	27,80
Papua Barat	20,51	21,79	21,13
Papua	19,36	23,21	21,30
Indonesia	34,77	36,65	35,69

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	26,40	34,46	30,21
Sumatera Utara	20,77	23,43	22,08
Sumatera Barat	18,09	24,19	21,13
Riau	23,87	27,47	25,59
Jambi	32,04	34,26	33,13
Sumatera Selatan	23,64	27,18	25,41
Bengkulu	22,75	27,30	24,90
Lampung	30,49	29,29	29,93
Kep. Bangka Belitung	25,26	29,91	27,63
Kepulauan Riau	20,91	42,61	31,07
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	27,96	30,78	29,34
Jawa Tengah	45,71	49,13	47,38
DI Yogyakarta	68,33	77,07	72,88
Jawa Timur	50,67	54,20	52,41
Banten	14,90	26,10	20,44
Bali	22,57	22,83	22,70
Nusa Tenggara Barat	36,69	41,65	39,15
Nusa Tenggara Timur	31,44	33,92	32,66
Kalimantan Barat	19,21	21,84	20,43
Kalimantan Tengah	34,51	37,90	36,21
Kalimantan Selatan	43,90	49,62	46,75
Kalimantan Timur	29,97	28,02	28,94
Kalimantan Utara	37,77	39,29	38,58
Sulawesi Utara	38,20	34,98	36,50
Sulawesi Tengah	42,83	40,45	41,62
Sulawesi Selatan	30,40	30,90	30,65
Sulawesi Tenggara	30,96	31,23	31,09
Gorontalo	48,08	56,86	52,14
Sulawesi Barat	39,63	44,24	41,85
Maluku	37,68	41,80	39,57
Maluku Utara	39,49	39,88	39,68
Papua Barat	22,94	29,26	25,99
Papua	9,56	9,67	9,62
Indonesia	32,56	35,87	34,18

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	28,80	34,63	31,60
Sumatera Utara	22,80	24,99	23,89
Sumatera Barat	18,14	24,61	21,36
Riau	23,25	23,94	23,58
Jambi	28,48	33,35	30,94
Sumatera Selatan	24,56	28,03	26,29
Bengkulu	24,02	26,31	25,13
Lampung	29,03	30,12	29,54
Kep. Bangka Belitung	35,33	33,44	34,38
Kepulauan Riau	20,08	24,27	22,01
DKI Jakarta	33,38	33,06	33,23
Jawa Barat	29,79	32,54	31,13
Jawa Tengah	48,52	50,88	49,66
DI Yogyakarta	57,74	63,21	60,56
Jawa Timur	51,88	54,97	53,41
Banten	25,04	31,19	28,11
Bali	25,95	23,59	24,83
Nusa Tenggara Barat	35,80	37,24	36,52
Nusa Tenggara Timur	31,71	34,07	32,86
Kalimantan Barat	20,68	22,70	21,63
Kalimantan Tengah	34,47	36,94	35,70
Kalimantan Selatan	43,63	47,36	45,50
Kalimantan Timur	25,20	26,68	25,96
Kalimantan Utara	24,37	28,25	26,36
Sulawesi Utara	33,72	31,91	32,82
Sulawesi Tengah	40,52	38,66	39,58
Sulawesi Selatan	30,63	28,19	29,43
Sulawesi Tenggara	31,01	33,88	32,39
Gorontalo	45,01	52,39	48,34
Sulawesi Barat	39,94	42,47	41,15
Maluku	32,69	34,53	33,55
Maluku Utara	34,20	39,13	36,55
Papua Barat	22,02	26,44	24,15
Papua	11,96	13,17	12,55
Indonesia	33,75	36,29	34,99

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	35,36	33,74	34,56
Sumatera Utara	25,46	26,71	26,08
Sumatera Barat	30,83	32,96	31,89
Riau	29,81	27,04	28,45
Jambi	23,98	29,31	26,70
Sumatera Selatan	23,22	27,13	25,12
Bengkulu	34,82	26,68	30,69
Lampung	29,67	35,77	32,74
Kep. Bangka Belitung	42,17	39,02	40,68
Kepulauan Riau	26,68	27,00	26,83
DKI Jakarta	39,88	38,65	39,30
Jawa Barat	35,45	36,88	36,14
Jawa Tengah	52,03	51,24	51,66
DI Yogyakarta	61,91	67,31	64,73
Jawa Timur	57,09	58,47	57,77
Banten	33,11	34,28	33,68
Bali	36,93	37,69	37,30
Nusa Tenggara Barat	41,57	38,05	39,82
Nusa Tenggara Timur	35,22	31,80	33,65
Kalimantan Barat	25,17	26,23	25,69
Kalimantan Tengah	38,36	37,99	38,18
Kalimantan Selatan	47,51	45,48	46,52
Kalimantan Timur	28,68	31,25	29,96
Kalimantan Utara	22,10	28,28	25,23
Sulawesi Utara	29,06	26,99	28,05
Sulawesi Tengah	37,58	36,23	36,90
Sulawesi Selatan	34,37	27,58	31,05
Sulawesi Tenggara	28,61	34,74	31,59
Gorontalo	42,73	46,93	44,70
Sulawesi Barat	43,46	40,33	41,83
Maluku	22,39	21,74	22,08
Maluku Utara	23,82	34,44	28,91
Papua Barat	22,62	27,45	25,02
Papua	18,69	22,52	20,54
Indonesia	38,84	39,43	39,13

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	26,35	33,63	29,86
Sumatera Utara	22,04	22,70	22,37
Sumatera Barat	26,81	30,19	28,49
Riau	28,41	29,92	29,15
Jambi	32,38	34,14	33,24
Sumatera Selatan	24,39	26,40	25,37
Bengkulu	27,31	27,94	27,61
Lampung	34,22	32,30	33,31
Kep. Bangka Belitung	26,11	33,65	29,95
Kepulauan Riau	29,20	37,90	33,40
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	34,27	35,05	34,65
Jawa Tengah	46,08	47,28	46,66
DI Yogyakarta	67,26	80,05	74,17
Jawa Timur	53,22	55,33	54,25
Banten	14,87	25,12	19,91
Bali	33,14	29,21	31,19
Nusa Tenggara Barat	37,34	41,33	39,33
Nusa Tenggara Timur	30,21	32,11	31,14
Kalimantan Barat	19,38	21,86	20,56
Kalimantan Tengah	36,87	38,24	37,56
Kalimantan Selatan	45,97	48,92	47,43
Kalimantan Timur	37,46	35,05	36,24
Kalimantan Utara	40,68	43,06	41,93
Sulawesi Utara	33,93	34,05	33,99
Sulawesi Tengah	44,49	41,35	42,88
Sulawesi Selatan	32,65	32,43	32,55
Sulawesi Tenggara	31,94	29,63	30,83
Gorontalo	49,65	54,11	51,78
Sulawesi Barat	39,13	43,34	41,19
Maluku	34,89	34,31	34,61
Maluku Utara	35,32	34,79	35,08
Papua Barat	26,45	30,05	28,18
Papua	9,63	10,79	10,18
Indonesia	34,72	36,59	35,63

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	29,14	33,66	31,33
Sumatera Utara	23,74	24,71	24,23
Sumatera Barat	28,53	31,38	29,95
Riau	28,96	28,79	28,87
Jambi	29,91	32,62	31,25
Sumatera Selatan	23,96	26,66	25,28
Bengkulu	29,69	27,51	28,63
Lampung	32,95	33,36	33,15
Kep. Bangka Belitung	35,01	36,42	35,70
Kepulauan Riau	27,06	28,62	27,82
DKI Jakarta	39,88	38,65	39,30
Jawa Barat	35,15	36,40	35,75
Jawa Tengah	49,17	49,30	49,23
DI Yogyakarta	63,28	70,73	67,21
Jawa Timur	55,26	56,99	56,11
Banten	27,61	31,52	29,54
Bali	35,74	34,93	35,34
Nusa Tenggara Barat	39,26	39,84	39,55
Nusa Tenggara Timur	31,34	32,04	31,68
Kalimantan Barat	21,20	23,30	22,21
Kalimantan Tengah	37,40	38,15	37,78
Kalimantan Selatan	46,69	47,35	47,01
Kalimantan Timur	31,70	32,59	32,15
Kalimantan Utara	29,95	34,81	32,46
Sulawesi Utara	31,51	30,79	31,15
Sulawesi Tengah	42,60	39,99	41,27
Sulawesi Selatan	33,34	30,48	31,95
Sulawesi Tenggara	30,66	31,63	31,13
Gorontalo	47,06	51,49	49,16
Sulawesi Barat	40,06	42,63	41,34
Maluku	30,07	29,37	29,73
Maluku Utara	32,37	34,70	33,46
Papua Barat	25,02	29,04	26,98
Papua	11,83	13,71	12,73
Indonesia	36,93	38,11	37,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perkotaan				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	99,95	99,18	87,38	51,13	58,28
Sumatera Utara	99,66	97,24	78,63	28,16	33,15
Sumatera Barat	99,53	97,18	88,87	50,19	55,45
Riau	99,57	96,22	80,81	38,39	44,07
Jambi	99,68	98,68	82,71	36,83	43,83
Sumatera Selatan	99,86	95,50	78,09	30,22	32,46
Bengkulu	99,89	99,04	86,11	45,60	49,55
Lampung	100,00	96,65	76,47	36,89	42,06
Kep, Bangka Belitung	99,83	95,83	72,72	17,53	21,20
Kepulauan Riau	99,51	99,69	85,16	18,52	19,89
DKI Jakarta	99,77	97,77	71,81	24,41	28,05
Jawa Barat	99,62	94,83	70,15	25,92	30,04
Jawa Tengah	99,77	96,20	74,38	27,02	31,11
DI Yogyakarta	99,95	99,88	90,07	57,74	62,87
Jawa Timur	99,67	98,08	78,80	29,53	32,26
Banten	99,66	96,63	72,43	25,62	29,88
Bali	99,66	98,90	82,16	30,82	33,76
Nusa Tenggara Barat	99,33	98,91	83,76	32,39	37,01
Nusa Tenggara Timur	98,72	97,51	86,78	49,52	53,43
Kalimantan Barat	98,96	95,74	79,99	38,20	42,91
Kalimantan Tengah	99,86	95,88	73,90	29,28	34,71
Kalimantan Selatan	99,86	92,74	74,22	32,96	37,62
Kalimantan Timur	99,91	98,77	83,71	34,67	40,59
Kalimantan Utara	97,94	97,08	77,80	28,24	31,61
Sulawesi Utara	99,26	96,21	76,15	27,62	30,28
Sulawesi Tengah	98,64	93,84	85,19	48,13	52,37
Sulawesi Selatan	99,48	93,83	73,64	47,35	51,99
Sulawesi Tenggara	99,71	96,40	82,66	47,14	51,85
Gorontalo	98,76	90,64	77,03	40,67	45,99
Sulawesi Barat	98,51	87,89	74,62	36,68	42,29
Maluku	99,73	98,82	83,14	50,31	55,28
Maluku Utara	99,06	99,13	82,75	43,37	48,41
Papua Barat	98,04	97,50	83,57	37,89	45,31
Papua	95,85	95,22	84,78	33,66	38,77
Indonesia	99,62	96,46	76,05	30,65	34,83

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.6.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perdesaan				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,81	98,20	80,90	22,85	26,52
Sumatera Utara	99,34	96,26	76,03	21,44	25,59
Sumatera Barat	99,50	95,78	78,50	17,63	20,71
Riau	98,76	94,14	74,82	18,78	22,22
Jambi	99,66	95,04	66,31	14,80	17,17
Sumatera Selatan	99,63	93,80	64,36	8,37	9,56
Bengkulu	99,86	96,53	75,60	20,51	23,15
Lampung	99,81	94,27	68,28	12,19	14,48
Kep. Bangka Belitung	99,87	89,00	61,31	14,26	15,98
Kepulauan Riau	99,59	96,80	76,10	15,96	18,34
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	99,25	92,27	58,74	8,58	10,06
Jawa Tengah	99,75	95,34	63,34	16,06	18,99
DI Yogyakarta	99,76	99,26	83,64	22,14	25,75
Jawa Timur	99,56	95,83	65,11	14,81	16,55
Banten	98,84	94,00	58,77	6,77	7,91
Bali	99,37	96,22	82,72	18,17	20,65
Nusa Tenggara Barat	99,52	96,70	70,77	19,02	21,29
Nusa Tenggara Timur	98,17	94,28	70,30	19,75	22,53
Kalimantan Barat	98,18	91,50	61,68	15,82	19,03
Kalimantan Tengah	99,52	92,65	62,79	20,74	25,01
Kalimantan Selatan	99,47	92,21	62,89	15,04	17,64
Kalimantan Timur	99,49	99,12	77,21	19,56	23,32
Kalimantan Utara	98,61	95,44	72,68	14,84	17,34
Sulawesi Utara	99,45	93,80	70,98	13,73	15,30
Sulawesi Tengah	98,11	92,35	69,95	16,87	18,84
Sulawesi Selatan	99,09	92,68	68,71	21,75	23,26
Sulawesi Tenggara	99,05	92,97	67,18	15,75	18,37
Gorontalo	98,77	91,82	67,09	22,99	26,17
Sulawesi Barat	98,17	90,53	66,82	19,94	23,05
Maluku	99,69	95,79	76,02	26,81	30,48
Maluku Utara	99,09	96,92	73,49	24,79	29,75
Papua Barat	96,87	96,80	78,76	25,78	29,55
Papua	78,47	74,64	56,08	17,90	21,13
Indonesia	98,78	94,13	67,16	15,83	18,29

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.6.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Laki-Laki				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,88	98,44	81,18	29,55	33,70
Sumatera Utara	99,48	96,26	73,88	24,19	28,21
Sumatera Barat	99,45	94,79	78,54	32,52	36,69
Riau	98,97	93,55	72,56	28,95	33,04
Jambi	99,58	96,23	69,56	19,30	22,30
Sumatera Selatan	99,73	93,80	65,27	16,24	18,10
Bengkulu	99,84	96,42	75,13	26,36	28,83
Lampung	99,85	94,09	68,60	19,55	22,37
Kep. Bangka Belitung	99,89	89,46	63,69	14,68	17,32
Kepulauan Riau	99,74	99,02	83,44	18,59	19,85
DKI Jakarta	99,93	97,79	72,73	23,89	27,44
Jawa Barat	99,48	92,90	66,60	22,46	26,21
Jawa Tengah	99,72	94,84	69,35	21,98	25,53
DI Yogyakarta	99,87	99,83	86,79	50,53	53,82
Jawa Timur	99,56	96,56	72,73	22,83	24,99
Banten	99,49	94,74	69,00	19,00	22,11
Bali	99,39	98,63	81,78	26,35	28,94
Nusa Tenggara Barat	99,07	97,00	80,78	26,48	29,67
Nusa Tenggara Timur	98,09	93,76	72,84	28,34	31,63
Kalimantan Barat	98,36	91,81	65,00	25,41	29,89
Kalimantan Tengah	99,63	93,38	66,04	22,55	27,34
Kalimantan Selatan	99,82	92,07	69,33	26,11	29,43
Kalimantan Timur	99,59	98,07	79,53	31,91	36,40
Kalimantan Utara	98,02	94,42	74,76	21,96	24,66
Sulawesi Utara	99,34	93,06	70,46	18,35	20,54
Sulawesi Tengah	97,96	90,80	71,75	26,84	28,79
Sulawesi Selatan	99,07	91,38	66,91	30,07	32,64
Sulawesi Tenggara	99,19	94,79	70,51	31,28	35,26
Gorontalo	98,33	87,64	69,60	28,74	31,48
Sulawesi Barat	98,12	86,93	64,46	21,62	24,74
Maluku	99,71	97,05	78,77	35,22	39,06
Maluku Utara	98,93	97,41	74,93	28,49	32,28
Papua Barat	97,90	96,97	80,30	29,16	34,28
Papua	82,16	80,78	65,67	23,76	28,00
Indonesia	99,17	94,51	70,98	24,03	27,36

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.6.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perempuan				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,84	98,54	84,74	35,74	41,69
Sumatera Utara	99,51	97,27	80,92	26,50	31,91
Sumatera Barat	99,57	97,92	87,81	35,22	39,82
Riau	99,18	96,30	82,45	25,26	30,12
Jambi	99,76	96,05	74,47	25,11	30,12
Sumatera Selatan	99,69	95,08	74,25	18,09	19,86
Bengkulu	99,90	98,37	83,72	32,25	36,23
Lampung	99,87	95,99	73,14	21,75	25,88
Kep. Bangka Belitung	99,81	96,35	70,59	17,44	20,22
Kepulauan Riau	99,32	99,39	84,19	17,86	19,60
DKI Jakarta	99,59	97,75	70,88	24,88	28,61
Jawa Barat	99,57	95,53	67,74	21,44	24,70
Jawa Tengah	99,80	96,81	68,68	21,85	25,56
DI Yogyakarta	99,93	99,59	90,15	52,84	59,84
Jawa Timur	99,67	97,54	71,62	22,88	25,39
Banten	99,29	96,89	67,66	21,88	25,53
Bali	99,75	97,14	82,90	28,18	31,17
Nusa Tenggara Barat	99,84	98,41	72,74	25,01	29,26
Nusa Tenggara Timur	98,47	96,21	76,90	28,19	31,93
Kalimantan Barat	98,51	93,90	71,75	22,25	25,91
Kalimantan Tengah	99,68	94,35	67,89	26,13	30,71
Kalimantan Selatan	99,46	92,84	67,94	21,48	25,92
Kalimantan Timur	99,93	99,80	83,72	27,51	33,47
Kalimantan Utara	98,48	98,44	76,54	24,36	27,66
Sulawesi Utara	99,39	97,09	77,08	24,92	27,06
Sulawesi Tengah	98,53	94,68	78,58	27,49	31,22
Sulawesi Selatan	99,44	94,92	74,87	37,41	41,05
Sulawesi Tenggara	99,38	93,76	76,35	28,72	32,72
Gorontalo	99,23	95,18	71,91	32,44	37,99
Sulawesi Barat	98,39	92,94	73,20	26,70	31,39
Maluku	99,70	97,04	79,51	40,43	45,48
Maluku Utara	99,25	97,54	77,68	34,42	41,19
Papua Barat	96,69	97,19	81,42	32,74	38,09
Papua	82,72	79,14	60,87	22,91	26,51
Indonesia	99,27	96,26	73,04	24,79	28,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.6.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,86	98,49	82,92	32,59	37,61
Sumatera Utara	99,50	96,75	77,41	25,31	29,97
Sumatera Barat	99,51	96,37	83,08	33,87	38,23
Riau	99,07	94,95	77,27	27,19	31,68
Jambi	99,67	96,14	71,94	22,16	26,16
Sumatera Selatan	99,71	94,41	69,65	17,15	18,98
Bengkulu	99,87	97,36	79,33	29,15	32,34
Lampung	99,86	95,00	70,83	20,60	24,06
Kep. Bangka Belitung	99,85	92,70	67,11	15,99	18,66
Kepulauan Riau	99,52	99,20	83,78	18,24	19,73
DKI Jakarta	99,77	97,77	71,81	24,41	28,05
Jawa Barat	99,52	94,15	67,17	21,96	25,46
Jawa Tengah	99,76	95,79	69,02	21,92	25,54
DI Yogyakarta	99,90	99,72	88,39	51,69	56,81
Jawa Timur	99,62	97,02	72,18	22,86	25,19
Banten	99,39	95,79	68,35	20,42	23,78
Bali	99,56	97,92	82,35	27,24	30,02
Nusa Tenggara Barat	99,43	97,72	76,89	25,74	29,46
Nusa Tenggara Timur	98,28	94,95	74,83	28,27	31,78
Kalimantan Barat	98,43	92,84	68,35	23,86	27,91
Kalimantan Tengah	99,66	93,87	66,95	24,27	28,97
Kalimantan Selatan	99,64	92,43	68,66	23,82	27,71
Kalimantan Timur	99,76	98,89	81,55	29,84	35,06
Kalimantan Utara	98,24	96,38	75,62	23,04	26,01
Sulawesi Utara	99,36	95,00	73,67	21,45	23,62
Sulawesi Tengah	98,24	92,74	75,05	27,15	29,95
Sulawesi Selatan	99,25	93,13	70,81	33,72	36,80
Sulawesi Tenggara	99,28	94,29	73,47	30,01	34,02
Gorontalo	98,76	91,38	70,75	30,58	34,64
Sulawesi Barat	98,25	89,95	68,69	24,10	27,96
Maluku	99,71	97,05	79,12	37,82	42,26
Maluku Utara	99,08	97,47	76,36	31,36	36,56
Papua Barat	97,31	97,08	80,81	30,84	36,07
Papua	82,43	80,00	63,48	23,37	27,30
Indonesia	99,22	95,36	71,99	24,40	27,92

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.7.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perkotaan				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	111,74	100,48	93,02	60,54	71,49
Sumatera Utara	110,31	89,73	94,68	32,86	39,59
Sumatera Barat	108,32	96,17	88,83	59,19	70,26
Riau	104,88	95,86	94,22	41,89	49,81
Jambi	110,01	90,63	96,83	50,70	61,55
Sumatera Selatan	112,85	91,26	87,52	39,23	46,42
Bengkulu	114,37	94,09	95,10	55,07	64,63
Lampung	109,75	93,10	98,10	34,45	40,75
Kep. Bangka Belitung	110,12	86,51	94,22	13,02	16,23
Kepulauan Riau	106,89	93,27	90,38	24,04	29,83
DKI Jakarta	105,27	94,91	73,98	30,62	36,71
Jawa Barat	106,21	91,25	80,45	24,82	29,86
Jawa Tengah	106,99	91,84	90,25	25,46	30,36
DI Yogyakarta	105,87	91,75	89,90	69,71	80,02
Jawa Timur	105,07	94,93	88,98	35,56	42,08
Banten	108,29	93,55	76,53	35,17	42,88
Bali	102,84	95,94	86,21	36,86	44,12
Nusa Tenggara Barat	108,44	94,06	97,23	32,08	37,76
Nusa Tenggara Timur	112,12	95,81	98,97	51,74	59,47
Kalimantan Barat	115,27	90,71	87,54	38,77	45,19
Kalimantan Tengah	108,45	90,74	87,61	29,74	36,69
Kalimantan Selatan	106,84	93,75	78,80	31,66	37,13
Kalimantan Timur	108,44	90,87	98,13	35,98	43,51
Kalimantan Utara	104,41	93,63	100,85	21,18	25,71
Sulawesi Utara	107,62	88,79	87,72	38,70	46,24
Sulawesi Tengah	104,58	92,89	102,15	64,12	76,15
Sulawesi Selatan	108,86	91,29	85,18	51,34	60,93
Sulawesi Tenggara	110,18	87,57	96,55	63,44	73,07
Gorontalo	111,20	80,51	86,70	44,01	51,99
Sulawesi Barat	107,95	79,91	97,74	42,18	48,93
Maluku	110,12	94,52	97,18	57,17	67,81
Maluku Utara	110,65	93,68	89,75	62,00	71,92
Papua Barat	104,41	89,22	107,09	38,48	46,68
Papua	106,94	103,23	110,32	25,38	30,39
Indonesia	107,22	92,60	86,64	33,81	40,39

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.7.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perdesaan				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	114,77	98,82	81,09	24,05	29,02
Sumatera Utara	111,86	90,23	88,05	15,83	19,39
Sumatera Barat	112,91	87,10	80,12	14,53	17,64
Riau	108,20	93,11	76,68	18,35	22,18
Jambi	112,83	86,22	69,59	16,01	19,67
Sumatera Selatan	114,86	83,83	71,06	9,85	12,12
Bengkulu	113,15	91,08	80,33	20,35	24,26
Lampung	110,24	94,65	74,09	9,02	10,99
Kep. Bangka Belitung	112,27	85,24	69,78	8,53	10,01
Kepulauan Riau	109,71	88,38	94,39	7,29	9,22
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	106,33	90,15	60,80	7,79	9,31
Jawa Tengah	109,41	92,09	77,66	9,89	12,08
DI Yogyakarta	105,75	112,25	80,45	18,62	22,37
Jawa Timur	108,48	94,94	68,56	12,69	15,22
Banten	112,08	87,80	60,38	7,20	8,71
Bali	103,34	96,47	90,75	14,39	17,03
Nusa Tenggara Barat	109,13	93,63	82,87	16,72	21,08
Nusa Tenggara Timur	117,64	86,59	69,80	14,39	17,62
Kalimantan Barat	117,75	79,47	74,49	7,63	9,37
Kalimantan Tengah	111,04	98,85	67,18	14,38	17,35
Kalimantan Selatan	113,02	80,84	72,44	12,51	15,52
Kalimantan Timur	107,23	95,62	92,00	15,72	18,94
Kalimantan Utara	99,64	115,43	73,62	12,72	15,18
Sulawesi Utara	110,27	88,16	76,33	17,57	20,97
Sulawesi Tengah	105,51	92,87	74,17	19,17	23,00
Sulawesi Selatan	111,27	84,13	79,19	19,65	23,66
Sulawesi Tenggara	111,15	83,76	76,81	18,98	23,05
Gorontalo	112,39	79,97	82,82	19,36	22,71
Sulawesi Barat	108,75	83,04	80,30	18,33	22,03
Maluku	113,53	96,34	79,45	25,35	30,88
Maluku Utara	114,73	90,23	87,28	21,32	25,91
Papua Barat	114,54	89,99	78,63	23,90	28,43
Papua	90,79	82,38	49,34	10,66	12,92
Indonesia	110,15	90,31	73,57	13,17	15,97

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.7.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Laki-Laki				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	114,09	100,20	82,60	33,47	40,02
Sumatera Utara	110,57	91,77	87,47	23,31	27,89
Sumatera Barat	111,85	90,15	77,10	34,19	40,63
Riau	105,92	92,55	79,51	29,03	34,10
Jambi	112,28	89,35	73,41	25,28	30,98
Sumatera Selatan	115,51	84,30	75,52	19,08	23,39
Bengkulu	112,24	89,36	85,31	26,97	31,90
Lampung	109,83	93,49	79,08	15,52	18,75
Kep. Bangka Belitung	113,88	81,00	81,04	8,96	10,61
Kepulauan Riau	107,47	94,38	87,11	23,28	29,24
DKI Jakarta	104,62	97,21	71,49	31,72	37,82
Jawa Barat	106,76	88,32	77,20	20,02	24,32
Jawa Tengah	108,74	90,72	86,06	17,29	20,86
DI Yogyakarta	107,89	96,01	86,25	59,06	67,21
Jawa Timur	107,28	95,47	80,06	22,91	27,36
Banten	109,51	88,65	74,18	25,93	31,45
Bali	103,43	97,00	87,59	29,26	34,64
Nusa Tenggara Barat	107,78	95,84	93,39	23,82	29,05
Nusa Tenggara Timur	118,71	87,68	74,23	22,95	27,18
Kalimantan Barat	116,39	82,29	78,59	19,76	24,19
Kalimantan Tengah	110,61	94,10	71,75	19,41	23,92
Kalimantan Selatan	111,42	86,06	75,31	22,98	27,46
Kalimantan Timur	109,54	95,38	95,99	29,54	34,98
Kalimantan Utara	103,09	104,86	89,80	12,46	15,07
Sulawesi Utara	109,08	85,55	78,86	25,71	30,70
Sulawesi Tengah	106,32	89,33	79,36	29,81	35,20
Sulawesi Selatan	109,83	85,74	77,20	30,67	36,45
Sulawesi Tenggara	110,34	86,79	86,60	38,46	44,95
Gorontalo	110,29	78,85	84,20	25,95	29,90
Sulawesi Barat	106,77	82,41	78,07	22,00	25,97
Maluku	111,37	95,56	83,26	36,61	44,11
Maluku Utara	114,31	89,03	91,60	35,13	41,58
Papua Barat	112,07	90,35	92,29	26,71	31,98
Papua	95,43	91,52	67,10	15,79	19,23
Indonesia	108,91	90,82	80,33	23,59	28,34

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.7.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perempuan				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	113,61	98,35	87,10	39,87	47,85
Sumatera Utara	111,66	88,08	95,65	28,12	34,63
Sumatera Barat	110,08	91,68	91,11	39,45	47,85
Riau	107,99	95,76	88,65	27,81	34,20
Jambi	111,66	85,77	84,83	29,98	36,66
Sumatera Selatan	112,70	88,92	79,38	24,30	29,07
Bengkulu	114,95	95,00	85,85	38,22	45,44
Lampung	110,39	94,93	84,13	20,03	24,10
Kep. Bangka Belitung	108,40	91,46	83,41	13,05	16,23
Kepulauan Riau	107,13	90,46	95,67	21,08	25,92
DKI Jakarta	105,95	92,42	76,52	29,63	35,71
Jawa Barat	105,70	93,86	73,40	21,88	25,97
Jawa Tengah	107,59	93,28	82,15	19,16	23,09
DI Yogyakarta	103,60	98,12	88,72	62,97	74,04
Jawa Timur	106,08	94,34	78,13	27,51	32,65
Banten	109,49	94,91	69,08	29,02	35,44
Bali	102,56	95,18	87,89	31,81	38,27
Nusa Tenggara Barat	109,98	91,91	85,64	25,07	30,44
Nusa Tenggara Timur	114,42	89,38	81,52	27,26	33,27
Kalimantan Barat	117,59	83,80	79,91	17,85	21,16
Kalimantan Tengah	109,38	97,47	78,03	22,17	26,66
Kalimantan Selatan	108,96	86,30	76,08	20,79	25,32
Kalimantan Timur	106,49	89,44	96,19	29,47	36,41
Kalimantan Utara	101,43	100,95	88,62	24,56	29,49
Sulawesi Utara	108,96	91,62	85,86	33,34	39,82
Sulawesi Tengah	104,18	96,44	88,00	38,42	46,56
Sulawesi Selatan	110,76	88,22	86,46	38,31	46,11
Sulawesi Tenggara	111,32	83,57	83,11	39,90	47,96
Gorontalo	113,74	81,52	84,30	33,99	40,87
Sulawesi Barat	110,46	82,30	91,31	26,61	32,02
Maluku	113,16	95,60	91,58	43,92	52,76
Maluku Utara	113,13	93,39	84,80	36,34	43,86
Papua Barat	109,30	88,97	88,89	33,69	40,46
Papua	93,44	83,71	62,64	15,74	18,80
Indonesia	108,29	92,25	81,04	26,70	32,09

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.7.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan, Laki-Laki+Perempuan				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	113,85	99,30	84,80	36,61	43,86
Sumatera Utara	111,10	89,98	91,57	25,64	31,11
Sumatera Barat	110,99	90,92	83,97	36,81	44,19
Riau	106,92	94,18	83,87	28,45	34,15
Jambi	111,98	87,55	78,93	27,60	33,78
Sumatera Selatan	114,14	86,51	77,40	21,65	26,23
Bengkulu	113,53	92,08	85,57	32,31	38,31
Lampung	110,11	94,18	81,56	17,68	21,32
Kep. Bangka Belitung	111,15	85,93	82,21	10,90	13,20
Kepulauan Riau	107,30	92,44	90,99	22,23	27,64
DKI Jakarta	105,27	94,91	73,98	30,62	36,71
Jawa Barat	106,24	90,96	75,31	20,93	25,14
Jawa Tengah	108,18	91,96	84,15	18,22	21,96
DI Yogyakarta	105,84	96,98	87,43	61,04	70,60
Jawa Timur	106,69	94,93	79,11	25,19	29,99
Banten	109,50	91,71	71,70	27,45	33,40
Bali	103,02	96,14	87,74	30,51	36,40
Nusa Tenggara Barat	108,82	93,83	89,64	24,44	29,75
Nusa Tenggara Timur	116,58	88,51	77,81	25,07	30,14
Kalimantan Barat	116,97	83,04	79,25	18,82	22,68
Kalimantan Tengah	110,02	95,79	74,83	20,73	25,24
Kalimantan Selatan	110,21	86,17	75,68	21,90	26,41
Kalimantan Timur	108,02	92,57	96,08	29,51	35,64
Kalimantan Utara	102,31	102,95	89,23	17,90	21,58
Sulawesi Utara	109,02	88,47	82,25	29,31	35,00
Sulawesi Tengah	105,28	92,88	83,53	33,96	40,61
Sulawesi Selatan	110,28	86,97	81,74	34,47	41,23
Sulawesi Tenggara	110,81	85,23	84,83	39,18	46,42
Gorontalo	111,95	80,17	84,25	29,94	35,23
Sulawesi Barat	108,56	82,36	84,48	24,26	28,90
Maluku	112,25	95,58	87,15	40,25	48,42
Maluku Utara	113,74	91,10	88,04	35,71	42,68
Papua Barat	110,72	89,68	90,74	29,99	35,97
Papua	94,47	87,81	65,07	15,77	19,03
Indonesia	108,61	91,52	80,68	25,12	30,19

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.8.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perkotaan				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	98,26	89,73	75,99	45,08	51,14
Sumatera Utara	96,33	78,39	67,36	22,65	26,52
Sumatera Barat	97,74	79,68	70,57	43,99	48,09
Riau	95,98	79,07	69,02	32,97	37,63
Jambi	97,61	79,42	70,00	28,64	33,89
Sumatera Selatan	94,88	73,55	64,38	24,55	25,75
Bengkulu	98,62	80,62	70,41	35,72	37,96
Lampung	99,07	79,73	64,11	25,61	28,72
Kep. Bangka Belitung	96,68	75,47	65,45	10,68	12,67
Kepulauan Riau	99,04	84,61	72,97	17,36	18,46
DKI Jakarta	98,03	80,81	60,01	22,13	25,42
Jawa Barat	98,60	82,02	60,11	20,48	23,50
Jawa Tengah	97,72	80,48	64,19	19,10	21,66
DI Yogyakarta	99,60	80,74	71,74	54,04	58,63
Jawa Timur	98,03	84,02	68,79	23,26	24,84
Banten	98,60	82,62	61,35	22,63	26,23
Bali	96,39	85,88	72,33	29,17	31,79
Nusa Tenggara Barat	99,13	86,32	73,00	23,19	26,18
Nusa Tenggara Timur	92,77	69,81	66,49	35,06	36,82
Kalimantan Barat	96,19	67,54	59,65	29,16	32,38
Kalimantan Tengah	99,08	74,46	58,76	20,38	23,74
Kalimantan Selatan	98,18	78,22	63,72	27,92	31,71
Kalimantan Timur	99,06	78,48	68,51	26,77	31,05
Kalimantan Utara	96,25	79,06	67,95	14,85	15,36
Sulawesi Utara	92,77	72,85	65,40	26,82	29,32
Sulawesi Tengah	91,40	69,62	75,48	39,93	42,64
Sulawesi Selatan	97,43	77,01	61,68	40,12	43,41
Sulawesi Tenggara	95,69	77,29	69,23	42,18	46,15
Gorontalo	98,76	69,97	56,73	34,26	38,41
Sulawesi Barat	95,48	64,77	61,95	24,90	28,62
Maluku	92,84	72,61	71,02	45,38	49,43
Maluku Utara	94,90	78,59	65,59	38,27	42,49
Papua Barat	92,60	72,61	72,53	27,58	32,87
Papua	92,47	73,32	69,55	19,82	22,20
Indonesia	97,74	80,61	64,65	24,75	27,79

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.8.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perdesaan				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,46	85,02	67,67	18,34	21,08
Sumatera Utara	98,87	80,12	67,16	13,94	16,40
Sumatera Barat	99,31	75,18	65,03	11,87	13,71
Riau	98,06	79,15	59,62	13,57	15,92
Jambi	99,66	79,36	56,18	12,34	14,16
Sumatera Selatan	99,54	78,81	57,04	7,10	8,01
Bengkulu	98,63	76,75	62,71	14,43	15,90
Lampung	99,26	80,44	56,95	5,76	6,65
Kep. Bangka Belitung	98,82	72,17	49,99	7,44	7,97
Kepulauan Riau	99,59	84,48	72,52	6,62	6,54
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	97,28	78,20	49,50	5,75	6,68
Jawa Tengah	97,79	78,04	54,13	8,06	9,25
DI Yogyakarta	99,24	92,00	65,91	11,93	14,22
Jawa Timur	97,72	79,69	53,73	10,07	10,89
Banten	96,64	77,26	52,54	6,39	7,45
Bali	95,81	86,20	74,32	11,09	12,26
Nusa Tenggara Barat	98,64	81,79	59,34	11,73	12,11
Nusa Tenggara Timur	96,92	67,70	48,82	9,32	9,93
Kalimantan Barat	97,51	65,16	46,30	4,88	5,69
Kalimantan Tengah	99,08	78,06	50,59	10,45	12,61
Kalimantan Selatan	99,31	70,76	51,62	9,79	11,26
Kalimantan Timur	97,18	81,84	68,28	12,74	15,10
Kalimantan Utara	88,25	77,05	58,81	9,05	10,42
Sulawesi Utara	96,86	75,49	60,05	12,74	14,12
Sulawesi Tengah	93,28	74,45	58,61	14,40	15,99
Sulawesi Selatan	98,45	73,90	58,81	16,48	16,91
Sulawesi Tenggara	98,47	76,23	58,52	12,43	14,34
Gorontalo	98,17	68,94	57,76	15,24	17,09
Sulawesi Barat	95,95	70,73	56,20	14,22	16,18
Maluku	97,57	75,13	58,04	20,39	22,66
Maluku Utara	97,78	75,54	63,11	16,28	19,51
Papua Barat	94,29	66,76	56,14	18,30	20,81
Papua	75,21	51,37	35,55	6,61	7,57
Indonesia	97,40	76,86	55,93	10,12	11,40

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.8.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Laki-Laki				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	99,27	86,33	67,86	24,51	27,66
Sumatera Utara	97,98	80,71	64,13	17,31	19,97
Sumatera Barat	98,82	74,43	61,15	25,67	28,54
Riau	97,28	76,96	60,03	23,23	26,32
Jambi	99,19	80,92	58,78	15,97	18,22
Sumatera Selatan	98,27	75,95	56,86	12,59	13,63
Bengkulu	98,50	75,82	62,77	18,72	19,80
Lampung	99,59	79,05	56,70	11,32	12,43
Kep. Bangka Belitung	98,31	70,77	54,19	6,75	7,94
Kepulauan Riau	99,57	85,61	71,92	16,06	16,67
DKI Jakarta	98,47	82,83	59,10	21,92	25,09
Jawa Barat	98,60	80,19	58,08	16,65	19,15
Jawa Tengah	97,77	77,89	59,67	12,60	14,21
DI Yogyakarta	99,55	82,41	67,44	44,14	46,79
Jawa Timur	97,99	81,67	61,29	15,89	16,73
Banten	98,31	78,03	59,41	16,35	18,90
Bali	96,60	87,21	72,38	22,45	24,32
Nusa Tenggara Barat	98,72	84,82	69,05	16,90	17,99
Nusa Tenggara Timur	96,37	65,79	49,65	14,94	15,90
Kalimantan Barat	97,26	65,85	48,67	14,27	16,24
Kalimantan Tengah	99,12	74,07	51,33	13,12	15,72
Kalimantan Selatan	99,39	73,42	57,15	19,46	21,48
Kalimantan Timur	98,34	81,45	66,38	22,34	25,07
Kalimantan Utara	93,11	79,34	62,78	8,55	8,44
Sulawesi Utara	94,91	71,41	60,00	17,93	20,05
Sulawesi Tengah	93,70	69,63	60,19	21,39	22,51
Sulawesi Selatan	97,91	74,16	57,50	23,98	25,41
Sulawesi Tenggara	97,33	78,19	62,76	25,72	28,76
Gorontalo	97,96	65,00	55,93	20,41	21,88
Sulawesi Barat	95,57	67,98	52,00	13,54	15,21
Maluku	95,93	73,42	61,64	29,64	32,33
Maluku Utara	97,19	75,92	64,64	21,44	24,05
Papua Barat	94,47	69,57	65,69	18,51	21,70
Papua	79,46	58,51	45,27	10,37	11,70
Indonesia	97,79	78,18	59,74	17,33	19,32

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.8.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perempuan				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	98,91	86,44	72,77	30,70	35,65
Sumatera Utara	97,26	77,70	70,39	20,71	24,78
Sumatera Barat	98,48	79,65	74,06	30,13	33,64
Riau	97,24	81,19	67,25	20,42	24,16
Jambi	98,88	77,85	63,20	19,67	23,47
Sumatera Selatan	97,42	77,96	63,03	15,68	16,98
Bengkulu	98,76	80,42	68,24	25,14	27,78
Lampung	98,81	81,51	61,74	13,83	16,35
Kep. Bangka Belitung	97,10	77,54	61,58	11,82	13,23
Kepulauan Riau	98,69	83,55	74,08	16,35	17,75
DKI Jakarta	97,56	78,63	60,94	22,32	25,72
Jawa Barat	97,90	81,91	56,58	17,60	20,14
Jawa Tengah	97,74	80,82	58,94	15,35	17,75
DI Yogyakarta	99,44	85,02	73,27	49,60	56,02
Jawa Timur	97,77	82,32	61,72	18,70	20,43
Banten	97,61	83,92	57,99	20,01	23,23
Bali	95,75	84,65	73,61	25,74	28,24
Nusa Tenggara Barat	99,02	82,98	62,28	18,08	20,85
Nusa Tenggara Timur	95,87	70,62	57,85	18,48	20,17
Kalimantan Barat	96,92	65,97	53,69	12,92	14,97
Kalimantan Tengah	99,03	79,32	56,09	16,12	18,66
Kalimantan Selatan	98,18	74,31	58,47	17,88	21,67
Kalimantan Timur	98,47	77,71	70,65	22,23	26,96
Kalimantan Utara	92,28	77,00	65,41	17,55	19,48
Sulawesi Utara	94,95	77,15	65,84	23,51	25,38
Sulawesi Tengah	91,88	76,79	68,61	24,31	27,37
Sulawesi Selatan	98,16	76,12	62,66	31,13	33,49
Sulawesi Tenggara	97,71	74,99	62,98	26,18	29,67
Gorontalo	98,84	73,73	58,85	26,44	30,77
Sulawesi Barat	96,12	70,86	63,53	20,36	23,77
Maluku	95,68	74,79	66,00	34,57	38,44
Maluku Utara	96,98	76,74	63,19	26,84	32,04
Papua Barat	92,80	68,62	60,05	26,31	30,42
Papua	78,81	55,52	43,18	12,15	13,82
Indonesia	97,37	79,55	61,64	19,89	22,62

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 3.8.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan, Laki-Laki+Perempuan				
	SD	SMP	SM	PT (19-24 th)	PT (19-23 th)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	99,10	86,38	70,26	27,55	31,58
Sumatera Utara	97,63	79,25	67,27	18,96	22,27
Sumatera Barat	98,66	77,08	67,48	27,89	31,05
Riau	97,26	79,12	63,47	21,89	25,32
Jambi	99,04	79,38	60,92	17,79	20,81
Sumatera Selatan	97,85	76,91	59,87	14,11	15,30
Bengkulu	98,63	78,03	65,45	21,76	23,57
Lampung	99,21	80,23	59,18	12,52	14,31
Kep. Bangka Belitung	97,71	73,96	57,86	9,15	10,38
Kepulauan Riau	99,12	84,59	72,90	16,20	17,19
DKI Jakarta	98,03	80,81	60,01	22,13	25,42
Jawa Barat	98,25	81,01	57,33	17,12	19,64
Jawa Tengah	97,75	79,31	59,31	13,96	15,96
DI Yogyakarta	99,50	83,61	70,22	46,89	51,37
Jawa Timur	97,88	81,98	61,51	17,28	18,56
Banten	97,97	80,91	58,72	18,15	21,02
Bali	96,19	86,00	73,00	24,06	26,22
Nusa Tenggara Barat	98,86	83,88	65,77	17,49	19,42
Nusa Tenggara Timur	96,12	68,14	53,67	16,69	17,97
Kalimantan Barat	97,09	65,91	51,16	13,61	15,61
Kalimantan Tengah	99,08	76,70	53,67	14,56	17,15
Kalimantan Selatan	98,80	73,84	57,78	18,68	21,57
Kalimantan Timur	98,40	79,68	68,43	22,29	25,94
Kalimantan Utara	92,72	78,20	64,05	12,59	13,42
Sulawesi Utara	94,93	74,18	62,83	20,57	22,56
Sulawesi Tengah	92,82	73,20	64,25	22,80	24,82
Sulawesi Selatan	98,03	75,13	60,03	27,54	29,40
Sulawesi Tenggara	97,51	76,64	62,87	25,95	29,20
Gorontalo	98,39	69,33	57,38	23,41	26,21
Sulawesi Barat	95,83	69,43	57,58	16,87	19,35
Maluku	95,80	74,08	63,68	32,10	35,38
Maluku Utara	97,09	76,31	63,88	24,06	27,89
Papua Barat	93,66	69,11	63,11	22,18	25,80
Papua	79,14	57,09	44,31	11,19	12,69
Indonesia	97,58	78,84	60,67	18,59	20,94

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.1.1 Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,06	70,13	68,60
Sumatera Utara	68,78	72,98	70,89
Sumatera Barat	71,86	77,59	74,78
Riau	77,50	79,80	78,63
Jambi	76,69	79,77	78,27
Sumatera Selatan	68,79	73,85	71,31
Bengkulu	75,63	75,73	75,68
Lampung	67,27	69,92	68,59
Kep. Bangka Belitung	75,39	75,60	75,49
Kepulauan Riau	71,09	66,65	68,85
DKI Jakarta	66,49	69,69	68,07
Jawa Barat	67,39	69,71	68,53
Jawa Tengah	74,68	75,56	75,11
DI Yogyakarta	86,72	88,49	87,58
Jawa Timur	74,73	77,04	75,87
Banten	67,94	71,10	69,52
Bali	77,77	79,11	78,43
Nusa Tenggara Barat	68,70	71,98	70,31
Nusa Tenggara Timur	75,21	73,27	74,25
Kalimantan Barat	70,75	74,83	72,76
Kalimantan Tengah	74,73	76,48	75,60
Kalimantan Selatan	78,30	79,63	78,93
Kalimantan Timur	74,53	76,99	75,73
Kalimantan Utara	67,78	73,59	70,65
Sulawesi Utara	70,50	73,28	71,92
Sulawesi Tengah	75,02	79,93	77,61
Sulawesi Selatan	75,84	78,90	77,39
Sulawesi Tenggara	75,77	77,54	76,63
Gorontalo	71,61	78,78	75,31
Sulawesi Barat	66,85	70,74	68,89
Maluku	63,72	67,92	65,82
Maluku Utara	70,02	73,61	71,85
Papua Barat	68,22	68,65	68,43
Papua	64,30	65,50	64,88
Indonesia	71,21	73,64	72,41

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.1.2 Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	50,67	52,04	51,35
Sumatera Utara	58,58	61,15	59,85
Sumatera Barat	62,42	64,90	63,65
Riau	62,38	65,62	63,99
Jambi	62,97	65,16	64,04
Sumatera Selatan	58,58	61,93	60,22
Bengkulu	57,46	63,73	60,54
Lampung	63,28	68,19	65,70
Kep. Bangka Belitung	60,91	62,69	61,79
Kepulauan Riau	63,57	61,13	62,39
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	60,47	62,22	61,32
Jawa Tengah	64,98	66,07	65,51
DI Yogyakarta	74,07	76,39	75,16
Jawa Timur	69,54	69,66	69,60
Banten	48,31	47,87	48,10
Bali	75,71	72,55	74,22
Nusa Tenggara Barat	61,09	61,36	61,22
Nusa Tenggara Timur	45,88	47,59	46,73
Kalimantan Barat	49,68	51,78	50,71
Kalimantan Tengah	61,84	63,16	62,49
Kalimantan Selatan	67,99	70,38	69,14
Kalimantan Timur	63,51	65,23	64,33
Kalimantan Utara	65,05	67,19	66,04
Sulawesi Utara	64,04	71,10	67,51
Sulawesi Tengah	52,91	57,76	55,27
Sulawesi Selatan	66,71	70,85	68,80
Sulawesi Tenggara	58,79	61,12	59,93
Gorontalo	65,27	67,48	66,37
Sulawesi Barat	47,85	55,35	51,61
Maluku	43,05	44,07	43,56
Maluku Utara	40,80	46,24	43,44
Papua Barat	48,10	49,48	48,76
Papua	26,29	25,46	25,91
Indonesia	60,06	62,08	61,04

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.1.3 Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	56,10	58,14	57,12
Sumatera Utara	63,80	67,32	65,55
Sumatera Barat	66,76	70,91	68,85
Riau	68,76	71,50	70,12
Jambi	67,53	70,31	68,92
Sumatera Selatan	62,60	66,72	64,63
Bengkulu	63,84	68,07	65,93
Lampung	64,56	68,76	66,63
Kep. Bangka Belitung	68,68	69,70	69,19
Kepulauan Riau	69,96	65,88	67,92
DKI Jakarta	66,49	69,69	68,07
Jawa Barat	65,74	67,95	66,82
Jawa Tengah	70,12	71,15	70,62
DI Yogyakarta	83,84	85,87	84,82
Jawa Timur	72,38	73,75	73,05
Banten	62,09	64,55	63,30
Bali	77,08	77,03	77,05
Nusa Tenggara Barat	64,69	66,58	65,60
Nusa Tenggara Timur	53,10	53,89	53,49
Kalimantan Barat	57,30	60,14	58,69
Kalimantan Tengah	66,98	68,58	67,77
Kalimantan Selatan	72,97	74,82	73,86
Kalimantan Timur	70,89	73,18	72,00
Kalimantan Utara	66,61	71,03	68,73
Sulawesi Utara	67,31	72,24	69,78
Sulawesi Tengah	59,33	64,97	62,14
Sulawesi Selatan	70,77	74,44	72,62
Sulawesi Tenggara	65,91	67,92	66,89
Gorontalo	67,77	72,14	69,97
Sulawesi Barat	52,48	59,36	55,97
Maluku	51,90	54,39	53,14
Maluku Utara	48,89	54,33	51,57
Papua Barat	56,19	57,46	56,81
Papua	37,93	38,42	38,16
Indonesia	66,22	68,54	67,36

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.2.1 Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	33,27	36,83	35,06
Sumatera Utara	36,15	37,53	36,84
Sumatera Barat	42,68	49,85	46,34
Riau	44,64	45,41	45,02
Jambi	40,30	45,07	42,75
Sumatera Selatan	35,28	40,11	37,68
Bengkulu	41,65	44,95	43,31
Lampung	39,79	41,45	40,62
Kep. Bangka Belitung	36,58	36,11	36,34
Kepulauan Riau	38,02	38,36	38,19
DKI Jakarta	41,21	42,46	41,82
Jawa Barat	36,38	36,80	36,59
Jawa Tengah	41,96	43,39	42,66
DI Yogyakarta	59,96	63,37	61,62
Jawa Timur	44,26	47,06	45,64
Banten	46,69	48,30	47,49
Bali	44,40	48,94	46,64
Nusa Tenggara Barat	30,60	38,12	34,30
Nusa Tenggara Timur	36,40	40,32	38,34
Kalimantan Barat	37,36	36,74	37,05
Kalimantan Tengah	36,92	39,36	38,14
Kalimantan Selatan	54,79	54,09	54,46
Kalimantan Timur	38,82	40,77	39,77
Kalimantan Utara	37,72	36,38	37,06
Sulawesi Utara	30,29	32,06	31,19
Sulawesi Tengah	41,18	44,78	43,08
Sulawesi Selatan	41,93	46,95	44,47
Sulawesi Tenggara	35,18	40,38	37,70
Gorontalo	32,13	37,86	35,09
Sulawesi Barat	32,81	34,95	33,93
Maluku	35,88	41,07	38,47
Maluku Utara	32,92	35,21	34,09
Papua Barat	28,84	28,83	28,84
Papua	28,33	31,91	30,06
Indonesia	40,17	42,13	41,14

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.2.2 Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	12,14	12,59	12,36
Sumatera Utara	20,03	20,34	20,18
Sumatera Barat	21,96	26,12	24,03
Riau	16,55	20,07	18,30
Jambi	18,01	23,07	20,49
Sumatera Selatan	13,73	17,24	15,45
Bengkulu	17,50	18,60	18,04
Lampung	18,53	21,49	19,98
Kep. Bangka Belitung	16,86	24,24	20,51
Kepulauan Riau	19,00	16,70	17,89
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	20,86	21,77	21,30
Jawa Tengah	26,59	31,00	28,73
DI Yogyakarta	34,48	35,83	35,12
Jawa Timur	27,29	29,96	28,59
Banten	21,07	20,10	20,61
Bali	26,47	30,45	28,35
Nusa Tenggara Barat	16,08	15,40	15,76
Nusa Tenggara Timur	6,66	8,31	7,48
Kalimantan Barat	12,28	11,96	12,12
Kalimantan Tengah	14,48	17,79	16,11
Kalimantan Selatan	21,72	25,41	23,50
Kalimantan Timur	17,76	19,15	18,42
Kalimantan Utara	21,91	29,19	25,28
Sulawesi Utara	13,51	19,33	16,37
Sulawesi Tengah	14,12	14,41	14,26
Sulawesi Selatan	21,46	25,57	23,53
Sulawesi Tenggara	12,71	14,08	13,38
Gorontalo	22,64	26,01	24,31
Sulawesi Barat	16,29	18,50	17,40
Maluku	7,65	10,69	9,15
Maluku Utara	7,50	11,31	9,35
Papua Barat	14,45	16,99	15,67
Papua	5,76	6,01	5,88
Indonesia	19,53	21,86	20,67

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.2.3 Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	19,14	20,76	19,95
Sumatera Utara	28,27	29,30	28,78
Sumatera Barat	31,49	37,35	34,44
Riau	28,40	30,58	29,48
Jambi	25,42	30,83	28,12
Sumatera Selatan	22,23	26,42	24,30
Bengkulu	25,98	28,12	27,04
Lampung	25,35	27,98	26,65
Kep. Bangka Belitung	27,45	30,68	29,06
Kepulauan Riau	35,16	35,34	35,25
DKI Jakarta	41,21	42,46	41,82
Jawa Barat	32,67	33,26	32,96
Jawa Tengah	34,73	37,63	36,15
DI Yogyakarta	54,17	57,41	55,74
Jawa Timur	36,58	39,44	37,98
Banten	39,05	40,35	39,69
Bali	38,38	43,07	40,66
Nusa Tenggara Barat	22,96	26,56	24,70
Nusa Tenggara Timur	13,98	16,17	15,06
Kalimantan Barat	21,34	20,95	21,15
Kalimantan Tengah	23,43	26,56	24,98
Kalimantan Selatan	37,72	39,20	38,43
Kalimantan Timur	31,87	33,77	32,79
Kalimantan Utara	30,92	33,50	32,16
Sulawesi Utara	22,00	26,01	24,01
Sulawesi Tengah	21,98	24,28	23,12
Sulawesi Selatan	30,56	35,11	32,86
Sulawesi Tenggara	22,13	24,97	23,52
Gorontalo	26,37	30,90	28,65
Sulawesi Barat	20,31	22,78	21,57
Maluku	19,73	23,83	21,77
Maluku Utara	14,54	18,38	16,43
Papua Barat	20,24	21,92	21,05
Papua	12,67	14,40	13,48
Indonesia	30,94	33,18	32,04

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.3.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	44,59	49,54	47,08
Sumatera Utara	47,49	51,11	49,31
Sumatera Barat	52,33	59,42	55,95
Riau	56,26	56,71	56,48
Jambi	58,50	59,72	59,13
Sumatera Selatan	50,16	55,50	52,81
Bengkulu	54,53	57,33	55,94
Lampung	51,39	53,95	52,66
Kep. Bangka Belitung	49,15	51,90	50,53
Kepulauan Riau	49,58	46,70	48,13
DKI Jakarta	57,53	59,45	58,47
Jawa Barat	52,38	55,02	53,68
Jawa Tengah	56,66	58,51	57,57
DI Yogyakarta	75,17	76,15	75,65
Jawa Timur	57,89	61,05	59,45
Banten	52,43	56,48	54,45
Bali	59,61	60,88	60,23
Nusa Tenggara Barat	39,12	47,55	43,27
Nusa Tenggara Timur	50,98	49,69	50,34
Kalimantan Barat	53,74	58,42	56,04
Kalimantan Tengah	54,03	54,71	54,37
Kalimantan Selatan	59,46	59,82	59,63
Kalimantan Timur	56,37	57,75	57,04
Kalimantan Utara	52,01	50,89	51,46
Sulawesi Utara	51,38	56,99	54,25
Sulawesi Tengah	54,02	60,31	57,33
Sulawesi Selatan	55,07	59,37	57,25
Sulawesi Tenggara	46,93	56,71	51,67
Gorontalo	52,94	60,36	56,77
Sulawesi Barat	39,89	47,29	43,76
Maluku	45,30	52,81	49,06
Maluku Utara	45,19	54,64	50,00
Papua Barat	44,96	48,89	46,90
Papua	44,83	46,73	45,75
Indonesia	53,91	56,84	55,36

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.3.2 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	22,72	24,88	23,79
Sumatera Utara	28,19	29,35	28,76
Sumatera Barat	30,84	35,89	33,35
Riau	30,69	35,34	33,00
Jambi	33,09	37,94	35,47
Sumatera Selatan	28,52	32,76	30,60
Bengkulu	28,13	33,41	30,72
Lampung	33,01	37,54	35,24
Kep. Bangka Belitung	36,13	37,63	36,87
Kepulauan Riau	38,36	33,48	36,01
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	37,45	40,60	38,98
Jawa Tengah	42,08	45,01	43,50
DI Yogyakarta	54,06	55,47	54,73
Jawa Timur	42,37	44,95	43,63
Banten	29,44	29,19	29,32
Bali	47,77	47,22	47,51
Nusa Tenggara Barat	26,95	26,66	26,81
Nusa Tenggara Timur	10,78	12,44	11,60
Kalimantan Barat	23,03	26,34	24,65
Kalimantan Tengah	30,64	34,64	32,60
Kalimantan Selatan	38,12	38,84	38,47
Kalimantan Timur	35,86	37,93	36,85
Kalimantan Utara	37,29	38,68	37,93
Sulawesi Utara	26,72	39,78	33,14
Sulawesi Tengah	23,78	26,47	25,08
Sulawesi Selatan	33,69	38,87	36,31
Sulawesi Tenggara	25,30	27,25	26,25
Gorontalo	34,96	40,81	37,86
Sulawesi Barat	22,69	27,03	24,87
Maluku	15,84	16,49	16,16
Maluku Utara	12,76	17,11	14,87
Papua Barat	24,32	25,01	24,65
Papua	8,86	9,59	9,20
Indonesia	32,34	35,19	33,73

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.3.3 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(2)	(3)	(4)
(1)			
Aceh	29,96	33,20	31,57
Sumatera Utara	38,06	40,69	39,37
Sumatera Barat	40,72	47,03	43,90
Riau	41,48	44,20	42,83
Jambi	41,54	45,62	43,57
Sumatera Selatan	37,05	41,89	39,44
Bengkulu	37,39	42,05	39,69
Lampung	38,90	42,88	40,87
Kep. Bangka Belitung	43,12	45,38	44,24
Kepulauan Riau	47,89	44,86	46,38
DKI Jakarta	57,53	59,45	58,47
Jawa Barat	48,81	51,62	50,19
Jawa Tengah	49,81	52,23	50,99
DI Yogyakarta	70,37	71,67	71,00
Jawa Timur	50,87	53,87	52,34
Banten	45,58	48,79	47,16
Bali	55,63	56,54	56,07
Nusa Tenggara Barat	32,71	36,93	34,75
Nusa Tenggara Timur	20,67	21,58	21,12
Kalimantan Barat	34,13	37,98	36,02
Kalimantan Tengah	39,97	42,80	41,37
Kalimantan Selatan	48,44	48,93	48,67
Kalimantan Timur	49,60	51,33	50,44
Kalimantan Utara	45,68	46,00	45,83
Sulawesi Utara	39,20	48,80	44,01
Sulawesi Tengah	32,56	37,47	35,00
Sulawesi Selatan	43,20	48,02	45,63
Sulawesi Tenggara	34,37	39,45	36,85
Gorontalo	42,03	48,87	45,47
Sulawesi Barat	26,88	32,30	29,63
Maluku	28,45	32,20	30,32
Maluku Utara	21,74	28,21	24,92
Papua Barat	32,62	34,95	33,75
Papua	19,87	21,61	20,69
Indonesia	44,26	47,28	45,75

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.4.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perkotaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	12,54	53,23	82,57	92,72
Sumatera Utara	18,09	64,08	85,86	96,07
Sumatera Barat	21,20	71,08	90,72	92,68
Riau	25,83	69,99	88,98	95,18
Jambi	28,71	75,03	88,07	94,32
Sumatera Selatan	21,85	69,66	88,70	99,03
Bengkulu	23,00	71,61	88,02	97,33
Lampung	19,48	69,90	86,05	96,79
Kep. Bangka Belitung	21,10	69,61	92,52	96,37
Kepulauan Riau	20,43	69,97	88,29	99,20
DKI Jakarta	32,14	81,06	93,56	97,78
Jawa Barat	21,66	74,50	92,53	97,35
Jawa Tengah	25,05	77,42	93,09	98,06
DI Yogyakarta	44,49	88,99	98,08	98,78
Jawa Timur	26,69	80,07	91,15	96,94
Banten	25,18	77,69	90,36	94,26
Bali	24,89	77,20	94,04	100,00
Nusa Tenggara Barat	9,61	51,90	84,69	92,21
Nusa Tenggara Timur	17,15	57,11	77,51	93,23
Kalimantan Barat	26,14	68,71	90,04	96,22
Kalimantan Tengah	26,66	70,28	90,68	94,39
Kalimantan Selatan	29,62	77,57	94,39	96,63
Kalimantan Timur	26,73	72,22	91,69	94,60
Kalimantan Utara	21,38	61,17	90,05	100,00
Sulawesi Utara	21,72	65,68	85,84	96,31
Sulawesi Tengah	17,94	66,60	90,10	93,05
Sulawesi Selatan	23,84	70,72	90,59	96,28
Sulawesi Tenggara	16,01	50,79	86,60	98,20
Gorontalo	22,24	69,23	92,33	96,90
Sulawesi Barat	13,20	53,12	85,02	93,03
Maluku	16,30	50,54	79,60	90,93
Maluku Utara	15,22	56,39	81,19	89,68
Papua Barat	13,93	54,24	79,62	97,11
Papua	16,87	55,13	77,42	90,65
Indonesia	23,68	73,46	90,58	96,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.4.2 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perdesaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4,24	26,53	58,62	80,16
Sumatera Utara	6,46	39,97	69,71	83,58
Sumatera Barat	7,20	53,31	82,02	83,35
Riau	7,91	48,89	81,30	77,10
Jambi	9,00	55,26	82,86	92,19
Sumatera Selatan	8,18	48,90	76,72	89,13
Bengkulu	6,69	44,09	73,86	85,40
Lampung	10,78	54,52	84,66	89,17
Kep. Bangka Belitung	8,90	60,95	86,10	96,73
Kepulauan Riau	10,14	59,75	77,21	92,73
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	10,59	65,73	89,26	96,56
Jawa Tengah	13,12	66,43	90,59	96,39
DI Yogyakarta	24,18	83,57	95,51	96,42
Jawa Timur	13,85	65,74	87,76	97,56
Banten	7,75	48,54	81,37	97,83
Bali	14,80	61,98	93,96	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,52	34,42	66,36	92,89
Nusa Tenggara Timur	1,07	11,40	44,36	70,67
Kalimantan Barat	5,81	35,44	71,71	79,33
Kalimantan Tengah	11,00	43,66	76,41	69,86
Kalimantan Selatan	13,91	62,26	81,89	89,30
Kalimantan Timur	10,16	48,21	80,00	88,19
Kalimantan Utara	11,48	50,47	81,87	95,60
Sulawesi Utara	10,81	44,45	73,30	83,75
Sulawesi Tengah	3,92	33,57	66,31	78,38
Sulawesi Selatan	8,79	51,63	80,75	89,06
Sulawesi Tenggara	4,92	33,06	76,11	88,77
Gorontalo	8,91	54,37	84,25	90,43
Sulawesi Barat	5,24	27,69	59,85	82,80
Maluku	2,40	22,18	37,11	58,15
Maluku Utara	2,32	16,65	38,84	60,98
Papua Barat	6,77	33,67	57,50	69,78
Papua	1,96	11,39	27,67	55,97
Indonesia	9,01	50,53	78,43	87,51

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.4.3 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6,71	34,36	66,78	87,26
Sumatera Utara	12,10	52,08	78,42	92,44
Sumatera Barat	12,92	61,24	86,09	90,70
Riau	14,65	57,25	84,84	88,40
Jambi	14,85	61,46	85,05	93,34
Sumatera Selatan	13,07	56,79	81,95	96,10
Bengkulu	11,83	53,40	79,45	92,07
Lampung	13,21	59,17	85,17	94,29
Kep. Bangka Belitung	15,20	65,67	89,84	96,51
Kepulauan Riau	18,91	68,31	86,56	98,94
DKI Jakarta	32,14	81,06	93,56	97,78
Jawa Barat	18,77	72,21	91,84	97,29
Jawa Tengah	19,11	72,15	91,97	97,62
DI Yogyakarta	38,84	87,39	97,47	98,67
Jawa Timur	20,47	73,33	89,73	97,10
Banten	19,48	68,77	88,09	94,59
Bali	21,40	71,65	94,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,26	42,52	75,72	92,43
Nusa Tenggara Timur	4,04	21,68	55,96	84,16
Kalimantan Barat	12,14	46,98	79,02	92,25
Kalimantan Tengah	17,07	53,18	82,63	84,00
Kalimantan Selatan	20,83	69,16	88,55	94,60
Kalimantan Timur	21,02	63,36	87,94	93,50
Kalimantan Utara	17,14	56,04	87,17	98,82
Sulawesi Utara	15,89	55,07	80,25	92,85
Sulawesi Tengah	7,37	42,09	75,96	86,79
Sulawesi Selatan	14,89	59,58	85,11	93,92
Sulawesi Tenggara	8,73	40,09	80,96	95,75
Gorontalo	13,77	59,96	87,34	94,59
Sulawesi Barat	7,16	33,08	66,84	86,63
Maluku	7,49	33,81	57,69	79,66
Maluku Utara	5,35	26,93	52,22	77,80
Papua Barat	9,32	41,92	68,64	84,54
Papua	5,81	24,79	49,29	76,16
Indonesia	16,64	62,77	85,52	94,41

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.5.1 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	11,55	6,82	9,16
Sumatera Utara	8,25	8,03	8,14
Sumatera Barat	7,36	5,10	6,18
Riau	10,64	6,28	8,48
Jambi	5,97	8,03	7,05
Sumatera Selatan	4,73	5,87	5,31
Bengkulu	8,39	6,33	7,38
Lampung	9,55	6,87	8,19
Kep. Bangka Belitung	4,78	4,88	4,83
Kepulauan Riau	5,03	4,66	4,85
DKI Jakarta	4,84	4,89	4,86
Jawa Barat	7,16	6,63	6,90
Jawa Tengah	7,28	5,99	6,65
DI Yogyakarta	11,68	11,83	11,76
Jawa Timur	7,45	6,83	7,14
Banten	6,90	6,44	6,67
Bali	8,60	10,64	9,62
Nusa Tenggara Barat	7,77	7,94	7,85
Nusa Tenggara Timur	9,62	5,33	7,51
Kalimantan Barat	8,66	8,14	8,40
Kalimantan Tengah	6,34	7,89	7,11
Kalimantan Selatan	8,96	8,89	8,93
Kalimantan Timur	11,46	6,26	8,94
Kalimantan Utara	3,93	5,04	4,47
Sulawesi Utara	4,96	3,91	4,43
Sulawesi Tengah	10,87	6,69	8,65
Sulawesi Selatan	9,63	9,63	9,63
Sulawesi Tenggara	10,22	8,08	9,17
Gorontalo	6,01	6,57	6,29
Sulawesi Barat	9,38	14,64	12,22
Maluku	7,69	4,60	6,14
Maluku Utara	7,71	5,77	6,72
Papua Barat	8,07	4,83	6,46
Papua	8,17	5,83	7,04
Indonesia	7,60	6,80	7,20

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.5.2 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	9,95	4,82	7,41
Sumatera Utara	16,75	11,71	14,28
Sumatera Barat	6,51	2,83	4,66
Riau	8,32	4,60	6,47
Jambi	4,53	2,85	3,69
Sumatera Selatan	4,88	2,62	3,79
Bengkulu	8,96	7,03	7,99
Lampung	8,07	3,89	6,02
Kep. Bangka Belitung	7,25	4,02	5,62
Kepulauan Riau	6,01	8,95	7,37
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	2,79	2,07	2,44
Jawa Tengah	7,42	4,57	6,04
DI Yogyakarta	8,66	5,04	6,90
Jawa Timur	6,81	3,11	5,02
Banten	1,97	2,32	2,13
Bali	8,77	10,07	9,38
Nusa Tenggara Barat	12,05	8,65	10,45
Nusa Tenggara Timur	7,73	5,02	6,39
Kalimantan Barat	7,98	4,98	6,50
Kalimantan Tengah	9,78	4,67	7,26
Kalimantan Selatan	8,81	4,53	6,76
Kalimantan Timur	7,11	4,37	5,80
Kalimantan Utara	9,44	5,55	7,59
Sulawesi Utara	5,64	2,88	4,27
Sulawesi Tengah	11,31	5,59	8,54
Sulawesi Selatan	12,90	8,70	10,75
Sulawesi Tenggara	16,24	7,58	12,04
Gorontalo	8,81	4,50	6,70
Sulawesi Barat	12,67	6,69	9,69
Maluku	9,90	5,21	7,62
Maluku Utara	11,23	5,65	8,52
Papua Barat	8,41	5,83	7,19
Papua	18,03	14,64	16,49
Indonesia	8,35	5,08	6,75

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.5.3 Persentase Siswa Umur Usia Tahun yang yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	10,50	5,52	8,02
Sumatera Utara	12,36	9,74	11,05
Sumatera Barat	6,91	3,96	5,40
Riau	9,32	5,32	7,34
Jambi	5,03	4,76	4,89
Sumatera Selatan	4,82	4,00	4,41
Bengkulu	8,74	6,78	7,76
Lampung	8,55	4,91	6,75
Kep. Bangka Belitung	5,88	4,49	5,18
Kepulauan Riau	5,19	5,26	5,22
DKI Jakarta	4,84	4,89	4,86
Jawa Barat	6,14	5,58	5,87
Jawa Tengah	7,34	5,34	6,37
DI Yogyakarta	11,04	10,42	10,73
Jawa Timur	7,17	5,20	6,21
Banten	5,48	5,35	5,42
Bali	8,66	10,46	9,54
Nusa Tenggara Barat	9,98	8,29	9,17
Nusa Tenggara Timur	8,23	5,10	6,69
Kalimantan Barat	8,24	6,19	7,23
Kalimantan Tengah	8,37	5,99	7,20
Kalimantan Selatan	8,89	6,67	7,83
Kalimantan Timur	10,06	5,66	7,94
Kalimantan Utara	6,19	5,24	5,73
Sulawesi Utara	5,28	3,43	4,35
Sulawesi Tengah	11,17	5,98	8,58
Sulawesi Selatan	11,39	9,12	10,24
Sulawesi Tenggara	13,62	7,80	10,78
Gorontalo	7,68	5,37	6,53
Sulawesi Barat	11,91	8,77	10,31
Maluku	8,91	4,93	6,95
Maluku Utara	10,20	5,69	7,97
Papua Barat	8,28	5,40	6,89
Papua	14,90	11,62	13,38
Indonesia	7,93	6,06	7,01

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.6.1 Persentase Siswa Umur Usia Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	18,71	37,35	28,12
Sumatera Utara	19,48	33,33	26,51
Sumatera Barat	27,93	46,63	37,72
Riau	21,39	35,22	28,22
Jambi	14,03	24,26	19,40
Sumatera Selatan	11,33	29,74	20,69
Bengkulu	12,46	28,61	20,39
Lampung	19,27	32,96	26,20
Kep. Bangka Belitung	27,69	41,99	34,83
Kepulauan Riau	16,58	21,55	19,04
DKI Jakarta	9,97	16,58	13,22
Jawa Barat	15,89	27,94	21,79
Jawa Tengah	23,44	36,16	29,67
DI Yogyakarta	56,44	70,80	63,58
Jawa Timur	21,13	31,60	26,28
Banten	16,70	30,49	23,59
Bali	61,88	69,52	65,69
Nusa Tenggara Barat	28,75	44,99	36,76
Nusa Tenggara Timur	52,46	62,56	57,42
Kalimantan Barat	16,50	28,86	22,61
Kalimantan Tengah	20,90	32,59	26,71
Kalimantan Selatan	20,54	32,66	26,26
Kalimantan Timur	24,21	39,37	31,57
Kalimantan Utara	18,94	32,69	25,71
Sulawesi Utara	24,19	29,96	27,12
Sulawesi Tengah	35,45	48,36	42,32
Sulawesi Selatan	17,41	34,19	25,93
Sulawesi Tenggara	40,79	60,76	50,63
Gorontalo	34,60	55,40	45,21
Sulawesi Barat	18,11	42,30	31,16
Maluku	24,71	40,75	32,75
Maluku Utara	36,38	53,76	45,29
Papua Barat	11,74	23,43	17,53
Papua	15,43	20,85	18,06
Indonesia	21,08	33,63	27,30

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.6.2 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,30	24,76	16,95
Sumatera Utara	27,76	46,17	36,79
Sumatera Barat	17,85	38,82	28,38
Riau	15,39	34,24	24,77
Jambi	9,60	26,10	17,86
Sumatera Selatan	13,54	30,97	21,98
Bengkulu	20,38	38,54	29,54
Lampung	21,39	43,12	32,03
Kep. Bangka Belitung	21,41	42,14	31,86
Kepulauan Riau	30,90	47,43	38,54
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	12,56	24,61	18,40
Jawa Tengah	21,16	38,03	29,34
DI Yogyakarta	32,00	50,52	41,04
Jawa Timur	16,55	27,89	22,04
Banten	9,96	19,66	14,52
Bali	66,73	75,25	70,71
Nusa Tenggara Barat	23,07	45,41	33,54
Nusa Tenggara Timur	38,95	50,93	44,88
Kalimantan Barat	11,38	28,27	19,69
Kalimantan Tengah	23,08	36,66	29,78
Kalimantan Selatan	26,65	47,14	36,48
Kalimantan Timur	13,02	21,92	17,28
Kalimantan Utara	20,03	41,32	30,12
Sulawesi Utara	28,00	37,78	32,86
Sulawesi Tengah	25,80	41,01	33,17
Sulawesi Selatan	13,24	34,92	24,31
Sulawesi Tenggara	38,46	57,64	47,76
Gorontalo	25,65	49,77	37,47
Sulawesi Barat	20,71	39,73	30,20
Maluku	21,04	34,04	27,36
Maluku Utara	22,16	36,12	28,95
Papua Barat	29,04	39,76	34,13
Papua	10,73	25,11	17,28
Indonesia	19,76	35,59	27,48

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 4.6.3 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	12,54	29,20	20,85
Sumatera Utara	23,48	39,32	31,39
Sumatera Barat	22,65	42,71	32,93
Riau	17,99	34,66	26,26
Jambi	11,14	25,42	18,41
Sumatera Selatan	12,66	30,45	21,45
Bengkulu	17,37	34,89	26,12
Lampung	20,69	39,63	30,07
Kep. Bangka Belitung	24,90	42,06	33,50
Kepulauan Riau	18,80	25,15	21,90
DKI Jakarta	9,97	16,58	13,22
Jawa Barat	15,12	27,17	21,01
Jawa Tengah	22,39	37,01	29,52
DI Yogyakarta	51,22	66,60	58,84
Jawa Timur	19,09	29,98	24,41
Banten	14,76	27,63	21,08
Bali	63,51	71,29	67,32
Nusa Tenggara Barat	25,81	45,20	35,13
Nusa Tenggara Timur	42,56	54,01	48,21
Kalimantan Barat	13,33	28,50	20,80
Kalimantan Tengah	22,19	34,99	28,52
Kalimantan Selatan	23,60	40,03	31,42
Kalimantan Timur	20,61	33,85	27,00
Kalimantan Utara	19,39	36,09	27,49
Sulawesi Utara	26,01	33,61	29,83
Sulawesi Tengah	28,80	43,61	36,21
Sulawesi Selatan	15,16	34,59	25,05
Sulawesi Tenggara	39,48	59,03	49,02
Gorontalo	29,25	52,15	40,67
Sulawesi Barat	20,11	40,40	30,44
Maluku	22,67	37,13	29,81
Maluku Utara	26,29	41,64	33,88
Papua Barat	22,00	32,80	27,22
Papua	12,22	23,65	17,53
Indonesia	20,51	34,47	27,38

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.1.1 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,95	99,82	99,20
Sumatera Utara	99,87	99,91	99,61
Sumatera Barat	99,89	99,74	99,38
Riau	99,93	99,97	99,56
Jambi	99,94	99,86	99,01
Sumatera Selatan	99,93	99,81	99,50
Bengkulu	100,00	99,88	99,13
Lampung	99,73	99,27	98,23
Kep. Bangka Belitung	99,79	99,19	98,36
Kepulauan Riau	99,95	99,71	99,26
DKI Jakarta	99,97	99,95	99,72
Jawa Barat	100,00	99,85	98,73
Jawa Tengah	99,92	98,58	95,28
DI Yogyakarta	100,00	99,18	96,63
Jawa Timur	99,88	98,30	95,24
Banten	100,00	99,15	98,17
Bali	99,96	98,30	95,64
Nusa Tenggara Barat	99,72	94,73	89,84
Nusa Tenggara Timur	99,61	98,31	96,93
Kalimantan Barat	99,92	97,83	95,65
Kalimantan Tengah	100,00	99,96	99,49
Kalimantan Selatan	99,81	99,57	98,98
Kalimantan Timur	100,00	99,73	99,23
Kalimantan Utara	99,47	97,95	96,53
Sulawesi Utara	100,00	99,95	99,93
Sulawesi Tengah	99,89	99,87	99,50
Sulawesi Selatan	99,71	97,91	96,30
Sulawesi Tenggara	99,94	98,87	96,70
Gorontalo	99,85	99,57	99,33
Sulawesi Barat	99,79	96,69	94,95
Maluku	99,91	99,87	99,66
Maluku Utara	99,85	99,89	99,50
Papua Barat	100,00	99,35	99,12
Papua	99,75	98,79	98,33
Indonesia	99,93	99,18	97,56

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.1.2 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,90	99,28	97,49
Sumatera Utara	99,80	99,18	98,42
Sumatera Barat	99,70	99,73	98,81
Riau	99,84	99,88	98,96
Jambi	99,96	99,56	97,73
Sumatera Selatan	99,87	99,35	98,15
Bengkulu	99,85	99,40	97,31
Lampung	99,90	98,91	96,38
Kep. Bangka Belitung	100,00	98,32	97,06
Kepulauan Riau	100,00	97,94	96,54
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	99,97	99,69	97,76
Jawa Tengah	99,84	96,81	91,52
DI Yogyakarta	99,99	97,32	89,97
Jawa Timur	99,88	94,64	88,12
Banten	99,92	98,01	96,21
Bali	99,81	94,31	87,77
Nusa Tenggara Barat	99,77	90,49	85,28
Nusa Tenggara Timur	98,10	93,59	90,29
Kalimantan Barat	99,72	94,72	90,97
Kalimantan Tengah	99,76	99,87	99,03
Kalimantan Selatan	100,00	99,74	97,92
Kalimantan Timur	99,99	99,64	98,40
Kalimantan Utara	99,14	96,75	93,26
Sulawesi Utara	99,89	99,89	99,81
Sulawesi Tengah	99,58	98,92	97,22
Sulawesi Selatan	99,30	93,48	88,55
Sulawesi Tenggara	99,60	96,22	93,02
Gorontalo	99,84	99,05	98,18
Sulawesi Barat	99,29	94,96	92,20
Maluku	99,50	99,05	98,88
Maluku Utara	99,92	99,72	98,44
Papua Barat	99,09	97,30	96,13
Papua	83,40	68,58	68,05
Indonesia	99,42	96,67	93,30

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.1.3 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Laki-laki		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
	(1)	(2)	(3)
Aceh	99,89	99,70	98,99
Sumatera Utara	99,93	99,78	99,53
Sumatera Barat	99,66	99,75	99,46
Riau	99,79	99,88	99,55
Jambi	99,96	99,83	99,08
Sumatera Selatan	99,88	99,70	99,29
Bengkulu	99,82	99,70	98,96
Lampung	99,85	99,35	98,33
Kep. Bangka Belitung	100,00	98,97	98,54
Kepulauan Riau	100,00	99,54	99,26
DKI Jakarta	99,93	99,95	99,89
Jawa Barat	99,99	99,87	99,14
Jawa Tengah	99,83	98,67	96,32
DI Yogyakarta	100,00	99,25	97,09
Jawa Timur	99,89	97,88	94,99
Banten	99,96	99,38	98,85
Bali	100,00	98,55	96,49
Nusa Tenggara Barat	99,64	95,19	91,86
Nusa Tenggara Timur	98,45	95,27	93,30
Kalimantan Barat	99,64	97,60	95,58
Kalimantan Tengah	99,75	99,86	99,48
Kalimantan Selatan	99,84	99,78	99,19
Kalimantan Timur	100,00	99,77	99,34
Kalimantan Utara	99,09	97,92	96,01
Sulawesi Utara	99,91	99,88	99,83
Sulawesi Tengah	99,60	99,33	98,50
Sulawesi Selatan	99,35	95,88	93,56
Sulawesi Tenggara	99,61	98,05	96,44
Gorontalo	99,82	99,16	98,48
Sulawesi Barat	99,25	96,24	94,49
Maluku	99,61	99,44	99,40
Maluku Utara	99,95	99,90	99,34
Papua Barat	99,70	98,85	98,28
Papua	91,59	82,14	81,69
Indonesia	99,72	98,70	97,33

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.1.4 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perempuan		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
	(1)	(2)	(3)
Aceh	99,94	99,21	97,09
Sumatera Utara	99,74	99,38	98,61
Sumatera Barat	99,92	99,72	98,69
Riau	99,98	99,96	98,83
Jambi	99,94	99,48	97,17
Sumatera Selatan	99,91	99,35	98,00
Bengkulu	100,00	99,42	96,82
Lampung	99,84	98,68	95,47
Kep. Bangka Belitung	99,77	98,59	96,91
Kepulauan Riau	99,91	99,41	98,46
DKI Jakarta	100,00	99,95	99,55
Jawa Barat	100,00	99,74	97,81
Jawa Tengah	99,93	96,81	90,68
DI Yogyakarta	100,00	98,18	92,66
Jawa Timur	99,87	95,31	88,85
Banten	100,00	98,27	96,34
Bali	99,83	95,43	89,48
Nusa Tenggara Barat	99,86	90,04	83,42
Nusa Tenggara Timur	98,56	94,27	90,57
Kalimantan Barat	99,95	93,91	89,48
Kalimantan Tengah	99,96	99,96	98,91
Kalimantan Selatan	99,98	99,54	97,63
Kalimantan Timur	100,00	99,63	98,53
Kalimantan Utara	99,62	96,93	94,21
Sulawesi Utara	100,00	99,96	99,92
Sulawesi Tengah	99,76	99,05	97,22
Sulawesi Selatan	99,62	94,89	90,19
Sulawesi Tenggara	99,88	96,49	92,51
Gorontalo	99,87	99,36	98,77
Sulawesi Barat	99,58	94,49	91,23
Maluku	99,75	99,38	99,03
Maluku Utara	99,84	99,64	98,16
Papua Barat	99,22	97,36	96,34
Papua	84,76	71,52	71,26
Indonesia	99,70	97,44	93,99

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.1.5 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,92	99,45	98,03
Sumatera Utara	99,84	99,58	99,07
Sumatera Barat	99,79	99,73	99,07
Riau	99,88	99,92	99,20
Jambi	99,95	99,66	98,15
Sumatera Selatan	99,90	99,53	98,66
Bengkulu	99,90	99,56	97,91
Lampung	99,85	99,02	96,93
Kep. Bangka Belitung	99,89	98,79	97,76
Kepulauan Riau	99,96	99,47	98,87
DKI Jakarta	99,97	99,95	99,72
Jawa Barat	99,99	99,81	98,48
Jawa Tengah	99,88	97,73	93,45
DI Yogyakarta	100,00	98,71	94,83
Jawa Timur	99,88	96,58	91,85
Banten	99,98	98,84	97,62
Bali	99,92	97,01	92,98
Nusa Tenggara Barat	99,75	92,49	87,42
Nusa Tenggara Timur	98,51	94,76	91,90
Kalimantan Barat	99,79	95,79	92,58
Kalimantan Tengah	99,85	99,91	99,21
Kalimantan Selatan	99,91	99,66	98,42
Kalimantan Timur	100,00	99,70	98,96
Kalimantan Utara	99,34	97,46	95,18
Sulawesi Utara	99,95	99,92	99,87
Sulawesi Tengah	99,68	99,19	97,87
Sulawesi Selatan	99,48	95,37	91,81
Sulawesi Tenggara	99,75	97,27	94,46
Gorontalo	99,84	99,26	98,63
Sulawesi Barat	99,41	95,36	92,85
Maluku	99,68	99,41	99,22
Maluku Utara	99,90	99,77	98,76
Papua Barat	99,47	98,16	97,37
Papua	88,44	77,12	76,79
Indonesia	99,71	98,07	95,66

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.2 Rasio Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,99	0,98	0,98
Sumatera Utara	1,00	0,98	0,99
Sumatera Barat	1,00	0,99	0,99
Riau	0,99	0,99	0,99
Jambi	0,99	0,98	0,98
Sumatera Selatan	0,99	0,98	0,99
Bengkulu	1,00	0,97	0,98
Lampung	0,98	0,97	0,97
Kep. Bangka Belitung	0,99	0,98	0,98
Kepulauan Riau	0,99	0,98	0,99
DKI Jakarta	1,00	-	1,00
Jawa Barat	0,99	0,98	0,99
Jawa Tengah	0,95	0,93	0,94
DI Yogyakarta	0,97	0,92	0,95
Jawa Timur	0,96	0,91	0,94
Banten	0,98	0,96	0,97
Bali	0,95	0,88	0,93
Nusa Tenggara Barat	0,92	0,90	0,91
Nusa Tenggara Timur	0,99	0,97	0,97
Kalimantan Barat	0,96	0,92	0,94
Kalimantan Tengah	1,00	0,99	0,99
Kalimantan Selatan	0,99	0,98	0,98
Kalimantan Timur	0,99	0,99	0,99
Kalimantan Utara	0,98	0,98	0,98
Sulawesi Utara	1,00	1,00	1,00
Sulawesi Tengah	1,00	0,98	0,99
Sulawesi Selatan	0,98	0,96	0,96
Sulawesi Tenggara	0,98	0,95	0,96
Gorontalo	1,00	1,00	1,00
Sulawesi Barat	0,97	0,96	0,97
Maluku	1,00	1,00	1,00
Maluku Utara	0,99	0,99	0,99
Papua Barat	0,99	0,97	0,98
Papua	0,99	0,82	0,87
Indonesia	0,98	0,95	0,97

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.3 Angka Mengulang Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,06	5,41	4,54
Sumatera Utara	5,31	5,52	2,69
Sumatera Barat	5,09	1,83	3,09
Riau	6,23	4,20	2,20
Jambi	2,62	4,03	1,76
Sumatera Selatan	5,04	5,15	4,48
Bengkulu	0,20	3,56	0,12
Lampung	0,57	2,52	0,57
Kep, Bangka Belitung	3,96	1,82	0,84
Kepulauan Riau	7,75	5,62	5,45
DKI Jakarta	5,13	7,49	5,13
Jawa Barat	4,32	1,40	2,20
Jawa Tengah	3,48	1,53	2,58
DI Yogyakarta	2,21	1,83	0,66
Jawa Timur	5,30	2,53	3,63
Banten	7,63	3,34	2,32
Bali	3,57	2,79	1,35
Nusa Tenggara Barat	4,53	2,52	5,15
Nusa Tenggara Timur	3,68	1,61	2,18
Kalimantan Barat	6,05	5,18	4,25
Kalimantan Tengah	7,14	6,27	4,68
Kalimantan Selatan	1,09	0,27	0,83
Kalimantan Timur	5,16	4,25	5,35
Kalimantan Utara	3,72	4,95	2,62
Sulawesi Utara	8,31	9,24	6,02
Sulawesi Tengah	2,60	2,34	3,00
Sulawesi Selatan	6,21	6,14	4,48
Sulawesi Tenggara	1,81	0,99	0,76
Gorontalo	4,81	2,08	4,74
Sulawesi Barat	2,79	2,82	3,15
Maluku	3,08	2,00	3,10
Maluku Utara	5,53	9,77	3,91
Papua Barat	1,66	2,82	2,33
Papua	9,46	10,79	7,68
Indonesia	4,66	3,17	3,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.4 Angka Bertahan SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,56	92,38	92,99
Sumatera Utara	92,00	94,24	93,16
Sumatera Barat	96,22	92,17	93,81
Riau	91,48	92,14	91,87
Jambi	95,26	97,24	96,67
Sumatera Selatan	93,78	93,25	93,43
Bengkulu	99,93	99,48	99,62
Lampung	99,22	99,30	99,27
Kep, Bangka Belitung	95,67	94,16	94,94
Kepulauan Riau	90,22	98,22	91,34
DKI Jakarta	95,31	-	95,31
Jawa Barat	94,19	96,79	94,85
Jawa Tengah	96,51	95,85	96,18
DI Yogyakarta	96,97	97,52	97,12
Jawa Timur	94,75	93,25	94,03
Banten	92,59	85,23	90,29
Bali	95,64	95,17	95,48
Nusa Tenggara Barat	94,94	95,66	95,34
Nusa Tenggara Timur	97,45	94,69	95,18
Kalimantan Barat	93,65	92,30	92,71
Kalimantan Tengah	94,26	90,57	92,01
Kalimantan Selatan	99,46	97,83	98,58
Kalimantan Timur	95,15	91,65	93,95
Kalimantan Utara	96,54	94,19	95,51
Sulawesi Utara	89,63	91,55	90,63
Sulawesi Tengah	96,45	97,77	97,47
Sulawesi Selatan	93,96	92,22	92,95
Sulawesi Tenggara	98,24	97,33	97,65
Gorontalo	93,66	93,24	93,39
Sulawesi Barat	95,06	96,75	96,35
Maluku	95,54	94,96	95,17
Maluku Utara	94,94	92,24	92,86
Papua Barat	98,08	96,06	96,81
Papua	84,33	89,06	87,83
Indonesia	94,57	94,32	94,45

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.5 Angka Bertahan SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	92,22	93,82	92,99
Sumatera Utara	93,31	92,99	93,16
Sumatera Barat	93,18	94,50	93,81
Riau	91,28	92,49	91,87
Jambi	96,41	96,96	96,67
Sumatera Selatan	93,12	93,76	93,43
Bengkulu	99,40	99,87	99,62
Lampung	98,94	99,64	99,27
Kep. Bangka Belitung	94,98	94,91	94,94
Kepulauan Riau	93,96	88,90	91,34
DKI Jakarta	94,80	95,83	95,31
Jawa Barat	95,11	94,59	94,85
Jawa Tengah	96,15	96,21	96,18
DI Yogyakarta	97,53	96,70	97,12
Jawa Timur	94,08	93,98	94,03
Banten	91,66	88,80	90,29
Bali	95,27	95,72	95,48
Nusa Tenggara Barat	94,84	95,92	95,34
Nusa Tenggara Timur	94,82	95,56	95,18
Kalimantan Barat	91,48	94,11	92,71
Kalimantan Tengah	91,07	93,05	92,01
Kalimantan Selatan	99,06	98,09	98,58
Kalimantan Timur	93,15	94,78	93,95
Kalimantan Utara	95,50	95,51	95,51
Sulawesi Utara	91,01	90,22	90,63
Sulawesi Tengah	97,65	97,26	97,47
Sulawesi Selatan	93,23	92,65	92,95
Sulawesi Tenggara	98,20	97,06	97,65
Gorontalo	94,50	92,22	93,39
Sulawesi Barat	95,80	96,95	96,35
Maluku	94,70	95,68	95,17
Maluku Utara	92,16	93,62	92,86
Papua Barat	97,00	96,60	96,81
Papua	88,49	87,09	87,83
Indonesia	94,48	94,43	94,45

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.6 Angka Melanjutkan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Melanjutkan ke SMP/ sederajat	Melanjutkan ke SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)
Aceh	94,15	92,36
Sumatera Utara	96,34	92,47
Sumatera Barat	96,70	95,42
Riau	81,47	94,50
Jambi	98,03	87,60
Sumatera Selatan	96,97	70,20
Bengkulu	98,37	94,51
Lampung	98,64	67,20
Kep, Bangka Belitung	98,75	88,01
Kepulauan Riau	92,38	91,72
DKI Jakarta	96,49	83,86
Jawa Barat	96,46	81,25
Jawa Tengah	83,08	85,96
DI Yogyakarta	99,34	96,98
Jawa Timur	97,76	83,32
Banten	96,37	86,99
Bali	96,92	91,91
Nusa Tenggara Barat	93,19	94,24
Nusa Tenggara Timur	94,78	90,07
Kalimantan Barat	89,84	86,43
Kalimantan Tengah	85,99	85,38
Kalimantan Selatan	98,80	97,03
Kalimantan Timur	93,63	89,02
Kalimantan Utara	94,90	95,09
Sulawesi Utara	87,01	82,82
Sulawesi Tengah	93,48	92,38
Sulawesi Selatan	88,35	86,29
Sulawesi Tenggara	89,51	97,71
Gorontalo	92,45	98,61
Sulawesi Barat	93,24	90,85
Maluku	96,00	96,19
Maluku Utara	89,78	84,08
Papua Barat	93,85	91,71
Papua	93,84	73,47
Indonesia	93,47	85,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.7 Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,42	1,12	2,08
Sumatera Utara	0,40	1,28	1,36
Sumatera Barat	0,45	2,41	3,42
Riau	0,69	0,91	0,87
Jambi	0,10	1,17	3,12
Sumatera Selatan	0,40	0,75	1,89
Bengkulu	0,63	2,60	5,52
Lampung	0,49	1,09	2,29
Kep. Bangka Belitung	0,36	2,91	7,73
Kepulauan Riau	0,30	1,14	6,23
DKI Jakarta	0,28	0,22	1,02
Jawa Barat	0,14	2,19	1,52
Jawa Tengah	0,30	0,54	4,42
DI Yogyakarta	0,12	0,28	0,73
Jawa Timur	0,62	1,25	3,34
Banten	0,34	0,20	2,21
Bali	0,31	0,94	4,59
Nusa Tenggara Barat	0,24	0,52	3,21
Nusa Tenggara Timur	1,01	4,69	4,90
Kalimantan Barat	1,17	2,69	3,07
Kalimantan Tengah	0,95	3,80	6,63
Kalimantan Selatan	0,98	3,31	5,76
Kalimantan Timur	0,36	1,37	0,99
Kalimantan Utara	0,75	4,83	6,33
Sulawesi Utara	1,39	5,74	7,45
Sulawesi Tengah	0,94	3,06	3,51
Sulawesi Selatan	0,75	2,62	3,22
Sulawesi Tenggara	0,83	2,25	8,50
Gorontalo	2,00	6,02	6,15
Sulawesi Barat	2,32	4,29	5,32
Maluku	1,72	1,67	3,68
Maluku Utara	1,87	3,88	5,94
Papua Barat	1,92	4,96	7,44
Papua	2,21	6,05	5,41
Indonesia	0,51	1,67	2,94

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.8.1 Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perkotaan		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,05	0,82	12,62
Sumatera Utara	0,34	2,76	21,37
Sumatera Barat	0,47	2,82	11,13
Riau	0,43	3,78	19,19
Jambi	0,32	1,32	17,29
Sumatera Selatan	0,14	4,50	21,91
Bengkulu	0,11	0,96	13,89
Lampung	0,00	3,35	23,53
Kep, Bangka Belitung	0,17	4,17	27,28
Kepulauan Riau	0,49	0,31	14,84
DKI Jakarta	0,23	2,23	28,19
Jawa Barat	0,38	5,17	29,85
Jawa Tengah	0,23	3,80	25,62
DI Yogyakarta	0,05	0,12	9,93
Jawa Timur	0,33	1,92	21,20
Banten	0,34	3,37	27,57
Bali	0,34	1,10	17,84
Nusa Tenggara Barat	0,67	1,09	16,24
Nusa Tenggara Timur	1,28	2,49	13,22
Kalimantan Barat	1,04	4,26	20,01
Kalimantan Tengah	0,14	4,12	26,10
Kalimantan Selatan	0,14	7,26	25,78
Kalimantan Timur	0,09	1,23	16,29
Kalimantan Utara	2,06	2,92	22,20
Sulawesi Utara	0,74	3,79	23,85
Sulawesi Tengah	1,36	6,16	14,81
Sulawesi Selatan	0,52	6,17	26,36
Sulawesi Tenggara	0,29	3,60	17,34
Gorontalo	1,24	9,36	22,97
Sulawesi Barat	1,49	12,11	25,38
Maluku	0,27	1,18	16,86
Maluku Utara	0,94	0,87	17,25
Papua Barat	1,96	2,50	16,43
Papua	4,15	4,78	15,22
Indonesia	0,38	3,54	23,95

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.8.2 Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perdesaan		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
	(1)	(2)	(3)
Aceh	0,19	1,80	19,10
Sumatera Utara	0,66	3,74	23,97
Sumatera Barat	0,50	4,22	21,50
Riau	1,24	5,86	25,18
Jambi	0,34	4,96	33,69
Sumatera Selatan	0,37	6,20	35,64
Bengkulu	0,14	3,47	24,40
Lampung	0,19	5,73	31,72
Kep. Bangka Belitung	0,13	11,00	38,69
Kepulauan Riau	0,41	3,20	23,90
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	0,75	7,73	41,26
Jawa Tengah	0,25	4,66	36,66
DI Yogyakarta	0,24	0,74	16,36
Jawa Timur	0,44	4,17	34,89
Banten	1,16	6,00	41,23
Bali	0,63	3,78	17,28
Nusa Tenggara Barat	0,48	3,30	29,23
Nusa Tenggara Timur	1,83	5,72	29,70
Kalimantan Barat	1,82	8,50	38,32
Kalimantan Tengah	0,48	7,35	37,21
Kalimantan Selatan	0,53	7,79	37,11
Kalimantan Timur	0,51	0,88	22,79
Kalimantan Utara	1,39	4,56	27,32
Sulawesi Utara	0,55	6,20	29,02
Sulawesi Tengah	1,89	7,65	30,05
Sulawesi Selatan	0,91	7,32	31,29
Sulawesi Tenggara	0,95	7,03	32,82
Gorontalo	1,23	8,18	32,91
Sulawesi Barat	1,83	9,47	33,18
Maluku	0,31	4,21	23,98
Maluku Utara	0,91	3,08	26,51
Papua Barat	3,13	3,20	21,24
Papua	21,53	25,36	43,92
Indonesia	1,22	5,87	32,84

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.8.3 Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Laki-laki		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,12	1,56	18,82
Sumatera Utara	0,52	3,74	26,12
Sumatera Barat	0,55	5,21	21,46
Riau	1,03	6,45	27,44
Jambi	0,42	3,77	30,44
Sumatera Selatan	0,27	6,20	34,73
Bengkulu	0,16	3,58	24,87
Lampung	0,15	5,91	31,40
Kep, Bangka Belitung	0,11	10,54	36,31
Kepulauan Riau	0,26	0,98	16,56
DKI Jakarta	0,07	2,21	27,27
Jawa Barat	0,52	7,10	33,40
Jawa Tengah	0,28	5,16	30,65
DI Yogyakarta	0,13	0,17	13,21
Jawa Timur	0,44	3,44	27,27
Banten	0,51	5,26	31,00
Bali	0,61	1,37	18,22
Nusa Tenggara Barat	0,93	3,00	19,22
Nusa Tenggara Timur	1,91	6,24	27,16
Kalimantan Barat	1,64	8,19	35,00
Kalimantan Tengah	0,37	6,62	33,96
Kalimantan Selatan	0,18	7,93	30,67
Kalimantan Timur	0,41	1,93	20,47
Kalimantan Utara	1,98	5,58	25,24
Sulawesi Utara	0,66	6,94	29,54
Sulawesi Tengah	2,04	9,20	28,25
Sulawesi Selatan	0,93	8,62	33,09
Sulawesi Tenggara	0,81	5,21	29,49
Gorontalo	1,67	12,36	30,40
Sulawesi Barat	1,88	13,07	35,54
Maluku	0,29	2,95	21,23
Maluku Utara	1,07	2,59	25,07
Papua Barat	2,10	3,03	19,70
Papua	17,84	19,22	34,33
Indonesia	0,83	5,49	29,02

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.8.4 Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perempuan		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
	(1)	(2)	(3)
Aceh	0,16	1,46	15,26
Sumatera Utara	0,49	2,73	19,08
Sumatera Barat	0,43	2,08	12,19
Riau	0,82	3,70	17,55
Jambi	0,24	3,95	25,53
Sumatera Selatan	0,31	4,92	25,75
Bengkulu	0,10	1,63	16,28
Lampung	0,13	4,01	26,86
Kep. Bangka Belitung	0,19	3,65	29,41
Kepulauan Riau	0,68	0,61	15,81
DKI Jakarta	0,41	2,25	29,12
Jawa Barat	0,43	4,47	32,26
Jawa Tengah	0,20	3,19	31,32
DI Yogyakarta	0,07	0,41	9,85
Jawa Timur	0,33	2,46	28,38
Banten	0,71	3,11	32,34
Bali	0,25	2,86	17,10
Nusa Tenggara Barat	0,16	1,59	27,26
Nusa Tenggara Timur	1,53	3,79	23,10
Kalimantan Barat	1,49	6,10	28,25
Kalimantan Tengah	0,32	5,65	32,11
Kalimantan Selatan	0,54	7,16	32,06
Kalimantan Timur	0,07	0,20	16,28
Kalimantan Utara	1,52	1,56	23,46
Sulawesi Utara	0,61	2,91	22,92
Sulawesi Tengah	1,47	5,32	21,42
Sulawesi Selatan	0,56	5,08	25,13
Sulawesi Tenggara	0,62	6,24	23,65
Gorontalo	0,77	4,82	28,09
Sulawesi Barat	1,61	7,06	26,80
Maluku	0,30	2,96	20,49
Maluku Utara	0,75	2,46	22,32
Papua Barat	3,31	2,81	18,58
Papua	17,28	20,86	39,13
Indonesia	0,73	3,74	26,96

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.8.5 Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2018

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,14	1,51	17,08
Sumatera Utara	0,50	3,25	22,59
Sumatera Barat	0,49	3,63	16,92
Riau	0,93	5,05	22,73
Jambi	0,33	3,86	28,06
Sumatera Selatan	0,29	5,59	30,35
Bengkulu	0,13	2,64	20,67
Lampung	0,14	5,00	29,17
Kep, Bangka Belitung	0,15	7,30	32,89
Kepulauan Riau	0,48	0,80	16,22
DKI Jakarta	0,23	2,23	28,19
Jawa Barat	0,48	5,85	32,83
Jawa Tengah	0,24	4,21	30,98
DI Yogyakarta	0,10	0,28	11,61
Jawa Timur	0,38	2,98	27,82
Banten	0,61	4,21	31,65
Bali	0,44	2,08	17,65
Nusa Tenggara Barat	0,57	2,28	23,11
Nusa Tenggara Timur	1,72	5,05	25,17
Kalimantan Barat	1,57	7,16	31,65
Kalimantan Tengah	0,34	6,13	33,05
Kalimantan Selatan	0,36	7,57	31,34
Kalimantan Timur	0,24	1,11	18,45
Kalimantan Utara	1,76	3,62	24,38
Sulawesi Utara	0,64	5,00	26,33
Sulawesi Tengah	1,76	7,26	24,95
Sulawesi Selatan	0,75	6,87	29,19
Sulawesi Tenggara	0,72	5,71	26,53
Gorontalo	1,24	8,62	29,25
Sulawesi Barat	1,75	10,05	31,31
Maluku	0,29	2,95	20,88
Maluku Utara	0,92	2,53	23,64
Papua Barat	2,69	2,92	19,19
Papua	17,57	20,00	36,52
Indonesia	0,78	4,64	28,01

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.9 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,86	8,80	9,46
Sumatera Utara	10,52	8,53	9,61
Sumatera Barat	10,49	7,97	9,10
Riau	10,54	8,12	9,11
Jambi	10,21	7,98	8,70
Sumatera Selatan	10,10	7,49	8,48
Bengkulu	10,89	7,98	8,94
Lampung	9,85	7,63	8,29
Kep. Bangka Belitung	9,36	6,92	8,24
Kepulauan Riau	10,52	6,89	10,01
DKI Jakarta	11,06	-	11,06
Jawa Barat	9,21	6,90	8,61
Jawa Tengah	8,77	6,87	7,84
DI Yogyakarta	10,49	7,69	9,73
Jawa Timur	8,98	6,77	7,93
Banten	9,72	6,89	8,93
Bali	9,90	7,22	9,00
Nusa Tenggara Barat	8,55	6,93	7,69
Nusa Tenggara Timur	10,08	6,94	7,70
Kalimantan Barat	9,49	6,68	7,65
Kalimantan Tengah	10,07	7,76	8,66
Kalimantan Selatan	9,72	7,32	8,45
Kalimantan Timur	10,38	8,09	9,63
Kalimantan Utara	9,79	8,32	9,18
Sulawesi Utara	10,43	8,54	9,51
Sulawesi Tengah	10,57	8,00	8,74
Sulawesi Selatan	10,08	7,27	8,45
Sulawesi Tenggara	10,50	8,08	9,03
Gorontalo	9,15	6,97	7,83
Sulawesi Barat	9,45	7,47	7,94
Maluku	11,05	8,82	9,78
Maluku Utara	10,96	8,26	9,07
Papua Barat	10,80	8,97	9,73
Papua	10,48	5,11	6,66
Indonesia	9,62	7,28	8,58

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.10 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,70	9,22	9,46
Sumatera Utara	9,78	9,45	9,61
Sumatera Barat	9,06	9,14	9,10
Riau	9,25	8,97	9,11
Jambi	8,99	8,41	8,70
Sumatera Selatan	8,65	8,30	8,48
Bengkulu	9,11	8,76	8,94
Lampung	8,48	8,09	8,29
Kep. Bangka Belitung	8,36	8,10	8,24
Kepulauan Riau	10,13	9,88	10,01
DKI Jakarta	11,37	10,75	11,06
Jawa Barat	8,93	8,29	8,61
Jawa Tengah	8,25	7,45	7,84
DI Yogyakarta	10,12	9,36	9,73
Jawa Timur	8,39	7,49	7,93
Banten	9,31	8,53	8,93
Bali	9,67	8,33	9,00
Nusa Tenggara Barat	8,27	7,17	7,69
Nusa Tenggara Timur	7,89	7,52	7,70
Kalimantan Barat	7,97	7,31	7,65
Kalimantan Tengah	8,91	8,37	8,66
Kalimantan Selatan	8,78	8,11	8,45
Kalimantan Timur	9,91	9,32	9,63
Kalimantan Utara	9,42	8,90	9,18
Sulawesi Utara	9,43	9,58	9,51
Sulawesi Tengah	8,87	8,60	8,74
Sulawesi Selatan	8,64	8,27	8,45
Sulawesi Tenggara	9,32	8,74	9,03
Gorontalo	7,49	8,17	7,83
Sulawesi Barat	8,05	7,83	7,94
Maluku	9,86	9,71	9,78
Maluku Utara	9,33	8,82	9,07
Papua Barat	10,05	9,37	9,73
Papua	7,27	5,97	6,66
Indonesia	8,90	8,26	8,58

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Tabel 5.11 Tingkat Kelulusan Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	Usia 15-17 Tahun Lulus SD/ sederajat	Usia 18-20 Tahun Lulus SMP/ sederajat	Usia 21-24 Tahun Lulus SM/ Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,14	88,34	66,99
Sumatera Utara	97,20	87,78	66,46
Sumatera Barat	94,84	83,20	66,26
Riau	96,51	84,66	56,12
Jambi	96,77	83,12	64,01
Sumatera Selatan	95,90	83,09	59,08
Bengkulu	96,97	86,07	58,10
Lampung	97,29	82,94	51,57
Kep. Bangka Belitung	95,54	78,06	55,80
Kepulauan Riau	99,16	90,28	80,88
DKI Jakarta	97,24	94,04	81,60
Jawa Barat	97,89	86,51	58,67
Jawa Tengah	97,74	87,44	44,01
DI Yogyakarta	98,23	95,82	79,10
Jawa Timur	97,64	86,69	56,72
Banten	98,33	85,83	52,35
Bali	97,13	93,16	61,31
Nusa Tenggara Barat	99,07	84,11	47,80
Nusa Tenggara Timur	92,15	75,16	38,74
Kalimantan Barat	91,80	75,52	44,77
Kalimantan Tengah	95,37	73,74	49,73
Kalimantan Selatan	95,30	83,48	59,60
Kalimantan Timur	97,72	88,95	54,53
Kalimantan Utara	95,80	79,88	67,77
Sulawesi Utara	95,97	84,42	71,36
Sulawesi Tengah	94,81	75,52	48,84
Sulawesi Selatan	95,87	80,67	51,74
Sulawesi Tenggara	96,23	84,37	61,01
Gorontalo	91,15	73,40	45,15
Sulawesi Barat	94,76	73,43	35,60
Maluku	97,77	83,89	65,45
Maluku Utara	97,74	81,44	59,46
Papua Barat	90,26	84,22	56,06
Papua	74,74	55,72	19,41
Indonesia	96,75	85,21	56,25

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

PERHITUNGAN RELATIVE STANDARD ERROR (RSE)

error



Tabel 1. Sampling Error APK PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan										Perdesaan											
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	
			Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error					Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error					Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error			
																						(2)
(1)																						
Aceh	47,65	2,75	42,26	53,05	5,78	0,91	13492	41,33	1,68	38,05	44,62	4,05	1,81	32341	43,33	1,44	40,52	46,15	3,32	0,84	48333	(2)
Sumatera Utara	34,39	1,76	30,94	37,84	5,12	2,19	33379	29,74	1,29	27,21	32,26	4,33	1,31	42411	32,06	1,09	29,93	34,19	3,39	1,76	75790	
Sumatera Barat	43,05	2,89	37,39	48,71	6,71	1,19	16035	38,98	2,00	35,06	42,90	5,14	0,86	23744	40,73	1,69	37,42	44,04	4,14	1,02	39779	
Riau	40,24	3,13	34,11	46,37	7,78	1,68	11156	39,02	2,11	34,88	43,16	5,42	1,48	18028	39,48	1,77	36,02	42,94	4,47	1,56	29584	
Jambi	35,99	3,33	29,46	42,53	9,26	0,95	6451	44,71	2,15	40,50	48,92	4,80	0,76	16646	42,01	1,82	38,45	45,57	4,32	0,82	23097	
Sumatera Selatan	32,50	2,68	27,24	37,76	8,26	2,31	12284	34,86	1,89	31,17	38,56	5,41	1,60	25006	33,97	1,55	30,93	37,01	4,57	1,84	37290	
Bengkulu	43,48	4,51	34,64	52,31	10,36	0,77	5774	37,27	2,63	32,12	42,42	7,05	0,68	12964	39,26	2,30	34,76	43,77	5,86	0,71	18738	
Lampung	43,97	3,51	37,09	50,86	7,98	1,87	9160	45,24	1,91	41,50	48,97	4,21	1,32	24758	44,87	1,70	41,54	48,19	3,78	1,48	33918	
Kepulauan Bangka Belitung	55,72	3,87	48,13	63,30	6,95	0,68	6573	40,79	3,19	34,54	47,03	7,81	0,49	6637	48,73	2,55	43,74	53,73	5,23	0,60	13210	
Kepulauan Riau	35,79	3,35	29,24	42,35	9,35	1,66	9667	53,31	7,20	39,20	67,42	13,50	0,86	3350	38,20	3,11	32,12	44,29	8,13	1,56	13017	
DKI Jakarta	52,90	2,74	47,53	58,26	5,17	3,99	17779	-	-	-	-	-	-	52,90	2,74	47,53	58,26	5,17	3,99	17779		
Jawa Barat	48,01	1,54	45,00	51,02	3,20	4,82	59433	46,53	2,01	42,60	50,47	4,32	2,81	27638	47,63	1,25	45,18	50,09	2,63	4,30	83071	
Jawa Tengah	69,21	1,68	65,91	72,51	2,43	2,26	51628	63,01	1,62	59,84	66,17	2,56	2,04	45078	66,23	1,17	63,93	68,52	1,77	2,16	96706	
DI Yogyakarta	91,05	5,20	80,85	101,24	5,71	2,05	8280	109,26	8,35	92,89	125,63	7,64	1,93	3835	95,81	4,43	87,13	104,50	4,62	2,01	12115	
Jawa Timur	79,43	1,87	75,77	83,09	2,35	2,42	54913	76,15	1,92	72,38	79,91	2,52	2,37	48463	77,89	1,34	75,27	80,52	1,72	2,41	103376	
Banten	45,03	2,54	40,05	50,00	5,64	3,92	17198	28,04	2,69	22,78	33,31	9,58	2,73	8966	40,10	1,96	36,25	43,95	4,90	3,65	26164	
Bali	51,94	3,39	45,30	58,59	6,52	1,25	13190	41,66	3,93	33,96	49,36	9,43	1,07	8347	48,57	2,61	43,46	53,68	5,37	1,19	21537	
Nusa Tenggara Barat	54,60	3,91	46,94	62,26	7,16	1,83	9728	54,29	3,18	48,07	60,52	5,85	1,70	12555	54,43	2,48	49,57	59,29	4,56	1,76	22883	
Nusa Tenggara Timur	44,00	3,49	37,16	50,84	7,93	1,27	8337	43,40	1,70	40,08	46,73	3,91	1,05	39907	43,54	1,53	40,53	46,54	3,52	1,10	48244	
Kalimantan Barat	34,11	3,16	27,93	40,29	9,25	1,43	9180	27,85	1,79	24,34	31,35	6,42	1,17	22272	29,86	1,57	26,78	32,95	5,27	1,25	31452	
Kalimantan Tengah	48,66	3,36	42,07	55,25	6,91	0,71	8517	49,71	2,84	44,15	55,26	5,71	0,89	16700	49,32	2,18	45,05	53,60	4,42	0,83	25217	
Kalimantan Selatan	63,09	3,31	56,61	69,57	5,24	1,09	10363	64,97	2,71	59,67	70,28	4,17	0,86	15701	64,10	2,11	59,96	68,24	3,30	0,97	26664	
Kalimantan Timur	40,00	2,85	34,42	45,58	7,11	1,30	12277	49,15	4,76	39,81	58,49	9,69	1,57	7759	43,17	2,50	38,26	48,07	5,80	1,43	20036	
Kalimantan Utara	32,56	4,03	24,66	40,46	12,38	0,56	4135	58,14	5,72	46,94	69,35	9,83	0,55	4448	43,30	3,41	36,61	49,99	7,88	0,56	8583	
Sulawesi Utara	38,55	2,95	32,77	44,33	7,64	0,70	11227	45,37	2,63	40,22	50,52	5,79	0,62	16366	42,21	1,97	38,35	46,07	4,67	0,66	27593	
Sulawesi Tengah	49,62	4,44	40,91	58,33	8,95	0,94	5398	58,46	2,45	53,65	63,26	4,19	0,72	19065	56,08	2,16	51,84	60,32	3,85	0,78	24463	
Sulawesi Selatan	43,06	2,65	37,86	48,25	6,15	1,51	19943	44,62	1,75	41,19	48,05	3,92	1,01	36253	44,00	1,49	41,07	46,92	3,39	1,21	55596	
Sulawesi Tenggara	41,58	3,94	33,85	49,31	9,48	1,51	6435	41,04	2,12	36,89	45,20	5,17	0,64	18829	41,25	2,01	37,31	45,19	4,88	0,96	25364	
Gorontalo	60,16	5,70	49,00	71,33	9,47	0,75	4040	70,40	4,59	61,41	79,39	6,52	0,84	8002	66,67	3,56	59,70	73,64	5,33	0,79	12042	
Sulawesi Barat	57,31	5,70	46,13	68,48	9,95	0,59	2461	57,40	3,57	50,40	64,40	6,22	0,86	9779	57,38	3,05	51,40	63,35	5,31	0,80	12240	
Maluku Utara	39,39	4,39	32,31	46,15	11,01	0,85	7540	47,86	2,73	42,50	53,21	5,71	0,70	15461	40,89	2,22	36,55	45,24	5,42	0,82	23001	
Papua Barat	33,07	4,22	24,81	41,34	12,75	0,56	5471	37,45	3,27	31,03	43,86	8,74	0,52	12114	35,79	2,56	30,71	40,87	7,24	0,53	17585	
Papua	26,84	2,49	21,96	31,73	9,28	0,63	9248	14,29	1,37	11,61	16,98	9,58	0,94	33526	17,45	1,22	15,05	19,84	7,00	0,84	42774	
INDONESIA	52,66	0,62	51,45	53,87	1,17	2,92	480469	48,71	0,48	47,78	49,64	0,98	1,64	651356	50,83	0,40	50,06	51,61	0,78	2,35	1131825	

Tabel 2. Sampling Error APK PAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki + Perempuan								
	Estimasi	Standard Error	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	40.11	1.94	36.30	43.92	4.85	0.84	27777	46.83	1.99	42.94	50.72	4.24	0.74	23056	43.33	1.44	40.52	46.15	3.32	0.84	48823
	31.49	1.46	28.64	34.34	4.62	1.58	37831	32.64	1.63	29.45	35.82	4.98	1.96	37959	32.06	1.09	29.93	34.19	3.39	1.76	75790
	38.84	2.39	34.17	43.52	6.15	1.02	19702	42.63	2.49	37.75	47.51	5.84	1.10	20077	40.73	1.69	37.42	44.04	4.14	1.02	39779
	38.48	2.28	34.01	42.95	5.92	1.39	15026	40.55	2.50	35.64	45.46	6.17	1.46	14558	39.48	1.77	36.02	42.94	4.47	1.56	29584
	41.11	2.68	35.87	46.35	6.51	0.85	11694	42.90	2.69	37.62	48.18	6.28	0.94	11403	42.01	1.82	38.45	45.57	4.32	0.82	23097
	32.79	2.02	28.84	36.75	6.16	1.58	18953	35.16	2.20	30.86	39.46	6.24	1.83	18337	33.97	1.55	30.93	37.01	4.57	1.84	37290
	40.51	3.23	34.19	46.84	7.97	0.68	9472	37.93	3.02	32.02	43.84	7.95	0.64	9366	39.26	2.30	34.76	43.71	5.86	0.71	18738
	43.79	2.33	39.24	48.35	5.31	1.51	17313	46.07	2.48	41.21	50.94	5.38	1.45	16605	44.87	1.70	41.54	48.19	3.78	1.48	33918
	49.08	3.74	41.74	56.42	7.63	0.65	6832	48.39	3.60	41.34	55.44	7.43	0.59	6378	48.73	2.55	43.74	53.73	5.23	0.60	13210
	35.61	4.40	26.99	44.23	12.35	1.79	6569	41.25	4.46	32.51	49.99	10.81	1.40	6448	38.20	3.11	32.12	44.29	8.13	1.56	13017
	52.36	3.50	45.50	59.21	6.68	3.62	8850	53.54	4.00	45.70	61.37	7.47	3.81	8929	52.90	2.74	47.53	58.26	5.17	3.99	17779
47.22	1.74	43.80	50.64	3.69	4.20	41704	48.07	1.70	44.73	51.40	3.54	3.93	41367	47.63	1.25	45.18	50.09	2.63	4.30	83071	
66.77	1.64	63.56	69.98	2.45	2.09	47761	65.64	1.60	62.51	68.77	2.43	2.05	48945	66.23	1.17	63.93	68.52	1.77	2.16	96706	
88.05	5.85	76.59	90.51	6.64	1.90	5942	103.09	6.02	91.30	114.88	5.84	1.74	6173	95.81	4.43	87.13	104.50	4.62	2.01	12115	
77.25	1.90	73.52	80.98	2.46	2.40	50747	78.55	1.86	74.89	82.20	2.37	2.37	52629	77.89	1.34	75.27	80.52	1.72	2.41	103376	
38.10	2.70	32.82	43.39	7.07	3.46	13179	42.10	2.62	36.97	47.24	6.22	3.25	12985	40.10	1.96	36.25	43.95	4.90	3.65	26164	
47.81	3.39	41.17	54.44	7.08	1.11	10792	49.41	4.05	41.47	57.35	8.20	1.30	10745	48.57	2.61	43.46	53.68	5.37	1.19	21537	
54.24	3.37	47.63	60.84	6.21	1.62	11050	54.63	3.26	48.24	61.03	5.97	1.53	11233	54.43	2.48	49.57	59.29	4.56	1.76	22283	
43.29	2.03	39.31	47.27	4.69	0.97	23796	43.80	1.93	40.01	47.58	4.41	0.88	24448	43.54	1.53	40.53	46.54	3.52	1.10	48244	
28.02	1.98	24.13	31.91	7.08	1.12	16008	31.94	2.21	27.61	36.27	6.92	1.08	15444	29.86	1.57	26.78	32.95	5.27	1.25	31452	
48.14	2.96	42.34	53.93	6.14	0.77	12819	50.53	2.91	44.82	56.24	5.77	0.73	12398	49.32	2.18	45.05	53.60	4.42	0.83	25217	
64.89	2.96	59.08	70.69	4.56	0.88	13027	63.32	2.82	57.80	68.84	4.45	0.93	13037	64.10	2.11	59.95	68.24	3.30	0.97	26064	
43.53	3.41	36.84	50.22	7.84	1.27	10271	42.82	3.48	36.01	49.63	8.12	1.45	9765	43.17	2.50	38.26	48.07	5.80	1.43	20036	
40.25	4.34	31.73	48.76	10.79	0.47	4396	46.19	4.94	36.51	55.88	10.70	0.58	4187	43.30	3.41	36.61	49.99	7.88	0.56	8583	
57.58	2.81	52.06	63.09	4.88	0.64	14279	54.61	3.01	48.70	60.52	5.52	0.78	13535	46.21	1.97	38.35	46.07	4.67	0.66	27593	
46.41	1.96	42.58	50.25	4.21	1.00	27190	41.49	2.07	37.43	45.55	4.99	1.21	28406	44.00	1.49	41.07	46.92	3.39	1.21	55596	
40.48	2.41	35.75	45.21	5.96	0.72	12571	42.09	3.17	35.87	48.31	7.54	1.16	12793	41.25	2.01	37.31	45.19	4.88	0.96	25364	
61.39	4.34	52.87	69.90	7.08	0.69	6058	73.11	5.19	62.93	83.29	7.10	0.71	5984	66.67	3.56	59.70	73.64	5.33	0.79	12042	
53.69	4.18	45.50	61.87	7.78	0.85	6135	61.39	4.16	53.25	69.53	6.77	0.65	6105	57.38	3.05	51.40	63.35	5.31	0.80	12240	
40.09	2.72	34.76	45.41	6.78	0.66	11557	41.81	3.01	35.91	47.72	7.20	0.70	11444	40.89	2.22	36.55	45.24	5.42	0.82	23001	
46.74	3.30	40.29	53.20	7.05	0.53	9298	49.16	3.34	42.60	55.71	6.80	0.52	8986	47.89	2.56	42.87	52.92	5.35	0.63	18284	
33.20	3.04	27.23	39.16	9.16	0.40	9075	38.57	3.84	31.05	46.10	9.95	0.53	8510	35.79	2.59	30.71	40.87	7.24	0.53	17585	
16.42	1.42	13.63	19.20	8.65	0.62	23352	18.52	1.69	15.21	21.83	9.13	0.75	20422	17.45	1.22	15.05	19.84	7.00	0.84	42774	
INDONESIA	50.15	0.54	49.09	51.21	1.08	2.24	567284	51.55	0.55	50.48	52.62	1.06	2.21	564541	50.83	0.40	50.06	51.61	0.78	2.35	1131825

Tabel 3. Sampling Error APK PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan + Perdesaan										
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error		Efek Rancangan	Jumlah Sampel					
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	35,16	1,92	31,40	38,92	5,45	0,96	13492	30,19	1,15	27,94	32,44	3,80	1,82	32341	31,76	0,99	29,81	33,70	3,12	0,86	48833
Sumatera Utara	26,08	1,29	23,55	28,61	4,95	2,30	33379	22,59	0,94	20,74	24,44	4,18	1,34	42411	24,34	0,90	22,77	25,90	3,28	1,83	75790
Sumatera Barat	32,08	1,84	28,47	35,70	5,74	1,27	16035	28,83	1,29	26,31	31,35	4,46	0,87	23744	30,22	1,08	28,10	32,35	3,58	1,06	39779
Riau	28,71	1,84	25,10	32,32	6,41	1,58	11156	29,70	1,50	26,77	32,63	5,03	1,57	18428	29,31	1,16	27,04	31,58	3,96	1,58	29584
Jambi	27,65	2,52	22,70	32,59	9,13	1,04	6451	33,49	1,32	30,49	36,49	4,57	0,80	16646	31,71	1,32	29,13	34,30	4,16	0,88	23097
Sumatera Selatan	25,14	2,10	21,02	29,26	8,36	2,43	12284	25,60	1,32	23,01	28,19	5,16	1,64	25006	25,43	1,14	23,20	27,66	4,47	1,93	37290
Bengkulu	30,89	2,79	25,42	36,36	9,04	0,78	5774	27,76	1,79	24,26	31,27	6,45	0,69	12964	28,80	1,52	25,83	31,77	5,26	0,72	18738
Lampung	32,74	2,31	28,21	37,28	7,07	1,89	9160	33,38	1,32	30,79	35,98	3,96	1,49	24758	33,20	1,16	30,93	35,46	3,48	1,61	33918
Kepulauan Bangka Belitung	40,99	2,77	35,57	46,41	6,75	0,81	6573	30,46	2,14	26,26	34,65	7,03	0,48	6637	36,10	1,79	32,60	39,61	4,95	0,66	13210
Kepulauan Riau	26,93	2,15	22,71	31,15	7,99	1,57	9667	36,11	4,23	27,81	44,41	11,73	0,85	3350	28,31	1,95	24,50	32,13	6,87	1,45	13017
DKI Jakarta	39,80	1,70	36,47	43,12	4,26	3,33	17779	-	-	-	-	-	-	-	39,80	1,70	36,47	43,12	4,26	3,33	17779
Jawa Barat	36,26	1,03	34,24	38,28	2,84	5,03	55433	34,74	1,34	32,13	37,36	3,84	3,00	27638	35,87	0,84	34,23	37,52	2,34	4,51	83071
Jawa Tengah	52,40	1,15	50,14	54,65	2,19	2,46	51628	46,99	1,11	44,81	49,17	2,37	2,22	45078	49,77	0,80	48,20	51,35	1,61	2,35	96706
DI Yogyakarta	66,39	2,60	61,29	71,49	3,92	2,06	8280	79,38	4,14	71,27	87,50	5,21	1,84	3835	69,80	2,23	65,43	74,17	3,19	2,08	12115
Jawa Timur	58,43	1,11	56,26	60,60	1,89	2,63	54913	55,18	1,17	52,89	57,47	2,11	2,54	48463	56,90	0,80	55,32	58,47	1,41	2,58	103376
Banten	33,95	1,79	30,44	37,46	5,28	4,26	17198	20,07	1,92	16,30	23,83	9,57	2,96	8966	29,77	1,39	27,04	32,50	4,68	3,96	26164
Bali	37,52	2,00	33,59	41,45	5,34	1,34	13190	31,19	2,67	25,96	36,42	8,56	1,23	8347	35,49	1,60	32,35	38,63	4,52	1,29	21537
Nusa Tenggara Barat	40,33	2,44	35,56	45,11	6,04	1,89	9728	40,25	2,25	35,84	44,65	5,59	1,91	12555	40,29	1,65	37,05	43,52	4,10	1,90	22283
Kalimantan Barat	33,90	2,39	29,21	38,59	7,06	1,16	8337	32,22	1,20	29,87	34,58	3,73	1,07	39907	32,58	1,08	30,48	34,69	3,30	1,09	48244
Nusa Tenggara Timur	25,69	2,24	21,31	30,07	8,70	1,46	9180	20,95	1,30	18,40	23,49	6,20	1,19	22272	22,47	1,13	20,25	24,70	5,05	1,27	31452
Kalimantan Tengah	38,28	2,39	33,60	42,95	6,23	0,74	8517	37,70	2,04	33,70	41,69	5,41	0,99	16700	37,90	1,56	34,84	40,97	4,12	0,90	25217
Kalimantan Selatan	46,78	2,19	42,49	51,08	4,69	1,21	10363	47,69	1,79	44,18	51,21	3,76	0,94	15701	47,27	1,40	44,53	50,02	2,96	1,07	26064
Kalimantan Timur	29,96	1,88	26,08	33,83	6,59	1,46	12277	36,39	3,05	30,41	42,38	8,39	1,69	7759	32,20	1,69	28,90	35,50	5,23	1,57	20036
Kalimantan Utara	25,23	2,89	19,57	30,90	11,45	0,63	4135	42,73	3,66	35,56	49,91	8,57	0,58	4448	32,80	2,34	28,22	37,39	7,14	0,62	8583
Sulawesi Utara	28,08	2,02	24,12	32,05	7,20	0,70	11227	35,18	1,95	31,36	38,99	5,53	0,60	16366	31,78	1,41	29,03	34,53	4,42	0,65	27593
Sulawesi Tengah	36,90	3,13	30,76	43,04	8,48	1,09	5398	43,57	1,63	40,38	46,76	3,73	0,74	19065	41,77	1,47	38,90	44,64	3,51	0,84	24463
Sulawesi Selatan	31,28	1,69	27,97	34,58	5,39	1,47	19343	32,76	1,22	30,36	35,16	3,73	1,13	36253	32,16	1,00	30,21	34,12	3,10	1,26	55596
Sulawesi Tenggara	31,69	3,09	25,64	37,74	9,73	1,69	6495	30,85	1,57	27,78	33,92	5,08	0,70	18929	31,18	1,34	28,17	34,18	4,93	1,09	23564
Gorontalo	44,70	3,59	37,67	51,73	8,02	0,74	4040	53,47	3,18	47,23	59,71	5,95	0,93	8002	50,23	2,37	46,57	54,88	4,73	0,84	12042
Sulawesi Barat	42,60	4,21	34,35	50,86	9,89	0,79	2461	43,51	2,54	37,53	47,48	5,97	0,97	9779	42,53	2,18	38,25	46,81	5,13	0,93	12240
Maluku	22,08	2,46	17,25	26,90	11,14	0,92	7540	36,31	2,09	33,22	40,40	5,75	0,73	15461	30,77	1,67	27,49	34,05	5,43	0,85	23001
Maluku Utara	29,25	3,07	23,24	35,27	10,49	0,55	4377	37,46	2,26	33,03	41,88	6,03	0,69	19007	35,31	1,86	31,67	38,95	5,26	0,66	18294
Papua Barat	25,21	2,94	19,46	30,97	11,65	0,56	5471	28,72	2,30	24,20	33,23	8,02	0,51	12114	27,39	1,82	23,83	30,95	6,63	0,53	17585
Papua	20,72	1,93	16,95	24,49	9,29	0,67	9248	10,71	1,01	8,74	12,68	9,38	0,95	33526	13,17	0,91	11,39	14,95	6,89	0,86	42774
INDONESIA	39,46	0,41	38,66	40,26	1,03	3,04	480469	36,14	0,33	35,50	36,77	0,90	1,73	651356	37,92	0,27	37,39	38,44	0,70	2,44	1131825

Tabel 4. Sampling Error APK PAUD 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki + Perempuan								
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error					Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error					Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	29,67	1,37	26,99	32,35	4,61	0,88	22777	33,97	1,31	31,40	36,54	3,86	0,71	23056	31,76	0,99	29,81	33,70	3,12	0,86	46833
Sumatera Utara	23,86	1,06	21,77	25,94	4,46	1,66	37831	24,82	1,18	22,51	27,13	4,75	1,96	37959	24,34	1,00	22,77	25,90	3,28	1,83	75790
Sumatera Barat	28,75	1,49	25,84	31,66	5,17	1,03	19702	31,72	1,59	28,60	34,83	5,01	1,10	20077	30,22	0,80	28,10	32,35	3,58	1,06	39779
Riau	29,11	1,53	26,11	32,11	5,26	1,42	15026	29,52	1,61	26,37	32,67	5,44	1,47	14558	29,31	1,16	27,04	31,58	3,96	1,58	29584
Jambi	30,32	1,82	26,76	33,89	6,00	0,86	11694	33,13	1,96	29,29	36,97	5,91	0,93	11403	31,71	1,32	29,13	34,30	4,16	0,88	23097
Sumatera Selatan	24,01	1,46	21,14	26,88	6,09	1,70	18953	26,93	1,62	23,76	30,10	6,00	1,82	18337	25,43	1,14	23,20	27,66	4,47	1,93	37290
Bengkulu	29,82	2,04	25,81	33,83	6,85	0,66	9472	27,72	2,03	23,74	31,70	7,33	0,64	9266	26,80	1,52	25,83	31,77	5,26	0,72	18738
Lampung	33,05	1,56	30,00	36,10	4,71	1,52	17313	33,36	1,64	30,14	36,57	4,92	1,56	16605	33,20	1,16	30,93	35,46	3,48	1,61	33918
Kepulauan Bangka Belitung	35,48	2,59	30,40	40,55	7,30	0,71	6832	36,76	2,48	31,89	41,63	6,76	0,62	6378	36,10	1,79	32,60	39,61	4,95	0,66	13210
Kepulauan Riau	27,81	2,97	21,99	33,64	10,68	1,74	6569	28,84	2,73	23,48	34,19	9,47	1,39	6448	28,31	1,95	24,50	32,13	6,87	1,45	13017
DKI Jakarta	40,68	2,28	36,21	45,15	5,61	3,58	8850	38,82	2,39	34,14	43,51	6,16	3,68	8929	39,80	1,70	36,47	43,12	4,26	3,83	17779
Jawa Barat	35,30	1,12	33,10	37,50	3,18	4,20	41704	36,49	1,17	34,19	38,78	3,21	4,22	41367	35,87	0,84	34,23	37,52	2,34	4,51	83071
Jawa Tengah	49,74	1,06	47,65	51,82	2,14	2,16	47761	49,81	1,11	47,05	51,98	2,22	2,13	48945	49,77	0,80	48,20	51,35	1,61	2,35	96706
DI Yogyakarta	65,68	3,10	59,61	71,75	4,72	1,78	5942	73,49	2,91	67,79	79,19	3,96	1,91	6173	69,80	2,23	65,43	74,17	3,19	2,03	12115
Jawa Timur	56,07	1,10	53,91	58,23	1,97	2,47	50747	57,75	1,12	55,56	59,95	1,94	2,48	52629	56,90	0,80	55,32	58,47	1,41	2,58	103376
Banten	27,96	1,84	24,36	31,56	6,57	3,61	13179	31,62	1,90	27,90	35,35	6,01	3,53	12985	29,77	1,39	27,04	32,50	4,68	3,96	26164
Bali	35,86	2,09	31,77	39,95	5,83	1,11	10792	35,10	2,33	30,53	39,68	6,65	1,34	10745	35,49	1,60	32,35	38,63	4,52	1,29	21537
Nusa Tenggara Barat	40,26	2,22	35,91	44,60	5,50	1,70	11050	40,32	2,17	36,07	44,57	5,38	1,64	11233	40,29	1,65	37,05	43,52	4,10	1,90	22283
Nusa Tenggara Timur	32,04	1,37	29,35	34,74	4,29	0,93	23796	33,17	1,40	30,42	35,91	4,22	0,88	24448	32,58	1,08	30,48	34,69	3,30	1,09	48244
Kalimantan Barat	21,57	1,45	18,72	24,42	6,74	1,11	16008	23,45	1,57	20,36	26,53	6,71	1,15	15444	22,47	1,13	20,25	24,70	5,05	1,27	31452
Kalimantan Tengah	37,47	2,07	33,41	41,53	5,53	0,79	12819	38,33	2,09	34,23	42,43	5,46	0,80	12398	37,90	1,56	34,84	40,97	4,12	0,90	25217
Kalimantan Selatan	46,91	1,85	43,29	50,53	3,94	0,95	13027	47,65	1,91	43,89	51,40	4,02	0,98	13037	47,27	1,40	44,53	50,02	2,96	1,07	26064
Kalimantan Timur	31,74	2,21	27,41	36,08	6,96	1,36	10271	32,66	2,37	28,01	37,31	7,26	1,54	9765	32,20	1,69	28,90	35,50	5,23	1,57	20036
Kalimantan Utara	30,67	2,97	24,85	36,48	9,67	0,49	4996	34,81	3,21	28,52	41,10	9,21	0,59	4187	32,80	2,34	28,22	37,39	7,14	0,62	8583
Sulawesi Utara	31,95	1,85	28,33	35,57	5,78	0,56	14058	31,61	1,93	27,88	35,39	6,11	0,61	13355	31,78	1,41	29,03	34,53	4,42	0,85	27593
Sulawesi Tengah	43,26	1,87	39,60	46,93	4,32	0,66	12479	40,33	2,07	36,27	44,38	5,13	0,86	11984	41,77	1,47	38,90	44,64	3,51	0,84	24463
Sulawesi Selatan	33,68	1,31	31,11	36,25	3,90	1,09	27190	30,57	1,36	27,89	33,24	4,46	1,19	28406	32,16	1,00	30,21	34,12	3,10	1,26	55596
Sulawesi Tenggara	30,75	1,81	27,20	34,30	5,89	0,79	12571	31,63	2,41	26,92	36,35	7,60	1,28	12793	31,18	1,54	28,17	34,18	4,93	1,09	25364
Gorontalo	48,30	3,06	42,31	54,30	6,33	0,73	6058	52,36	3,23	46,02	58,70	6,17	0,74	5984	50,23	2,17	45,57	54,88	4,73	0,84	12042
Sulawesi Barat	41,22	2,98	35,39	47,06	7,22	0,88	6135	43,85	2,79	38,38	49,32	6,36	0,75	6105	42,53	2,18	38,25	46,81	5,13	0,93	12240
Maluku	30,89	2,10	26,78	35,01	6,80	0,70	11557	30,63	2,16	26,41	34,86	7,04	0,68	11444	30,77	1,67	27,49	34,05	5,43	0,85	23001
Maluku Utara	33,94	2,25	29,54	38,34	6,61	0,53	9298	36,87	2,57	31,94	41,90	6,96	0,57	8986	35,31	1,86	31,67	38,95	5,26	0,66	18284
Papua Barat	25,58	2,17	21,33	29,84	8,49	0,41	9075	29,29	2,63	24,14	34,45	8,98	0,52	8510	27,39	1,82	23,83	30,95	6,63	0,53	17585
Papua	12,10	1,03	10,08	14,12	8,50	0,62	22352	14,34	1,26	11,86	16,82	8,82	0,74	20422	13,17	0,91	11,39	14,95	6,89	0,86	42774
INDONESIA	37,36	0,36	36,67	38,06	0,95	2,25	56784	38,50	0,37	37,77	39,22	0,96	2,28	56451	37,92	0,27	37,39	38,44	0,70	2,44	1131825

Tabel 5. Sampling Error APMPALD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan+Perdesaan								
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel			
			Batas Bawah	Batas Atas					Batas Bawah	Batas Atas					Batas Bawah	Batas Atas					
			(5)	(6)					(7)	(8)					(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	34,59	2,17	30,34	38,84	6,27	1,16	819	30,21	1,38	27,51	32,91	4,56	0,70	2003	31,60	1,17	29,31	33,88	3,69	0,92	2822
Sumatera Utara	25,69	1,47	22,82	28,57	5,71	2,81	1909	22,08	1,05	20,03	24,14	4,74	1,03	2818	23,89	0,90	22,13	25,65	3,76	1,85	4727
Sumatera Barat	21,67	1,95	17,86	25,49	8,97	1,69	930	21,13	1,28	18,62	23,65	6,08	0,64	1391	21,37	1,11	19,18	23,55	5,20	1,08	2321
Riau	20,25	1,77	16,79	23,71	8,71	1,64	644	25,59	1,63	22,40	28,79	6,37	1,27	1188	23,98	1,22	21,19	25,98	5,18	1,56	1832
Jambi	26,06	2,94	20,30	31,81	11,27	1,43	328	33,13	1,83	29,55	36,71	5,51	0,69	904	30,94	1,56	27,89	34,00	5,04	0,98	1232
Sumatera Selatan	27,75	2,38	23,09	32,41	8,57	2,80	713	25,41	1,50	22,47	28,35	5,90	1,25	1355	26,29	1,30	23,75	28,83	4,93	1,90	2068
Bengkulu	25,59	2,91	19,90	31,29	11,35	0,83	325	24,91	1,85	21,29	28,52	7,41	0,47	719	25,13	1,56	22,06	28,19	6,22	0,63	1044
Lampung	28,60	2,51	23,69	33,51	8,76	2,21	479	29,93	1,52	26,95	32,92	5,09	1,24	1402	29,54	1,30	26,99	32,10	4,41	1,67	1881
Kepulauan Bangka Belitung	40,31	2,96	34,52	46,11	7,33	0,86	356	27,63	2,52	22,69	32,38	9,13	0,43	395	34,38	1,98	30,50	38,27	5,76	0,64	751
Kepulauan Riau	20,56	2,48	15,71	25,41	12,04	2,34	560	31,07	4,37	22,52	39,63	14,05	0,57	211	22,01	2,22	17,66	26,36	10,08	1,73	771
DKI Jakarta	33,23	1,77	29,77	36,70	5,32	4,26	859	-	-	-	-	-	-	-	33,23	1,77	29,77	36,70	5,32	3,55	859
Jawa Barat	31,74	1,18	29,44	34,04	3,71	6,56	2855	29,34	1,44	26,52	32,16	4,90	2,28	1481	31,13	0,95	29,27	32,99	3,05	4,84	4836
Jawa Tengah	51,77	1,25	49,33	54,21	2,41	2,79	2520	47,38	1,30	44,84	49,93	2,75	1,83	2175	49,66	0,90	47,89	51,42	1,81	2,34	4695
DI Yogyakarta	56,19	3,13	50,07	62,32	5,56	2,67	343	72,88	4,82	63,43	82,34	6,62	1,81	154	60,56	2,69	55,29	65,83	4,44	2,30	497
Jawa Timur	54,29	1,29	51,77	56,81	2,37	3,27	2494	52,41	1,33	49,80	55,02	2,54	1,98	2152	53,41	0,93	51,60	55,23	1,73	2,65	4646
Banten	31,24	2,07	27,19	35,29	6,61	5,57	916	20,44	2,06	16,41	24,47	10,07	1,93	506	28,11	1,60	24,98	31,23	5,67	4,14	1422
Bali	25,87	2,16	21,63	30,10	8,35	1,71	596	22,70	3,14	16,54	28,85	13,88	1,25	367	24,83	1,77	21,36	28,29	7,13	1,46	963
Nusa Tenggara Barat	33,33	2,67	28,09	38,57	8,02	2,29	546	39,15	2,47	34,31	43,99	6,31	1,42	758	36,52	1,82	32,96	40,08	4,97	1,87	1304
Nusa Tenggara Timur	33,58	2,87	27,95	39,22	8,56	1,62	496	32,66	1,29	30,13	35,19	3,95	0,75	2707	32,87	1,19	30,53	35,20	3,62	1,06	3203
Kalimantan Barat	24,15	2,40	19,45	28,85	9,92	1,63	489	20,43	1,43	17,62	23,24	7,01	0,89	1312	21,63	1,24	19,20	24,05	5,72	1,22	1801
Kalimantan Tengah	34,80	2,71	29,50	40,11	7,78	0,97	466	36,21	2,34	31,62	40,80	6,47	0,81	997	35,70	1,79	32,20	39,20	5,00	0,96	1463
Kalimantan Selatan	44,06	2,71	39,75	49,38	6,15	1,74	539	46,75	2,01	42,81	50,69	4,30	0,71	844	45,50	1,66	42,26	48,75	3,64	1,16	1383
Kalimantan Timur	24,38	2,16	20,16	28,60	8,84	1,84	727	28,94	3,38	22,32	35,56	11,67	1,38	452	25,96	1,83	22,36	29,55	7,07	1,63	1179
Kalimantan Utara	17,53	2,82	12,00	23,07	16,10	0,75	265	38,58	4,14	30,45	46,70	10,74	0,46	295	26,36	2,44	21,59	31,14	9,24	0,60	560
Sulawesi Utara	28,56	2,44	23,78	33,34	8,54	0,91	514	36,50	2,15	32,28	40,72	5,90	0,47	879	32,82	1,63	29,64	36,00	4,95	0,68	1393
Sulawesi Tengah	34,05	3,72	26,76	41,35	10,93	1,48	290	41,62	1,77	38,14	45,09	4,26	0,54	1047	39,38	1,64	36,38	42,79	4,13	0,83	1337
Sulawesi Selatan	27,60	1,91	23,85	31,35	6,93	1,84	1007	30,65	1,41	27,89	33,41	4,59	0,91	1946	29,43	1,14	27,20	31,67	3,88	1,32	2953
Sulawesi Tenggara	34,41	3,62	27,31	41,51	10,53	2,12	386	31,09	1,85	27,47	34,71	5,94	0,58	1199	32,39	1,82	28,81	35,96	5,63	1,18	1585
Gorontalo	41,70	4,51	32,86	50,55	10,82	1,10	212	52,14	3,31	45,65	58,63	6,35	0,65	448	48,34	2,63	43,18	53,50	5,45	0,84	660
Sulawesi Barat	38,78	4,75	29,46	48,09	12,26	0,98	151	41,85	2,82	36,32	47,37	6,74	0,75	578	41,15	2,44	36,38	45,93	5,92	0,93	729
Maluku	23,89	2,86	18,29	29,50	11,96	1,08	432	39,57	2,40	34,86	44,28	6,07	0,60	1043	33,55	1,94	29,74	37,36	5,79	0,88	1475
Maluku Utara	27,80	3,63	20,68	34,92	13,06	0,73	246	39,68	2,51	34,76	44,60	6,32	0,53	860	36,55	2,09	32,45	40,64	5,72	0,66	1106
Papua Barat	21,13	2,83	15,59	26,67	13,37	0,56	340	25,99	2,41	21,27	29,28	9,28	0,37	919	24,15	1,84	20,54	27,76	7,62	0,47	1259
Papua	21,30	2,18	17,03	25,56	10,22	0,80	586	9,62	1,02	7,63	11,61	10,56	0,65	2691	12,55	0,95	10,68	14,42	7,60	0,78	3277
INDONESIA	35,69	0,46	34,79	36,59	1,29	3,14	25338	34,18	0,36	33,47	34,89	1,06	1,72	38196	34,99	0,30	34,41	35,58	0,85	2,49	63534

Tabel 6. Sampling Error APNPAUD 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Laki-Laki + Perempuan												
	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan									
	Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas											
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Aceh	22.80	1.51	25.84	31.76	5.24	0.82	1456	34.63	1.56	31.57	37.68	4.50	0.73	1366	31.60	1.17	33.88	3.69	0.92	2822	
Sumatera Utara	28.80	1.18	20.49	25.11	5.18	1.61	2503	24.99	1.38	22.29	27.68	5.50	2.02	2224	23.89	0.90	25.65	3.76	1.85	4727	
Sumatera Barat	18.14	1.51	15.18	21.10	8.32	1.182	24.61	24.61	1.68	21.33	27.90	6.81	1.07	1139	21.37	1.11	19.18	23.55	5.20	1.08	2321
Riau	23.25	1.62	20.09	26.42	6.95	1.39	970	23.94	1.66	20.70	27.18	6.91	1.32	862	23.58	1.22	21.19	25.98	5.18	1.56	1832
Jambi	28.48	2.08	24.41	32.55	7.29	0.87	641	33.35	2.22	29.01	37.69	6.65	0.93	591	30.94	1.56	27.89	34.00	5.04	0.98	1232
Sumatera Selatan	24.56	1.76	21.12	28.00	7.14	1.78	1065	28.03	1.78	24.55	31.52	6.34	1.65	1003	26.29	1.30	23.75	28.83	4.93	1.90	2068
Bengkulu	24.02	2.06	19.99	28.05	8.56	0.57	536	26.31	2.28	21.84	30.78	8.67	0.61	508	25.13	1.56	22.06	28.19	6.22	0.63	1044
Lampung	29.03	1.73	25.65	32.41	5.94	1.52	999	30.12	1.90	26.40	33.84	6.31	1.60	882	29.54	1.30	26.99	32.10	4.41	1.67	1881
Kepulauan Bangka Belitung	35.34	2.89	29.67	41.01	8.19	0.66	379	33.44	2.85	27.84	39.03	8.53	0.65	372	34.38	1.98	30.50	38.27	5.76	0.64	751
Kepulauan Riau	20.08	2.99	14.23	25.94	14.88	1.76	399	24.27	2.94	18.50	30.04	12.12	1.26	372	22.01	2.22	17.66	26.36	10.08	1.73	771
DKI Jakarta	33.38	2.49	28.50	38.26	7.46	3.71	448	33.06	2.67	27.83	38.28	8.06	3.58	411	33.23	1.77	29.77	36.70	5.32	3.55	859
Jawa Barat	29.79	1.27	27.31	32.27	4.25	4.41	2273	32.54	1.30	30.00	35.07	3.98	4.14	2063	31.13	0.95	29.27	32.99	3.05	4.84	4336
Jawa Tengah	48.52	1.20	46.17	50.87	2.47	2.10	2471	50.88	1.26	48.41	53.36	2.48	2.14	2224	49.66	0.90	47.89	51.42	1.81	2.34	4695
DI Yogyakarta	57.74	3.71	50.46	65.01	6.43	2.02	248	63.21	3.71	55.94	70.47	5.86	2.23	249	60.56	2.69	55.29	65.83	4.44	2.30	497
Jawa Timur	51.88	1.28	49.38	54.38	2.46	2.46	2388	54.97	1.29	52.44	57.50	2.35	2.47	2248	53.41	0.93	51.60	53.23	1.73	2.65	4646
Banten	25.04	2.07	20.99	29.09	8.25	3.65	718	31.19	2.19	26.90	35.49	7.02	3.55	704	28.11	1.60	24.98	31.23	5.67	4.14	1422
Bali	35.80	2.32	31.26	40.34	6.47	1.50	674	37.24	2.48	32.38	42.11	6.66	1.66	630	36.52	1.82	32.96	40.08	4.97	1.87	1304
Nusa Tenggara Barat	31.71	1.55	28.69	34.74	4.87	0.90	1659	34.07	1.60	30.94	37.21	4.69	0.88	1544	32.87	1.19	30.53	35.20	3.62	1.06	3203
Nusa Tenggara Timur	20.68	1.60	17.54	23.82	7.75	1.09	954	22.70	1.77	19.22	26.18	7.81	1.10	847	21.63	1.24	19.20	24.05	5.72	1.22	1801
Kalimantan Barat	34.47	2.32	29.92	39.01	6.73	0.80	739	36.94	2.38	32.29	41.60	6.43	0.80	724	35.70	1.79	32.20	39.20	5.00	0.96	1463
Kalimantan Selatan	43.63	2.12	39.48	47.78	4.85	0.92	714	47.36	2.19	43.08	51.65	4.62	0.97	669	45.50	1.66	42.26	48.75	3.64	1.16	1383
Kalimantan Timur	25.20	2.25	20.79	29.62	8.94	1.19	593	26.68	2.58	21.62	31.74	9.67	1.56	586	25.96	1.83	22.36	29.55	7.07	1.63	1179
Kalimantan Utara	24.37	3.03	18.43	30.31	12.43	0.46	264	28.25	3.20	21.98	34.52	11.33	0.49	296	26.36	2.44	21.59	31.14	9.24	0.60	560
Sulawesi Utara	33.72	2.10	29.61	37.84	6.23	0.54	712	31.91	2.25	27.50	36.33	7.06	0.63	681	32.82	1.63	29.64	36.00	4.95	0.88	1393
Sulawesi Tengah	40.52	2.18	36.25	44.79	5.38	0.70	678	38.66	2.36	34.04	43.28	6.09	0.84	669	39.58	1.64	36.38	42.79	4.13	0.83	1337
Sulawesi Selatan	30.63	1.51	27.68	33.58	4.91	1.11	1537	28.19	1.58	25.10	31.29	5.60	1.23	1416	29.43	1.14	27.20	31.67	3.88	1.32	2953
Sulawesi Tenggara	31.01	2.03	27.04	34.98	6.53	0.75	844	33.88	2.97	28.05	39.71	8.78	1.42	741	32.39	1.82	28.81	35.96	5.63	1.18	1585
Gorontalo	45.01	3.36	38.42	51.60	7.47	0.73	360	52.39	3.56	45.41	59.37	6.80	0.67	352	40.34	2.63	43.18	53.50	5.45	0.84	660
Sulawesi Barat	39.94	3.15	33.76	46.12	7.89	0.80	377	42.47	3.26	36.09	48.85	7.66	0.77	352	41.15	2.44	36.38	45.93	5.92	0.93	729
Maluku	32.69	2.41	27.96	37.42	7.38	0.71	802	34.53	2.57	29.49	49.47	7.44	0.68	673	33.55	1.94	29.74	37.36	5.79	0.88	1475
Maluku Utara	34.20	2.55	29.20	39.19	7.45	0.52	582	39.13	2.89	33.46	44.81	7.40	0.57	524	36.55	2.09	32.45	40.64	5.72	0.66	1106
Papua Barat	22.02	2.20	17.70	26.34	10.01	0.36	661	26.44	2.61	21.33	31.56	9.87	0.42	598	24.15	1.84	20.54	27.76	7.62	0.47	1259
Papua	11.96	1.20	9.61	14.30	10.01	0.64	1743	13.17	1.27	10.69	15.66	9.64	0.63	1534	12.55	0.95	10.68	14.42	7.60	0.78	3277
INDONESIA	33.75	0.40	32.97	34.53	1.18	2.31	33068	36.29	0.42	35.47	37.11	1.15	2.33	30466	34.99	0.30	34.41	35.58	0.85	2.49	6534

Tabel 7. Sampling Error APMPALUD 3-6Tahun Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Pekotaan						Perdesaan						Perkotaan+ Perdesaan								
	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan Bawah	Selang Kepercayaan Atas	Relative Standard Error	Efektif Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan Bawah	Selang Kepercayaan Atas	Relative Standard Error	Efektif Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan Bawah	Selang Kepercayaan Atas	Relative Standard Error	Efektif Rancangan	Jumlah Sampel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	34,56	1,89	30,86	38,26	5,46	1,18	1114	29,86	1,13	27,64	32,07	3,79	0,66	2750	31,33	0,96	29,42	33,25	3,12	0,89	3864
Sumatera Utara	26,08	1,29	23,55	28,61	4,95	2,83	2572	22,37	0,94	20,52	24,21	4,20	1,09	3824	24,23	0,80	22,66	25,79	3,29	1,92	6396
Sumatera Barat	31,89	1,84	28,29	35,50	5,77	1,58	1268	28,49	1,26	26,02	30,96	4,42	0,69	1904	29,95	1,07	27,84	32,05	3,58	1,10	3172
Riau	28,45	1,82	24,89	32,00	6,38	1,92	903	29,15	1,48	26,24	32,06	5,09	1,29	1565	28,87	1,15	26,62	31,13	3,98	1,65	2468
Jambi	26,70	2,48	21,85	31,55	9,27	1,29	432	33,24	1,52	30,26	36,21	4,57	0,65	1218	31,25	1,30	28,70	33,81	4,17	0,91	1650
Sumatera Selatan	25,12	2,10	21,00	29,24	8,37	2,99	929	25,37	1,32	22,79	27,95	5,20	1,33	1883	25,28	1,14	23,05	27,50	4,49	2,02	2812
Bengkulu	30,69	2,79	25,22	36,16	9,09	0,96	444	27,61	1,79	24,11	31,11	6,47	0,56	970	28,63	1,51	25,66	31,60	5,28	0,75	1414
Lampung	32,74	2,31	28,21	37,28	7,06	2,33	673	33,32	1,32	30,72	35,91	3,97	1,21	1902	33,15	1,16	30,89	35,41	3,48	1,68	2575
Kepulauan Bangka Belitung	40,68	2,76	35,28	46,08	6,77	1,00	487	29,95	2,13	25,78	34,12	7,10	0,39	536	35,70	1,78	32,22	39,18	4,98	0,69	1023
Kepulauan Riau	26,84	2,15	22,62	31,05	8,01	1,94	750	33,40	3,50	26,54	40,27	10,48	0,53	285	27,82	1,91	24,09	31,56	6,85	1,49	1035
DKI Jakarta	39,30	1,66	36,05	42,55	4,22	4,60	1130	-	-	-	-	-	-	-	39,30	1,66	36,05	42,55	4,22	3,90	1130
Jawa Barat	36,14	1,02	34,13	38,14	2,83	6,12	3823	34,65	1,34	32,03	37,27	3,86	2,44	1967	35,75	0,83	34,12	37,39	2,33	4,67	5790
Jawa Tengah	51,66	1,12	49,46	53,86	2,17	2,97	3340	46,66	1,10	44,50	48,82	2,36	1,78	2921	49,23	0,79	47,69	50,78	1,60	2,41	6261
DI Yogyakarta	64,73	2,56	59,71	69,75	3,95	2,63	481	74,17	3,81	66,69	81,64	5,14	1,63	218	67,21	2,16	62,99	71,43	3,21	2,21	699
Jawa Timur	57,77	1,09	55,64	59,90	1,88	3,21	3396	54,25	1,14	52,01	56,49	2,11	2,05	2981	56,11	0,79	54,57	57,66	1,40	2,68	6377
Banten	33,68	1,78	30,19	37,18	5,30	5,26	1218	19,91	1,91	16,16	23,66	9,61	2,40	702	29,54	1,39	26,82	32,26	4,70	4,13	1920
Bali	37,30	2,00	33,37	41,23	6,24	1,41	736	39,33	2,21	34,99	43,67	8,56	0,99	514	35,34	1,60	32,20	38,49	4,54	1,35	1333
Nusa Tenggara Barat	39,82	2,43	35,06	44,58	6,10	2,36	736	39,33	2,21	34,99	43,67	8,56	0,99	514	35,34	1,60	32,20	38,49	4,54	1,35	1333
Nusa Tenggara Timur	33,65	2,37	29,01	38,30	7,04	1,41	644	31,14	1,15	28,90	33,38	3,68	0,83	3690	31,68	1,04	29,65	33,71	3,27	4,14	2000
Kalimantan Barat	25,69	2,24	21,31	30,07	8,70	1,79	653	20,56	1,28	18,06	23,07	6,22	0,95	1763	22,21	1,12	20,01	24,41	5,06	1,32	2416
Kalimantan Tengah	38,18	2,38	33,51	42,85	6,24	0,92	602	37,56	2,03	33,58	41,55	5,41	0,80	1353	37,78	1,56	34,73	40,84	4,13	0,94	1960
Kalimantan Selatan	46,52	2,18	42,24	50,80	4,69	1,50	732	47,43	1,78	43,94	50,92	3,75	0,76	1158	47,01	1,39	44,29	49,74	2,96	1,11	1890
Kalimantan Timur	29,96	1,98	26,08	33,83	6,60	1,80	1003	36,24	3,05	30,26	42,22	8,42	1,37	617	32,15	1,69	28,85	35,45	5,24	1,64	1620
Kalimantan Utara	23,23	2,89	19,58	30,89	11,44	0,77	350	41,93	3,69	34,71	49,16	8,79	0,49	402	32,46	2,35	27,86	37,05	7,22	0,66	752
Sulawesi Utara	28,05	2,02	24,10	32,01	7,20	0,86	702	33,99	1,87	30,33	37,66	5,50	0,48	1143	31,15	1,38	28,45	33,84	4,42	0,67	1845
Sulawesi Tengah	36,90	3,13	30,77	43,04	8,48	1,34	393	42,88	1,59	39,76	46,00	3,71	0,59	1409	41,27	1,44	38,44	44,10	3,50	0,86	1802
Sulawesi Selatan	31,05	1,66	27,80	34,30	5,34	1,77	1372	32,55	1,22	30,16	34,93	3,74	0,91	2671	31,95	0,99	30,01	33,88	3,09	1,30	4043
Sulawesi Tenggara	31,59	3,08	25,55	37,64	9,76	2,09	515	30,83	1,57	27,76	33,90	5,08	0,57	1610	31,13	1,53	28,12	34,13	4,93	1,14	2125
Gorontalo	44,70	3,59	37,66	51,73	8,03	0,92	284	51,78	3,09	45,73	57,83	5,96	0,75	597	49,16	2,33	44,60	53,72	4,74	0,87	881
Sulawesi Barat	41,83	4,10	33,79	49,88	9,81	0,95	205	41,19	2,43	36,44	45,95	5,89	0,76	789	41,73	2,10	37,23	45,45	5,07	0,94	994
Maluku	22,08	2,46	17,25	26,90	11,15	1,13	599	34,61	1,99	30,72	38,51	5,74	0,58	1389	29,73	1,62	26,56	32,91	5,45	0,88	1988
Maluku Utara	28,91	3,01	23,01	34,81	10,41	0,66	339	35,08	2,14	30,88	39,27	6,10	0,56	1194	33,46	1,77	29,99	36,93	5,29	0,68	1533
Papua Barat	25,04	2,94	19,25	30,78	11,75	0,70	467	28,18	2,26	23,76	32,60	8,01	0,41	1185	26,98	1,79	23,46	30,49	6,65	0,55	1652
Papua	20,52	1,91	16,81	24,28	9,27	0,81	773	10,18	0,97	8,28	12,09	9,54	0,76	3645	12,73	0,88	11,00	14,46	6,93	0,88	4418
INDONESIA	39,13	0,40	38,34	39,92	1,08	3,13	34153	35,63	0,32	35,01	36,26	0,90	1,79	51780	37,50	0,26	36,99	38,02	0,70	2,52	89933

Tabel 9. Sampling Error Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan + Perdesaan								
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel		
Aceh	85,49	2,78	3,25	1,31	295	68,26	2,23	3,27	0,65	753	73,74	1,79	2,43	0,95	1048		
Sumatera Utara	73,34	2,70	3,68	3,29	671	56,84	2,13	3,75	1,02	1088	65,08	1,76	2,70	2,09	1759		
Sumatera Barat	73,74	3,32	4,51	1,38	352	73,93	2,23	3,02	0,61	577	73,85	1,88	2,55	0,99	929		
Riau	84,24	2,73	3,24	1,60	215	67,20	2,63	3,92	1,01	444	73,26	2,04	2,78	1,47	659		
Jambi	65,08	5,51	8,32	1,67	130	69,26	3,06	4,42	0,72	345	69,64	2,72	3,90	1,14	475		
Sumatera Selatan	70,52	5,13	7,88	4,01	232	61,45	2,59	4,21	1,04	533	62,79	2,50	3,99	2,19	765		
Bengkulu	82,77	4,30	5,20	0,92	119	70,98	3,39	4,77	0,51	258	74,85	2,71	3,62	0,73	377		
Lampung	85,64	3,09	3,60	1,94	180	82,26	1,95	2,25	1,02	547	83,15	1,59	1,92	1,49	727		
Kepulauan Bangka Belitung	88,85	2,97	3,34	0,66	118	82,25	3,45	4,19	0,40	155	85,44	2,31	3,00	0,57	273		
Kepulauan Riau	81,44	2,87	3,53	1,15	200	70,33	9,54	13,57	0,96	73	79,85	2,86	3,58	1,09	273		
DKI Jakarta	81,57	2,79	3,41	5,11	294	-	-	-	-	-	81,57	2,79	3,41	4,44	294		
Jawa Barat	76,01	1,93	2,54	7,04	900	62,81	2,86	4,55	2,68	442	72,94	1,61	2,22	5,26	1342		
Jawa Tengah	89,22	1,24	1,39	2,42	881	89,58	1,36	1,52	1,75	749	89,39	0,92	1,03	2,26	1630		
DI Yogyakarta	99,39	0,62	0,62	1,38	99	100,00	-	-	-	35	99,54	0,46	0,47	1,19	134		
Jawa Timur	94,54	0,83	0,88	2,34	823	83,38	1,60	1,92	1,88	804	89,15	0,90	1,01	2,44	1627		
Banten	76,34	2,96	3,88	4,07	299	45,03	4,21	9,36	2,11	217	65,07	2,52	3,87	3,17	516		
Bali	88,82	2,58	2,91	1,44	188	70,26	4,75	6,76	0,81	142	82,16	2,45	2,98	1,19	330		
Nusa Tenggara Barat	65,06	4,32	6,64	2,33	218	66,77	3,92	5,86	1,25	292	65,92	2,92	4,42	1,89	510		
Nusa Tenggara Timur	58,62	4,85	8,28	1,55	183	51,65	2,21	4,27	0,81	1192	52,99	2,01	3,79	1,16	1375		
Kalimantan Barat	56,47	4,19	6,68	1,39	191	26,72	2,94	11,02	1,20	510	35,93	2,46	31,10	40,76	6,85	1,44	701
Kalimantan Tengah	85,01	4,31	5,07	1,42	145	72,74	3,64	7,97	0,72	322	77,16	2,87	3,72	1,09	467		
Kalimantan Selatan	89,48	2,55	2,85	1,25	185	86,35	2,21	2,56	0,70	341	87,61	1,68	1,92	1,02	526		
Kalimantan Timur	83,37	2,70	3,24	1,16	258	81,79	3,13	3,83	0,54	177	82,78	2,05	2,48	0,91	435		
Kalimantan Utara	74,25	4,80	6,47	1,39	206	86,16	3,37	9,27	0,36	97	76,50	4,05	68,56	84,43	5,29	0,53	175
Sulawesi Utara	79,68	4,29	5,38	1,11	103	77,55	2,54	3,28	0,56	416	78,16	2,19	2,80	1,11	512		
Sulawesi Tengah	72,87	2,81	3,85	1,38	340	65,55	2,17	6,80	0,78	789	68,24	1,72	2,51	1,12	1129		
Sulawesi Selatan	84,45	3,96	4,69	1,19	125	74,39	2,70	3,62	0,48	449	77,74	2,30	3,24	0,80	574		
Sulawesi Tenggara	91,86	4,26	4,64	1,00	63	90,54	3,01	9,44	0,51	164	91,00	2,45	2,70	0,76	227		
Sulawesi Barat	61,98	7,48	12,06	1,27	70	67,86	4,13	7,95	0,56	215	65,98	3,69	5,59	0,88	285		
Maluku	52,54	5,71	10,87	0,96	148	51,35	3,50	6,85	0,47	444	51,59	3,01	45,70	57,48	5,83	0,72	592
Maluku Utara	39,98	7,77	19,43	1,01	83	50,35	3,35	5,92	0,38	353	47,83	3,21	41,54	54,12	6,71	0,60	436
Papua Barat	69,02	6,28	9,10	0,70	128	41,67	4,27	10,25	0,35	405	50,43	3,60	43,38	57,48	7,13	0,54	533
Papua	67,45	4,37	6,48	0,97	217	22,18	2,45	26,98	0,63	931	34,65	2,41	29,93	39,37	6,95	0,90	1148
INDONESIA	80,24	0,67	0,83	3,35	8737	68,40	0,56	0,81	1,61	14565	74,51	0,44	0,59	2,33	23302		

Tabel 10. Sampling Error Angka Kestajanan Sekolah (AKS) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki + Perempuan								
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	71,66	2,72	66,33	76,98	3,79	0,98	527	75,93	2,21	71,60	80,26	2,91	0,68	521	73,74	1,79	70,23	77,26	2,43	0,95	1048
Sumatera Utara	62,49	2,38	57,83	67,14	3,80	1,68	901	67,64	2,38	62,98	72,30	3,51	1,82	858	65,08	1,76	61,64	68,53	2,70	0,99	1759
Sumatera Barat	71,35	2,74	65,98	76,73	3,84	0,96	488	76,66	2,63	71,51	81,81	3,43	0,90	441	73,85	1,88	70,17	77,54	2,55	0,99	929
Riau	73,70	2,65	68,50	78,89	3,60	1,21	355	72,78	2,94	67,01	78,54	4,04	1,32	304	73,26	2,04	69,27	77,25	2,78	1,47	659
Jambi	67,42	3,50	60,55	74,28	5,19	0,91	261	72,33	3,48	65,52	79,14	4,80	0,81	214	69,64	2,72	64,31	74,97	3,90	1,14	475
Sumatera Selatan	75,82	2,83	70,22	82,42	4,54	1,37	428	73,24	3,53	66,33	80,15	5,38	1,85	337	67,79	2,50	57,88	67,70	3,99	2,19	765
Bengkulu	75,82	3,37	69,22	82,42	4,44	0,51	185	73,96	3,98	66,15	81,76	5,38	0,73	192	74,85	2,71	69,54	80,16	3,62	0,73	377
Lampung	81,56	2,31	77,03	86,09	2,84	1,38	393	84,85	2,08	80,77	88,93	2,45	1,22	334	83,15	1,59	80,03	86,28	1,92	1,49	727
Kepulauan Bangka Belitung	86,52	2,81	81,01	92,03	3,25	0,47	155	84,01	3,72	76,73	91,29	4,42	0,54	118	85,44	2,31	80,90	89,97	2,71	0,57	273
Kepulauan Riau	80,53	3,90	72,89	88,16	4,84	0,83	141	79,31	3,72	72,02	86,61	4,69	0,92	132	79,85	2,86	74,24	85,46	3,58	1,09	273
DKI Jakarta	78,98	4,01	71,12	86,85	5,08	3,85	152	84,19	3,33	77,65	90,72	3,96	3,25	142	81,57	2,79	76,11	87,03	3,41	4,44	294
Jawa Barat	72,73	2,17	68,48	76,97	2,98	4,54	690	72,33	2,14	68,15	76,52	2,95	4,08	652	72,54	1,61	69,39	75,69	2,22	5,26	1342
Jawa Tengah	88,26	1,23	85,85	90,68	1,40	1,76	854	90,58	1,23	88,18	92,99	1,35	2,00	776	89,39	0,92	87,59	91,19	1,03	2,26	1680
DI Yogyakarta	99,23	0,78	97,71	100,75	0,78	1,09	74	100,00	-	-	-	-	-	60	99,54	0,46	98,63	100,45	0,47	1,19	134
Jawa Timur	88,71	1,20	86,37	91,05	1,35	1,95	846	89,61	1,22	87,23	91,99	1,36	2,07	781	89,15	0,90	87,39	90,91	1,01	2,44	1627
Banten	61,44	3,46	54,66	68,22	5,63	2,54	263	68,45	3,50	61,58	75,31	5,12	3,05	253	65,07	2,52	60,14	70,00	3,87	3,17	516
Bali	79,64	3,85	71,10	87,18	4,83	1,18	162	84,54	2,95	78,76	90,31	3,48	0,90	168	82,16	2,45	77,35	86,97	2,98	1,19	330
Nusa Tenggara Barat	69,36	3,70	62,10	76,62	5,34	1,64	295	61,61	4,19	53,39	69,82	6,80	1,50	215	65,92	2,92	60,21	71,64	4,42	1,89	510
Nusa Tenggara Timur	51,01	2,61	45,89	56,13	5,12	0,95	747	55,19	2,69	49,93	60,45	4,87	0,90	628	52,99	2,01	49,05	56,92	3,79	1,16	1375
Kalimantan Barat	38,65	3,44	31,92	45,38	8,89	1,30	359	32,98	3,44	26,24	39,73	10,44	1,29	342	35,93	2,46	31,10	40,76	6,85	1,44	701
Kalimantan Tengah	75,83	3,83	68,32	83,35	5,06	0,86	236	78,49	3,70	71,25	85,73	4,71	0,86	231	77,16	2,87	71,54	82,78	3,72	1,09	467
Kalimantan Selatan	87,71	2,16	83,48	91,95	2,46	0,84	283	87,48	2,66	82,26	92,70	3,05	1,07	243	87,61	1,68	84,31	90,90	1,92	1,02	526
Kalimantan Timur	80,38	3,15	74,21	86,55	3,92	0,95	223	85,59	2,53	80,64	90,54	2,95	0,67	212	82,78	2,05	78,76	86,81	2,48	0,91	495
Kalimantan Utara	76,38	5,50	65,60	87,16	7,20	0,45	90	76,62	5,54	65,76	87,48	7,23	0,45	85	76,50	4,05	68,56	84,43	5,29	0,53	175
Sulawesi Utara	84,62	3,97	76,84	92,39	4,69	1,06	252	75,82	4,31	67,37	84,27	5,69	0,94	260	80,10	3,00	74,23	85,97	3,74	1,11	512
Sulawesi Tengah	75,15	2,97	69,33	80,98	3,95	0,63	263	81,07	2,73	75,72	86,42	3,37	0,67	256	78,16	2,19	73,88	82,44	2,80	0,83	519
Sulawesi Selatan	67,60	2,37	62,96	72,24	3,50	0,99	589	68,92	2,38	64,25	73,59	3,46	0,97	540	68,24	1,72	64,88	71,61	2,51	1,12	1129
Sulawesi Tenggara	74,25	3,38	67,62	80,88	4,55	0,73	292	81,33	2,99	75,47	87,19	3,68	0,69	282	77,74	2,30	73,23	82,24	2,96	0,80	574
Gorontalo	88,57	4,40	79,95	97,18	4,96	0,87	114	93,29	2,14	89,09	97,49	2,30	0,36	113	91,00	2,45	86,19	95,81	2,70	0,78	227
Sulawesi Barat	66,90	5,10	56,90	76,90	7,62	0,77	140	65,10	5,02	55,26	74,93	7,71	0,75	145	65,98	3,69	58,75	73,21	5,59	0,88	285
Maluku	50,50	3,81	43,03	57,96	7,54	0,48	287	52,50	4,03	44,61	60,40	7,67	0,64	305	51,59	3,01	45,70	57,48	5,83	0,72	592
Maluku Utara	45,99	3,98	38,18	53,80	8,66	0,45	232	49,91	4,59	40,92	58,91	9,20	0,52	204	47,83	3,21	41,54	54,12	6,71	0,60	436
Papua Barat	49,67	4,34	41,16	58,18	8,74	0,37	272	51,24	5,12	41,20	61,27	9,99	0,48	261	50,43	3,60	43,38	57,48	7,13	0,54	533
Papua	37,05	3,22	30,73	43,37	8,70	0,74	618	32,10	3,39	25,46	38,74	10,55	0,82	530	34,65	2,41	29,93	39,37	6,95	0,90	1148
INDONESIA	73,74	0,59	72,58	74,89	0,80	2,15	12167	75,34	0,59	74,17	76,50	0,79	2,16	11135	74,51	0,44	73,66	75,37	0,59	2,33	23302

Tabel 12. Sampling Error Angket Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Perempuan										Laki-laki + Perempuannya										
	Estimasi	Standard Error		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel				
		(2)	(3)				(4)	(5)					(6)	(7)				(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	99,88	0,06	99,76	100,00	0,06	0,43	2995	99,84	0,10	99,65	100,03	0,10	0,79	2764	99,86	0,06	99,74	99,97	0,06	0,70	5759
Sumatera Utara	99,48	0,09	99,30	99,66	0,09	0,65	5570	99,51	0,12	99,28	99,74	0,12	1,11	5168	99,50	0,08	99,35	99,65	0,08	1,00	10738
Sumatera Barat	99,45	0,20	99,07	99,84	0,20	1,01	2606	99,57	0,13	99,31	99,84	0,13	0,56	2428	99,51	0,12	99,28	99,75	0,12	0,90	5024
Riau	98,97	0,30	98,38	99,56	0,31	1,66	2023	99,18	0,26	98,67	99,68	0,26	1,41	1848	99,07	0,20	98,68	99,46	0,20	1,72	3871
Jambi	99,58	0,19	99,21	99,96	0,19	0,77	1399	99,76	0,13	99,51	100,01	0,13	0,56	1273	99,67	0,12	99,44	99,90	0,12	0,76	2672
Sumatera Selatan	99,73	0,09	99,55	99,90	0,09	0,60	2343	99,70	0,12	99,47	99,92	0,12	0,89	2091	99,71	0,07	99,57	99,85	0,07	0,83	4404
Bengkulu	99,84	0,10	99,66	100,03	0,10	0,29	1126	99,90	0,08	99,75	100,05	0,08	0,27	1058	99,87	0,06	99,75	99,99	0,06	0,32	2184
Lampung	99,85	0,08	99,70	100,00	0,08	0,82	2023	99,88	0,07	99,74	100,01	0,07	0,73	1868	99,86	0,05	99,76	99,96	0,05	0,86	3891
Kepulauan Bangka Belitung	99,89	0,08	99,72	100,05	0,08	0,20	794	99,81	0,11	99,60	100,03	0,11	0,21	729	99,85	0,07	99,71	99,98	0,07	0,23	1523
Kepulauan Riau	99,74	0,13	99,48	100,00	0,13	0,36	809	99,32	0,31	98,71	99,93	0,31	0,81	801	99,52	0,17	99,18	99,86	0,17	0,76	1610
DKI Jakarta	99,93	0,07	99,79	100,07	0,07	1,64	933	99,59	0,20	99,21	99,88	0,20	2,09	822	99,77	0,10	99,57	99,97	0,10	2,25	1755
Jawa Barat	99,48	0,10	99,28	99,67	0,10	2,16	4770	99,57	0,12	99,35	99,80	0,12	3,41	4461	99,52	0,08	98,37	99,67	0,08	3,03	9321
Jawa Tengah	99,72	0,08	99,57	99,87	0,08	1,58	5106	99,80	0,08	99,65	99,95	0,08	2,13	4703	99,76	0,06	99,65	99,87	0,06	2,00	9809
DI Yogyakarta	99,87	0,10	99,68	100,06	0,10	0,53	559	99,93	0,07	99,80	100,07	0,07	0,47	534	99,90	0,06	99,78	100,02	0,06	0,57	1093
Jawa Timur	99,56	0,09	99,39	99,74	0,09	1,51	5095	99,68	0,08	99,53	99,82	0,08	1,36	4711	99,62	0,06	99,50	99,74	0,06	1,60	9806
Banten	99,49	0,21	99,09	99,90	0,21	2,68	1557	99,29	0,26	98,79	99,79	0,26	2,75	1431	99,39	0,19	99,03	99,76	0,19	3,94	2988
Bali	99,39	0,22	98,95	99,83	0,23	0,76	1151	99,75	0,13	99,50	100,00	0,13	0,53	1006	99,56	0,13	99,30	99,82	0,13	0,76	2157
Nusa Tenggara Barat	99,07	0,35	98,39	99,76	0,35	1,77	1471	99,84	0,11	99,63	100,04	0,11	0,80	1214	99,43	0,19	99,06	99,81	0,19	1,81	2885
Nusa Tenggara Timur	98,09	0,27	97,56	98,62	0,28	0,64	3741	98,47	0,24	98,00	98,94	0,24	0,61	3542	98,28	0,19	97,90	98,65	0,19	0,77	7283
Kalimantan Barat	98,36	0,32	97,73	98,99	0,33	0,81	1991	98,51	0,31	97,91	99,11	0,31	0,74	1818	98,43	0,22	98,00	98,86	0,22	0,86	3809
Kalimantan Tengah	98,63	0,13	99,38	99,88	0,13	0,29	1569	99,68	0,12	99,45	99,92	0,12	0,27	1502	99,66	0,09	99,48	99,84	0,09	0,34	3071
Kalimantan Selatan	99,82	0,14	99,55	100,09	0,14	1,06	1499	99,46	0,20	99,07	99,86	0,20	0,74	1396	99,65	0,12	99,41	99,88	0,12	0,92	2895
Kalimantan Timur	99,59	0,14	99,31	99,87	0,14	0,42	1287	99,93	0,04	99,85	100,01	0,04	0,22	1230	99,76	0,07	99,62	99,91	0,07	0,43	2517
Kalimantan Utara	98,02	0,65	98,75	99,30	0,66	0,40	563	98,48	0,57	97,37	99,58	0,57	0,35	531	98,24	0,50	97,25	99,22	0,51	0,56	1094
Sulawesi Utara	99,34	0,20	98,96	99,72	0,20	0,32	1496	99,39	0,24	98,93	99,85	0,24	0,47	1433	99,36	0,17	99,02	99,70	0,17	0,56	2929
Sulawesi Tengah	97,97	0,49	97,01	98,92	0,50	0,90	1596	98,53	0,31	97,93	99,13	0,31	0,46	1475	98,24	0,30	97,66	98,82	0,30	0,83	3071
Sulawesi Selatan	99,07	0,22	98,64	99,50	0,22	1,16	3512	99,44	0,16	99,13	99,76	0,16	0,96	3247	99,25	0,14	98,98	99,52	0,14	1,21	6759
Sulawesi Tenggara	99,19	0,22	98,77	99,61	0,22	0,45	1773	99,38	0,19	99,01	99,74	0,19	0,39	1687	99,28	0,16	98,97	99,59	0,16	0,56	3460
Gorontalo	98,33	0,59	97,17	99,48	0,60	0,60	715	99,24	0,32	98,60	99,87	0,32	0,36	665	98,76	0,35	98,09	99,44	0,35	0,59	1380
Sulawesi Barat	98,12	0,44	97,26	98,98	0,45	0,39	887	98,39	0,47	97,47	99,32	0,48	0,49	828	98,25	0,33	97,61	98,89	0,33	0,49	1715
Maluku	99,71	0,11	99,50	99,93	0,11	0,21	1696	99,70	0,19	99,33	100,08	0,19	0,61	1661	99,71	0,11	99,50	99,92	0,11	0,46	3357
Maluku Utara	98,93	0,25	98,45	99,41	0,25	0,21	1331	99,25	0,27	98,72	99,79	0,28	0,33	1188	99,09	0,19	98,71	99,46	0,19	0,31	2519
Papua Barat	97,91	0,68	96,57	99,25	0,70	0,59	1379	96,69	0,64	95,44	97,93	0,66	0,31	1253	97,31	0,55	96,23	98,39	0,57	0,64	2632
Papua	82,16	1,15	79,91	84,42	1,40	0,89	3715	82,72	1,13	80,50	84,94	1,37	0,81	3151	82,43	0,99	80,50	84,37	1,20	1,41	6866
INDONESIA	99,17	0,04	99,10	99,25	0,04	1,27	71050	99,27	0,04	99,20	99,35	0,04	1,41	65517	99,22	0,03	99,16	99,28	0,03	1,55	136567

Tabel 13. Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan														
	Estimasi	Standart Error	Relatvie Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standart Error	Relatvie Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standart Error	Relatvie Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	98,18	0,44	0,44	100,04	0,44	1,02	688	98,20	0,36	97,49	98,91	0,37	0,51	1807	98,49	0,29	97,93	99,05	0,29	0,74	2505
Sumatera Utara	97,74	0,50	0,52	98,22	0,52	2,20	2226	96,26	0,48	95,33	97,20	0,50	0,95	3167	96,75	0,35	96,08	97,43	0,36	1,62	5393
Sumatera Barat	97,18	0,70	0,81	98,35	0,72	1,24	976	95,78	0,58	94,65	96,92	0,61	0,51	1467	96,37	0,45	95,50	97,25	0,46	0,85	2443
Riau	96,22	0,84	0,88	97,88	0,88	1,56	684	94,15	0,89	92,41	95,88	0,94	1,15	1165	94,95	0,63	93,71	96,19	0,67	1,55	1849
Jambi	98,68	0,64	0,65	97,43	0,65	0,99	354	95,04	0,84	93,40	96,68	0,88	1,00	958	96,14	0,62	94,93	97,35	0,64	0,98	1312
Sumatera Selatan	95,50	1,07	1,12	97,60	1,12	2,44	696	93,80	0,75	92,34	95,26	0,80	1,00	1547	94,41	0,62	93,20	95,62	0,65	1,66	2243
Bengkulu	99,04	0,51	0,51	98,04	0,51	0,93	347	96,53	0,79	94,98	98,08	0,82	0,45	761	97,36	0,56	96,26	98,46	0,58	0,63	1108
Lampung	96,55	0,90	0,99	98,41	0,99	1,76	501	94,27	0,76	92,77	95,76	0,81	1,11	1219	95,00	0,60	93,83	96,16	0,63	1,56	1720
Kepulauan Bangka Belitung	95,83	0,95	0,99	97,69	0,99	0,51	388	88,00	1,88	85,31	92,69	2,11	0,44	372	92,70	1,03	90,69	94,72	1,11	0,59	760
Kepulauan Riau	99,69	0,16	0,16	99,38	0,16	0,43	578	96,80	1,35	94,15	99,45	1,40	0,40	202	98,20	0,27	96,67	99,73	0,27	0,52	780
DKI Jakarta	97,77	0,59	0,60	98,92	0,60	3,55	855	-	-	-	-	-	-	97,77	0,59	96,62	98,92	0,60	3,22	855	
Jawa Barat	94,83	0,54	0,57	95,89	0,57	5,86	3053	92,27	0,93	90,44	94,10	1,01	2,78	1457	94,15	0,47	93,24	95,07	0,50	4,84	4510
Jawa Tengah	96,20	0,43	0,45	97,05	0,45	2,35	2554	95,35	0,52	94,34	96,35	0,54	1,64	2036	95,79	0,33	95,14	96,45	0,35	2,22	4590
DI Yogyakarta	99,88	0,12	0,12	100,12	0,12	0,71	351	99,26	0,74	97,80	100,71	0,75	0,94	141	99,72	0,21	99,31	100,13	0,21	1,11	492
Jawa Timur	98,08	0,33	0,34	98,73	0,34	3,00	2624	95,84	0,49	94,87	96,80	0,51	1,77	2016	97,02	0,29	96,45	97,59	0,30	2,55	4640
Banten	96,63	0,86	0,89	98,31	0,89	5,10	886	94,00	1,35	91,35	96,65	1,44	2,22	499	95,79	0,73	94,36	97,22	0,76	3,96	1385
Bali	98,90	0,40	0,41	99,69	0,41	1,05	661	96,22	1,00	94,25	98,19	1,04	0,72	448	97,93	0,45	97,04	98,81	0,46	0,99	1109
Nusa Tenggara Barat	98,91	0,53	0,53	97,88	0,53	1,79	519	96,70	0,85	95,03	98,37	0,88	1,17	741	97,72	0,52	96,70	98,74	0,53	1,65	1260
Nusa Tenggara Timur	97,51	0,76	0,78	99,00	0,78	0,98	578	94,28	0,49	93,32	95,25	0,52	0,46	3020	94,95	0,43	94,12	95,78	0,45	0,68	3598
Kalimantan Barat	95,74	1,02	1,07	97,74	1,07	1,21	525	91,50	0,88	89,78	93,22	0,96	0,65	1387	92,84	0,68	91,51	94,18	0,73	0,95	1912
Kalimantan Tengah	95,88	1,23	1,28	98,28	1,28	1,11	484	92,65	1,11	90,48	94,82	1,19	0,56	1030	93,87	0,83	92,23	95,50	0,89	0,85	1514
Kalimantan Selatan	92,74	1,88	2,02	96,42	2,02	2,55	509	92,21	1,14	89,97	94,45	1,24	0,81	958	92,43	1,02	90,42	94,44	1,11	1,60	1467
Kalimantan Timur	98,77	0,52	0,53	99,78	0,53	1,37	669	99,12	0,39	98,34	99,89	0,40	0,39	477	98,89	0,36	98,18	99,60	0,37	1,05	1146
Kalimantan Utara	97,08	1,20	1,24	99,44	1,24	0,61	238	95,44	2,38	90,78	100,09	2,49	0,74	292	96,38	1,23	93,96	98,79	1,28	0,82	530
Sulawesi Utara	96,21	0,72	0,75	97,63	0,75	0,51	650	93,80	0,91	92,02	95,59	0,97	0,33	970	95,00	0,59	93,85	96,16	0,62	0,47	1620
Sulawesi Tengah	93,84	1,80	1,92	97,37	1,92	1,37	331	92,35	0,84	90,70	94,01	0,91	0,46	1341	92,74	0,78	91,21	94,26	0,84	0,77	1672
Sulawesi Selatan	93,83	1,05	1,12	95,89	1,12	2,01	1139	92,68	0,68	91,35	94,01	0,73	0,70	2330	93,13	0,59	91,99	94,28	0,63	1,28	3469
Sulawesi Tenggara	96,40	1,18	1,22	98,71	1,22	1,40	415	92,97	1,04	90,92	95,01	1,12	0,60	1334	94,29	0,79	92,75	95,84	0,84	0,95	1769
Gorontalo	90,64	2,25	2,48	95,05	2,48	0,82	250	91,82	1,38	89,12	94,53	1,50	0,38	538	91,38	1,21	89,01	93,74	1,32	0,62	788
Sulawesi Barat	87,89	3,38	3,85	94,52	3,85	1,05	164	90,53	1,29	88,00	93,06	1,42	0,44	739	89,95	1,26	87,49	92,42	1,40	0,71	903
Meliku	96,82	0,50	0,50	99,80	0,50	0,54	549	95,79	0,71	94,40	97,17	0,74	0,29	1143	97,05	0,46	96,14	97,95	0,48	0,41	1692
Meliku Utara	99,13	0,47	0,47	98,21	0,47	0,28	289	96,92	0,62	95,70	98,13	0,64	0,27	1048	97,47	0,48	96,53	98,42	0,49	0,37	1337
Papua Barat	99,50	1,09	1,12	99,63	1,12	0,59	361	96,80	0,73	95,36	98,23	0,76	0,20	837	97,08	0,62	95,87	98,28	0,63	0,36	1198
Papua	95,22	1,11	1,17	97,40	1,17	0,72	611	74,64	1,73	71,26	78,03	2,31	0,77	2213	80,00	1,31	77,43	82,57	1,64	1,00	2824
INDONESIA	96,46	0,18	0,19	96,82	0,19	3,34	26713	94,13	0,18	93,79	94,47	0,19	1,75	39660	95,36	0,13	95,11	95,61	0,13	2,39	66373

Tabel 14. *Sampling Error* Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan												
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan								
			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	98,44	0,41	97,64	99,24	0,41	0,67	12,91	98,54	0,39	97,78	99,29	0,39	0,60	1214	98,49	0,29	97,93	99,05	0,29	0,74	2505
Sumatera Utara	96,26	0,52	95,25	97,28	0,54	1,45	2805	97,27	0,44	96,42	98,13	0,45	1,33	2588	96,75	0,35	96,08	97,43	0,36	1,62	5393
Sumatera Barat	94,79	0,79	93,24	96,33	0,83	0,82	1259	97,92	0,45	97,05	98,79	0,45	0,65	1184	96,37	0,45	95,50	97,25	0,46	0,85	2443
Riau	93,55	0,98	91,64	95,47	1,05	1,28	929	96,30	0,69	94,95	97,66	0,72	1,12	920	94,95	0,63	93,71	96,19	0,67	1,55	1849
Jambi	96,23	0,81	94,65	97,82	0,84	0,76	654	96,05	0,91	94,28	97,83	0,94	0,92	658	96,14	0,62	94,93	97,35	0,64	0,98	1312
Sumatera Selatan	93,80	0,87	92,09	95,51	0,93	1,40	1166	95,08	0,85	93,42	96,75	0,89	1,51	1077	94,41	0,62	93,20	95,62	0,65	1,66	2243
Bengkulu	96,42	0,91	94,65	98,20	0,94	0,57	577	98,37	0,58	97,24	99,50	0,59	0,46	531	97,36	0,56	96,26	98,46	0,58	0,63	1108
Lampung	94,09	0,86	92,40	95,77	0,91	1,30	911	95,99	0,78	94,47	97,51	0,81	1,39	809	95,00	0,60	93,83	96,16	0,63	1,56	1720
Kepulauan Bangka Belitung	89,46	1,75	86,02	92,90	1,96	0,58	426	96,35	0,97	94,45	98,25	1,00	0,42	334	92,70	1,03	90,69	94,72	1,11	0,59	760
Kepulauan Riau	96,02	0,43	96,17	99,87	0,44	0,49	405	99,40	0,33	98,76	100,03	0,33	0,43	375	99,20	0,27	98,67	99,73	0,27	0,52	780
DKI Jakarta	97,79	0,77	96,29	99,29	0,78	2,55	445	97,75	0,92	95,95	99,56	0,94	3,34	410	97,77	0,59	96,62	98,92	0,60	3,22	855
Jawa Barat	92,90	0,70	91,54	94,27	0,75	4,18	2346	95,53	0,58	94,39	96,68	0,61	4,10	2164	94,15	0,47	93,24	95,07	0,50	4,84	4510
Jawa Tengah	94,84	0,52	93,82	95,85	0,55	2,02	2384	96,81	0,41	96,01	97,61	0,42	1,88	2206	95,79	0,33	95,14	96,45	0,35	2,22	4650
DI Yogyakarta	99,83	0,17	99,50	100,16	0,17	0,57	271	99,59	0,41	98,78	100,39	0,41	1,17	221	99,72	0,21	99,31	100,13	0,21	1,11	492
Jawa Timur	96,56	0,41	95,76	97,35	0,42	2,01	2469	97,54	0,41	96,73	98,34	0,42	2,60	2171	97,02	0,29	96,45	97,59	0,30	2,55	4640
Banten	94,74	0,96	92,87	96,61	1,01	2,52	717	96,88	0,95	95,03	98,76	0,98	3,94	668	95,79	0,73	94,36	97,22	0,76	3,96	1385
Bali	97,63	0,47	97,71	99,56	0,48	0,77	585	97,14	0,80	95,57	98,70	0,82	0,96	524	97,93	0,45	97,04	98,81	0,46	0,99	1109
Nusa Tenggara Barat	97,00	0,91	95,22	98,78	0,94	1,67	644	98,41	0,55	97,34	99,47	0,55	1,16	616	97,72	0,52	96,70	98,74	0,53	1,65	1260
Nusa Tenggara Timur	93,77	0,60	92,59	94,94	0,64	0,51	1852	96,21	0,56	95,11	97,30	0,58	0,66	1746	94,95	0,43	94,12	95,78	0,45	0,68	3598
Kalimantan Barat	91,81	1,00	89,85	93,77	1,09	0,81	979	93,90	0,88	92,17	95,63	0,94	0,81	933	92,84	0,68	91,51	94,18	0,73	0,95	1912
Kalimantan Tengah	93,38	1,07	91,28	95,48	1,15	0,58	748	94,35	1,17	92,06	96,64	1,24	0,80	766	93,87	0,83	92,23	95,50	0,89	0,85	1514
Kalimantan Selatan	92,07	1,33	89,47	94,67	1,44	1,22	759	92,84	1,42	90,06	95,62	1,53	1,34	708	92,43	1,02	90,42	94,44	1,11	1,60	1467
Kalimantan Timur	96,07	0,66	96,78	99,37	0,68	0,96	621	99,80	0,13	99,56	100,05	0,13	0,30	525	98,89	0,36	98,18	99,60	0,37	1,05	1146
Kalimantan Utara	94,42	2,18	90,14	98,70	2,31	0,78	271	98,44	0,92	96,64	100,24	0,93	0,45	259	96,38	1,23	93,96	98,79	1,28	0,82	530
Sulawesi Utara	93,06	0,95	91,20	94,93	1,02	0,42	886	97,09	0,67	95,78	98,40	0,69	0,43	734	95,00	0,59	93,85	96,16	0,62	0,47	1620
Sulawesi Tengah	90,80	1,22	88,40	93,19	1,35	0,69	846	94,68	0,89	92,94	96,42	0,94	0,59	826	92,74	0,78	91,21	94,26	0,84	0,77	1672
Sulawesi Selatan	91,38	0,83	89,76	92,99	0,90	0,93	1756	94,92	0,73	93,49	96,35	0,77	1,16	1713	93,13	0,59	91,99	94,28	0,63	1,28	3469
Sulawesi Tenggara	94,79	0,89	93,06	96,53	0,93	0,60	916	93,76	1,13	91,55	95,97	1,20	0,77	833	94,29	0,79	92,75	95,84	0,84	0,95	1749
Gorontalo	87,64	1,91	83,90	91,38	2,18	0,51	409	95,18	1,39	92,47	97,90	1,46	0,62	379	91,38	1,21	89,01	93,74	1,32	0,62	788
Sulawesi Barat	86,93	1,89	83,24	90,63	2,17	0,56	437	92,94	1,32	90,34	95,53	1,42	0,48	466	89,95	1,26	87,49	92,42	1,40	0,71	903
Maluku	97,05	0,57	95,94	98,17	0,59	0,29	895	97,04	0,70	95,66	98,42	0,72	0,41	797	97,05	0,46	96,14	97,95	0,48	0,41	1692
Maluku Utara	97,41	0,63	96,18	98,64	0,64	0,29	717	97,54	0,73	96,11	98,98	0,75	0,37	620	97,47	0,48	96,53	98,42	0,49	0,37	1337
Papua Barat	96,97	0,93	95,14	98,80	0,96	0,37	623	97,19	0,86	95,52	98,87	0,88	0,32	575	97,08	0,62	95,87	98,28	0,63	0,36	1198
Papua	80,78	1,54	77,76	83,79	1,90	0,66	1530	79,14	1,72	75,77	82,52	2,17	0,70	1294	80,00	1,31	77,43	82,57	1,64	1,00	2824
INDONESIA	94,52	0,19	94,15	94,88	0,20	2,26	34529	96,26	0,16	95,95	96,58	0,17	2,20	31844	95,36	0,13	95,11	95,61	0,13	2,39	66373

Table 15. Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan							
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel		
			Batas Bawah	Batas Atas					Batas Bawah	Batas Atas					Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Aceh	87,38	1,91	83,63	91,13	2,19	1,59	725	80,90	1,30	78,37	83,44	1,70	0,74	1745	82,92	1,08	80,81	85,03	1,30	4670
Sumatera Utara	78,63	1,52	75,65	81,60	1,93	3,26	2089	76,03	1,29	73,51	78,56	1,60	1,23	2583	77,41	1,01	75,43	79,39	1,30	2472
Sumatera Barat	88,87	1,47	85,99	91,76	1,66	1,50	964	78,50	1,33	75,90	81,11	1,69	0,58	1276	83,08	1,01	81,11	85,06	1,21	2240
Riau	80,81	1,95	77,00	84,63	2,41	1,90	624	74,82	1,60	71,69	77,94	2,13	0,97	990	77,27	1,23	74,87	79,68	1,59	1614
Jambi	82,71	2,06	78,67	86,74	2,49	1,02	388	66,31	1,98	62,44	70,19	2,98	0,74	847	71,94	1,49	69,01	74,86	2,07	1235
Sumatera Selatan	78,09	2,17	73,84	82,35	2,78	2,44	620	64,36	1,62	61,19	67,53	2,51	1,03	1248	69,65	1,35	67,01	72,29	1,93	1868
Bengkulu	86,11	2,18	81,84	90,38	2,53	0,74	344	75,60	2,05	71,57	79,62	2,71	1,49	656	79,33	1,54	76,31	82,35	1,95	1000
Lampung	76,47	2,70	71,18	81,76	3,53	2,92	496	68,28	1,65	65,04	71,51	2,42	1,28	1145	70,83	1,42	68,05	73,61	2,00	1641
Kepulauan Bangka Belitung	72,72	2,92	67,00	78,43	4,01	0,86	348	61,32	3,13	55,18	67,45	5,11	0,51	338	67,11	2,14	62,91	71,31	3,19	706
Kepulauan Riau	85,16	2,41	80,43	89,89	2,83	1,94	507	76,10	5,00	66,31	85,90	6,57	0,67	160	83,78	2,19	79,49	88,07	2,61	667
DKI Jakarta	71,81	1,81	68,26	75,36	2,52	3,76	891	-	-	-	-	-	-	71,81	1,81	68,27	75,36	2,52	3,13	891
Jawa Barat	70,15	1,18	67,85	72,46	1,68	6,59	3071	58,74	1,50	55,79	61,69	2,56	2,11	1388	67,17	0,95	65,30	69,03	1,42	4459
Jawa Tengah	74,38	1,13	72,16	76,59	1,52	3,25	2534	63,34	1,28	60,83	65,85	2,02	2,07	2015	69,02	0,85	67,35	70,70	1,24	2,67
DI Yogyakarta	90,07	1,80	86,55	93,60	2,00	2,40	386	83,64	3,68	76,43	90,85	4,40	1,49	158	88,39	1,62	85,22	91,57	1,83	1,91
Jawa Timur	78,80	1,09	76,65	80,94	1,39	3,75	2651	65,12	1,32	62,53	67,70	2,03	2,41	2070	72,18	0,84	70,52	73,83	1,17	4721
Banten	72,44	1,99	68,53	76,34	2,75	4,70	899	58,77	2,81	53,26	64,27	4,78	2,10	510	68,35	1,62	65,17	71,53	2,37	3,41
Bali	82,16	1,85	78,52	85,79	2,26	1,69	680	82,72	2,46	77,90	87,54	2,98	0,99	380	83,35	1,48	79,44	85,25	1,80	1,37
Nusa Tenggara Barat	83,76	2,03	79,79	87,73	2,42	2,18	565	70,77	2,38	66,10	75,44	3,37	1,42	706	76,89	1,62	73,72	80,05	2,10	1,87
Nusa Tenggara Timur	86,78	1,76	83,33	90,23	2,03	1,24	614	70,30	1,39	67,59	73,02	1,97	0,72	2109	74,83	1,16	72,57	77,09	1,54	2723
Kalimantan Barat	79,99	2,06	75,96	84,03	2,57	1,39	554	61,68	1,82	58,12	65,24	2,95	0,82	1156	68,35	1,43	65,55	71,15	2,09	1,13
Kalimantan Tengah	73,90	2,57	68,87	78,93	3,47	0,93	444	62,79	2,30	58,27	67,30	3,66	0,66	883	66,95	1,73	63,56	70,34	2,58	0,82
Kalimantan Selatan	74,22	2,23	69,85	78,59	3,00	1,56	641	62,89	2,13	58,71	67,08	3,39	0,72	780	68,66	1,56	65,62	71,71	2,27	1,10
Kalimantan Timur	83,72	2,27	79,26	88,17	2,72	2,51	647	77,21	3,11	71,11	83,31	4,03	1,16	417	81,55	1,84	77,94	85,15	2,26	1,85
Sulawesi Utara	77,80	3,27	71,39	84,22	4,21	0,76	241	72,68	5,05	62,79	82,58	6,95	0,75	282	75,62	2,87	69,99	81,25	3,80	0,79
Sulawesi Tengah	76,15	2,25	73,81	80,57	2,96	0,93	590	70,98	1,98	67,10	74,86	2,79	0,38	785	73,67	1,51	70,70	76,63	2,05	0,63
Sulawesi Tenggara	85,19	2,75	79,81	90,57	3,22	1,63	367	69,95	1,65	66,72	73,19	2,36	0,45	1042	75,05	1,48	72,15	77,95	1,97	0,79
Sulawesi Selatan	73,64	1,70	70,31	76,97	2,30	1,62	1101	68,71	1,31	66,15	71,27	1,90	0,75	2012	70,81	1,04	68,77	72,84	1,47	1,12
Gorontalo	82,66	2,62	77,52	87,80	3,17	1,58	390	67,18	1,93	63,39	70,97	2,88	0,52	1081	73,47	1,66	70,21	76,73	2,26	0,95
Sulawesi Barat	77,03	3,57	70,03	84,04	4,64	0,83	212	67,09	2,82	61,56	72,62	4,21	0,46	469	70,75	2,22	66,41	75,10	3,13	0,62
Maluku	74,62	4,36	66,07	83,16	5,84	0,98	141	66,83	2,50	61,92	71,73	3,74	0,56	604	68,69	2,19	64,41	71,98	3,18	0,75
Melaku Utara	83,14	2,11	79,00	87,29	2,54	0,78	528	76,02	2,00	72,10	79,95	2,63	0,45	939	79,12	1,46	76,26	81,98	1,84	0,61
Papua Barat	82,75	3,18	76,52	88,99	3,85	0,85	261	73,50	1,84	69,90	77,10	2,50	0,30	805	76,36	1,63	73,18	79,55	2,13	0,47
Papua	83,57	3,24	77,22	89,93	3,88	0,86	340	78,76	2,69	73,49	84,04	3,41	0,42	640	80,81	2,09	76,72	84,91	2,59	0,62
	84,79	2,47	79,94	89,63	2,92	1,12	534	56,08	2,07	52,03	60,14	3,69	0,76	1791	63,48	1,68	60,19	66,78	2,65	0,93
INDONESIA	76,05	0,44	75,19	76,90	0,57	3,41	26387	67,16	0,39	66,39	67,93	0,58	1,91	34040	71,99	0,30	71,41	72,57	0,41	2,61

Tabel 16. Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki + Perempuan								
	Estimasi (2)	Standar Error (3)	Selang Kepercayaan Batas Bawah (4)	Selang Kepercayaan Batas Atas (5)	Relative Standar Error (6)	Efek Rancangan (7)	Jumlah Sampel (8)	Estimasi (9)	Standar Error (10)	Selang Kepercayaan Batas Bawah (11)	Selang Kepercayaan Batas Atas (12)	Relative Standar Error (13)	Efek Rancangan (14)	Jumlah Sampel (15)	Estimasi (16)	Standar Error (17)	Selang Kepercayaan Batas Bawah (18)	Selang Kepercayaan Batas Atas (19)	Relative Standar Error (20)	Efek Rancangan (21)	Jumlah Sampel (22)
Aceh	81,18	1,48	78,28	84,07	1,82	0,91	1326	84,74	1,40	82,01	87,48	1,65	0,91	1144	82,92	1,08	80,81	85,03	1,30	1,05	2470
Sumatera Utara	73,88	1,39	71,15	76,61	1,89	1,82	2413	80,92	1,32	78,33	83,52	1,64	2,05	2259	77,41	1,01	75,43	79,39	1,30	2,17	4672
Sumatera Barat	78,54	1,52	75,56	81,52	1,93	0,88	1142	87,81	1,19	85,48	90,15	1,36	0,81	1098	83,08	1,01	81,11	85,06	1,21	0,93	2240
Riau	72,56	1,76	69,11	76,01	2,43	1,25	868	82,45	1,62	79,27	85,62	1,96	1,82	748	77,27	1,23	74,87	79,68	1,59	1,36	1614
Jambi	69,56	2,07	65,51	73,61	2,97	0,84	645	74,47	2,03	70,50	78,44	2,72	0,84	590	71,94	1,49	69,01	74,86	2,07	0,92	1235
Sumatera Selatan	65,27	1,83	61,68	68,85	2,80	1,40	988	74,25	1,86	70,61	77,90	2,50	1,62	880	69,65	1,35	67,01	72,29	1,93	1,64	1868
Bengkulu	75,13	2,23	70,76	79,50	2,97	0,57	518	83,72	1,93	79,93	87,51	2,31	0,56	482	79,33	1,54	76,31	82,35	1,95	0,63	1000
Lampung	68,60	2,00	64,67	72,53	2,92	1,77	862	73,14	1,87	69,47	76,81	2,56	1,63	779	70,83	1,42	68,05	73,61	2,00	1,88	1641
Kepulauan Bangka Belitung	63,69	2,93	57,94	69,44	4,61	0,60	385	70,59	2,94	64,82	76,35	4,17	0,65	321	67,11	2,14	62,91	71,31	3,19	0,68	706
Kepulauan Riau	83,44	2,82	77,91	88,96	3,38	1,26	352	84,19	3,53	77,28	91,11	4,19	1,69	315	83,78	2,19	79,49	88,07	2,61	1,46	667
DKI Jakarta	72,73	2,48	67,86	77,59	3,41	2,94	484	70,88	2,65	65,69	76,08	3,74	3,15	407	71,81	1,81	68,27	75,36	2,52	3,13	891
Jawa Barat	66,60	1,30	64,06	69,14	1,94	4,13	2238	67,74	1,26	65,28	70,20	1,85	3,89	2221	67,17	0,95	65,30	69,03	1,42	4,60	4459
Jawa Tengah	69,35	1,13	67,14	71,56	1,63	2,32	2361	68,68	1,26	66,21	71,15	1,84	2,73	2188	69,02	0,85	67,35	70,70	1,24	2,67	4549
DI Yogyakarta	86,79	2,34	82,21	91,37	2,69	1,81	291	90,15	2,27	85,70	94,60	2,52	1,99	253	88,39	1,62	85,22	91,57	1,83	1,91	544
Jawa Timur	72,73	1,12	70,53	74,93	1,54	2,62	2440	71,62	1,23	69,20	74,03	1,72	3,01	2281	72,18	0,84	70,52	73,83	1,17	2,99	4721
Banten	69,00	2,15	64,79	73,22	3,12	3,03	744	67,66	2,32	63,11	72,21	3,43	3,24	665	68,35	1,62	65,17	71,53	2,37	3,41	1409
Bali	81,79	2,18	77,51	86,06	2,67	1,39	520	82,90	1,99	78,99	86,81	2,41	1,23	540	82,35	1,48	79,44	85,25	1,80	1,37	1060
Nusa Tenggara Barat	80,78	2,05	76,76	84,81	2,54	1,73	673	72,74	2,48	67,87	77,61	3,41	1,85	598	76,89	1,62	73,72	80,05	2,10	1,87	1271
Nusa Tenggara Timur	72,84	1,55	69,80	75,88	2,13	0,84	1419	76,90	1,60	73,76	80,04	2,08	0,96	1304	74,83	1,16	72,57	77,09	1,54	0,99	2723
Kalimantan Barat	65,00	1,86	61,35	68,65	2,86	0,89	895	71,75	1,91	68,02	75,49	2,65	1,03	815	68,35	1,43	65,55	71,15	2,09	1,13	1710
Kalimantan Tengah	66,04	2,40	61,34	70,74	3,63	0,77	665	67,89	2,36	63,26	72,52	3,48	0,74	662	66,95	1,73	63,56	70,34	2,58	0,82	1327
Kalimantan Selatan	69,33	2,07	65,27	73,40	2,99	1,00	740	67,94	2,31	63,41	72,46	3,40	1,11	681	68,66	1,56	65,62	71,71	2,27	1,10	1421
Kalimantan Timur	79,53	2,45	74,72	84,34	3,08	1,54	568	83,72	2,47	78,88	88,56	2,95	1,71	496	81,55	1,84	77,94	85,15	2,26	1,85	1064
Kalimantan Utara	74,76	3,47	67,96	81,55	4,64	0,57	277	76,54	4,36	67,99	85,09	5,70	0,88	246	76,62	2,87	69,99	81,25	3,80	0,79	523
Sulawesi Utara	70,46	2,11	66,34	74,59	2,99	0,57	748	77,08	2,22	72,72	81,44	2,88	0,70	627	73,67	1,51	70,70	76,63	2,05	0,63	1375
Sulawesi Tengah	71,75	2,02	67,80	75,71	2,81	0,68	746	78,58	1,86	74,94	82,22	2,36	0,65	663	75,05	1,48	72,15	77,95	1,97	0,79	1409
Sulawesi Selatan	66,91	1,52	63,94	69,88	2,27	1,10	1601	74,87	1,44	72,05	77,68	1,92	1,11	1512	70,81	1,04	68,77	72,84	1,47	1,12	3113
Sulawesi Tenggara	70,51	2,48	65,65	75,38	3,52	0,96	730	76,35	2,13	72,18	80,52	2,79	0,82	752	73,47	1,66	70,21	76,73	2,26	0,95	1481
Gorontalo	69,60	3,12	63,50	75,71	4,48	0,58	349	71,91	3,04	65,95	77,88	4,23	0,57	331	70,75	2,22	66,41	75,10	3,13	0,62	681
Sulawesi Barat	64,46	2,72	59,14	69,79	4,22	0,55	410	73,20	3,12	67,09	79,31	4,26	0,78	335	68,69	2,19	64,41	72,98	3,18	0,75	745
Maluku	78,77	2,15	74,57	82,98	2,72	0,67	758	79,51	2,01	75,56	83,45	2,53	0,53	709	79,12	1,46	76,26	81,98	1,84	0,61	1467
Maluku Utara	74,93	2,42	70,19	79,67	3,23	0,46	536	77,68	2,16	73,45	81,91	2,78	0,44	530	76,36	1,63	73,18	79,55	2,13	0,47	1066
Papua Barat	80,30	2,60	75,20	85,39	3,24	0,50	560	81,42	3,09	75,36	87,49	3,80	0,61	420	80,81	2,09	76,72	84,91	2,59	0,62	980
Papua	65,67	2,15	61,47	69,88	3,27	0,82	1275	60,87	2,29	56,38	65,36	3,76	0,74	1050	63,48	1,68	60,19	66,78	2,65	0,93	2325
INDONESIA	70,98	0,40	70,20	71,76	0,56	2,35	31527	73,04	0,41	72,24	73,85	0,56	2,55	28900	71,99	0,30	71,41	72,57	0,41	2,61	60427

Tabel 17. Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan +Perdesaan								
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	51,13	2,60	46,03	56,23	5,09	2,58	1178	22,85	1,22	20,47	25,23	5,32	1,00	2770	32,59	1,32	30,01	35,17	4,54	1,51	3948
Sumatera Utara	28,16	1,74	24,75	31,57	6,18	6,30	2756	21,44	1,20	19,09	23,80	5,60	1,75	2882	25,31	1,15	23,06	27,55	4,02	3,52	5638
Sumatera Barat	50,19	2,77	44,75	55,62	5,53	3,89	1275	17,63	1,26	15,17	20,09	7,13	0,91	1562	33,87	1,80	30,33	37,40	5,32	2,95	2857
Riau	38,39	2,45	33,58	43,19	6,38	3,71	943	18,78	1,34	16,15	21,42	7,15	1,51	1394	27,19	1,41	24,43	29,95	5,18	2,36	2337
Jambi	36,83	2,84	31,26	42,40	7,72	2,00	564	14,80	1,17	12,50	17,10	7,93	0,83	1344	22,16	1,35	19,51	24,81	6,09	1,26	1908
Sumatera Selatan	30,22	2,32	25,67	34,78	7,69	4,21	1119	8,37	0,83	6,74	10,00	9,92	1,45	1887	17,15	1,19	14,82	19,49	6,94	2,83	3006
Bengkulu	45,60	3,21	39,31	51,89	7,04	1,35	480	20,51	1,67	17,23	23,79	8,15	0,70	1022	29,15	1,66	25,90	32,40	5,69	0,87	1502
Lampung	36,89	4,35	28,36	45,43	11,80	10,92	845	12,19	1,14	9,95	14,43	9,38	2,09	1788	20,60	1,93	16,82	24,38	9,35	6,20	2653
Kepulauan Bangka Belitung	17,53	2,10	13,42	21,64	11,96	1,13	475	14,27	2,01	10,33	18,20	14,06	0,72	525	15,99	1,46	13,13	18,84	9,12	0,77	1000
Kepulauan Riau	18,52	2,33	13,95	23,08	12,57	3,04	823	15,96	3,86	8,40	23,32	24,16	0,75	212	18,24	2,12	14,09	22,39	11,61	1,98	1085
DKI Jakarta	24,41	1,39	21,69	27,14	5,70	5,00	1685	-	-	-	-	-	-	-	24,41	1,39	21,69	27,14	5,70	3,46	1685
Jawa Barat	25,92	0,88	24,19	27,65	3,40	7,79	5198	8,58	0,74	7,13	10,03	8,65	2,63	2029	21,96	0,71	20,56	23,36	3,25	5,11	7227
Jawa Tengah	27,02	1,06	24,95	29,09	3,90	4,92	4021	16,06	0,89	14,32	17,80	5,53	2,92	2927	21,92	0,71	20,53	23,31	3,23	3,30	6948
DI Yogyakarta	57,74	2,52	52,79	62,68	4,37	4,10	803	22,14	4,92	12,51	31,78	22,21	2,97	723	51,69	2,28	47,22	56,17	4,42	2,74	1026
Jawa Timur	29,53	1,24	27,11	31,96	4,39	7,39	4417	14,81	1,07	12,71	16,91	7,23	5,00	3335	22,86	0,85	21,19	24,52	3,72	5,23	7752
Banten	25,62	1,48	22,72	28,52	5,78	5,49	1708	6,77	1,17	4,49	9,05	17,21	2,58	819	20,42	1,15	18,16	22,67	5,63	3,72	2527
Bali	30,82	1,61	27,66	33,98	5,24	1,74	1184	18,17	3,26	11,79	24,55	17,92	2,64	487	27,24	1,43	24,45	30,04	5,23	1,41	1671
Nusa Tenggara Barat	32,40	2,37	27,75	37,04	7,31	3,25	821	19,02	1,76	15,57	22,47	9,25	1,66	896	25,74	1,51	22,79	28,70	5,86	2,08	1717
Nusa Tenggara Timur	49,52	2,59	44,44	54,60	5,23	2,03	882	19,75	1,07	17,65	21,85	5,42	0,90	2588	28,27	1,17	25,98	30,56	4,14	1,24	3450
Kalimantan Barat	38,20	2,87	32,57	43,82	7,51	3,17	834	15,82	1,27	13,34	18,29	8,00	1,28	1677	23,86	1,45	21,02	26,70	6,07	2,02	2511
Kalimantan Tengah	29,28	2,36	24,65	33,91	8,06	1,49	748	20,73	1,58	17,63	23,83	7,63	0,79	1270	24,27	1,35	21,62	26,91	5,57	0,92	2018
Kalimantan Selatan	32,96	2,46	28,13	37,79	7,47	2,67	880	15,04	1,48	12,15	17,93	9,81	1,13	1222	23,82	1,48	20,92	26,72	6,21	1,66	2102
Kalimantan Timur	34,67	2,03	30,69	38,65	5,85	2,25	1027	19,56	2,01	15,62	23,49	10,26	0,98	583	29,84	1,56	26,77	32,90	5,24	1,47	1610
Kalimantan Utara	28,24	3,11	22,15	34,33	11,00	1,00	371	14,84	2,45	10,04	19,65	16,52	0,42	322	23,04	2,19	18,75	27,33	9,49	0,64	693
Sulawesi Utara	27,62	2,37	22,98	32,27	8,58	1,86	996	13,73	1,57	10,66	16,80	11,41	0,72	1140	21,45	1,54	18,43	24,47	7,19	1,17	2136
Sulawesi Tengah	48,13	3,41	41,45	54,80	7,08	2,15	536	16,87	1,20	14,52	19,22	7,11	0,64	1395	27,15	1,55	24,11	30,20	5,72	1,19	1931
Sulawesi Selatan	47,35	2,20	43,04	51,65	4,64	4,07	1769	21,75	1,24	19,33	24,18	5,69	1,42	2656	33,72	1,37	31,04	36,40	4,05	2,60	4425
Sulawesi Tenggara	47,14	4,16	38,98	55,30	8,03	4,20	649	15,75	1,78	12,27	19,24	11,29	1,14	1357	30,01	2,40	25,30	34,71	8,00	2,32	2006
Gorontalo	40,67	2,88	35,02	46,31	7,88	0,98	468	22,99	2,65	17,79	28,18	11,53	0,99	711	30,58	1,99	26,68	34,47	6,50	0,85	1179
Sulawesi Barat	36,68	4,33	28,19	45,18	11,62	1,39	238	19,94	1,75	16,51	23,38	8,79	0,66	774	24,10	1,75	20,67	27,53	7,25	0,80	1012
Maluku	50,31	3,07	44,29	56,34	6,11	1,65	724	26,81	2,53	21,86	31,77	9,43	1,07	1229	37,82	2,04	33,83	41,81	5,39	1,14	1953
Maluku Utara	43,37	3,44	36,64	50,11	7,92	1,04	461	24,79	1,82	21,22	28,36	7,35	0,46	1075	31,86	1,70	28,03	34,70	5,42	0,57	1536
Papua Barat	37,89	3,08	31,85	43,92	8,12	0,81	499	25,78	2,75	20,39	31,18	10,68	0,73	958	30,84	2,13	26,68	35,01	6,89	0,70	1457
Papua	33,66	2,30	29,14	38,17	6,85	1,36	970	17,90	1,18	15,59	20,22	6,59	0,67	2580	23,37	1,15	21,11	25,62	4,92	0,85	3550
INDONESIA	30,65	0,40	29,87	31,43	1,30	3,89	42347	15,83	0,28	15,27	16,38	1,79	2,27	47619	24,40	0,27	23,89	24,92	1,09	3,42	8996

Tabel 18. Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan														
	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan Batas Atas Batas Bawah	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan Batas Atas Batas Bawah	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan Batas Atas Batas Bawah	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	29,55	1,74	26,14	32,97	5,90	1,68	20,77	35,74	1,70	32,41	39,06	4,75	1,39	19,91	32,59	1,32	30,01	35,17	4,04	1,51	3948
Sumatera Utara	24,19	1,29	21,67	26,71	5,31	2,78	29,91	26,50	1,62	23,33	29,67	6,10	3,88	27,07	25,31	1,15	23,06	27,55	4,52	3,52	5638
Sumatera Barat	32,52	1,98	28,64	36,41	6,09	1,86	14,70	35,23	2,41	30,50	39,95	6,84	2,62	13,67	33,87	1,80	30,33	37,40	5,32	2,55	2837
Riau	28,95	1,80	25,42	32,48	6,22	2,30	12,14	25,26	1,70	21,92	28,59	6,74	2,03	11,23	27,19	1,41	24,43	29,95	5,18	2,36	2337
Jambi	19,30	1,54	16,28	22,32	7,99	1,09	9,77	25,11	2,07	21,06	29,16	8,23	1,57	9,91	22,16	1,35	19,51	24,81	6,09	1,26	1908
Sumatera Selatan	16,24	1,41	13,47	19,01	8,70	2,50	15,90	18,09	1,52	15,12	21,06	8,38	2,80	14,56	17,15	1,19	14,82	19,49	6,94	2,83	3006
Bengkulu	26,36	2,01	22,42	30,29	7,62	0,84	7,86	32,25	2,19	27,94	36,55	6,80	0,80	7,16	29,15	1,66	25,90	32,40	5,69	0,87	1502
Lampung	19,55	2,13	15,38	23,71	10,87	4,82	13,57	21,75	2,77	16,32	27,17	12,73	6,93	12,76	20,60	1,93	16,82	24,38	9,35	6,20	2633
Kepulauan Bangka Belitung	14,68	2,04	10,69	18,67	13,87	1,01	5,22	17,44	2,15	13,23	21,65	12,32	0,88	4,78	15,99	1,46	13,13	18,84	9,12	0,77	1000
Kepulauan Riau	18,59	2,55	13,59	23,60	13,73	1,75	5,43	17,86	2,86	12,25	23,46	16,02	2,06	4,92	18,24	2,12	14,09	22,39	11,61	1,98	1035
DKI Jakarta	23,89	1,78	20,40	27,39	7,46	3,23	8,12	24,89	1,78	21,39	28,38	7,16	3,47	8,73	24,41	1,39	21,69	27,14	5,70	3,46	1685
Jawa Barat	22,46	0,92	20,67	24,26	4,08	4,99	3,706	21,44	0,96	19,56	23,32	4,47	5,46	3,521	21,96	0,71	20,56	23,36	3,25	5,11	7227
Jawa Tengah	21,98	0,93	20,17	23,80	4,21	3,38	3,368	21,86	0,92	20,06	23,65	4,20	3,23	3,580	21,92	0,71	20,53	23,31	3,23	3,30	6948
DI Yogyakarta	50,53	2,90	44,85	56,20	5,73	2,58	5,94	52,84	3,16	46,64	59,04	5,98	3,13	4,92	51,69	2,28	47,22	56,17	4,42	2,74	1076
Jawa Timur	22,83	1,12	20,64	25,03	4,91	5,42	3,846	22,88	0,96	21,00	24,76	4,19	3,88	3,906	22,86	0,85	21,19	24,52	3,72	5,23	7752
Banten	19,00	1,53	16,00	22,00	8,06	4,18	12,74	21,88	1,55	18,84	24,93	7,10	3,74	12,53	20,42	1,15	18,16	22,67	5,63	3,72	2527
Bali	26,35	2,23	21,98	30,72	8,46	2,13	8,91	28,18	1,87	24,52	31,84	6,62	1,37	7,80	27,24	1,43	24,45	30,04	5,23	1,41	1671
Nusa Tenggara Barat	26,48	1,98	22,60	30,37	7,49	2,09	8,60	25,01	1,93	21,22	28,80	7,73	2,06	8,57	25,74	1,51	22,79	28,70	5,86	2,08	1717
Nusa Tenggara Timur	28,34	1,51	25,38	31,31	5,34	1,24	16,72	28,19	1,55	25,15	31,24	5,50	1,27	1,778	28,27	1,17	25,98	30,56	4,14	1,24	3450
Kalimantan Barat	25,41	1,91	21,68	29,15	7,50	2,02	12,82	22,25	1,69	18,93	25,56	7,60	1,67	1,129	23,86	1,45	21,02	26,70	6,07	2,02	2511
Kalimantan Tengah	22,55	1,66	19,30	25,80	7,36	0,90	1,034	26,13	1,95	22,31	29,96	7,46	1,03	984	24,77	1,35	21,62	26,91	5,57	0,92	2018
Kalimantan Selatan	26,11	2,05	22,10	30,12	7,84	1,78	1,068	21,48	1,65	18,24	24,72	7,70	1,30	1,034	23,82	1,48	20,92	26,72	6,21	1,66	2102
Kalimantan Timur	31,91	2,07	27,86	35,96	6,48	1,55	8,28	27,51	2,04	23,50	31,51	7,43	1,46	782	29,84	1,56	26,77	32,90	5,24	1,47	1610
Kalimantan Utara	21,96	3,03	16,02	27,89	13,80	0,83	3,64	24,37	2,90	18,68	30,05	11,91	0,58	3,329	23,04	2,19	18,75	27,33	9,49	0,64	693
Sulawesi Utara	18,35	1,73	14,95	21,74	9,44	1,03	1,169	24,92	2,07	20,88	28,97	8,29	1,05	987	21,45	1,54	18,43	24,47	7,19	1,17	2136
Sulawesi Tengah	26,84	2,14	22,65	31,04	7,97	1,39	9,94	27,49	1,97	23,63	31,35	7,16	1,08	937	27,15	1,55	24,11	30,20	5,72	1,19	1931
Sulawesi Selatan	30,07	1,63	26,87	33,26	5,41	2,33	2,226	37,41	1,68	34,13	40,70	4,48	2,19	2,199	33,72	1,37	31,04	36,40	4,05	2,60	4425
Sulawesi Tenggara	31,28	2,59	26,21	36,35	8,27	1,71	9,61	28,72	2,96	22,92	34,51	10,30	2,30	1,045	30,01	2,40	25,30	34,71	8,00	2,52	2006
Gorontalo	28,74	2,40	24,03	33,45	8,36	0,77	5,93	32,44	2,61	27,32	37,56	8,05	0,84	586	30,58	1,99	26,68	34,47	6,50	0,85	1179
Sulawesi Barat	21,62	2,04	17,61	25,62	9,45	0,71	5,14	26,70	2,81	21,19	32,21	10,52	1,11	498	24,10	1,75	20,67	27,53	7,25	0,80	1012
Maluku	35,23	2,53	30,28	40,18	9,17	1,07	9,94	40,43	2,60	35,34	45,52	6,43	1,06	969	37,82	2,04	33,83	41,81	5,39	1,14	1953
Maluku Utara	28,49	2,06	24,46	32,53	7,23	0,54	7,92	34,42	2,55	29,41	39,42	7,42	0,70	744	31,36	1,70	28,03	34,70	5,42	0,57	1536
Papua Barat	29,16	2,51	24,24	34,07	8,60	0,63	7,64	32,74	2,68	27,49	37,99	8,18	0,60	693	30,84	2,13	26,68	35,01	6,89	0,70	1457
Papua	23,76	1,53	20,76	26,75	6,43	0,94	1,785	22,91	1,48	20,02	25,80	6,44	0,76	2,111	23,37	1,15	21,11	25,62	4,92	0,85	3550
INDONESIA	24,03	0,34	23,37	24,69	1,39	2,81	45,668	24,79	0,34	24,12	25,47	1,38	2,79	44,288	24,40	0,27	23,89	24,92	1,09	3,42	89,966

Tabel 19. Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (sederajat Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018)

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	
			Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas					Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	111,74	1,42	108,97	114,52	1,27	0,98	13492	114,77	0,74	113,92	115,22	0,64	0,57	32341	113,85	0,67	112,54	115,17	0,59	0,69	48833
Sumatera Utara	110,31	1,09	108,18	112,44	0,99	2,32	33379	111,86	0,67	110,54	113,18	0,60	1,15	42411	111,10	0,64	108,86	112,35	0,57	1,79	75790
Sumatera Barat	108,32	1,26	105,85	110,79	1,16	1,31	16035	112,91	0,84	111,26	114,56	0,74	0,70	23744	110,99	0,73	109,56	112,42	0,66	0,96	39779
Riau	104,88	1,28	102,37	107,38	1,22	1,64	11156	108,20	0,87	106,49	109,91	0,81	1,27	18428	106,92	0,73	105,49	108,35	0,68	1,42	29584
Jambi	110,01	2,05	105,60	114,41	2,04	1,57	6451	112,83	0,97	110,93	114,74	0,86	0,72	16466	111,98	0,97	110,08	113,88	0,87	1,01	23097
Sumatera Selatan	112,85	2,05	108,83	116,88	1,82	2,36	12284	114,87	0,88	113,15	116,58	0,76	1,09	25006	114,14	0,83	112,31	115,97	0,82	1,67	37290
Bengkulu	114,37	2,40	109,66	119,08	2,10	0,87	5774	113,15	1,16	110,88	115,42	1,02	0,48	12964	113,53	1,10	111,39	115,68	0,97	0,61	18738
Lampung	109,76	1,48	106,85	112,66	1,35	1,95	9160	110,24	0,80	108,67	111,82	0,73	1,45	24758	110,11	0,71	108,71	111,50	0,65	1,59	33918
Kepulauan Bangka Belitung	110,12	2,22	105,77	114,46	2,01	0,90	6573	112,27	1,64	109,05	115,48	1,46	0,51	6637	111,15	1,40	108,41	113,89	1,26	0,73	13210
Kepulauan Riau	106,89	1,23	104,49	109,29	1,15	1,48	9667	109,71	2,19	105,42	114,00	2,00	0,65	3350	107,30	1,10	105,14	109,45	1,02	1,35	13017
DKI Jakarta	105,27	0,83	103,64	106,90	0,79	3,18	17779	-	-	-	-	-	-	-	105,27	0,83	103,64	106,90	0,79	3,18	17779
Jawa Barat	106,21	0,45	105,33	107,08	0,42	3,40	55433	106,33	0,72	104,93	107,74	0,68	2,37	27638	106,24	0,38	105,50	106,99	0,36	3,08	83071
Jawa Tengah	106,99	0,55	105,92	108,06	0,51	1,76	51628	109,41	0,63	108,18	110,64	0,57	1,84	45078	108,18	0,42	107,36	108,99	0,38	1,81	96706
DI Yogyakarta	105,87	1,07	103,77	107,97	1,01	1,67	8280	105,75	1,57	102,68	108,82	1,48	1,26	3835	105,84	0,89	104,10	107,58	0,84	1,55	12115
Jawa Timur	105,07	0,53	104,03	106,11	0,51	2,40	54913	108,48	0,63	107,24	109,72	0,58	2,06	48463	106,69	0,41	105,89	107,49	0,39	2,22	103376
Banten	108,29	0,95	106,43	110,15	0,88	3,07	17198	112,08	1,73	108,70	115,47	1,54	2,74	8966	109,50	0,85	107,84	111,17	0,77	2,92	26164
Bali	102,85	1,14	100,61	105,08	1,11	1,42	13190	108,34	1,55	100,31	106,38	1,50	1,18	8347	103,02	0,92	101,22	104,82	0,89	1,33	21537
Nusa Tenggara Timur	108,44	1,46	105,57	111,31	1,35	2,18	9728	109,14	2,20	106,79	111,48	1,09	1,51	12555	108,82	0,93	107,00	110,65	0,86	1,78	22283
Nusa Tenggara Barat	112,12	2,15	107,90	116,34	1,92	0,96	8337	117,64	0,79	116,09	119,20	0,67	0,58	39907	116,58	0,77	115,08	118,08	0,66	0,66	48244
Kalimantan Barat	115,27	2,11	111,14	119,40	1,83	1,28	9180	117,75	1,16	115,47	120,02	0,99	0,84	22272	116,97	1,04	114,93	119,00	0,89	0,98	31452
Kalimantan Tengah	108,45	1,31	105,88	111,02	1,21	0,75	8517	111,04	0,97	109,14	112,94	0,87	0,49	16700	110,02	0,78	108,49	111,55	0,71	0,98	25217
Kalimantan Selatan	106,84	1,23	104,42	109,26	1,15	1,21	10963	113,02	1,00	111,07	114,97	0,88	0,65	15701	110,21	0,79	108,67	111,75	0,71	0,87	26064
Kalimantan Timur	108,44	1,17	106,14	110,73	1,08	1,35	12277	107,23	1,72	103,85	110,60	1,61	1,26	7759	108,02	0,97	106,11	109,92	0,90	1,32	20036
Kalimantan Utara	104,41	1,92	100,64	108,18	1,84	0,57	4135	99,64	2,34	95,05	104,22	2,35	0,36	4448	102,31	1,53	99,31	105,30	1,49	0,46	8583
Sulawesi Utara	107,62	2,06	103,58	111,66	1,91	0,88	11227	110,27	1,17	107,96	112,55	1,06	0,41	16366	109,02	1,16	106,76	111,28	1,06	0,67	27593
Sulawesi Tengah	104,58	2,03	100,60	108,56	1,94	0,65	5398	105,51	1,00	103,56	107,47	0,95	0,54	19065	105,28	0,91	103,51	107,06	0,86	0,57	24463
Sulawesi Selatan	108,86	1,18	106,54	111,18	1,09	1,61	19343	111,27	0,78	109,75	112,79	0,70	0,95	36253	110,28	0,67	108,97	111,59	0,61	1,22	55596
Sulawesi Tenggara	110,18	2,15	105,96	114,40	1,95	1,13	6435	111,15	0,99	108,22	113,09	0,89	0,59	18929	110,81	0,93	108,88	112,75	0,89	0,81	25044
Gorontalo	111,20	1,95	107,38	115,01	1,75	0,49	4040	112,39	1,78	108,90	115,88	1,58	0,60	8002	111,95	1,33	109,34	114,56	1,19	0,95	13064
Sulawesi Barat	107,95	3,34	101,41	114,50	3,09	1,04	2461	108,75	1,43	105,95	111,56	1,31	0,60	9779	108,56	1,35	105,91	111,21	1,25	0,70	12240
Maluku	110,12	2,46	105,30	114,94	2,23	0,83	7540	113,53	1,23	111,11	115,94	1,09	0,45	15461	112,26	1,21	109,89	114,62	1,08	0,63	23001
Maluku Utara	110,66	2,87	105,03	116,29	2,60	0,59	4377	114,73	1,29	112,19	117,87	1,13	0,40	13907	113,74	1,20	111,40	116,09	1,05	0,44	18294
Papua Barat	104,41	1,85	100,78	108,03	1,77	0,32	5471	114,54	1,71	111,19	117,89	1,49	0,30	12114	110,72	1,29	108,18	113,25	1,17	0,32	17585
Papua	106,94	1,86	103,29	110,93	1,74	0,63	9248	90,79	1,59	87,67	93,91	1,75	1,00	33526	94,47	1,32	91,88	97,07	1,40	0,96	42774
INDONESIA	107,22	0,21	106,81	107,63	0,19	2,20	480469	110,15	0,20	109,77	110,54	0,18	1,30	651356	108,61	0,14	108,33	108,89	0,13	1,72	1131825

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan							
	Estimasi	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel		
		Standard Error	Batas Bawah	Batas Atas				Relative Standard Error	Standard Error	Batas Bawah				Batas Atas	Relative Standard Error	Standard Error			Batas Bawah	Batas Atas
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	100,48	2,50	95,59	105,37	2,48	1,02	98,82	1,69	95,52	102,12	1,71	0,85	32,94	99,30	1,40	96,56	102,04	1,41	0,89	45833
Sumatera Utara	89,73	1,94	85,92	93,53	2,16	2,41	33379	1,34	87,61	92,85	1,48	1,23	42,411	89,98	1,18	87,66	92,79	1,31	1,85	75990
Sumatera Barat	96,17	2,74	90,80	101,53	2,85	1,17	16035	1,83	83,53	90,68	2,10	0,79	23,744	90,92	1,57	87,84	94,01	1,73	0,98	39779
Riau	95,86	2,96	90,05	101,67	3,09	1,55	11156	2,16	88,89	97,34	2,32	1,48	18,428	94,18	1,75	90,76	97,61	1,86	1,47	29584
Jambi	90,63	3,38	84,01	97,24	3,72	1,01	6451	1,81	82,67	89,77	2,10	0,81	16,646	87,55	1,63	84,36	90,75	1,86	0,88	23097
Sumatera Selatan	91,27	3,79	83,84	98,69	4,15	2,62	12284	1,38	81,13	85,53	1,64	1,13	25,006	86,51	1,62	83,34	89,68	1,87	1,89	37290
Bengkulu	94,09	4,64	85,00	103,18	4,93	1,04	5774	1,08	86,32	93,84	2,66	0,52	12,964	92,08	2,23	87,70	96,45	2,42	0,68	18738
Lampung	93,10	3,03	87,17	99,04	3,25	1,66	9160	1,46	80,28	99,03	2,36	2,00	20,758	94,18	1,81	90,64	97,72	1,92	1,90	33918
Kepulauan Bangka Belitung	86,51	3,47	79,70	93,31	4,01	0,71	6573	3,46	78,46	92,03	4,06	0,52	6,637	85,93	2,46	81,10	90,76	2,87	0,62	13210
Kepulauan Riau	93,27	2,84	87,72	98,83	3,04	1,49	9667	3,28	81,96	94,81	3,71	0,53	33,50	92,44	2,44	87,66	97,23	2,64	1,38	13017
DKI Jakarta	94,91	2,22	90,56	99,25	2,33	2,79	17779	-	-	-	-	-	-	94,91	2,22	90,56	99,25	2,33	2,79	17779
Jawa Barat	91,25	1,09	89,11	93,39	1,20	3,81	55433	1,63	86,95	93,36	1,81	2,49	27,638	90,96	0,91	89,17	92,75	1,00	3,40	83071
Jawa Tengah	91,84	1,17	89,55	94,14	1,27	1,79	51628	1,48	89,18	94,99	1,61	2,25	46,078	91,96	0,94	90,13	93,80	1,02	2,03	96706
DI Yogyakarta	91,75	3,59	84,71	98,79	3,91	2,13	8280	1,12,25	99,97	124,53	5,58	1,95	3,855	96,98	3,20	90,72	103,24	3,29	2,18	12315
Jawa Timur	94,93	1,18	92,61	97,25	1,25	2,25	54913	1,45	92,10	97,77	1,52	2,25	48,463	94,93	0,93	93,12	96,75	0,97	2,25	103376
Banten	93,55	2,27	89,10	97,99	2,42	3,52	17198	2,84	82,24	93,36	3,23	2,35	8,819	89,66	1,79	88,19	95,23	1,96	3,13	26164
Bali	95,94	2,63	90,79	101,10	2,74	1,67	13190	3,07	90,45	102,50	3,19	1,31	8,347	96,14	2,01	92,19	100,08	2,09	1,54	21537
Nusa Tenggara Barat	94,06	2,39	89,39	98,73	2,54	1,56	9728	1,46	88,85	98,42	2,61	1,36	12,555	93,83	1,71	90,47	97,19	1,83	1,43	22283
Nusa Tenggara Timur	95,81	4,63	86,74	104,87	4,83	1,32	8337	1,54	83,58	89,61	1,78	0,68	39,907	88,51	1,55	85,47	91,55	1,75	0,83	48244
Kalimantan Barat	90,71	3,50	83,86	97,56	3,85	0,92	9180	2,18	75,21	83,74	2,74	0,99	22,272	83,04	1,85	79,42	86,66	2,23	0,96	31452
Kalimantan Tengah	90,74	4,02	82,86	98,62	4,43	1,00	8517	3,16	92,65	105,04	3,20	0,92	16,700	95,79	2,48	90,93	100,64	2,59	0,94	23217
Kalimantan Selatan	93,75	3,79	86,32	101,18	4,04	1,60	10963	2,26	76,42	85,26	2,79	0,89	15,701	86,17	2,05	82,15	90,19	2,38	1,19	26064
Kalimantan Timur	90,87	3,19	84,62	97,12	3,51	1,64	12277	3,38	89,00	102,25	3,53	1,03	7,759	92,57	2,39	87,88	97,26	2,58	1,44	20036
Kalimantan Utara	93,63	3,90	85,38	101,28	4,17	0,44	4135	6,35	102,98	127,88	5,50	0,41	4,448	102,96	3,65	95,81	110,10	3,54	0,46	8653
Sulawesi Utara	88,79	3,40	82,13	95,46	3,83	0,86	11227	2,68	82,90	93,42	3,04	0,63	16,366	88,47	2,16	84,23	92,72	2,45	0,75	27593
Sulawesi Tengah	92,89	4,37	84,32	101,46	4,71	0,75	5398	2,01	88,93	96,82	2,17	0,56	19,065	92,88	1,87	89,21	96,54	2,01	0,61	24463
Sulawesi Selatan	91,29	2,66	86,07	96,51	2,92	1,76	19943	1,53	81,13	87,13	1,82	0,99	36,253	86,97	1,40	84,23	89,71	1,61	1,31	55596
Sulawesi Tenggara	87,57	3,17	81,35	93,78	3,62	0,98	6435	2,04	79,77	87,75	2,43	0,70	18,929	85,23	1,75	81,81	88,66	2,05	0,81	25364
Gorontalo	80,51	4,57	71,56	89,47	5,68	0,71	4040	3,34	73,42	86,52	4,18	0,61	8,002	80,17	2,70	74,88	85,47	3,37	0,65	12042
Sulawesi Barat	79,92	7,33	65,54	94,29	9,17	1,05	2461	2,48	78,18	87,91	2,99	0,50	9,779	82,36	2,52	77,42	87,30	3,06	0,64	12240
Meluku	94,52	4,34	86,01	103,03	4,59	0,82	7540	3,09	90,28	102,40	3,21	0,61	15,461	95,58	2,56	90,57	100,60	2,68	0,70	23001
Meluku Utara	93,68	3,99	85,86	101,50	4,26	0,41	4377	2,66	85,02	95,43	2,94	0,52	13,907	91,10	2,23	86,73	95,47	2,45	0,50	18284
Papua Barat	89,22	4,35	80,69	97,75	4,88	0,47	5471	3,47	83,18	96,79	3,86	0,34	12,114	89,68	2,72	84,36	95,00	3,03	0,38	17585
Papua	103,23	5,01	93,40	113,05	4,86	0,92	9248	3,25	76,02	88,74	3,94	0,97	35,256	87,81	2,70	82,52	93,09	3,07	0,92	42774
INDONESIA	92,60	0,47	91,68	93,52	0,51	2,34	480469	0,42	89,48	91,14	0,47	1,49	653356	91,52	0,32	90,89	92,14	0,35	1,91	113825

Tabel 12. Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki + Perempuan								
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error					Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error					Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	100,20	1,84	96,59	103,81	1,84	0,76	22777	98,35	1,98	94,47	102,22	2,01	0,91	23056	99,30	1,40	96,56	102,04	1,41	0,89	4833
Sumatera Utara	91,77	1,53	88,77	94,77	1,67	1,62	37831	88,08	1,73	84,68	91,48	1,97	1,91	37959	89,98	1,18	87,66	92,29	1,31	1,85	7990
Sumatera Barat	90,15	2,40	85,44	94,86	2,67	1,01	19702	91,68	2,07	87,63	95,73	2,25	0,96	20077	90,92	1,57	87,84	94,01	1,73	0,98	3979
Riau	92,55	2,38	87,89	97,21	2,57	1,27	15026	95,76	2,64	90,58	100,93	2,76	1,82	14558	94,18	1,75	90,76	97,61	1,86	1,47	29584
Jambi	89,35	1,94	85,55	93,16	2,17	0,64	11694	85,77	2,46	80,95	90,60	2,87	0,99	11403	87,55	1,63	84,36	90,75	1,86	0,88	2397
Sumatera Selatan	84,30	2,28	79,82	88,77	2,71	2,03	18953	88,92	2,52	83,99	93,85	2,83	2,10	18337	86,51	1,62	83,34	89,68	1,87	1,89	3790
Bengkulu	89,36	3,24	83,01	95,71	3,63	0,73	9472	95,00	2,99	89,15	100,86	3,15	0,60	9266	92,08	2,23	87,70	96,45	2,42	0,68	18738
Lampung	93,49	2,52	88,55	98,44	2,70	1,86	17313	94,93	2,53	89,98	99,88	2,66	1,87	16605	94,18	1,81	90,64	97,72	1,92	1,90	33918
Kepulauan Bangka Belitung	81,00	3,33	74,48	87,52	4,10	0,61	6832	91,46	3,81	83,99	98,93	4,17	0,68	6378	85,93	2,46	81,10	90,76	2,87	0,62	13210
Kepulauan Riau	94,38	3,71	87,12	101,65	3,93	1,59	6569	90,46	2,90	84,77	96,15	3,21	0,98	6448	92,44	2,44	87,66	97,23	2,64	1,38	13017
DKI Jakarta	97,21	3,08	91,18	103,24	3,16	2,87	8850	92,42	3,17	86,21	98,62	3,42	2,66	8929	94,91	2,22	90,56	99,25	2,33	2,79	17779
Jawa Barat	88,32	1,21	85,95	90,69	1,37	3,32	41704	93,86	1,34	91,23	96,49	1,43	3,27	41367	90,96	0,91	89,17	92,75	1,00	3,40	83071
Jawa Tengah	90,72	1,32	88,13	93,32	1,46	2,02	47761	93,28	1,29	90,75	95,80	1,38	1,93	48945	91,96	0,94	90,13	93,80	1,02	2,03	96706
DI Yogyakarta	96,01	3,99	88,19	103,83	4,15	1,77	5942	98,12	4,81	88,69	107,56	4,90	2,38	90,72	96,98	3,20	90,72	103,24	3,29	2,18	12115
Jawa Timur	95,47	1,30	92,92	98,02	1,36	2,29	50747	94,34	1,31	91,77	96,91	1,39	2,26	52629	94,93	0,93	93,12	96,75	0,97	2,25	103376
Banten	88,65	2,60	83,55	93,75	2,93	3,13	13179	94,91	2,70	89,62	100,20	2,84	3,69	12985	91,71	1,79	88,19	95,23	1,96	3,13	26164
Bali	97,00	2,59	91,93	102,07	2,67	1,42	10792	95,18	2,74	89,81	100,54	2,88	1,27	10745	96,14	2,01	92,19	100,08	2,09	1,54	21537
Nusa Tenggara Barat	95,84	2,38	91,18	100,50	2,48	1,31	11050	91,91	2,55	86,91	96,91	2,78	1,67	11233	93,83	1,71	90,47	97,19	1,83	1,43	22283
Nusa Tenggara Timur	87,68	2,03	83,71	91,65	2,31	0,68	23796	89,38	2,23	85,02	93,75	2,49	0,90	24448	88,51	1,55	85,47	91,55	1,75	0,83	48244
Kalimantan Barat	82,29	2,54	77,31	87,28	3,09	0,93	16008	83,80	2,83	78,26	89,34	3,37	1,09	15444	83,04	1,85	79,42	86,66	2,23	0,96	31452
Kalimantan Tengah	94,10	3,37	87,51	100,70	3,58	0,81	12819	97,47	3,39	90,82	104,12	3,48	0,95	12388	95,79	2,48	90,93	100,64	2,59	0,94	23217
Kalimantan Selatan	86,06	2,53	81,09	91,02	2,94	0,95	13027	86,30	2,86	80,69	91,91	3,32	1,11	13037	86,17	2,05	82,15	90,19	2,38	1,19	26064
Kalimantan Timur	95,38	3,36	88,79	101,97	3,53	1,49	10271	89,44	2,98	83,59	95,28	3,34	1,07	9765	92,57	2,39	87,88	97,26	2,58	1,44	20336
Kalimantan Utara	104,86	5,37	94,33	115,38	5,12	0,51	4396	100,95	5,38	90,41	111,49	5,33	0,50	4187	102,96	3,65	95,81	110,10	3,54	0,46	8583
Sulawesi Utara	85,55	2,85	79,97	91,13	3,33	0,66	14058	91,62	3,05	85,65	97,60	3,33	0,75	13535	88,47	2,16	84,23	92,72	2,45	0,75	27593
Sulawesi Tengah	89,33	2,85	83,75	94,91	3,19	0,69	12479	96,44	2,59	91,37	101,51	2,68	0,61	11984	92,88	1,87	89,21	96,54	2,01	0,61	24463
Sulawesi Selatan	85,74	1,82	82,18	89,30	2,12	1,10	27190	88,22	1,96	84,37	92,06	2,22	1,28	28406	86,97	1,40	84,23	89,71	1,61	1,31	55596
Sulawesi Tenggara	86,79	2,53	81,83	91,75	2,92	0,91	12571	83,57	2,51	78,66	88,49	3,00	0,79	12793	85,23	1,75	81,81	88,66	2,05	0,81	25364
Gorontalo	78,85	4,06	70,89	86,81	5,15	0,64	6058	81,52	3,40	74,86	88,18	4,17	0,61	5984	80,17	2,70	74,88	85,47	3,37	0,65	12042
Sulawesi Barat	82,41	3,81	74,94	89,89	4,62	0,68	6135	82,30	3,52	75,41	89,20	4,27	0,67	6105	82,36	2,52	77,42	87,30	3,06	0,64	12240
Maluku	95,56	3,67	88,38	102,75	3,84	0,73	11557	95,60	3,04	88,64	101,57	3,18	0,50	11444	95,58	2,56	90,57	100,60	2,68	0,70	23001
Maluku Utara	89,03	2,70	83,75	94,31	3,03	0,40	9298	93,39	3,46	86,60	100,18	3,71	0,53	8986	91,10	2,23	86,73	95,47	2,45	0,50	18284
Papua Barat	90,35	3,74	83,02	97,68	4,14	0,37	9075	88,97	4,01	81,11	96,84	4,51	0,41	8510	89,68	2,72	84,36	95,00	3,03	0,38	17585
Papua	91,52	3,84	84,00	99,05	4,20	0,93	22352	83,71	3,27	77,30	90,13	3,91	0,68	20422	87,81	2,70	82,52	93,09	3,07	0,92	42774
INDONESIA	90,82	0,44	89,97	91,68	0,48	1,85	567284	92,25	0,45	91,37	93,14	0,49	1,91	564941	91,52	0,32	90,89	92,14	0,35	1,91	113925

Table 23. Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SV (sederajat) Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan + Perdesaan												
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	93.02	4.79	5.15	3.32	13492	81.09	1.93	2.38	84.87	32341	84.80	2.01	80.86	88.74	2.37	1.34	4.6333				
Sumatera Utara	94.68	2.99	3.16	3.01	33379	88.05	1.96	2.22	91.89	42411	91.57	1.82	88.00	95.14	1.99	2.29	75790				
Sumatera Barat	88.83	3.41	3.84	1.51	16035	80.12	2.16	2.69	84.35	23744	83.97	1.91	80.22	87.71	2.28	1.11	39799				
Riau	94.22	4.46	4.73	2.35	11156	76.68	2.44	3.18	81.46	18428	83.87	2.33	79.30	88.44	2.78	1.74	29584				
Jambi	96.83	5.99	6.19	1.80	6451	69.59	2.38	3.42	74.25	16646	78.93	2.54	73.96	83.90	3.21	1.15	23097				
Sumatera Selatan	87.52	3.78	4.32	1.98	12284	71.06	2.14	3.00	75.24	25006	77.40	2.01	73.45	81.35	2.60	1.68	37290				
Bengkulu	95.10	5.92	6.22	1.01	5774	80.33	3.10	3.86	86.42	12964	85.57	2.92	79.85	91.29	3.41	0.76	18738				
Lampung	98.10	7.66	7.81	4.95	9160	74.09	2.45	3.31	78.90	24758	81.56	3.00	75.69	87.43	3.67	3.23	33918				
Kepulauan Bangka Belitung	94.22	5.79	6.14	0.90	6573	69.78	5.76	8.26	81.08	6637	82.21	4.06	74.26	90.17	4.94	0.95	13210				
Kepulauan Riau	90.38	3.86	4.27	1.26	9667	94.39	7.98	8.45	110.02	3350	90.99	3.51	84.12	97.86	3.85	1.20	13017				
DKI Jakarta	73.98	2.51	3.39	2.95	17779	-	-	-	-	-	73.98	2.51	69.06	78.90	3.39	2.95	17779				
Jawa Barat	80.45	1.72	2.13	4.87	55433	60.80	1.94	3.19	64.60	27638	75.31	1.36	72.65	77.97	1.80	4.37	83071				
Jawa Tengah	90.25	2.04	2.26	2.90	51628	77.66	2.07	2.66	81.72	45078	84.15	1.46	81.30	87.00	1.73	2.91	96706				
DI Yogyakarta	89.90	4.98	5.54	3.16	8280	80.45	9.08	11.28	98.24	3835	87.43	4.38	78.84	96.02	5.01	3.37	12215				
Jawa Timur	88.98	1.91	2.15	3.35	54913	68.56	2.19	3.19	72.85	48463	79.11	1.43	76.30	81.91	1.81	3.76	103376				
Banten	76.53	3.22	4.21	4.80	17198	60.38	3.44	5.69	67.12	8966	71.70	2.47	66.87	76.53	3.44	4.24	26164				
Bali	86.21	2.96	3.43	1.42	13190	90.75	3.89	4.29	98.37	8347	87.74	2.37	83.09	93.38	2.70	1.34	21537				
Nusa Tenggara Barat	97.23	3.90	4.01	1.77	9728	82.87	4.17	5.03	91.04	12555	89.64	2.90	83.96	95.32	3.23	1.98	22283				
Nusa Tenggara Timur	98.97	4.70	4.75	1.25	8337	69.80	2.06	2.96	73.84	39907	77.81	1.99	73.91	81.71	2.55	0.97	48244				
Kalimantan Barat	87.55	4.71	5.38	1.57	9180	74.49	3.05	4.10	80.48	22272	79.25	2.60	74.16	84.34	3.27	1.28	31452				
Kalimantan Tengah	87.61	4.92	5.62	0.86	8517	67.18	2.89	4.31	72.85	16700	74.83	2.58	69.78	79.88	3.44	0.77	25217				
Kalimantan Selatan	78.80	3.34	4.24	1.33	10363	72.44	2.94	4.06	80.80	15701	75.68	2.23	71.30	80.06	2.95	1.04	26064				
Kalimantan Timur	98.13	4.12	4.20	1.50	12277	92.00	5.18	5.63	102.14	7759	96.09	3.24	89.73	102.44	3.37	1.47	20036				
Kalimantan Utara	100.85	7.47	7.41	0.84	4135	73.62	8.11	11.02	89.52	4448	89.23	5.61	78.24	100.22	6.28	0.99	8583				
Sulawesi Utara	87.72	3.95	4.50	0.84	5398	74.17	2.46	3.32	82.54	16386	82.25	2.57	77.21	87.29	3.13	0.74	27593				
Sulawesi Tengah	102.15	6.01	6.92	1.51	5398	74.17	2.46	3.32	82.54	16386	82.25	2.57	77.21	87.29	3.13	0.74	27593				
Sulawesi Selatan	85.18	3.35	3.94	1.87	19343	79.19	2.11	2.67	83.33	36253	81.74	1.87	78.08	85.39	2.28	1.43	55596				
Sulawesi Tenggara	96.55	5.32	5.51	1.33	6435	76.81	2.60	3.38	81.90	18929	84.83	2.74	79.46	90.21	3.23	0.98	25364				
Gorontalo	86.70	6.52	7.52	0.62	4040	82.82	4.91	5.92	92.44	8002	84.25	3.91	76.59	91.91	4.64	0.65	12042				
Sulawesi Barat	97.74	9.08	9.29	0.90	2461	80.30	4.33	5.39	88.78	9779	84.48	3.98	76.68	92.28	4.71	0.88	12240				
Maluku	97.18	3.98	4.10	0.59	7540	79.45	3.41	4.30	86.15	15461	87.15	2.64	81.99	92.32	3.08	0.61	23001				
Maluku Utara	89.75	5.12	5.70	0.48	4377	87.28	3.23	3.70	93.60	13907	88.05	2.73	82.69	93.40	3.10	0.44	18284				
Papua Barat	107.09	6.05	6.65	0.50	5471	78.63	4.11	5.23	86.69	12114	90.74	3.54	83.81	97.67	3.90	0.45	17585				
Papua	110.32	5.98	5.42	0.86	9248	49.34	2.49	5.05	54.23	33526	65.07	2.45	60.26	69.87	3.77	0.89	42774				
INDONESIA	86.64	0.72	88.05	0.83	480469	73.57	0.59	0.81	74.74	651356	80.68	0.47	79.76	81.61	0.59	2.72	1131825				

Tabel 24. Sampling Error Angkle Partisipasi Kasar (APK) SMJ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki + Perempuan								
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan			Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error					Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error					Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	82,60	3,06	76,61	88,60	3,70	1,53	2277	87,10	2,35	82,50	91,70	2,70	0,92	23056	84,80	2,01	80,86	88,74	2,37	1,34	45833
Sumatera Utara	87,47	2,27	83,03	91,91	2,59	1,78	3781	95,65	2,80	90,16	101,14	2,93	2,70	37959	91,57	1,92	88,00	95,14	1,99	2,29	75790
Sumatera Barat	77,10	2,52	72,17	82,04	3,27	0,95	19702	91,11	2,65	85,92	96,31	2,91	1,10	20077	83,97	1,81	80,22	87,71	2,28	1,11	39779
Riau	79,51	2,78	74,07	84,95	3,49	1,30	15026	88,65	3,59	81,62	95,68	4,05	1,95	14558	83,87	2,33	79,30	88,44	2,78	1,74	29584
Jambi	73,41	2,93	67,67	79,16	4,00	0,87	11694	84,83	4,09	76,81	92,85	4,82	1,31	11403	78,93	2,54	73,96	83,90	3,21	1,15	23097
Sumatera Selatan	75,52	2,79	70,05	80,98	3,69	1,58	18953	79,38	2,92	73,67	85,10	3,67	1,81	18337	77,40	2,01	73,45	81,35	2,60	1,68	37290
Bengkulu	85,31	4,19	77,10	93,51	4,91	0,74	9472	85,85	4,09	77,84	93,86	4,76	0,81	9266	85,57	2,92	79,85	91,29	3,41	0,76	18728
Lampung	79,08	3,63	71,97	86,19	4,59	2,39	17313	84,13	4,13	76,03	92,23	4,91	3,06	16605	81,56	3,00	75,69	87,43	3,67	3,23	33918
Kepulauan Bangka Belitung	81,04	5,61	70,05	92,03	6,92	0,85	6832	83,41	5,12	73,38	93,44	6,14	0,82	6378	82,21	4,06	74,26	90,17	4,94	0,95	13210
Kepulauan Riau	87,11	4,75	77,81	96,41	5,45	1,31	6569	95,67	5,45	84,99	106,36	5,70	1,18	6448	90,99	3,51	84,12	97,86	3,85	1,20	13017
DKI Jakarta	71,49	3,36	64,91	78,07	4,69	2,78	8850	76,52	3,69	69,29	83,75	4,82	3,01	8929	73,98	2,51	69,06	78,90	3,39	2,95	17779
Jawa Barat	77,21	1,93	73,42	80,99	2,50	4,32	41704	73,40	1,79	69,89	76,91	2,44	3,92	41367	75,31	1,36	72,65	77,97	1,80	4,37	83071
Jawa Tengah	86,06	2,03	82,08	90,04	2,36	2,78	47761	82,15	2,00	78,23	86,06	2,43	2,79	48945	84,15	1,46	81,30	87,00	1,73	2,91	96706
DI Yogyakarta	86,26	6,29	73,93	98,58	7,29	3,37	5942	88,72	5,67	77,61	99,83	6,39	2,95	6173	87,43	4,38	78,84	96,02	5,01	3,37	12115
Jawa Timur	80,06	2,09	75,96	84,15	2,61	3,91	50747	78,13	1,81	74,59	81,67	2,31	3,07	52629	79,11	1,43	76,30	81,91	1,81	3,76	103376
Banten	74,18	3,88	66,56	81,79	5,23	5,13	13179	69,08	2,99	63,23	74,94	4,32	3,20	12985	71,70	2,47	66,87	76,53	3,44	4,24	26164
Bali	87,59	3,38	80,97	94,21	3,86	1,32	10792	87,89	3,29	81,43	94,34	3,75	1,33	10745	87,74	2,37	83,09	92,38	2,70	1,34	21537
Nusa Tenggara Barat	93,39	3,78	85,98	100,79	4,04	1,75	11050	85,64	3,93	77,93	93,35	4,59	1,76	11233	89,64	2,90	83,96	95,32	3,23	1,98	22283
Nusa Tenggara Timur	74,24	2,60	69,14	79,33	3,50	0,84	23796	81,52	2,76	76,11	86,93	3,39	0,94	24448	77,81	1,99	73,91	81,71	2,55	0,97	48244
Kalimantan Barat	78,59	3,60	71,54	85,64	4,58	1,18	16008	79,91	3,41	73,24	86,59	4,26	1,15	15444	79,25	2,60	74,16	84,34	3,27	1,28	31452
Kalimantan Tengah	71,75	3,45	64,99	78,51	4,81	0,71	12819	78,03	3,51	71,16	84,90	4,49	0,69	12398	74,83	2,58	69,78	79,88	3,44	0,77	25217
Kalimantan Selatan	75,31	3,22	69,00	81,61	4,27	1,11	13027	76,08	3,25	69,71	82,45	4,27	1,06	13037	75,68	2,23	71,30	80,06	2,95	1,04	26064
Kalimantan Timur	95,99	4,61	86,94	105,03	4,81	1,45	10271	96,19	4,40	87,58	104,81	4,57	1,40	9765	96,09	3,74	89,73	102,44	3,37	1,47	20036
Kalimantan Utara	89,80	7,06	75,97	103,63	7,86	0,76	4396	88,62	7,57	73,78	103,45	8,54	0,93	4187	89,23	5,61	78,24	100,22	6,28	0,99	9583
Sulawesi Utara	78,86	3,31	72,37	85,34	4,20	0,63	14058	85,86	3,64	78,73	92,99	4,24	0,71	13535	82,25	2,57	77,21	87,29	3,13	0,74	27593
Sulawesi Tengah	79,36	3,48	72,54	86,17	4,38	0,88	12479	88,00	3,38	81,38	94,62	3,84	0,81	11984	83,53	2,70	78,24	88,82	3,23	1,04	24463
Sulawesi Selatan	77,20	2,31	72,68	81,72	2,99	1,17	27190	86,46	2,67	81,23	91,69	3,09	1,36	28406	81,74	1,87	78,08	85,39	2,28	1,43	55596
Sulawesi Tenggara	86,60	4,27	73,54	94,96	4,93	1,11	12571	83,11	3,27	76,71	89,51	3,93	0,74	12793	84,83	2,74	79,46	90,21	3,23	0,98	25364
Gorontalo	84,20	5,44	73,24	94,86	6,46	0,61	6058	84,30	5,13	74,25	94,36	6,09	0,59	5984	84,25	3,91	76,59	91,91	4,64	0,65	12042
Sulawesi Barat	78,07	4,98	68,32	87,82	6,37	0,72	6135	91,31	5,69	80,17	102,46	6,23	0,87	6105	84,48	3,98	76,68	92,28	4,71	0,88	12440
Maluku	83,26	3,71	75,99	90,53	4,45	0,67	11557	91,58	3,73	84,28	98,89	4,07	0,54	11444	87,15	2,64	81,99	92,32	3,03	0,61	23001
Maluku Utara	91,60	4,04	83,68	99,52	4,41	0,42	9298	84,80	3,71	77,53	92,07	4,37	0,45	8896	88,05	2,73	82,69	93,40	3,10	0,44	18284
Papua Barat	92,29	4,87	82,75	101,83	5,27	0,49	9075	88,90	5,56	78,00	99,79	6,25	0,49	8510	90,74	3,54	83,81	97,67	3,90	0,45	17585
Papua	67,10	3,21	60,81	73,38	4,78	0,80	22352	62,64	3,08	56,60	68,68	4,92	0,67	20422	65,07	2,45	60,26	69,87	3,77	0,89	41774
INDONESIA	80,33	0,66	79,04	81,62	0,82	2,63	56784	81,04	0,64	79,79	82,30	0,79	2,50	564541	80,68	0,47	79,76	81,61	0,59	2,72	1131825

Tabel 26. Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) PT Menurut Provinsi dan jenis kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan										
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas					Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Aceh	33,47	1,84	29,87	37,07	5,49	1,39	2777	39,87	1,87	36,22	43,53	4,68	1,25	23056	36,61	1,43	33,82	39,41	3,90	48833	
Sumatera Utara	23,31	1,48	20,42	26,20	6,33	3,29	37831	28,12	2,52	23,19	33,05	8,95	7,64	37959	25,64	1,59	22,53	28,75	6,19	75790	
Sumatera Barat	34,19	2,60	29,09	39,28	7,61	2,52	19702	39,45	2,80	33,97	44,93	7,08	2,62	20077	36,81	2,34	32,22	41,39	6,36	39779	
Riau	29,03	2,06	25,00	33,06	7,09	2,61	15026	27,81	1,98	23,93	31,68	7,11	2,17	14558	28,45	1,60	25,30	31,59	5,64	29584	
Jambi	25,28	2,21	20,95	29,62	8,75	1,50	11694	29,98	2,40	25,28	34,69	8,01	1,49	11403	27,60	1,83	24,02	31,18	6,62	23097	
Sumatera Selatan	19,08	1,86	15,44	22,73	9,73	3,32	18953	24,30	2,09	20,20	28,40	8,60	3,24	18337	21,65	1,64	18,44	24,87	7,56	37290	
Bengkulu	26,97	2,35	22,37	31,57	8,70	3,94	9472	38,22	2,89	32,56	43,88	7,56	0,92	9266	32,31	2,10	28,19	36,42	6,50	18738	
Lampung	15,52	1,94	11,73	19,31	12,47	4,42	17313	20,03	2,00	16,11	23,94	9,97	3,37	16605	17,68	1,48	14,78	20,57	8,36	33918	
Kepulauan Bangka Belitung	8,97	1,24	6,54	11,39	13,78	0,55	6832	13,05	1,72	9,67	16,42	13,19	0,70	6378	10,90	1,04	8,85	12,94	9,56	13210	
Kepulauan Riau	23,28	3,69	16,05	30,51	15,84	2,64	6569	21,08	3,88	13,49	28,68	18,38	3,02	6448	22,23	2,90	16,55	27,91	13,03	13017	
DKI Jakarta	31,72	2,42	26,97	36,47	7,64	3,94	8850	29,64	2,20	25,32	33,96	7,44	4,00	8929	30,63	1,79	27,12	34,13	5,84	17779	
Jawa Barat	20,02	0,94	18,19	21,85	4,67	5,27	41704	21,88	1,02	19,87	23,88	4,67	5,60	41367	20,93	0,77	19,43	22,44	3,66	88071	
Jawa Tengah	17,29	0,94	15,45	19,14	5,43	3,79	47761	19,16	0,96	17,29	21,03	4,98	3,59	48945	18,22	0,77	16,72	19,72	4,21	96706	
DI Yogyakarta	59,06	4,06	51,11	67,02	6,87	3,06	5942	62,98	5,13	52,92	73,03	8,15	5,19	6173	61,04	3,90	53,39	68,68	6,39	5,81	12115
Jawa Timur	22,92	1,13	20,71	25,12	4,91	4,68	50747	27,51	1,23	25,09	29,92	4,48	4,63	52629	25,19	0,99	23,25	27,13	3,93	103376	
Banten	25,93	2,06	21,91	29,96	7,92	4,85	13179	29,02	1,96	25,18	32,86	6,76	4,00	12985	27,45	1,60	24,32	30,59	5,83	5,60	26164
Bali	29,26	2,37	24,63	33,90	8,08	1,91	10792	31,81	2,12	27,66	36,96	6,65	1,41	10745	30,51	1,64	27,29	33,72	5,38	1,77	21537
Nusa Tenggara Barat	23,82	2,11	19,68	27,96	8,86	2,18	10500	25,07	2,30	20,56	29,58	9,18	2,49	11233	24,44	1,71	21,09	27,80	7,00	2,81	22283
Nusa Tenggara Timur	22,95	1,67	19,67	26,23	7,29	1,46	23796	27,26	1,87	23,60	30,91	6,85	1,53	24448	25,07	1,40	22,33	27,82	5,59	1,87	48244
Kalimantan Barat	19,76	2,21	15,42	24,10	11,21	2,90	16008	17,85	1,76	14,41	21,30	9,85	1,93	15444	18,82	1,69	15,52	22,13	8,96	3,45	31452
Kalimantan Tengah	19,42	1,89	15,72	23,11	9,71	1,13	12819	22,17	2,09	18,07	26,26	9,43	1,16	12398	20,73	1,53	17,74	23,73	7,37	1,36	25217
Kalimantan Selatan	22,98	1,87	19,31	26,64	8,14	1,50	13037	20,79	1,77	17,33	24,26	8,50	1,44	13037	21,90	1,42	19,11	24,69	6,50	1,80	26064
Kalimantan Timur	29,54	2,65	24,34	34,74	8,98	2,24	10271	29,47	2,45	24,66	34,27	8,33	1,71	9765	29,51	2,15	25,29	33,73	7,29	2,79	20336
Kalimantan Utara	12,46	1,91	8,73	16,20	15,28	0,48	4396	24,56	3,39	19,92	31,19	13,79	0,67	4187	17,90	1,91	14,16	21,64	10,67	0,63	8583
Sulawesi Utara	25,71	2,13	21,53	29,89	8,30	1,03	14058	33,34	2,69	28,08	38,61	8,06	1,17	13535	29,31	2,01	25,38	33,25	6,85	1,54	27993
Sulawesi Tengah	29,81	2,25	25,41	34,21	7,53	1,17	12479	38,42	3,10	32,35	44,50	8,07	1,57	11984	33,96	2,07	29,91	38,01	6,08	1,66	24463
Sulawesi Selatan	30,67	2,03	26,69	34,64	6,61	3,04	27190	38,31	1,93	34,53	42,08	5,03	2,36	28406	34,47	1,69	31,16	37,78	4,90	3,89	55596
Sulawesi Tenggara	38,46	3,00	33,58	44,35	7,80	1,49	12571	39,90	3,64	32,77	47,03	9,12	2,07	17793	39,18	2,80	33,69	44,66	7,14	2,52	25364
Gorontalo	25,95	2,75	20,56	31,34	10,59	0,95	6058	33,99	2,96	28,19	39,80	8,72	0,87	5984	29,94	2,30	25,43	34,46	7,69	1,17	12042
Sulawesi Barat	22,00	2,66	16,78	27,22	12,11	1,00	6135	26,61	2,76	21,20	32,03	10,38	0,94	6105	24,26	2,05	20,23	28,28	8,46	1,10	12240
Maluku	36,61	3,14	30,46	42,76	8,57	1,35	11557	43,92	3,42	37,21	50,62	7,79	1,38	11444	40,25	2,77	34,82	45,68	6,88	1,94	23001
Maluku Utara	35,13	3,37	28,52	41,74	9,60	0,92	9298	36,34	3,10	30,26	42,41	8,53	0,79	8986	35,72	2,67	30,49	40,94	7,47	1,15	18284
Papua Barat	26,71	2,51	21,79	31,62	9,39	0,55	9075	33,69	3,20	27,41	39,97	9,51	0,70	8510	29,99	2,32	25,45	34,53	7,72	0,83	17585
Papua	15,79	1,51	12,83	18,75	9,56	1,12	22352	15,74	1,49	12,83	18,65	9,44	0,97	20422	15,77	1,17	13,47	18,06	7,42	1,27	42774
INDONESIA	23,59	0,37	22,87	24,30	1,55	3,50	56784	26,70	0,41	25,90	27,50	1,52	3,77	56454	25,12	0,31	24,51	25,73	1,24	4,73	113825

Tabel 27. Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sejarah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan + Perdesaan										
	Estimasi	Standara Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standara Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standara Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Bawah	Atas						Bawah	Atas						Bawah	Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	98,26	0,55	97,20	99,33	0,55	1,77	1678	99,46	0,18	99,11	99,81	0,18	0,93	4081	99,10	0,21	98,69	99,51	0,21	1,49	5759
Sumatera Utara	96,33	0,55	95,26	97,40	0,57	3,91	4204	98,87	0,25	98,37	99,37	0,26	1,93	6534	97,63	0,30	97,04	98,22	0,31	3,46	10738
Sumatera Barat	97,74	0,55	96,66	98,83	0,56	1,93	1967	99,32	0,22	98,88	99,75	0,22	0,95	3067	98,66	0,27	98,13	99,18	0,27	1,67	5034
Riau	95,98	0,74	94,52	97,43	0,77	2,37	1402	98,06	0,37	97,33	98,78	0,38	1,30	2469	97,26	0,37	96,54	97,98	0,38	2,01	3871
Jambi	97,61	0,82	96,00	99,21	0,84	1,77	715	99,66	0,13	99,42	99,91	0,13	0,46	1957	99,04	0,27	98,51	99,58	0,27	1,46	2672
Sumatera Selatan	94,88	0,94	93,04	96,72	0,99	3,23	1370	99,54	0,14	99,26	99,81	0,14	0,92	3034	97,85	0,37	97,12	98,59	0,38	3,01	4404
Bengkulu	98,62	0,63	97,39	99,86	0,64	1,05	655	98,63	0,39	97,86	99,40	0,40	0,62	1529	98,63	0,34	97,97	99,29	0,34	0,88	2184
Lampung	99,07	0,45	98,18	99,96	0,46	3,06	1013	99,26	0,23	98,81	99,71	0,23	1,74	2878	99,21	0,21	98,80	99,62	0,21	2,51	3891
Kepulauan Bangka Belitung	96,68	1,08	94,56	98,81	1,12	1,51	729	98,82	0,53	97,78	99,85	0,53	0,62	794	97,71	0,62	96,49	98,93	0,64	1,26	1523
Kepulauan Riau	99,04	0,43	98,21	99,87	0,43	2,16	1179	99,59	0,18	99,23	99,94	0,18	0,10	431	99,12	0,37	98,40	99,83	0,37	1,86	1610
DKI Jakarta	98,03	0,29	97,46	98,60	0,30	2,38	1755	-	-	-	-	-	-	-	98,03	0,29	97,46	98,60	0,30	2,19	1755
Jawa Barat	98,60	0,13	98,34	98,86	0,13	2,57	6175	97,28	0,28	96,74	97,82	0,28	1,36	3056	98,25	0,12	98,01	98,49	0,12	2,16	9231
Jawa Tengah	97,72	0,19	97,34	98,10	0,20	1,51	5253	97,79	0,20	97,40	98,18	0,20	1,08	4556	97,75	0,14	97,48	98,03	0,14	1,42	9809
DI Yogyakarta	99,60	0,15	99,30	99,89	0,15	0,70	759	99,24	0,33	98,60	99,89	0,33	0,48	334	99,50	0,14	99,22	99,78	0,14	0,64	1093
Jawa Timur	98,03	0,19	97,67	98,39	0,19	1,75	5295	97,72	0,22	97,30	98,14	0,22	1,27	4511	97,88	0,14	97,61	98,16	0,14	1,66	9806
Banten	98,60	0,24	98,13	99,07	0,24	2,07	1901	96,64	0,64	95,38	97,90	0,67	2,05	1087	97,97	0,27	97,45	98,49	0,27	2,40	2988
Bali	96,39	0,81	94,81	97,97	0,84	2,60	1265	95,81	0,96	93,93	97,70	1,01	1,15	882	96,19	0,62	94,97	97,41	0,65	2,07	2157
Nusa Tenggara Barat	99,13	0,36	98,43	99,84	0,36	2,05	1124	98,64	0,45	97,75	99,52	0,46	1,72	1561	98,86	0,30	98,28	99,44	0,30	2,18	2685
Nusa Tenggara Timur	92,77	1,17	90,47	95,07	1,27	1,55	993	96,92	0,30	96,34	97,50	0,31	0,63	6290	96,12	0,33	95,48	96,77	0,34	1,05	7283
Kalimantan Barat	96,19	0,91	94,41	97,97	0,94	2,10	1013	97,51	0,36	96,80	98,22	0,37	0,75	2796	97,10	0,38	96,35	97,84	0,39	1,40	3809
Kalimantan Tengah	99,08	0,46	98,19	99,98	0,46	1,36	1054	99,08	0,35	98,40	99,76	0,35	0,83	2017	99,08	0,28	98,54	99,63	0,28	1,17	3071
Kalimantan Selatan	98,18	0,63	96,96	99,41	0,64	2,38	1120	99,31	0,22	98,88	99,74	0,22	0,61	1775	98,80	0,31	98,19	99,40	0,31	1,78	2895
Kalimantan Timur	99,06	0,52	98,03	100,08	0,53	3,95	1495	97,18	0,95	95,31	99,04	0,98	1,62	1022	98,40	0,48	97,46	99,35	0,49	2,79	2517
Kalimantan Utara	96,25	0,99	94,31	98,19	1,03	0,64	486	88,25	1,77	84,79	91,71	2,00	0,38	608	92,72	0,83	90,70	94,74	1,11	0,61	1094
Sulawesi Utara	92,77	1,08	90,66	94,89	1,16	1,05	1122	96,86	0,56	95,76	97,97	0,58	0,48	1807	94,93	0,60	93,77	96,10	0,63	0,87	2929
Sulawesi Tengah	91,40	1,53	88,41	94,39	1,67	1,29	609	93,28	0,59	92,12	94,45	0,64	0,51	2462	92,82	0,59	91,67	93,97	0,63	0,83	3071
Sulawesi Selatan	97,43	0,59	96,27	98,60	0,61	3,02	2211	98,45	0,30	97,87	99,04	0,30	1,22	4548	98,03	0,30	97,44	98,62	0,31	2,27	6759
Sulawesi Tenggara	95,69	0,99	93,93	97,45	0,94	1,20	749	98,47	0,33	97,83	99,11	0,33	0,56	2711	97,51	0,39	96,75	98,27	0,40	1,00	3460
Gorontalo	98,76	0,53	97,71	99,81	0,54	0,56	437	98,17	0,59	97,00	99,33	0,61	0,56	943	98,39	0,42	97,55	99,22	0,43	0,68	1380
Sulawesi Barat	95,48	1,41	92,73	98,24	1,47	0,96	334	95,95	0,67	94,64	97,26	0,70	0,51	1381	95,84	0,61	94,64	97,03	0,64	0,74	1715
Maluku	92,84	1,37	90,16	95,52	1,47	1,28	941	97,57	0,53	96,52	98,61	0,55	0,62	2416	95,80	0,63	94,57	97,04	0,66	1,11	3357
Maluku Utara	94,90	1,39	92,19	97,62	1,46	0,80	500	97,78	0,48	96,84	98,72	0,49	0,46	2019	97,09	0,49	96,12	98,06	0,51	0,58	2519
Papua Barat	92,60	1,28	90,09	95,12	1,39	0,55	747	94,29	0,99	92,36	96,23	1,05	0,46	1885	93,66	0,79	92,12	95,20	0,84	0,66	2632
Papua	92,47	0,89	90,73	94,22	0,96	0,59	1213	75,21	1,25	72,76	77,65	1,66	1,00	5553	79,14	1,01	77,16	81,13	1,28	1,31	6866
INDONESIA	97,74	0,08	97,58	97,90	0,08	2,11	53463	97,40	0,08	97,25	97,55	0,08	1,48	83104	97,58	0,06	97,47	97,69	0,06	1,80	136567

Tabel 28. Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan												
	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan Bawah	Selang Kepercayaan Atas	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan Bawah	Selang Kepercayaan Atas	Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel							
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	99,27	0,25	98,78	99,77	0,25	1,24	2995	98,91	0,34	98,25	99,58	0,34	1,45	2764	99,10	0,21	98,69	99,51	0,21	1,49	5759
Sumatera Utara	97,98	0,33	97,34	98,63	0,34	2,22	5570	97,26	0,46	96,36	98,16	0,47	3,05	5168	97,63	0,30	97,03	98,22	0,31	3,46	10738
Sumatera Barat	98,82	0,37	98,10	99,55	0,38	1,69	2606	98,48	0,40	97,69	99,27	0,41	1,45	2428	98,66	0,27	98,13	99,18	0,27	1,67	5034
Riau	97,28	0,51	96,29	98,27	0,52	1,79	2023	97,24	0,57	96,13	98,35	0,58	2,07	1848	97,26	0,37	96,54	97,98	0,38	2,01	3871
Jambi	99,19	0,34	98,54	99,85	0,34	1,22	1399	98,89	0,45	98,01	99,76	0,45	1,50	1273	99,04	0,27	98,51	99,58	0,27	1,46	2672
Sumatera Selatan	98,27	0,45	97,40	99,15	0,45	2,46	2313	97,42	0,60	96,24	98,59	0,62	2,84	2091	97,85	0,37	97,12	98,59	0,38	3,01	4404
Bengkulu	98,51	0,43	97,66	99,35	0,44	0,63	1126	98,76	0,48	97,83	99,70	0,48	0,84	1058	98,63	0,34	97,97	99,29	0,34	0,88	2184
Lampung	99,59	0,20	99,20	99,98	0,20	2,04	2023	98,81	0,38	98,07	99,54	0,38	2,38	1868	99,21	0,21	98,80	99,62	0,21	2,51	3891
Kepulauan Bangka Belitung	98,31	0,64	97,06	99,56	0,65	0,81	794	97,10	1,01	95,11	99,09	1,04	1,19	729	97,71	0,62	96,49	98,93	0,64	1,26	1523
Kepulauan Riau	99,58	0,18	99,23	99,92	0,18	0,39	809	98,70	0,69	97,34	100,05	0,70	2,11	801	99,12	0,37	98,40	99,83	0,37	1,86	1610
DKI Jakarta	98,47	0,36	97,77	99,16	0,36	1,95	933	97,57	0,44	96,70	98,44	0,46	1,81	822	98,03	0,29	97,46	98,60	0,30	2,19	1755
Jawa Barat	98,60	0,15	98,31	98,88	0,15	1,76	4770	97,90	0,19	97,52	98,28	0,20	1,97	4461	98,25	0,12	98,01	98,49	0,12	2,16	9231
Jawa Tengah	97,77	0,19	97,40	98,14	0,19	1,22	5106	97,74	0,20	97,34	98,13	0,21	1,29	4703	97,75	0,14	97,48	98,03	0,14	1,42	9809
DI Yogyakarta	99,55	0,19	99,19	99,92	0,19	0,59	559	99,44	0,21	99,03	99,86	0,21	0,55	534	99,50	0,14	99,22	99,78	0,14	0,64	1093
Jawa Timur	97,99	0,18	97,63	98,35	0,19	1,36	5095	97,77	0,20	97,38	98,17	0,21	1,43	4711	97,88	0,14	97,61	98,16	0,14	1,66	9806
Banten	98,31	0,30	97,72	98,91	0,31	1,76	1557	97,61	0,40	96,83	98,40	0,41	2,04	1431	97,97	0,27	97,45	98,49	0,27	2,40	2988
Ball	96,60	0,78	95,06	98,13	0,81	1,72	1151	95,75	0,82	94,13	97,36	0,86	1,39	1006	96,19	0,62	94,97	97,41	0,65	2,07	2157
Nusa Tenggara Barat	98,72	0,42	97,89	99,55	0,43	1,90	1471	99,02	0,42	98,20	99,84	0,42	2,14	1214	98,86	0,30	98,28	99,44	0,30	2,18	2885
Nusa Tenggara Timur	96,37	0,42	95,54	97,20	0,44	0,84	3741	95,87	0,48	94,93	96,81	0,50	0,93	3542	96,12	0,33	95,48	96,77	0,34	1,05	7283
Kalimantan Barat	97,26	0,46	96,36	98,16	0,47	1,01	1991	96,92	0,58	95,78	98,05	0,60	1,32	1818	97,10	0,38	96,35	97,84	0,39	1,40	3809
Kalimantan Tengah	99,13	0,39	98,36	99,89	0,39	1,14	1569	99,03	0,39	98,26	99,80	0,40	0,96	1502	99,08	0,28	98,54	99,63	0,28	1,17	3071
Kalimantan Selatan	99,39	0,28	98,84	99,94	0,28	1,30	1499	98,18	0,52	97,15	99,21	0,53	1,49	1396	98,80	0,31	98,19	99,40	0,31	1,78	2895
Kalimantan Timur	98,34	0,59	97,19	99,49	0,60	1,82	1287	98,47	0,67	97,15	99,79	0,68	2,56	1230	98,40	0,48	97,46	99,35	0,49	2,79	2517
Kalimantan Utara	93,11	1,32	90,53	95,69	1,41	0,50	563	92,29	1,49	89,36	95,21	1,62	0,51	531	92,72	1,03	90,70	94,74	1,11	0,61	1094
Sulawesi Utara	94,91	0,88	93,18	96,64	0,93	0,88	1496	94,95	0,74	93,50	96,41	0,78	0,60	1433	94,93	0,60	93,77	96,10	0,63	0,87	2929
Sulawesi Tengah	93,70	0,78	92,18	95,22	0,83	0,77	1596	91,88	0,84	90,23	93,53	0,92	0,67	1475	92,82	0,59	91,67	93,97	0,63	0,83	3071
Sulawesi Selatan	97,91	0,40	97,13	98,70	0,41	1,77	3512	98,16	0,39	97,40	98,92	0,39	1,71	3247	98,03	0,30	97,44	98,62	0,31	2,27	6759
Sulawesi Tenggara	97,33	0,54	96,28	98,38	0,55	0,85	1773	97,71	0,59	96,56	98,86	0,60	1,08	1687	97,51	0,39	96,75	98,27	0,40	1,00	3460
Gorontalo	97,96	0,69	96,62	99,31	0,70	0,67	715	98,84	0,51	97,85	99,83	0,51	0,58	665	98,39	0,42	97,55	99,22	0,43	0,68	1380
Sulawesi Barat	95,57	0,82	93,97	97,17	0,85	0,58	887	96,12	0,83	94,49	97,74	0,86	0,63	828	95,84	0,61	94,64	97,03	0,64	0,74	1715
Maluku	95,93	0,84	94,28	97,58	0,88	0,93	1696	95,68	0,90	93,91	97,45	0,94	0,98	1661	95,80	0,63	94,57	97,04	0,66	1,11	3357
Maluku Utara	97,19	0,61	96,00	98,38	0,62	0,49	1331	96,98	0,73	95,55	98,40	0,75	0,60	1188	97,09	0,49	96,12	98,06	0,51	0,66	2519
Papua Barat	94,48	1,01	92,49	96,46	1,07	0,50	1379	92,80	1,04	90,77	94,83	1,12	0,39	1253	93,66	0,79	92,12	95,20	0,84	0,58	2632
Papua	79,46	1,17	77,16	81,76	1,48	0,83	3715	78,81	1,21	76,43	81,18	1,54	0,80	3151	79,14	1,01	77,16	81,13	1,28	1,31	6866
INDONESIA	97,79	0,07	97,65	97,92	0,07	1,52	71050	97,37	0,08	97,21	97,53	0,08	1,75	65517	97,58	0,06	97,47	97,69	0,06	1,80	136567

Tabel 29. Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sejahtera Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan + Perdesaan										
	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan			Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan			Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel					
			Batas Bawah	Batas Atas	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	89,73	1,38	87,02	92,44	1,54	0,90	698	85,02	1,05	82,95	87,08	1,24	0,59	1807	86,38	0,86	84,71	88,06	0,99	0,84	2505
Sumatera Utara	78,39	1,31	75,82	80,96	1,67	2,40	2226	80,12	0,98	78,19	82,04	1,23	0,91	3167	79,25	0,82	77,64	80,86	1,04	1,75	5393
Sumatera Barat	79,68	1,66	76,42	82,94	2,08	1,18	976	75,18	1,41	72,42	77,94	1,87	0,65	1467	77,08	1,09	74,95	79,20	1,41	0,99	2443
Riau	79,07	2,06	75,03	83,11	2,61	2,04	684	79,15	1,39	76,42	81,88	1,76	0,94	1165	79,12	1,17	76,82	81,41	1,48	1,53	1849
Jambi	79,42	2,50	74,52	84,33	3,15	1,22	354	79,96	1,58	76,26	82,45	1,99	0,72	958	79,38	1,34	76,76	82,00	1,68	1,04	1312
Sumatera Selatan	73,55	2,50	68,65	78,45	3,40	2,94	696	78,81	1,17	76,51	81,10	1,49	0,86	1547	79,24	1,19	74,59	79,24	1,54	1,83	2243
Bengkulu	80,62	3,39	73,97	87,27	4,21	1,38	347	76,75	1,81	73,20	80,30	2,36	0,45	761	78,03	1,64	74,82	81,24	2,10	0,80	1108
Lampung	79,73	2,27	75,28	84,18	2,85	2,25	501	80,44	1,31	77,88	83,01	1,63	1,13	1219	80,23	1,14	77,98	82,47	1,43	1,73	1720
Kepulauan Bangka Belitung	75,47	2,56	70,45	80,50	3,40	0,80	388	72,17	2,53	67,21	77,13	3,51	0,47	372	73,96	1,81	70,42	77,50	2,44	0,64	760
Kepulauan Riau	84,61	1,93	80,83	88,40	2,28	1,48	578	84,48	3,01	78,57	90,38	3,57	0,39	202	84,59	1,68	81,29	87,89	1,99	1,23	780
DKI Jakarta	80,81	1,49	77,89	83,74	1,85	3,21	855	-	-	-	-	-	-	80,81	1,49	77,89	83,74	1,85	2,91	855	
Jawa Barat	82,02	0,84	80,38	83,66	1,02	4,71	3053	78,20	1,30	75,65	80,74	1,66	2,25	1457	81,01	0,71	79,62	82,40	0,88	3,97	4510
Jawa Tengah	80,48	0,89	78,72	82,23	1,11	2,35	2554	78,04	1,03	76,03	80,06	1,32	1,69	2036	79,31	0,68	77,98	80,64	0,85	2,25	4590
DI Yogyakarta	80,74	2,49	75,86	85,62	3,08	2,28	351	92,00	2,48	87,14	96,86	2,70	1,06	141	83,61	1,97	79,74	87,48	2,36	1,98	482
Jawa Timur	84,02	0,87	82,32	85,71	1,03	2,84	2624	79,69	1,03	77,67	81,71	1,29	1,92	2016	81,98	0,67	80,67	83,29	0,81	2,64	4640
Banten	82,62	1,74	79,20	86,04	2,11	4,79	886	77,26	2,35	72,66	81,96	3,04	2,14	499	80,91	1,40	78,16	83,66	1,73	3,84	1385
Bali	85,88	1,87	82,21	89,55	2,18	2,03	661	86,21	2,09	82,11	90,30	2,42	0,95	448	86,00	1,41	83,23	88,77	1,64	1,66	1109
Nusa Tenggara Barat	86,32	1,82	82,74	89,89	2,11	1,94	519	81,79	1,88	78,10	85,48	2,30	1,23	741	83,88	1,32	81,30	86,46	1,57	1,73	1260
Nusa Tenggara Timur	69,81	2,81	64,30	75,32	4,03	1,55	578	67,70	1,12	65,50	69,90	1,66	0,59	3020	68,14	1,07	66,05	70,23	1,56	0,94	3598
Kalimantan Barat	67,54	2,57	62,51	72,57	3,80	1,42	525	65,16	1,60	62,02	68,29	2,45	0,74	1387	65,91	1,36	63,25	68,58	2,06	1,11	1912
Kalimantan Tengah	74,46	2,45	69,67	79,26	3,28	0,92	484	78,06	1,84	74,45	81,66	2,36	0,61	1030	76,70	1,46	73,83	79,57	1,91	0,84	1514
Kalimantan Selatan	78,22	2,34	73,64	82,80	2,99	1,56	509	70,76	1,70	67,43	74,08	2,40	0,62	958	73,84	1,39	71,12	76,56	1,88	1,06	1467
Kalimantan Timur	78,48	1,95	74,65	82,30	2,48	1,40	669	81,84	2,35	77,24	86,44	2,55	0,82	477	79,68	1,52	76,70	82,65	1,90	1,24	1146
Kalimantan Utara	79,06	2,63	73,90	84,21	3,33	0,50	238	77,05	3,50	70,19	83,92	4,55	0,40	292	78,20	2,13	74,03	82,37	2,72	0,50	530
Sulawesi Utara	72,86	2,26	68,43	77,28	3,10	0,92	650	75,49	1,66	72,23	78,75	2,20	0,34	970	74,18	1,40	71,44	76,91	1,88	0,66	1620
Sulawesi Tengah	69,62	3,04	63,67	75,57	4,36	1,06	331	74,45	1,40	71,70	77,19	1,88	0,46	1341	73,20	1,31	70,64	75,77	1,79	0,75	1672
Sulawesi Selatan	77,01	1,61	73,85	80,17	2,09	1,54	1139	73,90	1,13	71,68	76,12	1,53	0,69	2330	75,13	0,94	73,30	76,97	1,25	1,13	3469
Sulawesi Tenggara	77,29	2,57	72,26	82,32	3,32	1,31	415	76,23	1,43	73,42	79,04	1,88	0,41	1334	76,64	1,33	74,04	79,24	1,73	0,81	1749
Gorontalo	69,97	3,01	64,07	75,87	4,30	0,60	250	68,94	2,55	63,94	73,94	3,70	0,45	538	69,33	1,95	65,50	73,16	2,82	0,60	788
Sulawesi Barat	64,77	5,07	54,83	74,72	7,83	1,10	164	70,73	1,93	66,96	74,51	2,72	0,40	739	69,43	1,89	65,73	73,13	2,72	0,68	903
Maluku	72,61	2,86	67,02	78,21	3,93	1,03	549	75,13	1,57	72,05	78,21	2,09	0,30	1143	74,08	1,51	71,13	77,04	2,03	0,65	1682
Maluku Utara	78,59	3,10	72,52	84,66	3,94	0,62	289	75,54	1,62	72,37	78,71	2,14	0,30	1048	76,31	1,45	73,47	79,15	1,90	0,46	1337
Papua Barat	72,61	3,47	65,80	79,42	4,78	0,73	361	66,76	2,33	62,20	71,32	3,49	0,82	837	69,11	1,96	65,26	72,95	2,84	0,49	1198
Papua	73,32	2,39	68,64	78,01	3,26	0,78	611	51,37	2,05	47,35	55,39	3,99	0,28	2213	57,09	1,60	53,94	60,23	2,81	0,14	2824
INDONESIA	80,61	0,34	79,94	81,29	0,43	2,65	26713	76,86	0,31	76,27	77,46	0,40	1,64	38660	78,84	0,23	78,39	79,30	0,29	2,14	66373

Tabel 30. Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan										
	Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan			Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan			Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan								
			Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error			Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error			Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	86,33	1,11	84,15	88,50	1,29	0,65	1,291	86,44	1,24	84,01	88,87	1,43	0,76	1,214	86,38	0,86	84,71	88,06	0,99	0,84	2,505
Sumatera Utara	80,71	1,11	78,53	82,90	1,38	1,55	2805	77,70	1,21	75,33	80,07	1,55	1,54	2588	79,25	0,82	77,64	80,86	1,04	1,75	5393
Sumatera Barat	74,43	1,56	71,37	77,50	2,10	0,84	1259	79,65	1,48	76,75	82,55	1,86	0,90	1184	77,08	1,09	74,95	79,20	1,41	0,99	2443
Riau	76,96	1,60	73,83	80,10	2,07	1,17	929	81,19	1,65	77,95	84,43	2,03	1,49	920	79,12	1,17	76,82	81,41	1,48	1,53	1849
Jambi	80,92	1,67	77,64	84,20	2,07	0,77	654	77,85	1,93	74,07	81,63	2,48	0,91	658	79,38	1,34	76,76	82,00	1,68	1,04	1312
Sumatera Selatan	75,95	1,63	72,76	79,14	2,14	1,56	1166	77,97	1,70	74,63	81,30	2,18	1,64	1077	76,91	1,19	74,59	79,24	1,54	1,83	2243
Bengkulu	75,82	2,29	71,33	80,31	3,02	0,68	577	80,42	2,19	76,12	84,71	2,73	0,67	531	78,03	1,64	74,82	81,24	2,10	0,80	1108
Lampung	79,05	1,68	75,75	82,35	2,13	1,67	911	81,51	1,53	78,51	84,52	1,88	1,38	809	80,23	1,14	77,98	82,47	1,43	1,73	1720
Kepulauan Bangka Belitung	70,77	2,61	65,66	75,88	3,69	0,58	426	77,54	2,67	72,31	82,78	3,44	0,64	334	73,96	1,81	70,42	77,50	2,44	0,64	760
Kepulauan Riau	85,61	2,41	80,89	90,33	2,81	1,20	405	83,55	2,49	78,67	88,43	2,98	1,11	375	84,59	1,68	81,29	87,89	1,99	1,23	780
DKI Jakarta	82,83	2,05	78,81	86,85	2,47	2,78	445	78,63	2,27	74,19	83,08	2,88	2,65	410	80,81	1,49	77,89	83,74	1,85	2,91	855
Jawa Barat	80,19	0,97	78,29	82,09	1,21	3,37	2346	81,91	0,99	79,98	83,85	1,21	3,39	2164	81,01	0,71	79,62	82,40	0,88	3,97	4510
Jawa Tengah	77,89	0,98	75,97	79,82	1,26	2,07	2384	80,82	0,93	78,99	82,65	1,16	1,94	2206	79,31	0,68	77,98	80,64	0,85	2,25	4590
DI Yogyakarta	82,41	2,73	77,06	87,76	3,31	1,73	271	85,02	2,65	79,82	90,22	3,12	1,57	221	83,61	1,97	79,74	87,48	2,36	1,98	492
Jawa Timur	81,67	0,91	79,88	83,45	1,11	2,26	2469	82,32	0,96	80,44	84,21	1,17	2,35	2171	81,98	0,67	80,67	83,29	0,81	2,64	4640
Banten	78,03	1,97	74,17	81,89	2,52	3,11	717	83,92	1,78	80,48	87,41	2,12	3,07	668	80,91	1,40	78,16	83,66	1,73	3,84	1385
Bali	87,21	1,67	83,94	90,48	1,91	1,17	585	84,65	2,13	80,48	88,82	2,51	1,46	524	86,00	1,41	83,23	88,77	1,64	1,66	1109
Nusa Tenggara Barat	84,82	1,81	81,28	88,36	2,13	1,49	644	82,98	1,97	79,12	86,85	2,38	1,69	616	83,88	1,32	81,30	86,46	1,57	1,73	1280
Nusa Tenggara Timur	65,79	1,39	63,07	68,50	2,11	0,70	1852	70,62	1,49	67,71	73,53	2,10	0,83	1746	68,14	1,07	66,05	70,23	1,56	0,94	3598
Kalimantan Barat	65,85	1,87	62,19	69,52	2,84	0,94	979	65,97	1,94	62,17	69,78	2,95	1,00	933	65,91	1,36	63,25	68,58	2,06	1,11	1912
Kalimantan Tengah	74,07	2,07	70,03	78,12	2,79	0,70	748	79,32	1,95	75,51	83,13	2,45	0,72	766	76,70	1,46	73,83	79,57	1,91	0,84	1514
Kalimantan Selatan	73,42	1,89	69,72	77,13	2,58	0,93	759	74,31	1,89	70,60	78,02	2,55	0,83	708	73,84	1,39	71,12	76,56	1,88	1,06	1467
Kalimantan Timur	81,45	2,02	77,50	85,40	2,47	1,11	621	77,71	2,25	73,30	82,11	2,89	1,07	525	79,68	1,52	76,70	82,65	1,90	1,24	1146
Kalimantan Utara	79,34	3,35	72,77	85,91	4,22	0,59	271	77,00	3,18	70,76	83,23	4,13	0,47	259	78,20	2,13	74,03	82,37	2,72	0,50	530
Sulawesi Utara	71,41	1,99	67,51	75,31	2,78	0,58	886	77,16	2,00	73,24	81,07	2,59	0,62	734	74,18	1,40	71,44	76,91	1,88	0,66	1620
Sulawesi Tengah	69,63	2,03	65,65	73,61	2,91	0,75	846	76,79	1,66	73,55	80,03	2,16	0,58	826	73,20	1,31	70,64	75,77	1,79	0,75	1672
Sulawesi Selatan	74,16	1,30	71,61	76,72	1,76	0,96	1756	76,12	1,29	73,60	78,64	1,69	0,97	1713	75,13	0,94	73,30	76,97	1,25	1,13	3469
Sulawesi Tenggara	78,19	1,98	74,31	82,07	2,53	0,87	916	74,99	2,01	71,04	78,93	2,68	0,76	833	76,64	1,33	74,04	79,24	1,73	0,81	1749
Gorontalo	65,00	2,66	59,79	70,20	4,09	0,47	409	73,73	2,69	68,45	79,01	3,65	0,55	379	69,33	1,95	65,50	73,16	2,82	0,60	788
Sulawesi Barat	67,99	2,82	62,46	73,51	4,15	0,66	437	70,86	2,51	65,95	75,78	3,54	0,57	466	69,43	1,89	65,73	73,13	2,72	0,68	903
Maluku	73,42	1,83	69,83	77,01	2,50	0,44	895	74,79	2,14	70,60	78,98	2,86	0,41	797	74,08	1,51	71,13	77,04	2,03	0,65	1692
Maluku Utara	75,92	1,94	72,12	79,72	2,55	0,38	717	76,74	2,11	72,61	80,88	2,75	0,47	620	76,31	1,45	73,47	79,15	1,90	0,46	1337
Papua Barat	69,57	2,54	64,59	74,56	3,66	0,38	623	68,62	3,03	62,69	74,55	4,41	0,50	575	69,11	1,96	65,26	72,95	2,84	0,49	1198
Papua	58,51	2,09	54,42	62,59	3,57	0,78	1530	55,52	2,08	51,45	59,59	3,74	0,68	1294	57,09	1,60	53,94	60,23	2,81	0,97	2824
INDONESIA	78,18	0,32	77,55	78,81	0,41	2,08	34529	79,55	0,32	78,91	80,18	0,41	2,08	31844	78,84	0,23	78,39	79,30	0,29	2,14	66373

Tabel 31. Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SM/serajat Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan+Perdesaan												
	Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standart Error							
			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	75,99	2,34	71,40	80,58	3,08	1,44	725	67,67	1,50	64,73	70,61	2,21	0,70	1745	70,26	1,27	67,76	72,75	1,81	1,00	2470
Sumatera Utara	67,36	1,91	63,62	71,10	2,83	3,93	2089	67,16	1,31	64,60	69,73	1,95	1,05	2583	67,27	1,18	64,95	69,59	1,76	2,37	4672
Sumatera Barat	70,57	2,47	65,73	75,41	3,50	2,01	964	65,03	1,59	61,92	68,14	2,44	0,61	1276	67,48	1,40	64,73	70,22	2,07	1,15	2240
Riau	69,02	2,37	64,38	73,67	3,43	2,05	624	59,62	1,75	56,19	63,04	2,93	0,91	990	63,47	1,42	60,70	66,25	2,23	1,37	1614
Jambi	70,00	3,32	63,49	76,51	4,74	1,81	388	56,18	1,99	52,29	60,07	3,53	0,67	847	60,92	1,72	57,56	64,28	2,82	1,03	1235
Sumatera Selatan	64,38	2,67	59,15	69,62	4,15	2,75	620	57,04	1,65	53,80	60,28	2,90	1,01	1248	59,87	1,45	57,02	62,72	2,43	1,68	1868
Bengkulu	70,41	3,68	63,19	77,63	5,23	1,21	344	62,71	2,26	58,29	67,14	3,60	0,47	656	65,45	1,94	61,64	69,25	2,97	0,72	1000
Lampung	64,11	3,23	57,77	70,45	5,04	3,27	496	56,95	1,78	53,47	60,43	3,12	1,31	1145	59,18	1,59	56,06	62,30	2,69	2,01	1641
Kepulauan Bangka Belitung	65,45	3,09	59,40	71,50	4,71	0,84	348	50,00	3,46	43,20	56,79	6,93	0,59	358	57,86	2,34	53,27	62,44	4,04	0,73	706
Kepulauan Riau	72,97	2,63	67,81	78,13	3,61	1,48	507	72,52	5,12	62,49	82,56	7,06	0,64	160	72,90	2,36	68,27	77,54	3,24	1,17	667
DKI Jakarta	60,01	1,93	56,23	63,80	3,22	3,61	891	-	-	-	-	-	-	-	60,01	1,93	56,23	63,80	3,22	3,00	891
Jawa Barat	60,11	1,19	57,78	62,44	1,98	5,89	3071	49,50	1,49	46,58	52,41	3,01	2,01	1388	57,33	0,96	55,45	59,22	1,67	4,23	4459
Jawa Tengah	64,19	1,21	61,82	66,56	1,88	3,09	2534	54,13	1,32	51,54	56,73	2,44	2,06	2015	59,31	0,90	57,55	61,07	1,51	2,61	4549
DI Yogyakarta	71,75	2,50	66,84	76,65	3,49	2,05	386	65,91	4,62	56,86	74,95	7,00	1,43	158	70,22	2,22	66,87	74,57	3,16	1,76	544
Jawa Timur	68,80	1,17	66,50	71,09	1,70	3,35	2651	53,73	1,39	51,00	56,45	2,59	2,44	2070	61,51	0,90	59,74	63,27	1,46	2,88	4721
Banten	61,35	2,18	57,07	65,63	3,56	4,76	899	52,54	2,90	46,86	58,22	5,52	2,18	510	58,72	1,74	55,31	62,13	2,96	3,51	1409
Bali	72,33	1,92	68,57	76,08	2,65	1,32	680	74,32	2,85	68,74	79,91	3,83	1,00	380	73,00	1,60	69,87	76,13	2,19	1,17	1060
Nusa Tenggara Barat	73,00	2,34	68,42	77,58	3,20	2,00	565	59,34	2,77	53,92	64,76	4,66	1,64	706	65,77	1,86	62,12	69,42	2,83	1,96	1271
Nusa Tenggara Timur	66,49	2,91	60,78	72,19	4,38	1,75	614	48,82	1,47	45,95	51,69	3,00	0,67	2109	53,67	1,37	50,98	56,37	2,56	1,06	2723
Kalimantan Barat	59,65	2,57	54,62	64,69	4,30	1,44	554	46,30	1,84	42,70	49,89	3,96	0,80	1156	51,16	1,52	48,19	54,14	2,96	1,10	1710
Kalimantan Tengah	58,76	2,89	53,10	64,42	4,92	0,94	444	50,63	2,35	46,02	55,24	4,65	0,65	883	53,67	1,82	50,10	57,24	3,39	0,81	1327
Kalimantan Selatan	63,72	2,51	58,80	68,65	3,94	1,64	641	51,62	2,20	47,31	55,93	4,26	0,71	780	57,78	1,68	54,50	61,07	2,90	1,13	1421
Kalimantan Timur	68,51	2,63	63,36	73,67	3,84	2,12	647	68,28	3,38	61,66	74,89	4,94	1,11	417	68,43	2,08	64,35	72,52	3,04	1,65	1064
Kalimantan Utara	67,95	3,72	60,66	75,24	5,47	0,78	241	58,81	6,20	46,65	70,97	10,55	0,93	282	64,05	3,43	57,33	70,78	5,36	0,91	523
Sulawesi Utara	65,40	2,59	60,31	70,48	3,97	1,00	590	60,05	2,30	55,53	64,56	3,84	0,44	785	62,83	1,76	59,39	66,27	2,80	0,71	1375
Sulawesi Tengah	75,48	3,27	69,07	81,89	4,33	1,58	367	58,61	1,79	55,10	62,11	3,05	0,46	1042	64,25	1,67	60,97	67,53	2,61	0,83	1409
Sulawesi Selatan	61,68	1,93	57,90	65,46	3,13	1,72	1101	58,81	1,41	56,05	61,57	2,39	0,77	2012	60,03	1,15	57,78	62,29	1,92	1,18	3113
Sulawesi Tenggara	69,23	3,50	62,37	76,09	5,05	1,89	390	58,52	2,09	54,42	62,61	3,57	0,55	1091	62,87	1,96	59,03	66,71	3,12	1,11	1481
Gorontalo	56,73	3,65	49,18	64,27	6,78	0,69	212	57,77	2,80	52,28	63,25	4,85	0,41	469	57,38	2,27	52,94	61,83	3,95	0,55	681
Sulawesi Barat	61,96	4,83	52,49	71,42	7,80	0,97	141	56,21	2,74	50,83	61,58	4,88	0,60	604	57,59	2,39	52,90	62,27	4,15	0,79	745
Naluku	71,02	2,36	66,39	75,65	3,33	0,67	528	58,04	2,22	53,69	62,40	3,83	0,42	939	63,68	1,68	60,39	66,97	2,64	0,57	1467
Maluku Utara	65,59	4,33	57,11	74,08	6,60	1,00	261	63,11	1,95	59,28	66,94	3,09	0,28	805	63,88	1,91	60,14	67,62	2,99	0,51	1066
Papua Barat	72,53	3,89	65,89	79,16	4,67	0,65	340	56,14	2,80	50,65	61,64	4,99	0,31	640	63,12	2,16	58,88	67,35	3,42	0,44	980
Papua	69,55	2,88	63,88	75,22	4,16	0,94	534	35,55	1,92	31,78	39,32	5,41	0,70	1791	44,31	1,64	41,10	47,53	3,70	0,83	2325
INDONESIA	64,65	0,46	63,75	65,56	0,71	3,07	26387	55,93	0,41	55,13	56,72	0,73	1,84	34040	60,67	0,31	60,06	61,28	0,51	2,45	60427

Tabel 34. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) PT Menuut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki											Perempuan											Laki-laki + Perempuan										
	Estimasi	Standart Error			Rebtive Standart Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan			Relative Standart Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan			Relative Standart Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel										
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas						Batas Bawah	Batas Atas	Batas						Batas Bawah	Batas Atas	Batas													
																								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)												
Aceh	24,51	1,40	27,26	5,72	12,22	2017	30,70	1,57	27,62	33,78	5,12	34,28	1,931	27,55	1,10	25,39	29,71	4,00	39,48														
Sumatera Utara	17,31	1,25	14,87	19,75	7,19	3,35	2931	20,71	1,64	17,50	23,92	7,91	4,72	27,07	1,14	16,73	21,18	5,99	4,25	5,638													
Sumatera Barat	25,67	1,99	21,77	29,57	7,76	2,17	1470	30,13	2,41	25,42	34,85	7,98	2,83	13,67	1,84	24,29	31,49	6,58	2,94	2,837													
Riau	23,23	1,76	19,78	26,69	7,59	2,55	1214	20,42	1,61	17,27	23,56	7,86	2,10	11,23	1,81	19,23	24,55	6,19	2,54	2,337													
Jambi	15,97	1,40	13,23	18,71	8,75	1,04	977	19,67	1,69	16,35	22,98	8,60	1,25	9,91	1,17	15,51	20,07	6,55	1,11	1,908													
Sumatera Selatan	12,59	1,28	10,09	15,10	10,15	2,52	1550	15,68	1,39	12,95	18,41	8,88	2,41	14,56	1,11	12,05	16,18	7,46	2,60	3,006													
Bengkulu	18,72	1,77	15,25	22,19	9,46	0,83	786	25,14	2,05	21,11	29,16	8,17	0,82	7,16	1,48	18,87	24,65	6,78	0,83	1,502													
Lampung	11,32	1,79	7,82	14,83	15,81	3,88	1357	13,83	1,71	10,47	17,18	12,38	3,79	12,76	1,29	9,99	15,06	10,32	4,16	2,633													
Kepulauan Bangka Belitung	6,75	1,06	4,67	8,84	15,76	0,55	522	11,82	1,66	8,56	15,08	14,07	0,72	4,78	0,95	0,96	11,03	10,49	0,94	1,000													
Kepulauan Riau	16,06	2,51	11,14	20,99	15,64	1,90	543	16,35	2,79	10,88	21,82	17,07	2,10	4,92	2,06	12,17	20,23	12,70	2,05	1,035													
DKI Jakarta	21,92	1,72	18,56	25,29	7,83	3,18	812	22,32	1,72	18,95	25,68	7,69	3,46	8,73	1,34	19,50	24,76	6,07	3,45	1,685													
Jawa Barat	16,65	0,83	15,02	18,27	4,98	5,12	3706	17,60	0,92	15,80	19,40	5,20	5,79	35,21	1,12	0,68	15,79	18,44	3,94	5,54	7,727												
Jawa Tengah	12,60	0,71	11,21	13,99	5,63	3,08	3388	15,35	0,81	13,77	16,94	5,26	3,29	35,80	1,96	0,59	12,81	15,11	4,19	3,22	6,948												
DI Yogyakarta	44,14	2,82	38,61	49,67	6,39	2,48	534	49,60	3,21	43,32	55,88	6,46	3,70	4,92	2,34	42,31	51,48	4,99	2,88	1,026													
Jawa Timur	15,89	0,83	14,26	17,52	5,24	3,95	3846	18,70	0,90	16,94	20,46	4,81	3,96	39,06	1,78	0,70	15,92	18,65	4,03	4,33	7,752												
Banten	16,35	1,30	13,81	18,89	7,93	3,37	1274	20,01	1,43	17,21	22,80	7,12	3,36	1,253	1,03	16,13	20,17	5,68	3,27	2,527													
Ball	22,45	2,21	18,12	26,77	9,84	2,33	891	25,75	1,79	22,24	29,25	6,95	3,33	7,80	1,41	21,30	26,82	5,86	1,50	1,671													
Nusa Tenggara Barat	16,90	1,59	13,79	20,01	9,38	1,85	860	18,09	1,87	14,41	21,76	10,36	2,44	8,57	1,34	14,86	20,12	7,67	2,18	1,717													
Nusa Tenggara Timur	14,94	1,22	12,55	17,32	8,15	1,28	1672	18,48	1,43	15,67	21,29	7,75	1,45	1,778	1,02	14,69	18,68	6,10	1,37	3,450													
Kalimantan Barat	14,27	1,80	10,74	17,80	12,63	2,79	1282	12,92	1,40	10,18	15,67	10,83	1,76	1,229	1,36	10,94	16,27	9,99	2,75	2,511													
Kalimantan Tengah	13,12	1,42	10,34	15,91	10,82	1,01	1034	16,12	1,66	12,86	19,37	10,30	1,06	9,84	1,16	12,29	16,83	7,96	1,00	2,018													
Kalimantan Selatan	19,46	1,68	16,16	22,76	8,65	1,48	1088	17,88	1,63	14,69	21,06	9,10	1,44	1,034	1,31	16,12	21,24	6,99	1,54	2,102													
Kalimantan Timur	22,34	2,00	18,41	26,26	8,96	1,82	828	22,23	1,98	18,36	26,11	8,89	1,58	7,82	1,59	19,17	25,41	7,13	1,84	1,610													
Kalimantan Utara	8,55	1,57	5,48	11,61	18,31	0,49	364	17,55	2,57	12,52	22,59	14,63	0,58	32,9	1,52	9,62	15,57	12,05	0,90	6,63													
Sulawesi Utara	17,94	1,73	14,54	21,33	9,66	1,05	1149	23,51	2,03	19,54	27,49	8,63	1,05	9,87	1,53	17,67	23,56	7,43	1,18	2,136													
Sulawesi Tengah	21,39	1,66	18,14	24,65	7,76	0,98	994	24,31	1,83	20,73	27,89	7,52	1,00	9,93	1,31	20,23	25,37	5,75	0,95	1,931													
Sulawesi Selatan	23,98	1,63	20,79	27,17	6,78	2,68	2226	31,13	1,59	28,01	34,25	5,11	2,15	2,199	1,32	24,94	30,13	4,80	2,73	4,425													
Sulawesi Tenggara	25,72	2,16	21,48	29,96	8,41	1,34	961	26,18	2,72	22,84	31,51	10,40	2,06	1,045	1,99	22,05	29,85	7,67	1,90	2,006													
Sulawesi Barat	20,41	2,40	15,71	25,12	11,76	0,77	593	26,44	2,57	21,40	31,48	9,72	0,91	5,86	2,03	19,49	27,32	8,53	1,02	1,179													
Maluku	13,54	1,76	10,09	16,99	12,99	0,77	514	20,36	2,23	15,99	24,74	10,96	0,85	4,98	1,44	14,05	19,70	8,53	0,71	1,012													
Maluku Utara	29,64	2,59	24,56	34,72	8,74	1,23	984	34,57	2,68	29,32	39,82	7,75	1,21	9,69	2,15	27,89	36,30	6,68	1,37	1,953													
Papua Barat	18,51	2,27	14,06	22,96	9,18	0,59	792	26,84	2,32	22,30	31,38	8,64	0,66	7,44	2,16	20,78	27,34	6,95	0,65	1,536													
Papua	10,38	1,02	8,38	12,37	9,81	0,81	1785	12,15	1,19	9,82	14,49	9,81	0,87	1,765	1,19	9,46	12,93	7,91	0,79	3,550													
INDONESIA	17,33	0,29	16,76	17,89	1,66	2,65	45,668	19,89	0,32	19,26	20,51	1,60	2,83	44,298	0,24	18,12	19,05	1,28	3,36	8,966													

Tabel 38. Sampling Error Siswa Umur 10-24 Tahun yang Berkejar Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan												
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel							
			Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	10.50	0.77	8.99	12.01	7.34	1.39	4340	5.52	0.57	4.42	6.63	10.23	1.32	4117	8.02	0.51	7.02	9.02	6.37	1.62	8457
Sumatera Utara	12.36	0.61	11.16	13.56	4.95	2.05	7949	9.74	0.63	8.50	10.98	6.50	2.67	7499	11.05	0.49	10.10	12.01	4.42	3.00	15448
Sumatera Barat	6.91	0.65	5.64	8.19	9.40	1.42	3745	3.96	0.55	2.88	5.04	13.87	1.79	3760	5.40	0.45	4.52	6.28	8.30	1.82	7505
Riau	9.32	0.81	7.73	10.92	8.72	2.07	2752	5.32	0.71	3.94	6.70	13.25	2.55	2661	7.34	0.60	6.17	8.51	8.15	2.89	5413
Jambi	5.03	0.61	3.82	6.23	12.20	0.99	1908	4.76	0.63	3.54	5.99	13.13	1.12	1925	4.89	0.42	4.07	5.71	8.59	1.02	3833
Sumatera Selatan	4.82	0.93	6.91	10.57	10.67	0.80	1622	6.78	0.76	5.29	8.26	11.17	0.66	1631	7.76	0.64	6.51	9.01	8.21	0.87	3253
Bengkulu	8.74	0.86	6.88	10.23	10.01	2.74	2628	4.91	0.61	3.72	6.11	12.41	2.27	2485	6.75	0.56	5.66	7.85	8.28	3.02	5113
Lampung	5.88	0.87	4.18	7.58	14.77	0.65	1193	4.49	0.75	3.02	5.97	16.79	0.83	974	5.18	0.64	3.93	6.43	12.31	0.83	2077
Kepulauan Bangka Belitung	5.19	1.07	3.08	7.29	20.69	1.83	1123	5.26	1.11	3.08	7.44	21.15	1.84	1121	5.22	0.81	3.63	6.82	15.59	2.14	2314
Kepulauan Riau	4.84	0.67	3.52	6.15	13.86	3.07	1471	4.89	0.72	3.48	6.31	14.76	3.39	1362	4.86	0.52	3.85	5.87	10.59	3.72	2833
DKI Jakarta	6.14	0.44	5.27	7.00	7.19	5.71	6837	5.58	0.41	4.77	6.40	7.41	5.21	6510	5.87	0.32	5.24	6.50	5.49	6.52	13347
Jawa Barat	7.34	0.45	6.46	8.22	6.10	3.42	7196	5.34	0.39	4.57	6.11	7.34	3.31	6736	6.37	0.31	5.76	6.98	4.90	3.86	13932
Jawa Tengah	11.04	1.33	8.43	13.65	12.08	2.57	1037	10.42	1.33	7.81	13.03	12.78	2.62	959	10.73	0.95	8.88	12.59	8.81	2.75	19996
DI Yogyakarta	7.17	0.51	6.17	8.17	7.13	5.03	7450	5.20	0.39	4.44	5.97	7.46	3.72	6982	6.21	0.33	5.57	6.85	5.25	4.80	14432
Banten	5.48	0.87	3.78	7.19	15.89	6.36	2151	5.35	0.67	4.04	6.66	12.48	3.67	2075	5.42	0.56	4.33	6.51	10.30	5.44	4026
Ball	8.66	1.07	6.56	10.76	12.36	2.20	1794	10.46	0.98	8.55	12.38	9.32	1.46	1669	9.54	0.76	8.05	11.04	8.00	2.10	3463
Nusa Tenggara Barat	9.98	0.97	8.08	11.88	9.71	2.13	2080	8.29	0.93	6.47	10.10	11.18	2.12	1864	9.17	0.73	7.74	10.60	7.96	2.64	3954
Nusa Tenggara Timur	8.23	0.61	7.03	9.43	7.44	1.21	5103	5.11	0.56	4.00	6.21	11.03	1.54	4950	6.69	0.46	5.78	7.59	6.89	1.72	10053
Kalimantan Barat	8.24	0.79	6.69	9.78	9.56	1.51	2760	6.19	0.76	4.69	7.68	12.32	1.77	2549	7.23	0.59	6.08	8.37	8.11	1.94	5309
Kalimantan Tengah	8.38	0.85	6.72	10.04	10.11	0.89	2113	6.00	0.71	4.60	7.39	11.91	0.84	2134	7.20	0.57	6.08	8.32	7.95	0.97	4247
Kalimantan Selatan	8.89	0.87	7.18	10.60	9.82	1.41	2165	6.67	0.75	5.20	8.14	11.23	1.22	2042	7.83	0.63	6.60	9.07	8.02	1.64	4207
Kalimantan Timur	10.06	1.08	7.95	12.18	10.72	1.82	1877	5.66	0.81	4.08	7.25	14.30	1.61	1698	7.94	0.73	6.51	9.36	9.16	2.07	3575
Kalimantan Utara	6.19	1.82	2.62	9.76	29.39	1.59	817	5.24	1.12	3.05	7.44	21.37	0.66	784	5.73	1.24	3.30	8.16	21.66	1.62	1601
Sulawesi Utara	5.28	0.73	3.85	6.71	13.80	0.89	2282	3.43	0.56	2.33	4.53	16.33	0.80	2101	4.35	0.45	3.47	5.23	10.30	0.86	4383
Sulawesi Tengah	11.17	0.91	9.40	12.95	8.12	0.92	2304	5.98	0.67	4.67	7.29	11.19	0.88	2288	8.58	0.60	7.40	9.75	7.01	1.08	4587
Sulawesi Selatan	11.40	0.72	9.99	12.80	6.28	1.70	4958	9.12	0.65	7.86	10.39	7.09	1.57	5084	10.24	0.54	9.18	11.30	5.27	2.28	10042
Sulawesi Tenggara	13.62	1.11	11.44	15.80	8.18	1.20	2533	7.80	1.02	5.80	9.80	13.10	1.57	2415	10.78	0.86	9.09	12.47	7.99	1.80	4918
Gorontalo	7.68	1.00	5.73	9.63	12.96	0.62	1142	5.37	0.74	3.92	6.83	13.81	0.48	1117	6.53	0.65	5.25	7.81	9.98	0.65	2259
Sulawesi Barat	11.91	1.43	9.10	14.71	12.03	1.01	1232	8.77	1.66	5.51	12.03	18.97	1.84	1252	10.31	1.21	7.94	12.68	11.73	1.74	2484
Maluku	8.91	0.86	7.24	10.59	9.59	0.74	2553	4.93	0.69	3.58	6.28	14.00	0.81	2475	6.95	0.63	5.72	8.18	9.04	1.04	5028
Maluku Utara	10.21	1.10	8.04	12.37	10.81	0.73	2012	5.69	0.89	3.95	7.43	15.63	0.79	1834	7.97	0.86	6.28	9.66	10.81	1.15	3846
Papua Barat	8.28	1.06	6.20	10.35	12.77	0.59	1984	5.40	0.84	3.76	7.05	15.51	0.51	1731	6.89	0.73	5.46	8.32	10.59	0.68	3665
Papua	14.90	1.15	12.66	17.15	7.69	1.22	3942	11.62	1.07	9.53	13.72	9.20	1.13	3366	13.38	0.94	11.54	15.21	7.00	1.75	7308
INDONESIA	7.93	0.15	7.63	8.23	1.93	3.16	10076	6.06	0.13	5.80	6.32	2.21	3.03	95080	7.01	0.11	6.80	7.22	1.53	3.44	195156

Keterangan: 25% < RSE ≤ 50%, perlu diperhatikan interpretasi dalam penggunaannya

Tabel 42. Sampling Error Angka Melekk Huruf 15-99 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan										
	Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standart Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	99,70	0,05	99,61	99,79	0,05	0,46	13942	99,21	0,08	99,07	99,36	0,08	0,50	14437	99,45	0,05	99,36	99,55	0,05	0,55	28379
Sumatera Utara	99,75	0,06	99,71	99,85	0,03	0,99	22142	99,38	0,06	99,26	99,51	0,06	1,20	22772	99,58	0,04	99,50	99,67	0,04	1,64	44914
Sumatera Barat	99,88	0,04	99,80	99,95	0,04	1,19	9327	99,96	0,02	99,93	99,99	0,02	0,46	9131	99,92	0,02	99,87	99,96	0,02	1,08	18458
Riau	99,83	0,05	99,72	99,93	0,05	0,83	7453	99,48	0,09	99,30	99,66	0,09	0,80	7383	99,66	0,06	99,54	99,78	0,06	1,02	14836
Jambi	99,70	0,05	99,60	99,80	0,05	0,95	11854	99,35	0,09	99,18	99,52	0,09	1,36	11633	99,53	0,05	99,42	99,63	0,05	1,37	23487
Sumatera Selatan	99,70	0,11	99,49	99,92	0,11	1,09	5999	99,42	0,11	99,20	99,64	0,11	0,57	5884	99,56	0,08	99,41	99,72	0,08	0,72	11883
Bengkulu	99,35	0,10	99,15	99,55	0,10	1,86	10755	98,68	0,15	98,39	99,67	0,15	1,85	10455	99,02	0,10	98,83	99,21	0,10	2,13	21210
Lampung	98,97	0,16	98,65	99,29	0,17	0,55	4354	98,59	0,21	98,18	98,99	0,21	0,58	4063	98,79	0,15	98,50	99,07	0,15	0,70	8417
Kepulauan Bangka Belitung	99,54	0,22	99,12	99,96	0,22	3,03	4190	99,41	0,19	99,03	99,78	0,19	1,76	4095	99,47	0,15	99,18	99,77	0,15	2,43	8285
Kepulauan Riau	99,95	0,03	99,90	100,00	0,03	1,98	5943	99,95	0,04	99,87	100,03	0,04	4,87	6126	99,95	0,02	99,90	100,00	0,02	3,40	12069
DKI Jakarta	99,87	0,03	99,81	99,93	0,03	5,20	26301	99,74	0,04	99,67	99,82	0,04	3,57	26733	99,81	0,03	99,76	99,86	0,03	4,40	53034
Jawa Barat	98,67	0,08	98,50	98,83	0,09	2,42	29604	96,81	0,14	96,54	97,07	0,14	2,76	31201	97,73	0,09	97,55	97,90	0,09	3,29	60805
Jawa Tengah	99,25	0,15	98,96	99,55	0,15	1,56	3743	98,18	0,26	97,66	98,70	0,27	2,03	3843	98,71	0,15	98,42	99,01	0,15	1,86	7586
DI Yogyakarta	97,88	0,10	97,68	98,09	0,11	2,80	32094	95,31	0,17	94,97	95,65	0,18	3,73	33896	96,58	0,12	96,34	96,82	0,13	4,80	65990
Jawa Timur	99,38	0,10	99,18	99,59	0,10	3,13	8588	96,28	0,19	97,91	98,64	0,19	3,52	8643	98,84	0,12	98,61	99,07	0,12	4,05	17231
Bali	98,55	0,17	98,22	98,89	0,17	1,22	6756	95,43	0,33	94,78	96,08	0,35	1,48	6769	97,01	0,21	96,59	97,42	0,22	1,80	13525
Nusa Tenggara Barat	95,19	0,37	94,46	95,93	0,39	1,92	6671	90,04	0,51	89,04	91,05	0,57	2,04	7088	92,49	0,38	91,75	93,23	0,41	2,68	13769
Nusa Tenggara Timur	95,28	0,28	94,72	95,83	0,29	1,11	12887	94,27	0,31	93,66	94,88	0,33	1,19	13866	94,76	0,26	94,25	95,27	0,27	1,73	26753
Kalimantan Timur	97,60	0,18	97,24	97,96	0,19	0,99	9942	93,91	0,32	93,29	94,53	0,34	1,16	9664	95,79	0,22	95,37	96,21	0,22	1,50	19606
Kalimantan Tengah	99,87	0,06	99,75	99,98	0,06	0,93	8217	99,96	0,02	99,92	99,99	0,02	0,28	7930	99,91	0,03	99,85	99,97	0,03	0,77	16147
Kalimantan Selatan	99,78	0,07	99,65	99,92	0,07	1,31	8412	99,54	0,11	99,32	99,76	0,11	1,54	8540	99,66	0,07	99,53	99,79	0,07	1,48	16952
Kalimantan Timur	99,77	0,09	99,60	99,94	0,09	1,85	6459	99,63	0,13	99,38	99,88	0,13	2,13	6290	99,70	0,08	99,54	99,87	0,08	2,34	12749
Sulawesi Utara	97,92	0,34	97,25	98,58	0,35	0,58	2740	96,93	0,42	96,11	97,76	0,43	0,54	2625	97,46	0,30	96,88	98,04	0,30	0,66	5365
Sulawesi Tengah	99,89	0,05	99,80	99,97	0,05	0,60	8829	99,96	0,03	99,89	100,02	0,03	0,78	8441	99,92	0,03	99,86	99,97	0,03	0,64	12720
Sulawesi Selatan	99,34	0,13	99,08	99,59	0,13	1,07	7761	99,05	0,16	98,74	99,35	0,16	1,00	7491	99,19	0,12	98,95	99,44	0,13	1,52	15252
Sulawesi Tenggara	95,88	0,21	95,47	96,30	0,22	1,29	16372	94,89	0,24	94,42	95,36	0,25	1,42	17409	95,37	0,19	95,00	95,75	0,20	1,91	33781
Gorontalo	98,05	0,20	97,66	98,44	0,20	0,69	7947	96,49	0,31	95,88	97,11	0,33	0,98	7808	97,27	0,22	96,85	97,69	0,22	1,16	15155
Sulawesi Tengah	99,16	0,13	98,90	99,42	0,13	0,34	3893	99,36	0,16	99,05	99,67	0,16	0,63	3881	99,26	0,11	99,05	99,47	0,11	0,50	7774
Maluku	96,24	0,40	95,46	97,02	0,42	0,78	3671	94,49	0,52	93,46	95,51	0,55	0,93	3671	95,37	0,39	94,61	96,12	0,40	1,17	7342
Maluku Utara	99,44	0,04	99,16	99,72	0,04	0,82	6559	99,38	0,14	99,10	99,65	0,14	0,71	6679	99,41	0,13	99,16	99,66	0,13	1,19	13238
Papua Barat	99,90	0,04	99,83	99,97	0,04	0,22	5538	99,64	0,09	99,47	99,81	0,09	0,32	5480	99,77	0,05	99,67	99,87	0,05	0,35	11018
Papua	98,85	0,23	98,40	99,31	0,23	0,64	5338	97,36	0,37	96,63	98,09	0,38	0,64	5048	96,16	0,24	97,69	98,62	0,24	0,78	10386
INDONESIA	98,70	0,03	98,64	98,75	0,03	2,09	348491	97,44	0,04	97,36	97,53	0,04	2,57	333559	98,07	0,03	98,02	98,13	0,03	3,44	702050

Tabel 48. Sampling Error Angka Melanjutkan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2018

Provinsi	SMP/ sederajat						SM/ sederajat							
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Bawah	Atas						Bawah	Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	94,15	1,17	91,85	96,45	1,24	0,57	390	92,36	1,31	89,79	94,93	1,42	0,65	475
Sumatera Utara	96,34	0,65	95,07	97,61	0,67	0,90	902	92,48	1,10	90,32	94,63	1,19	1,66	1224
Sumatera Barat	96,71	0,73	95,28	98,13	0,75	0,58	548	95,42	0,90	93,65	97,19	0,94	0,66	590
Riau	81,47	2,19	77,18	85,77	2,69	1,64	550	94,50	1,11	92,32	96,68	1,18	1,09	431
Jambi	98,03	1,31	95,47	100,59	1,33	1,34	204	87,60	2,01	83,66	91,54	2,29	0,86	307
Sumatera Selatan	96,97	0,84	95,33	98,62	0,87	0,93	328	70,20	2,25	65,78	74,61	3,21	1,44	646
Bengkulu	98,37	0,69	97,03	99,71	0,70	0,27	236	94,52	1,56	91,46	97,57	1,65	0,59	282
Lampung	98,64	0,76	97,16	100,13	0,77	1,51	316	67,20	2,32	62,66	71,75	3,45	1,69	669
Kepulauan Bangka Belitung	98,75	0,74	97,29	100,20	0,75	0,29	124	88,01	2,77	82,58	93,44	3,15	0,64	163
Kepulauan Riau	92,38	2,95	86,61	98,15	3,19	1,78	173	91,72	2,54	86,74	96,71	2,77	1,25	200
DKI Jakarta	96,49	1,13	94,27	98,71	1,17	2,00	240	83,86	2,81	78,36	89,37	3,35	3,18	233
Jawa Barat	96,46	0,73	95,04	97,89	0,75	4,01	1116	81,25	1,58	78,15	84,35	1,94	4,48	1193
Jawa Tengah	83,08	1,11	80,90	85,26	1,34	1,74	1435	85,96	1,04	83,92	88,01	1,21	2,00	1366
DI Yogyakarta	99,34	0,65	98,06	100,63	0,66	1,02	108	96,98	1,49	94,05	99,91	1,54	1,51	143
Jawa Timur	97,76	0,49	96,81	98,72	0,50	2,35	1339	83,32	1,20	80,98	85,67	1,44	2,33	1381
Banten	96,37	1,16	94,10	98,63	1,20	2,47	332	86,99	2,08	82,92	91,07	2,39	2,48	344
Bali	96,92	1,08	94,81	99,04	1,11	1,01	245	91,91	2,18	87,64	96,19	2,37	1,48	249
Nusa Tenggara Barat	93,19	1,82	89,62	96,76	1,95	1,63	302	94,24	1,47	91,36	97,13	1,56	1,36	306
Nusa Tenggara Timur	94,78	1,13	92,57	96,99	1,19	1,14	897	90,07	1,52	87,09	93,05	1,69	0,96	723
Kalimantan Barat	89,84	2,28	85,38	94,30	2,53	1,49	377	86,43	2,33	81,86	91,00	2,70	1,50	430
Kalimantan Tengah	86,00	3,07	79,98	92,01	3,57	1,04	322	85,38	2,70	80,09	90,67	3,16	1,03	348
Kalimantan Selatan	98,80	0,83	97,18	100,42	0,84	1,32	295	97,03	1,07	94,92	99,13	1,11	1,05	357
Kalimantan Timur	93,63	1,89	89,92	97,34	2,02	1,14	243	89,02	2,42	84,27	93,78	2,72	1,41	287
Kalimantan Utara	94,90	1,89	91,20	98,61	1,99	0,42	180	95,09	1,68	91,80	98,37	1,76	0,31	156
Sulawesi Utara	87,01	2,14	82,81	91,21	2,46	0,52	295	82,82	3,11	76,72	88,92	3,76	1,09	401
Sulawesi Tengah	93,48	1,31	90,92	96,04	1,40	0,67	459	92,38	1,47	89,50	95,26	1,59	0,60	382
Sulawesi Selatan	88,35	1,77	84,88	91,81	2,00	1,20	538	86,29	1,67	83,01	89,57	1,94	1,34	842
Sulawesi Tenggara	89,51	2,66	84,30	94,71	2,97	1,29	314	97,71	1,01	95,73	99,69	1,03	0,94	376
Gorontalo	92,45	2,59	87,38	97,52	2,80	0,66	154	98,61	0,75	97,15	100,07	0,76	0,27	155
Sulawesi Barat	93,24	1,82	89,67	96,81	1,96	0,56	248	90,85	2,03	86,87	94,83	2,24	0,57	213
Maluku	96,00	1,11	93,82	98,19	1,16	0,41	317	96,19	0,93	94,38	98,01	0,96	0,29	376
Maluku Utara	89,78	2,43	85,01	94,55	2,71	0,48	256	84,08	2,60	78,98	89,19	3,09	0,49	331
Papua Barat	93,85	2,15	89,64	98,06	2,29	0,54	215	91,71	3,67	84,52	98,90	4,00	1,21	240
Papua	93,84	1,42	91,06	96,63	1,51	0,61	582	73,47	3,23	67,13	79,81	4,40	0,75	431
INDONESIA	93,47	0,27	92,95	94,00	0,29	1,70	14580	85,50	0,42	84,68	86,32	0,49	2,29	16250

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No.6-8, Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2086-4566

